

AKUNTANSI KEUANGAN

PENGENALAN, PENGAKUAN, DAN
PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN



Dr. Rizky Windar Amelia, S.E., M.Acc., Ak., CA.

BUKU AJAR

AKUNTANSI KEUANGAN

**PENGENALAN, PENGAKUAN, DAN
PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN**

Dr. Rizky Windar Amelia, S.E., M.Acc., Ak., CA.

AKUNTANSI KEUANGAN

PENGENALAN, PENGAKUAN, DAN PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN

Ditulis oleh:

Dr. Rizky Windar Amelia, S.E., M.Acc., Ak., CA.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.



ISBN: 978-634-7457-65-3
X + 275 hlm; 18,2 x 25,7 cm.
Cetakan I, Januari 2026

Desain Cover dan Tata Letak:
Melvin Mirsal

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Media Penerbit Indonesia
Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131
Telp: 081362150605
Email: ptmediapenerbitindonesia@gmail.com
Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>
Anggota IKAPI No.088/SUT/2024



KATA PENGANTAR

Akuntansi keuangan merupakan pilar utama dalam sistem informasi bisnis yang berfungsi menyediakan data keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan bagi pengambilan keputusan ekonomi. Dalam dunia bisnis yang dinamis, akuntansi keuangan tidak hanya berperan sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai sarana komunikasi yang menjembatani kepentingan antara pihak internal dan eksternal perusahaan. Melalui laporan keuangan, berbagai pihak seperti manajemen, investor, kreditor, dan pemerintah dapat menilai posisi keuangan, kinerja, serta prospek entitas di masa depan.

Buku ajar “Akuntansi Keuangan: Pengenalan, Pengakuan, dan Pelaporan Transaksi Keuangan” ini membahas secara komprehensif seluruh proses akuntansi keuangan mulai dari konsep dasar, siklus akuntansi, hingga penyusunan dan analisis laporan keuangan. Buku ajar ini membahas prinsip-prinsip akuntansi, pengakuan dan pengukuran transaksi, pencatatan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, serta beban sesuai standar PSAK dan IFRS. Buku ajar ini juga membahas perkembangan akuntansi modern, seperti konvergensi standar internasional, pelaporan keberlanjutan (ESG), dan penerapan teknologi digital dalam praktik akuntansi.

Semoga buku ajar ini dapat menjadi sumber ilmu yang bermanfaat bagi mahasiswa, pendidik, dan praktisi dalam memahami konsep akuntansi keuangan secara lebih mendalam serta menginspirasi penerapan praktik akuntansi yang profesional, transparan, dan beretika di dunia kerja.

Salam Hangat,

Penutup



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ANALISIS INSTRUKSIONAL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN AKUNTANSI KEUANGAN	1
A. Pengertian Akuntansi dan Akuntansi Keuangan	1
B. Peran dan Fungsi Akuntansi Keuangan dalam Dunia Bisnis	7
C. Pengguna Laporan Keuangan dan Kebutuhan Informasi ..	10
D. Prinsip-Prinsip Dasar Akuntansi Keuangan	16
E. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan	20
F. Standar Akuntansi Keuangan (SAK, IFRS, dan PSAK) ...	25
G. Latihan Soal	29
BAB II SIKLUS AKUNTANSI KEUANGAN	31
A. Konsep Siklus Akuntansi.....	31
B. Pencatatan Transaksi Keuangan	35
C. Buku Jurnal dan Buku Besar	40
D. Penyesuaian dan Jurnal Penyesuaian.....	44
E. Penyusunan Neraca Saldo dan Kertas Kerja	48
F. Proses Penutupan Buku dan Neraca Saldo Setelah Penutupan	54
G. Latihan Soal	59
BAB III PENGAKUAN DAN PENGUKURAN TRANSAKSI KEUANGAN	61
A. Konsep Pengakuan (<i>Recognition</i>)	61
B. Konsep Pengukuran (<i>Measurement</i>).....	66
C. Dasar Pengukuran (<i>Historical Cost, Fair Value, dll.</i>).....	70
D. Kriteria Pengakuan Aset, Liabilitas, Pendapatan, dan Beban	75

E.	Studi Kasus: Penerapan Prinsip Pengakuan dan Pengukuran	79
F.	Latihan Soal	84
BAB IV	AKUNTANSI UNTUK ASET LANCAR	85
A.	Kas dan Setara Kas	85
B.	Piutang Usaha dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	90
C.	Persediaan: Metode Penilaian dan Pencatatan.....	95
D.	Investasi Jangka Pendek	100
E.	Pengungkapan Aset Lancar dalam Laporan Keuangan...	104
F.	Latihan Soal	108
BAB V	AKUNTANSI UNTUK ASET TIDAK LANCAR	109
A.	Aset Tetap: Pengakuan, Pengukuran Awal, dan Penyusutan	109
B.	Aset Takberwujud (<i>Intangible Assets</i>).....	113
C.	Penurunan Nilai Aset (<i>Impairment</i>)	118
D.	Revaluasi Aset	122
E.	Penyajian dan Pengungkapan Aset Tidak Lancar	126
F.	Latihan Soal	131
BAB VI	AKUNTANSI UNTUK KEWAJIBAN (LIABILITAS)	
	133
A.	Liabilitas Jangka Pendek	133
B.	Liabilitas Jangka Panjang	137
C.	Utang Obligasi dan Instrumen Utang Lainnya	141
D.	Provisi dan Kewajiban Kontinjensi	145
E.	Penyajian dan Pengungkapan Liabilitas	149
F.	Latihan Soal	153
BAB VII	AKUNTANSI UNTUK EKUITAS.....	155
A.	Pengertian dan Komponen Ekuitas.....	155
B.	Modal Saham dan Agio/Disagio.....	160
C.	Laba Ditahan dan Cadangan.....	164
D.	Dividen dan Pembagian Laba.....	168
E.	Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas	172
F.	Latihan Soal	176

BAB VIII AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BEBAN	177
A. Konsep Pengakuan Pendapatan (<i>Revenue Recognition</i>)..	177
B. PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan..	181
C. Pengakuan Beban dan Matching Principle.....	184
D. Akuntansi untuk Beban Operasional dan Non-Operasional.....	189
E. Pengungkapan Pendapatan dan Beban	192
F. Latihan Soal	196
BAB IX PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....	197
A. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	197
B. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	201
C. Laporan Perubahan Ekuitas	205
D. Laporan Arus Kas	210
E. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).....	214
F. Hubungan Antar-Laporan Keuangan.....	218
G. Latihan Soal	222
BAB X ANALISIS DAN INTERPRETASI LAPORAN KEUANGAN	223
A. Analisis Rasio Keuangan	223
B. Analisis Tren dan Perbandingan.....	227
C. Analisis Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas.....	231
D. Keterbatasan Analisis Laporan Keuangan.....	235
E. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Laporan Keuangan	240
F. Latihan Soal	243
BAB XI ISU DAN TANTANGAN DALAM AKUNTANSI KEUANGAN MODERN.....	245
A. Konvergensi IFRS dan PSAK di Indonesia.....	245
B. Akuntansi Keuangan di Era Digital (Fintech dan Blockchain).....	249
C. Akuntansi Berkelanjutan (<i>Sustainability Reporting</i> dan ESG)	254
D. Etika Profesi Akuntansi dan Tanggung Jawab Sosial	258

E. Latihan Soal	262
DAFTAR PUSTAKA	263
GLOSARIUM	269
INDEKS	271
BIOGRAFI PENULIS	275
SINOPSIS	277

ANALISIS INSTRUKSIONAL

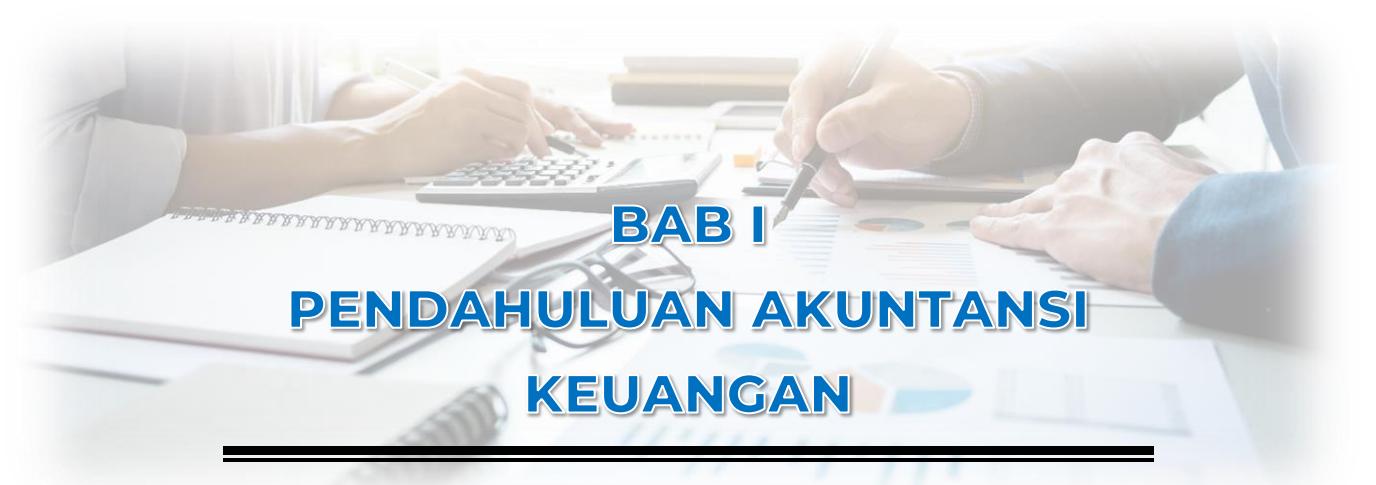
No	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Indikator
1	Mampu memahami terkait dengan pengertian akuntansi dan akuntansi keuangan, memahami peran dan fungsi akuntansi keuangan dalam dunia bisnis, memahami pengguna laporan keuangan dan kebutuhan informasi, memahami prinsip-prinsip dasar akuntansi keuangan, memahami kerangka konseptual pelaporan keuangan, serta memahami standar akuntansi keuangan (SAK, IFRS, dan PSAK). Sehingga pembaca dapat mampu menyusun, menafsirkan, dan menganalisis laporan keuangan secara profesional sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan dan mendukung tata kelola perusahaan yang baik.	<ul style="list-style-type: none">• Pengertian Akuntansi dan Akuntansi Keuangan• Peran dan Fungsi Akuntansi Keuangan dalam Dunia Bisnis• Pengguna Laporan Keuangan dan Kebutuhan Informasi• Prinsip-Prinsip Dasar Akuntansi Keuangan• Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan• Standar Akuntansi Keuangan (SAK, IFRS, dan PSAK)
2	Mampu memahami terkait dengan konsep siklus akuntansi, memahami pencatatan transaksi keuangan, memahami buku jurnal dan buku besar, memahami penyesuaian dan jurnal penyesuaian, memahami penyesuaian neraca saldo dan kertas kerja, serta memahami proses penutupan buku dan neraca saldo setelah penutupan. Sehingga pembaca dapat mampu menerapkan prosedur akuntansi	<ul style="list-style-type: none">• Konsep Siklus Akuntansi• Pencatatan Transaksi Keuangan• Buku Jurnal dan Buku Besar• Penyesuaian dan Jurnal Penyesuaian• Penyusunan Neraca Saldo dan Kertas Kerja

	keuangan secara tepat, akurat, dan sesuai dengan prinsip serta standar akuntansi yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> • Proses Penutupan Buku dan Neraca Saldo Setelah Penutupan
3	Mampu memahami terkait dengan konsep pengakuan (<i>recognition</i>), memahami konsep pengukuran (<i>measurement</i>), memahami dasar pengukuran (<i>historical cost, fair value, dll.</i>), memahami kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban, serta memahami studi kasus: penerapan prinsip pengakuan dan pengukuran. Sehingga pembaca dapat mampu menerapkan prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran secara tepat, konsisten, dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku secara nasional maupun internasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Pengakuan (<i>Recognition</i>) • Konsep Pengukuran (<i>Measurement</i>) • Dasar Pengukuran (<i>Historical Cost, Fair Value, dll.</i>) • Kriteria Pengakuan Aset, Liabilitas, Pendapatan, dan Beban • Studi Kasus: Penerapan Prinsip Pengakuan dan Pengukuran
4	Mampu memahami terkait dengan kas dan setara kas, memahami piutang usaha dan penyisihan piutang tak tertagih, memahami persediaan: metode penilaian dan pencatatan, memahami investasi jangka pendek, serta memahami pengungkapan aset lancar dalam laporan keuangan. Sehingga pembaca dapat mampu menerapkan akuntansi aset lancar secara profesional dalam praktik pelaporan keuangan yang akurat dan sesuai standar.	<ul style="list-style-type: none"> • Kas dan Setara Kas • Piutang Usaha dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih • Persediaan: Metode Penilaian dan Pencatatan • Investasi Jangka Pendek • Pengungkapan Aset Lancar dalam Laporan Keuangan
5	Mampu memahami terkait dengan aset tetap: pengakuan, pengukuran awal, dan penyusutan, memahami aset takberwujud (<i>intangible assets</i>), memahami penurunan nilai aset	<ul style="list-style-type: none"> • Aset Tetap: Pengakuan, Pengukuran Awal, dan Penyusutan • Aset Takberwujud (<i>Intangible Assets</i>)

	(<i>impairment</i>), memahami revaluasi aset, serta memahami penyajian dan pengungkapan aset tidak lancar. Sehingga pembaca dapat mampu menerapkan prinsip akuntansi aset tidak lancar secara profesional, akurat, dan sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan nasional maupun internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan Nilai Aset (<i>Impairment</i>) • Revaluasi Aset • Penyajian dan Pengungkapan Aset Tidak Lancar
6	Mampu memahami terkait dengan liabilitas jangka pendek, memahami liabilitas jangka panjang, memahami utang obligasi dan instrumen utang lainnya, memahami provisi dan kewajiban kontinjensi, serta memahami penyajian dan pengungkapan liabilitas. Sehingga pembaca dapat mampu mengasah keterampilan analitis dan teknis dalam menyusun serta menafsirkan laporan kewajiban secara profesional dan sesuai standar pelaporan keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Liabilitas Jangka Pendek • Liabilitas Jangka Panjang • Utang Obligasi dan Instrumen Utang Lainnya • Provisi dan Kewajiban Kontinjensi • Penyajian dan Pengungkapan Liabilitas
7	Mampu memahami terkait dengan pengertian dan komponen ekuitas, memahami modal saham dan agio/disagio, memahami laba ditahan dan cadangan, memahami dividen dan pembagian laba, serta memahami penyajian dan pengungkapan ekuitas. Sehingga pembaca dapat mampu memahami, mencatat, dan menganalisis transaksi yang memengaruhi ekuitas perusahaan secara profesional, akurat, dan sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian dan Komponen Ekuitas • Modal Saham dan Agio/Disagio • Laba Ditahan dan Cadangan • Dividen dan Pembagian Laba • Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas
8	Mampu memahami terkait dengan konsep pengakuan pendapatan (<i>revenue recognition</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Pengakuan Pendapatan (<i>Revenue Recognition</i>)

	<p><i>recognition</i>), memahami PSAK 72: pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, memahami pengakuan beban dan <i>matching principle</i>, memahami akuntansi untuk beban operasional dan non-operasional, serta memahami pengungkapan pendapatan dan beban. Sehingga pembaca dapat memahami hubungan antara pendapatan, beban, dan laba perusahaan, serta mampu menerapkan prinsip akuntansi pendapatan dan beban secara profesional, akurat, dan relevan dengan praktik bisnis modern.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan • Pengakuan Beban dan <i>Matching Principle</i> • Akuntansi untuk Beban Operasional dan Non-Operasional • Pengungkapan Pendapatan dan Beban
9	<p>Mampu memahami terkait dengan laporan posisi keuangan (neraca), memahami laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, memahami laporan perubahan ekuitas, memahami laporan arus kas, memahami catatan atas laporan keuangan (CaLK), serta memahami hubungan antar-laporan keuangan. Sehingga pembaca dapat mampu menyusun laporan keuangan yang lengkap, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan (PSAK dan IFRS), serta mampu menginterpretasikan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi yang tepat dan bertanggung jawab.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Posisi Keuangan (Neraca) • Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain • Laporan Perubahan Ekuitas • Laporan Arus Kas • Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) • Hubungan Antar-Laporan Keuangan
10	<p>Mampu memahami terkait dengan analisis rasio keuangan, memahami analisis tren dan perbandingan, memahami analisis likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas, memahami keterbatasan analisis laporan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Rasio Keuangan • Analisis Tren dan Perbandingan

	<p>keuangan, serta memahami pengambilan keputusan berdasarkan laporan keuangan. Sehingga pembaca dapat menilai kesehatan finansial perusahaan secara komprehensif dan mendukung pengambilan keputusan yang akurat, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas • Keterbatasan Analisis Laporan Keuangan • Pengambilan Keputusan Berdasarkan Laporan Keuangan
11	<p>Mampu memahami terkait dengan konvergensi IFRS dan PSAK di Indonesia, memahami akuntansi keuangan di era digital (fintech dan <i>blockchain</i>), memahami akuntansi berkelanjutan (<i>sustainability reporting</i> dan ESG), serta memahami etika profesi akuntansi dan tanggung jawab sosial . Sehingga pembaca dapat menghadapi dinamika perubahan lingkungan bisnis global, menerapkan prinsip akuntansi yang beretika, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang transparan, adil, dan berkelanjutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konvergensi IFRS dan PSAK di Indonesia • Akuntansi Keuangan di Era Digital (Fintech dan <i>Blockchain</i>) • Akuntansi Berkelanjutan (<i>Sustainability Reporting</i> dan ESG) • Etika Profesi Akuntansi dan Tanggung Jawab Sosial



BAB I

PENDAHULUAN AKUNTANSI

KEUANGAN

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan pengertian akuntansi dan akuntansi keuangan, memahami peran dan fungsi akuntansi keuangan dalam dunia bisnis, memahami pengguna laporan keuangan dan kebutuhan informasi, memahami prinsip-prinsip dasar akuntansi keuangan, memahami kerangka konseptual pelaporan keuangan, serta memahami standar akuntansi keuangan (SAK, IFRS, dan PSAK). Sehingga pembaca dapat mampu menyusun, menafsirkan, dan menganalisis laporan keuangan secara profesional sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan dan mendukung tata kelola perusahaan yang baik.

Materi Pembelajaran

- Pengertian Akuntansi dan Akuntansi Keuangan
- Peran dan Fungsi Akuntansi Keuangan dalam Dunia Bisnis
- Pengguna Laporan Keuangan dan Kebutuhan Informasi
- Prinsip-Prinsip Dasar Akuntansi Keuangan
- Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan
- Standar Akuntansi Keuangan (SAK, IFRS, dan PSAK)
- Latihan Soal

A. Pengertian Akuntansi dan Akuntansi Keuangan

Akuntansi merupakan bahasa bisnis yang digunakan untuk mengukur, mengklasifikasikan, mencatat, dan melaporkan transaksi ekonomi suatu entitas dengan tujuan menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan (Weygandt, Kimmel, & Kieso, 2022). Menurut *American Accounting Association (AAA)*, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk memungkinkan penilaian dan pengambilan

keputusan oleh pengguna informasi tersebut. Definisi ini menunjukkan bahwa akuntansi bukan hanya sekadar kegiatan pencatatan transaksi, tetapi juga mencakup pengolahan dan penyajian informasi yang dapat digunakan secara strategis oleh berbagai pihak.

Akuntansi keuangan (*financial accounting*) merupakan cabang akuntansi yang berfokus pada penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal, seperti investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat umum (Scott, 2023). Akuntansi keuangan berorientasi pada penyajian informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan, kinerja, serta arus kas perusahaan. Informasi tersebut disusun berdasarkan standar yang telah ditetapkan secara umum, seperti *International Financial Reporting Standards* (IFRS) atau *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan* (PSAK) di Indonesia.

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2023), akuntansi keuangan melibatkan proses penyusunan laporan yang mencerminkan aktivitas ekonomi perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini harus disusun dengan mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (*Generally Accepted Accounting Principles – GAAP*) agar dapat dibandingkan dan dipercaya. Hal ini menjamin konsistensi dalam pelaporan antar entitas dan antar periode.

1. Elemen Utama Akuntansi Keuangan

Menurut Reeve, Warren, dan Duchac (2022), akuntansi keuangan terdiri atas beberapa elemen utama yang saling berkaitan dalam menghasilkan informasi keuangan yang andal dan relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi. Elemen pertama adalah pencatatan (*recording*), yaitu proses sistematis mencatat seluruh transaksi keuangan ke dalam jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah. Tahap ini merupakan fondasi dari sistem akuntansi, karena ketepatan pencatatan akan memengaruhi seluruh proses berikutnya (Warren et al., 2022). Setiap transaksi diidentifikasi, diukur dalam satuan moneter, dan dicatat dengan mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP atau PSAK di Indonesia).

Tahap kedua adalah klasifikasi (*classifying*), yakni mengelompokkan transaksi keuangan berdasarkan jenisnya ke dalam akun-akun tertentu di buku besar. Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2022), klasifikasi membantu organisasi mengatur data keuangan agar mudah dianalisis, misalnya memisahkan akun aset,

liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Proses ini memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang terstruktur dan sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi.

Tahap ketiga adalah pengikhtisaran (*summarizing*), yaitu proses menyusun ringkasan aktivitas keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Hasilnya berupa neraca saldo, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Menurut Wild, Subramanyam, dan Halsey (2021), tahap ini bertujuan untuk menyajikan data keuangan yang kompleks menjadi informasi yang lebih ringkas dan mudah dipahami oleh pengguna laporan.

Tahap keempat adalah pelaporan (*reporting*), yakni penyampaian hasil pengikhtisaran kepada pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan regulator. Laporan keuangan harus disusun sesuai standar akuntansi keuangan, seperti PSAK atau IFRS, agar dapat dibandingkan secara internasional (IAI, 2023). Pelaporan yang transparan meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung tata kelola perusahaan yang baik.

Tahap terakhir adalah interpretasi (*interpreting*), yaitu proses menganalisis dan menafsirkan laporan keuangan agar informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Menurut Gibson (2023), interpretasi mencakup analisis rasio keuangan, tren, dan evaluasi kinerja untuk memahami kondisi dan prospek perusahaan. Dengan demikian, kelima elemen utama ini membentuk siklus akuntansi keuangan yang terintegrasi, mulai dari pencatatan hingga penyajian informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis.

2. Tujuan Akuntansi Keuangan

Tujuan utama akuntansi keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pengambilan keputusan ekonomi (Horngren, Harrison, & Oliver, 2022). Informasi ini digunakan oleh berbagai pihak seperti investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat untuk menilai kondisi keuangan, kinerja, serta prospek suatu entitas. Menurut PSAK 1 (IAI, 2023), laporan keuangan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan selama periode tertentu. Informasi tersebut membantu pengguna dalam mengevaluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan, menilai stabilitas keuangan, serta memahami tanggung jawab

manajemen terhadap penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan memiliki fungsi akuntabilitas (*accountability*), yaitu menunjukkan sejauh mana manajemen telah mengelola aset dan kewajiban perusahaan secara efektif dan efisien (IAI, 2023). Fungsi ini penting untuk memastikan bahwa entitas menjalankan praktik tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) yang transparan dan dapat dipercaya. Dalam konteks ini, laporan keuangan tidak hanya menjadi alat informasi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan manajemen kepada pemilik dan pihak eksternal lainnya.

Menurut IFRS Foundation (2023), agar tujuan tersebut tercapai, informasi akuntansi harus memenuhi karakteristik kualitatif utama, yaitu relevansi, keandalan, keterbandingan, dan dapat dipahami. Relevansi berarti informasi harus memiliki kemampuan memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, kini, atau masa depan. Keandalan (*faithful representation*) memastikan bahwa informasi disajikan secara jujur, lengkap, dan bebas dari kesalahan material. Keterbandingan memungkinkan pengguna untuk menilai kinerja antarperiode atau antarentitas, sedangkan dapat dipahami menuntut penyajian informasi secara jelas dan terstruktur agar mudah diinterpretasikan oleh pengguna yang memiliki pengetahuan akuntansi yang memadai.

3. Perbedaan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajerial

Akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial merupakan dua cabang utama dalam disiplin akuntansi yang memiliki peran dan fokus yang berbeda, meskipun keduanya sama-sama bertujuan menyediakan informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Menurut Wild, Subramanyam, dan Halsey (2023), perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada tujuan, pengguna, standar, serta sifat informasi yang disajikan. Akuntansi keuangan berorientasi pada penyediaan informasi kepada pihak eksternal, seperti investor, kreditor, regulator, dan publik, dengan tujuan utama memastikan transparansi serta akuntabilitas terhadap aktivitas keuangan perusahaan. Sebaliknya, akuntansi manajerial digunakan oleh manajemen internal untuk mendukung proses perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja organisasi.

Pada standar pelaporan, akuntansi keuangan harus mengikuti prinsip dan pedoman yang diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, atau IFRS/GAAP secara internasional, agar laporan yang dihasilkan dapat diperbandingkan dan diandalkan oleh pengguna eksternal (IAI, 2023). Sementara itu, akuntansi manajerial tidak terikat oleh standar formal, karena informasi yang disajikan bersifat internal dan disesuaikan dengan kebutuhan manajemen. Misalnya, laporan biaya produksi, anggaran, dan analisis varians dalam akuntansi manajerial dapat disusun dengan metode yang fleksibel sesuai konteks keputusan yang dihadapi (Garrison, Noreen, & Brewer, 2022).

Dari segi sifat informasi, akuntansi keuangan bersifat historis dan periodik, karena berfokus pada penyajian data masa lalu yang telah terjadi, seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas yang umumnya diterbitkan setiap periode tertentu. Sebaliknya, akuntansi manajerial bersifat prospektif dan dinamis, dengan orientasi pada masa depan, misalnya dalam penyusunan proyeksi penjualan atau analisis biaya-manafaat untuk strategi bisnis.

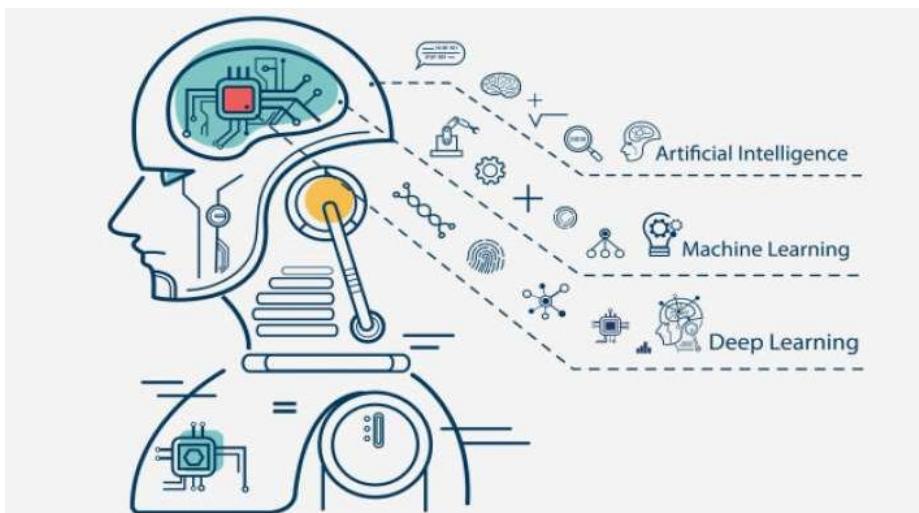
Perbedaan ini menunjukkan bahwa akuntansi keuangan memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan publik melalui pelaporan yang transparan dan akurat, sedangkan akuntansi manajerial berperan sebagai alat pengendalian dan perencanaan strategis di dalam perusahaan. Investor menggunakan laporan keuangan untuk menilai kinerja dan prospek perusahaan, sedangkan manajemen memanfaatkan informasi manajerial untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing (Weygandt, Kimmel, & Kieso, 2023). Dengan demikian, kedua bidang ini saling melengkapi dalam menciptakan sistem informasi keuangan yang komprehensif dan berorientasi pada keberlanjutan organisasi.

4. Perkembangan Konsep Akuntansi Keuangan

Perkembangan konsep akuntansi keuangan dalam dua dekade terakhir menunjukkan transformasi yang sangat signifikan, terutama akibat kemajuan teknologi digital dan globalisasi ekonomi. Menurut Barone dan Mas (2024), era digital telah mengubah paradigma akuntansi dari sistem manual berbasis dokumen menjadi sistem otomatis dan terintegrasi, di mana proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan keuangan dapat dilakukan secara *real-time* melalui pemanfaatan *Enterprise Resource Planning* (ERP) dan *Artificial Intelligence* (AI). Sistem ERP memungkinkan integrasi antara berbagai fungsi bisnis

seperti keuangan, produksi, dan logistik, sehingga menghasilkan data yang lebih akurat, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh bagian organisasi. Sementara itu, AI dan *machine learning* membantu akuntan dalam menganalisis pola keuangan, mendeteksi anomali, serta melakukan prediksi atas kinerja keuangan di masa mendatang dengan tingkat presisi yang tinggi (Kokina & Davenport, 2023).

Gambar 1. Kecerdasan Buatan



Sumber: *Codepolitan*

Akuntansi keuangan juga mengalami perluasan fungsi yang tidak hanya berfokus pada pelaporan finansial tradisional, tetapi juga mencakup pelaporan non-keuangan. Menurut *International Federation of Accountants* (IFAC, 2023), pelaporan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) kini menjadi bagian penting dari tanggung jawab korporasi, karena semakin banyak investor dan pemangku kepentingan yang menilai kinerja perusahaan berdasarkan aspek keberlanjutan dan dampak sosial-lingkungan. Konsep ini dikenal sebagai akuntansi berkelanjutan (*sustainability accounting*), yang menempatkan akuntansi sebagai sarana komunikasi nilai perusahaan secara lebih luas, meliputi dimensi etika, sosial, dan ekologis.

Perkembangan akuntansi keuangan juga dipengaruhi oleh konvergensi standar internasional, khususnya antara IFRS dan PSAK, yang mendorong harmonisasi praktik akuntansi lintas negara agar laporan keuangan dapat lebih mudah dibandingkan di pasar global (IAI, 2023). Dalam konteks ini, akuntan modern tidak hanya berperan sebagai penyusun laporan keuangan, tetapi juga sebagai analis strategis dan

penasihat bisnis yang menggunakan data keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*).

B. Peran dan Fungsi Akuntansi Keuangan dalam Dunia Bisnis

Akuntansi keuangan memiliki peran vital dalam dunia bisnis modern karena menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, dan terukur bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Informasi ini membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi, pengelolaan sumber daya, serta penilaian kinerja organisasi. Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2023), akuntansi keuangan bukan sekadar alat pencatatan transaksi, tetapi juga berfungsi sebagai sistem informasi yang memungkinkan entitas bisnis berkomunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal secara transparan dan akuntabel.

1. Peran Akuntansi Keuangan dalam Dunia Bisnis

Peran akuntansi keuangan dalam dunia bisnis sangat krusial karena menjadi fondasi utama dalam penyediaan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Horngren, Harrison, dan Oliver (2022), akuntansi keuangan memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai alat komunikasi keuangan, alat pengendalian dan pengambilan keputusan, serta alat akuntabilitas publik. Pertama, sebagai *financial communication tool*, akuntansi keuangan berperan dalam menyampaikan kondisi dan kinerja keuangan perusahaan kepada pihak eksternal seperti investor, kreditor, regulator, dan masyarakat umum. Laporan keuangan meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, dan laporan arus kas berfungsi sebagai bahasa universal yang memungkinkan pihak luar memahami aktivitas ekonomi suatu entitas (Wild, Subramanyam, & Halsey, 2023). Sesuai dengan pandangan *International Accounting Standards Board* (IASB, 2023), akuntansi merupakan “*the language of business*” karena mentransformasikan aktivitas ekonomi yang kompleks menjadi informasi yang terstruktur dan mudah dipahami. Tanpa sistem akuntansi keuangan yang sesuai standar, komunikasi antara entitas bisnis dan pemangku kepentingan akan menjadi kabur dan tidak akurat.

Kedua, akuntansi keuangan berperan sebagai alat pengendalian dan pengambilan keputusan. Melalui informasi keuangan yang disajikan

secara sistematis, manajemen dapat mengevaluasi efisiensi operasi bisnis, menilai kinerja keuangan, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau investasi tambahan (Warren, Reeve, & Duchac, 2022). Misalnya, laporan laba rugi membantu menentukan tingkat profitabilitas, laporan arus kas menunjukkan likuiditas dan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, sedangkan neraca menggambarkan struktur aset, liabilitas, dan ekuitas. Ketiga laporan ini memberikan dasar rasional bagi manajemen dalam merancang strategi bisnis, mengalokasikan sumber daya, dan mengambil keputusan investasi atau pendanaan yang tepat.

Ketiga, akuntansi keuangan memiliki peran penting sebagai alat akuntabilitas dan transparansi publik. Dalam prinsip *good corporate governance*, laporan keuangan menjadi bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pemegang saham dan publik atas pengelolaan dana perusahaan (Scott, 2023). Transparansi ini memperkuat kepercayaan investor dan menjaga stabilitas pasar modal. Selain itu, laporan keuangan juga menjadi instrumen utama bagi regulator, auditor, dan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan dan penegakan integritas sistem ekonomi (IFAC, 2023). Dengan demikian, akuntansi keuangan tidak hanya mendukung efisiensi manajerial, tetapi juga berperan strategis dalam menjaga keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dunia bisnis modern.

2. Fungsi Akuntansi Keuangan dalam Operasional Bisnis

Fungsi akuntansi keuangan dalam operasional bisnis memiliki peran vital dalam mendukung efektivitas manajemen, pengambilan keputusan, serta menjaga transparansi dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi. Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2022), terdapat lima fungsi utama akuntansi keuangan yang saling berkaitan, yaitu fungsi informasi, fungsi pengendalian, fungsi perencanaan, fungsi evaluasi kinerja, dan fungsi kepatuhan. Pertama, fungsi informasi berperan dalam menyediakan data keuangan yang relevan, akurat, dan dapat diandalkan untuk berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan seperti posisi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan arus kas menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dalam menilai kinerja dan prospek keuangan perusahaan (Barone & Mas, 2024). Misalnya, investor menggunakan laporan keuangan untuk menilai potensi pengembalian investasi (*return*

on investment), sedangkan kreditor menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya.

Kedua, fungsi pengendalian (*control function*) memastikan bahwa setiap transaksi dan kegiatan keuangan perusahaan tercatat secara sistematis dan sesuai kebijakan yang berlaku. Dengan adanya sistem pencatatan akuntansi yang baik, manajemen dapat memantau arus kas, penggunaan aset, serta mendeteksi penyimpangan atau potensi inefisiensi dalam operasional (Horngren et al., 2022). Akuntansi keuangan dengan demikian berfungsi sebagai alat pengawasan internal untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Ketiga, fungsi perencanaan (*planning function*) berperan dalam membantu manajemen merancang strategi keuangan dan operasional jangka pendek maupun jangka panjang. Data historis dari laporan keuangan menjadi dasar untuk menyusun anggaran, memproyeksikan pendapatan, serta menetapkan kebijakan investasi dan pengeluaran (Reeve, Warren, & Duchac, 2022).

Fungsi evaluasi kinerja (*performance evaluation*) memungkinkan perusahaan menilai sejauh mana tujuan keuangan telah tercapai melalui analisis profitabilitas, efisiensi aset, dan tingkat solvabilitas. Laporan keuangan membantu menilai efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya untuk menghasilkan laba dan menjaga kesehatan finansial (Wild et al., 2023). Terakhir, fungsi kepatuhan dan regulasi (*compliance function*) menegaskan tanggung jawab akuntansi keuangan dalam memastikan bahwa laporan disusun sesuai standar yang berlaku seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), serta memenuhi ketentuan dari otoritas seperti OJK dan IAPI (IAI, 2023). Dengan demikian, akuntansi keuangan bukan sekadar alat pencatatan, melainkan sistem informasi strategis yang menopang tata kelola, efisiensi, dan keberlanjutan bisnis modern.

3. Peran Strategis Akuntansi Keuangan dalam Ekonomi Digital

Di era ekonomi digital, akuntansi keuangan mengalami transformasi besar yang menjadikannya tidak hanya sebagai alat pelaporan tradisional, tetapi juga sebagai sistem strategis berbasis teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan dan keberlanjutan bisnis. Menurut Birt, Chalmers, dan Maloney (2023), kemajuan teknologi seperti *Artificial Intelligence* (AI), *Big Data Analytics*, dan *Blockchain* telah mengubah cara perusahaan mengelola dan melaporkan

informasi keuangan. Integrasi AI memungkinkan otomatisasi proses akuntansi mulai dari pencatatan transaksi, rekonsiliasi, hingga audit sehingga meningkatkan akurasi dan efisiensi pelaporan. Sementara itu, *Big Data Analytics* memungkinkan analisis keuangan dilakukan secara *real-time* dengan mengolah data dalam jumlah besar untuk menghasilkan wawasan mendalam tentang kinerja perusahaan, risiko, dan peluang pasar. Teknologi *Blockchain*, di sisi lain, menghadirkan transparansi dan keamanan data melalui sistem pencatatan terdistribusi yang sulit dimanipulasi, menjadikan laporan keuangan lebih andal dan mudah diverifikasi (Smith & Casten, 2024).

Peran strategis akuntansi keuangan juga semakin meluas ke ranah pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) dan *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Menurut *International Federation of Accountants* (IFAC, 2023), pelaporan non-keuangan kini dianggap sama pentingnya dengan laporan keuangan konvensional, karena memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja perusahaan dalam aspek sosial dan lingkungan. Akuntansi keuangan berperan dalam mengukur, mencatat, dan melaporkan dampak keberlanjutan perusahaan misalnya emisi karbon, efisiensi energi, kesejahteraan karyawan, dan tata kelola etis. Informasi ini menjadi dasar bagi investor dan regulator dalam menilai nilai jangka panjang (*long-term value*) dan reputasi perusahaan di pasar global (KPMG, 2023).

Pada konteks ekonomi digital yang serba cepat, akuntansi keuangan berfungsi sebagai pusat integrasi data bisnis yang mendukung keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*). Laporan keuangan yang dihasilkan secara otomatis dan *real-time* memungkinkan manajemen merespons perubahan pasar dengan lebih cepat dan tepat. Dengan demikian, akuntansi keuangan modern bukan hanya alat administratif, tetapi juga instrumen strategis dalam menciptakan nilai, meningkatkan transparansi, dan memperkuat daya saing perusahaan di era digital (Birt et al., 2023; IFAC, 2023).

C. Pengguna Laporan Keuangan dan Kebutuhan Informasi

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dengan suatu entitas. Menurut *International Accounting*

Standards Board (IASB, 2023) dalam *Conceptual Framework for Financial Reporting*, tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pihak lain dalam pengambilan keputusan ekonomi terkait penyediaan sumber daya kepada entitas.

Akuntansi keuangan tidak hanya berperan bagi internal perusahaan, tetapi juga bagi pihak eksternal yang membutuhkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas. Oleh karena itu, memahami siapa pengguna laporan keuangan dan apa kebutuhan informasinya merupakan hal yang fundamental dalam praktik akuntansi keuangan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2023).

1. Pengertian Pengguna Laporan Keuangan

Menurut Horngren, Harrison, dan Oliver (2022), pengguna laporan keuangan adalah individu atau kelompok yang membutuhkan informasi keuangan suatu entitas untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memiliki peran vital dalam mencerminkan posisi keuangan, kinerja, serta arus kas perusahaan, sehingga menjadi dasar bagi berbagai pihak untuk menilai kondisi ekonomi entitas. Secara umum, pengguna laporan keuangan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal.

Pengguna internal mencakup pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan organisasi, seperti manajemen, pemilik, dan karyawan. Manajemen menggunakan laporan keuangan untuk melakukan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap strategi bisnis serta efektivitas operasional (Reeve, Warren, & Duchac, 2022). Karyawan, di sisi lain, memanfaatkan informasi keuangan untuk menilai stabilitas dan profitabilitas perusahaan, yang berkaitan dengan keamanan pekerjaan dan potensi kenaikan kompensasi. Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2022), akuntansi keuangan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan strategis internal yang berkaitan dengan efisiensi biaya, pengelolaan aset, serta investasi modal.

Pengguna eksternal meliputi investor, kreditor, pemerintah, pelanggan, dan masyarakat luas. Investor membutuhkan laporan keuangan untuk menilai prospek laba dan tingkat pengembalian investasi (ROI). Kreditor dan lembaga keuangan menggunakan informasi keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan

jangka panjang. Pemerintah dan otoritas pajak memerlukan laporan keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi fiskal, sementara masyarakat dan media memanfaatkannya untuk menilai dampak sosial serta kontribusi ekonomi perusahaan (Scott, 2023).

Setiap kelompok pengguna memiliki kebutuhan informasi yang berbeda sesuai dengan hubungan dan kepentingannya terhadap entitas pelapor. Oleh karena itu, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip relevansi, keandalan, keterbandingan, dan dapat dipahami (IASB, 2023). Dalam konteks modern, keterbukaan informasi keuangan menjadi semakin penting, karena meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap entitas. Dengan demikian, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang berkelanjutan (Horngren et al., 2022; Scott, 2023).

2. Pengguna Internal Laporan Keuangan

Pengguna internal laporan keuangan terdiri atas pihak-pihak di dalam organisasi yang menggunakan informasi keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan operasional. Menurut Reeve, Warren, dan Duchac (2022), kelompok utama pengguna internal meliputi manajemen dan karyawan, yang keduanya memiliki kepentingan langsung terhadap efisiensi, stabilitas, dan keberlanjutan entitas.

Manajemen merupakan pengguna utama laporan keuangan di tingkat internal karena memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja organisasi. Informasi akuntansi digunakan untuk merencanakan strategi bisnis, menyusun anggaran, mengontrol aktivitas operasional, serta mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya. Misalnya, laporan laba rugi membantu manajemen menilai kinerja keuangan setiap divisi, sementara laporan posisi keuangan memberikan gambaran tentang kekuatan aset dan struktur modal perusahaan (Reeve et al., 2022). Selain itu, laporan arus kas menjadi alat penting untuk mengelola likuiditas, sehingga perusahaan dapat memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi. Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2022), laporan keuangan juga berperan sebagai alat umpan balik (feedback tool) yang memungkinkan manajemen

mengevaluasi efektivitas strategi dan menyesuaikannya untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang. Dalam konteks digitalisasi modern, banyak perusahaan memanfaatkan sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) untuk mengintegrasikan data keuangan secara *real-time*, yang semakin mempercepat pengambilan keputusan berbasis informasi (Barone & Mas, 2024).

Sementara itu, karyawan juga termasuk pengguna internal laporan keuangan karena memiliki kepentingan terhadap stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Menurut *International Federation of Accountants* (IFAC, 2023), laporan keuangan membantu karyawan menilai keamanan pekerjaan, potensi kenaikan gaji, serta kelayakan program kesejahteraan perusahaan. Di beberapa negara, informasi ini bahkan menjadi dasar dalam proses negosiasi upah dan pembagian keuntungan antara manajemen dan serikat pekerja. Selain itu, transparansi dalam pelaporan keuangan meningkatkan rasa percaya dan loyalitas karyawan terhadap organisasi. Dengan demikian, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat manajerial, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan.

3. Pengguna Eksternal Laporan Keuangan

Pengguna eksternal laporan keuangan adalah pihak-pihak di luar organisasi yang memanfaatkan informasi keuangan untuk menilai kinerja, stabilitas, dan prospek masa depan suatu entitas. Tidak memiliki akses langsung terhadap data internal perusahaan, sehingga laporan keuangan menjadi sumber utama dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Wild, Subramanyam, dan Halsey (2023), kelompok pengguna eksternal mencakup investor dan pemegang saham, kreditor dan lembaga keuangan, pemerintah dan regulator, pemasok, pelanggan, serta masyarakat dan lembaga nonprofit.

Investor dan pemegang saham merupakan pengguna utama laporan keuangan karena berkepentingan terhadap tingkat pengembalian investasi (ROI), risiko keuangan, dan prospek pertumbuhan laba. Berdasarkan *International Accounting Standards Board* (IASB, 2023), informasi paling relevan bagi investor meliputi laba bersih, arus kas, dan nilai ekuitas, karena mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai ekonomi dan mengembalikan investasi. Investor

menggunakan rasio profitabilitas, solvabilitas, dan arus kas untuk menilai keberlanjutan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

Kreditor dan lembaga keuangan seperti bank memanfaatkan laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar kewajiban. Menurut Horngren et al. (2022), kreditor fokus pada rasio likuiditas, solvabilitas, dan utang terhadap aset sebelum memberikan pinjaman. Neraca dan laporan arus kas menjadi alat utama untuk memastikan perusahaan memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban bunga dan pokok pinjaman.

Pemerintah dan lembaga regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia, menggunakan laporan keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan transparansi publik (IAI, 2023). Menurut Barone dan Mas (2024), data keuangan agregat dari berbagai perusahaan juga berfungsi sebagai indikator makroekonomi yang membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal dan moneter.

Pemasok menggunakan laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar tagihan tepat waktu sebelum memberikan kredit dagang (Warren, Reeve, & Duchac, 2022), sedangkan pelanggan besar menilai stabilitas perusahaan untuk menjamin kontinuitas pasokan barang dan jasa (Scott, 2023). Terakhir, masyarakat dan lembaga nonprofit memanfaatkan laporan keuangan, khususnya laporan keberlanjutan (*sustainability report*) dan indikator *Environmental, Social, and Governance* (ESG), guna menilai tanggung jawab sosial dan dampak lingkungan perusahaan (IFAC, 2023). Dengan demikian, laporan keuangan berfungsi sebagai sarana komunikasi utama antara perusahaan dan pemangku kepentingan eksternal dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik.

4. Kebutuhan Informasi Pengguna Laporan Keuangan

Kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan didasarkan pada prinsip bahwa laporan keuangan harus menyajikan data yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami, dan tepat waktu agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut *Conceptual Framework for Financial Reporting* yang diterbitkan oleh IASB (2023), karakteristik kualitatif ini memastikan bahwa laporan keuangan tidak hanya memenuhi aspek teknis pelaporan, tetapi juga

memberikan nilai informatif yang nyata bagi pengguna internal maupun eksternal.

Karakteristik pertama adalah relevansi (*relevance*), yang berarti informasi keuangan harus mampu memengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu menilai kondisi masa lalu, sekarang, atau masa depan perusahaan. Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2023), relevansi dapat ditingkatkan melalui penyajian informasi yang memiliki nilai prediktif dan konfirmatori. Misalnya, data laba per saham (EPS) memberikan sinyal penting bagi investor tentang tingkat profitabilitas dan prospek pertumbuhan perusahaan di masa mendatang.

Keandalan atau representasi jujur (*faithful representation*). Informasi keuangan harus mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya secara lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan material. Scott (2023) menegaskan bahwa laporan keuangan yang akurat menjadi dasar utama kepercayaan publik terhadap perusahaan, karena informasi yang menyesatkan dapat berdampak pada kesalahan keputusan investasi dan regulasi.

Ciri berikutnya, dapat dibandingkan (*comparability*), memungkinkan pengguna menganalisis kinerja keuangan dari waktu ke waktu atau antara perusahaan yang berbeda. Konsistensi penerapan standar seperti PSAK di Indonesia dan IFRS di tingkat global menjadi faktor penting dalam menjaga keterbandingan laporan (IAI, 2023). Tanpa standar yang seragam, pengguna tidak dapat menilai perbedaan kinerja secara objektif.

Karakteristik dapat dipahami (*understandability*) juga sangat penting. Informasi keuangan harus disajikan secara jelas dan terstruktur agar mudah dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan akuntansi dasar. Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2022) menyatakan bahwa kompleksitas informasi perlu dihindari agar laporan tetap komunikatif dan inklusif.

Ketepatan waktu (*timeliness*) memastikan bahwa informasi tersedia saat masih relevan untuk pengambilan keputusan. Dalam era digital, laporan keuangan yang disampaikan terlambat akan kehilangan nilai informatifnya karena kondisi pasar dan keuangan dapat berubah dengan cepat (Barone & Mas, 2024). Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan modern tidak hanya bergantung pada akurasi, tetapi juga pada kecepatan dan transparansi penyampaiannya kepada publik.

D. Prinsip-Prinsip Dasar Akuntansi Keuangan

Prinsip-prinsip dasar akuntansi keuangan merupakan fondasi konseptual yang digunakan untuk menyusun, menyajikan, dan menafsirkan laporan keuangan agar informasi yang dihasilkan dapat diandalkan, relevan, serta dapat dibandingkan antar periode maupun antar entitas. Prinsip-prinsip ini membantu menjaga konsistensi dan integritas laporan keuangan, sehingga pengguna dapat membuat keputusan ekonomi yang rasional berdasarkan informasi yang tersedia (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2023).

Menurut *International Accounting Standards Board (IASB, 2023)* dalam *Conceptual Framework for Financial Reporting*, prinsip-prinsip akuntansi berfungsi sebagai pedoman normatif bagi penyusun laporan keuangan agar penyajiannya mencerminkan realitas ekonomi (*economic substance*) dan bukan sekadar formalitas hukum (*legal form*). Di Indonesia, prinsip-prinsip dasar ini diadopsi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2023) dan diselaraskan dengan *International Financial Reporting Standards (IFRS)*.

1. Prinsip Entitas Ekonomi (*Economic Entity Principle*)

Prinsip Kelangsungan Usaha (*Going Concern Principle*) merupakan salah satu pilar utama dalam akuntansi keuangan yang menegaskan bahwa suatu entitas dianggap akan terus beroperasi dalam jangka waktu yang tidak terbatas, kecuali terdapat bukti yang jelas bahwa entitas tersebut tidak mampu melanjutkan aktivitasnya (Scott, 2023). Dengan kata lain, laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi bahwa perusahaan tidak berniat maupun terpaksa untuk menghentikan operasinya dalam waktu dekat. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam proses pengukuran, pencatatan, dan pelaporan keuangan karena berpengaruh langsung terhadap cara aset dan kewajiban dinilai dalam laporan keuangan.

Menurut Wild, Subramanyam, dan Halsey (2023), penerapan prinsip kelangsungan usaha memiliki implikasi besar terhadap penilaian aset dan kewajiban. Dalam kondisi normal, aset perusahaan dicatat berdasarkan biaya historis (*historical cost*) karena diasumsikan akan terus digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, bukan untuk dijual dalam waktu dekat. Sebagai contoh, mesin produksi dicatat pada

nilai perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan, bukan pada nilai pasar saat ini atau nilai likuidasinya. Namun, jika terdapat indikasi bahwa perusahaan akan berhenti beroperasi misalnya akibat kebangkrutan atau ketidakmampuan membayar kewajibannya maka asumsi kelangsungan usaha tidak lagi relevan. Dalam kasus tersebut, laporan keuangan harus disusun berdasarkan basis likuidasi (*liquidation basis*), di mana aset dinilai berdasarkan nilai realisasi bersihnya.

Horngren, Harrison, dan Oliver (2022) menekankan bahwa prinsip ini juga memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan pengguna laporan keuangan. Investor, kreditor, dan regulator memerlukan keyakinan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi entitas yang beroperasi secara berkelanjutan. Jika auditor menemukan adanya keraguan substansial terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha, wajib mengungkapkan hal tersebut dalam laporan auditnya sesuai dengan standar auditing internasional (ISA 570).

Barone dan Mas (2024) menambahkan bahwa di era ekonomi global yang dinamis, faktor-faktor seperti perubahan teknologi, krisis ekonomi, dan gangguan rantai pasok dapat memengaruhi asumsi going concern. Oleh karena itu, perusahaan perlu secara berkala melakukan evaluasi terhadap kemampuan operasional dan likuiditasnya. Prinsip ini bukan sekadar asumsi teknis, melainkan fondasi etis dan praktis dalam penyusunan laporan keuangan yang andal dan transparan, memastikan bahwa informasi yang disajikan benar-benar mencerminkan keberlanjutan entitas di masa depan.

2. Prinsip Kelangsungan Usaha (*Going Concern Principle*)

Prinsip Kelangsungan Usaha (*Going Concern Principle*) merupakan salah satu prinsip dasar dalam akuntansi keuangan yang menyatakan bahwa suatu entitas diasumsikan akan terus melanjutkan kegiatan operasionalnya di masa mendatang dan tidak berniat, maupun tidak terpaksa, untuk menghentikan atau mengurangi secara signifikan skala usahanya (Scott, 2023). Asumsi ini menjadi landasan dalam penyusunan laporan keuangan karena memengaruhi cara entitas mengukur, menilai, dan melaporkan aset serta kewajiban. Dengan mengasumsikan bahwa entitas akan tetap beroperasi, maka nilai aset dan kewajiban dicatat berdasarkan biaya historis (*historical cost*), bukan berdasarkan nilai likuidasi.

Menurut Wild, Subramanyam, dan Halsey (2023), prinsip ini memberikan keyakinan kepada pengguna laporan keuangan bahwa angka-angka yang disajikan merepresentasikan kondisi ekonomi yang berkelanjutan. Misalnya, aset tetap seperti gedung, mesin, dan kendaraan dicatat berdasarkan nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, bukan berdasarkan nilai jual saat ini. Namun, apabila terdapat bukti kuat bahwa entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya misalnya karena krisis likuiditas, beban utang yang tidak terkendali, atau penurunan pendapatan yang ekstrem maka laporan keuangan harus disusun menggunakan basis likuidasi (*liquidation basis*). Dalam hal ini, aset dan kewajiban diukur berdasarkan nilai realisasi bersih (*net realizable value*), yaitu jumlah yang dapat diperoleh atau dibayarkan apabila entitas menghentikan operasinya.

Horngren, Harrison, dan Oliver (2022) menambahkan bahwa prinsip kelangsungan usaha juga berkaitan erat dengan kepercayaan publik dan integritas pelaporan keuangan. Auditor memiliki tanggung jawab profesional untuk menilai kemampuan entitas mempertahankan kelangsungan usaha dalam jangka waktu minimal 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jika ditemukan keraguan substansial (*substantial doubt*) terhadap kemampuan tersebut, auditor wajib mengungkapkannya dalam laporan audit sesuai dengan standar audit internasional (ISA 570).

Barone dan Mas (2024) berperan bahwa dalam era bisnis modern yang penuh ketidakpastian, seperti pandemi global atau disrupti teknologi, penilaian terhadap going concern menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, manajemen harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi kemampuan perusahaan untuk terus beroperasi. Dengan demikian, prinsip kelangsungan usaha bukan hanya asumsi teknis dalam akuntansi, tetapi juga mencerminkan stabilitas, keandalan, dan keberlanjutan entitas bisnis dalam jangka panjang.

3. Prinsip Satuan Moneter (*Monetary Unit Principle*)

Prinsip Satuan Moneter (*Monetary Unit Principle*) merupakan salah satu pilar utama dalam akuntansi keuangan yang menyatakan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus dinyatakan dan dicatat dalam satuan moneter yang stabil, seperti Rupiah di Indonesia atau Dolar AS di Amerika Serikat (IAI, 2023). Prinsip ini berfungsi untuk memberikan keseragaman dalam pencatatan transaksi keuangan, sehingga seluruh

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diukur, dibandingkan, dan dianalisis secara konsisten dari waktu ke waktu. Hanya transaksi yang dapat diukur secara kuantitatif dalam bentuk uang yang dapat dicatat, sedangkan unsur non-keuangan seperti kepuasan pelanggan, reputasi perusahaan, atau nilai moral tidak dimasukkan dalam catatan akuntansi (Horngren, Harrison, & Oliver, 2022).

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2023), penggunaan satuan moneter memungkinkan entitas untuk mengakumulasikan berbagai jenis transaksi yang kompleks ke dalam laporan keuangan yang komprehensif dan mudah dipahami. Sebagai contoh, pembelian aset, penerimaan pendapatan, dan pembayaran gaji semuanya dapat disajikan dalam satu ukuran yang sama, yaitu nilai uang. Hal ini menciptakan keseragaman (*uniformity*) dalam pelaporan dan memudahkan proses analisis kinerja keuangan antarperiode. Prinsip ini juga mendukung perbandingan (*comparability*) antara entitas satu dengan yang lain, karena semua data keuangan dinyatakan dalam satuan moneter yang sama dan mengikuti standar akuntansi yang berlaku.

Prinsip satuan moneter memiliki keterbatasan karena nilai uang tidak sepenuhnya stabil dari waktu ke waktu. Inflasi, deflasi, dan fluktuasi nilai tukar dapat memengaruhi daya beli uang, sehingga mengurangi keakuratan pengukuran aset dan kewajiban dalam jangka panjang (Scott, 2023). Untuk mengatasi hal ini, *International Accounting Standards Board* (IASB, 2023) melalui IAS 29: *Financial Reporting in Hyperinflationary Economies*, merekomendasikan agar laporan keuangan disesuaikan dengan perubahan harga umum apabila suatu negara mengalami hiperinflasi. Penyesuaian ini bertujuan agar informasi keuangan tetap relevan dan dapat mencerminkan nilai ekonomi yang sesungguhnya.

4. Prinsip Periode Akuntansi (*Time Period Principle*)

Prinsip Periode Akuntansi (*Time Period Principle*) merupakan salah satu konsep fundamental dalam akuntansi keuangan yang menyatakan bahwa aktivitas ekonomi suatu entitas dapat dibagi ke dalam periode waktu tertentu untuk tujuan pelaporan, seperti bulanan, triwulanan, atau tahunan (Weygandt, Kimmel, & Kieso, 2022). Prinsip ini memungkinkan entitas bisnis menyajikan informasi keuangan yang relevan dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan, seperti investor, kreditur, dan manajemen, sehingga dapat menilai kinerja dan

posisi keuangan perusahaan secara berkala. Tanpa pembagian periode waktu yang jelas, penilaian terhadap perkembangan dan stabilitas keuangan perusahaan akan sulit dilakukan, karena transaksi bisnis bersifat berkelanjutan dan tidak memiliki titik akhir alami (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2023).

Pada praktiknya, prinsip periode akuntansi mendasari penyusunan laporan keuangan interim (seperti laporan kuartalan) maupun laporan tahunan yang menggambarkan hasil operasional dan kondisi keuangan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, laporan laba rugi disusun untuk menunjukkan pendapatan, beban, dan laba atau rugi yang terjadi selama periode tertentu, sedangkan laporan posisi keuangan (neraca) menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode tersebut (Horngren, Harrison, & Oliver, 2022). Dengan pembagian ini, pengguna laporan keuangan dapat melakukan evaluasi kinerja dan perbandingan antarperiode, serta memantau tren pertumbuhan perusahaan secara sistematis.

Prinsip ini berhubungan erat dengan konsep accrual basis accounting, yang menyatakan bahwa pendapatan dan beban harus diakui pada periode terjadinya, bukan saat kas diterima atau dibayarkan (Reeve, Warren, & Duchac, 2022). Pendekatan ini memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan aktivitas ekonomi secara akurat dalam periode terkait, memberikan gambaran yang lebih realistik tentang profitabilitas dan efisiensi operasional perusahaan. Misalnya, pendapatan yang sudah diperoleh tetapi belum diterima tunai tetap harus dicatat dalam periode saat jasa diberikan atau barang dikirim.

E. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan

Kerangka konseptual pelaporan keuangan (*Conceptual Framework for Financial Reporting*) merupakan landasan teoretis bagi penyusunan, penyajian, dan interpretasi laporan keuangan. Kerangka ini memberikan panduan bagi penyusun standar akuntansi, penyusun laporan keuangan, serta pengguna laporan dalam memahami tujuan dan prinsip dasar pelaporan keuangan (IASB, 2023). Dalam konteks Indonesia, kerangka konseptual ini diadopsi ke dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2023) dan disesuaikan dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang diterbitkan oleh

International Accounting Standards Board (IASB). Kerangka konseptual bukan merupakan standar akuntansi itu sendiri, melainkan pedoman normatif yang menjadi dasar dalam pengembangan dan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta dalam penentuan kebijakan akuntansi yang belum diatur secara spesifik oleh standar (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2023).

1. Tujuan Utama Pelaporan Keuangan

Tujuan utama pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas suatu entitas, yang berguna bagi para pengguna eksternal dalam pengambilan keputusan ekonomi (IASB, 2023). Menurut PSAK 1 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2023), laporan keuangan bertujuan membantu berbagai pihak seperti investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat dalam menilai kondisi ekonomi perusahaan serta prospek masa depannya. Dengan demikian, pelaporan keuangan berfungsi tidak hanya sebagai sarana pelaporan aktivitas masa lalu, tetapi juga sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di masa mendatang.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mampu menggambarkan posisi keuangan entitas melalui penyajian aset, liabilitas, dan ekuitas pada suatu waktu tertentu. Selain itu, laporan keuangan juga memberikan gambaran tentang kinerja keuangan, yang mencakup pendapatan, beban, serta laba atau rugi selama periode pelaporan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2023). Komponen penting lainnya adalah laporan arus kas yang menunjukkan bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan kas dalam aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Melalui informasi ini, pengguna dapat memahami perubahan posisi keuangan entitas serta menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa depan.

Menurut Horngren, Harrison, dan Oliver (2022), pelaporan keuangan memiliki dua fungsi utama: fungsi konfirmatif dan prediktif. Fungsi konfirmatif membantu pengguna memverifikasi hasil dan keputusan ekonomi sebelumnya, sedangkan fungsi prediktif membantu memperkirakan prospek keuangan dan kinerja perusahaan di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif seperti relevansi, keandalan, keterbandingan, dan

keterpahaman agar dapat digunakan secara efektif oleh berbagai pihak (Weygandt, Kimmel, & Kieso, 2022).

2. Karakteristik Kualitatif Informasi Keuangan

Karakteristik kualitatif informasi keuangan merupakan elemen penting yang menentukan sejauh mana laporan keuangan dapat memberikan manfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut *Conceptual Framework for Financial Reporting* yang diterbitkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB, 2023), terdapat dua kategori utama karakteristik kualitatif, yaitu karakteristik fundamental dan karakteristik peningkat (*enhancing qualitative characteristics*). Kedua kategori ini bekerja secara saling melengkapi untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan tidak hanya akurat, tetapi juga relevan dan dapat diandalkan.

Karakteristik kualitatif fundamental terdiri dari relevansi dan penyajian yang jujur (*faithful representation*). Relevansi berarti bahwa informasi keuangan harus memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu menilai peristiwa masa lalu, kondisi saat ini, atau proyeksi masa depan. Unsur utama dari relevansi adalah materialitas, yaitu sejauh mana penghilangan atau kesalahan dalam penyajian informasi dapat memengaruhi keputusan pengguna (IASB, 2023). Sementara itu, penyajian yang jujur mengharuskan laporan keuangan menggambarkan realitas ekonomi dari suatu transaksi secara lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan material (Wild, Subramanyam, & Halsey, 2023). Dengan penyajian yang jujur, pengguna dapat mempercayai bahwa laporan keuangan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan, bukan sekadar formalitas hukum.

Karakteristik peningkat mencakup dapat dibandingkan, dapat diverifikasi, tepat waktu, dan dapat dipahami. Keterbandingan memungkinkan pengguna menilai kinerja entitas dari waktu ke waktu atau membandingkannya dengan perusahaan lain. Konsistensi dalam penerapan standar akuntansi merupakan syarat penting untuk keterbandingan (Reeve, Warren, & Duchac, 2022). Verifiability berarti bahwa informasi dapat diuji oleh pihak independen dan menghasilkan kesimpulan yang sama, sehingga meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Ketepatan waktu memastikan bahwa informasi disajikan tanpa penundaan yang berlebihan, sehingga tetap relevan untuk

pengambilan keputusan. Terakhir, keterpahaman (*understandability*) menuntut agar informasi disusun dengan jelas dan ringkas, agar pengguna yang memiliki pengetahuan akuntansi dasar dapat memahaminya (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2023).

3. Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Unsur-unsur laporan keuangan merupakan komponen fundamental yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian informasi keuangan suatu entitas. Menurut *Conceptual Framework for Financial Reporting* yang diterbitkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB, 2023) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2023), laporan keuangan memiliki dua kelompok unsur utama, yaitu unsur yang berkaitan dengan posisi keuangan dan unsur yang berkaitan dengan kinerja keuangan. Kedua kelompok ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi suatu entitas.

Unsur yang berkaitan dengan posisi keuangan terdiri atas aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, yang diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Contohnya termasuk kas, piutang usaha, persediaan, dan aset tetap seperti gedung dan peralatan. Liabilitas merupakan kewajiban entitas saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan akan mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi, seperti pembayaran utang kepada kreditor atau kewajiban pajak. Sementara itu, ekuitas adalah kepentingan residual dalam aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas, yang mencerminkan hak pemilik atas sumber daya bersih perusahaan (IASB, 2023; IAI, 2023).

Sedangkan unsur yang berkaitan dengan kinerja keuangan meliputi pendapatan (*income*) dan beban (*expenses*). Pendapatan merupakan peningkatan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, selain yang berasal dari kontribusi pemilik. Sebaliknya, beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk penurunan aset atau peningkatan kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas (Scott, 2023). Dengan demikian, perbandingan antara pendapatan dan beban selama

periode tertentu menunjukkan kinerja keuangan entitas, yang biasanya disajikan dalam laporan laba rugi.

4. Pengakuan dan Pengukuran Elemen Laporan Keuangan

Pengakuan dan pengukuran elemen laporan keuangan merupakan dua konsep utama dalam akuntansi keuangan yang menentukan bagaimana dan kapan suatu transaksi dicatat serta bagaimana nilainya disajikan dalam laporan keuangan. Menurut *International Accounting Standards Board* (IASB, 2023), pengakuan (*recognition*) adalah proses memasukkan suatu unsur laporan keuangan ke dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi pada saat memenuhi dua kriteria utama. Pertama, terdapat kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan unsur tersebut akan mengalir ke atau dari entitas. Kedua, unsur tersebut memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur secara andal. Dengan kata lain, suatu aset, liabilitas, pendapatan, atau beban tidak boleh dicatat sampai memenuhi kedua syarat tersebut.

Sebagai contoh, pengakuan pendapatan mengikuti prinsip dalam PSAK 72 (*Revenue from Contracts with Customers*), yang mengacu pada IFRS 15. Pendapatan diakui ketika entitas telah memindahkan kendali atas barang atau jasa kepada pelanggan dan pelanggan memperoleh manfaat atas barang atau jasa tersebut. Artinya, fokus pengakuan pendapatan kini tidak hanya pada saat terjadinya transaksi atau penerimaan kas, tetapi pada saat terjadinya *transfer of control* (IAI, 2023). Hal ini memastikan bahwa pendapatan yang diakui mencerminkan aktivitas ekonomi yang sebenarnya terjadi selama periode pelaporan.

Pengukuran (*measurement*) merupakan proses penentuan jumlah moneter yang diakui dan dilaporkan untuk setiap unsur laporan keuangan. Menurut IASB (2023), terdapat empat dasar utama pengukuran yang digunakan dalam praktik akuntansi, yaitu biaya historis (*historical cost*), nilai kini (*current cost*), nilai realisasi (*realisable value*), dan nilai wajar (*fair value*). Biaya historis mencerminkan nilai perolehan awal suatu aset atau kewajiban, sedangkan nilai wajar menggambarkan estimasi harga yang akan diterima jika aset dijual atau kewajiban dialihkan dalam transaksi pasar saat ini.

F. Standar Akuntansi Keuangan (SAK, IFRS, dan PSAK)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan seperangkat prinsip, prosedur, dan pedoman yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan agar informasi yang dihasilkan dapat diandalkan, relevan, dan dapat dibandingkan antarperiode maupun antarentitas. Standar ini berfungsi sebagai kerangka dasar yang memastikan bahwa laporan keuangan disajikan dengan cara yang konsisten dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dari suatu entitas (IAI, 2023).

1. Pengertian Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan pedoman fundamental yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan di Indonesia untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan bersifat relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2023), SAK adalah seperangkat prinsip dan ketentuan yang mengatur proses pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Dengan adanya standar ini, entitas di Indonesia memiliki acuan yang seragam dalam menyusun laporan keuangan, sehingga memudahkan para pengguna informasi, baik internal maupun eksternal, untuk memahami dan mengevaluasi kondisi keuangan serta kinerja suatu entitas secara konsisten.

Tujuan utama dari penerapan SAK adalah menyediakan informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi. Informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi pihak internal, seperti manajemen dalam perencanaan dan pengendalian, tetapi juga bagi pihak eksternal seperti investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat dalam menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan (Barone & Mas, 2024). Dengan kata lain, SAK berperan penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas keuangan di dunia bisnis Indonesia.

SAK juga disusun dengan mengacu pada *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang diterbitkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB), guna memastikan harmonisasi dengan praktik akuntansi global (IASB, 2023). Proses konvergensi antara SAK dan IFRS ini dilakukan secara bertahap oleh Dewan Standar

Akuntansi Keuangan (DSAK-IAI) untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan perusahaan Indonesia di tingkat internasional. Konvergensi ini juga mendukung upaya peningkatan daya saing ekonomi nasional dan menarik investasi asing, karena laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar internasional lebih mudah dipahami oleh investor global.

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2023), penerapan standar akuntansi yang konsisten seperti SAK memberikan fondasi yang kuat bagi keandalan pelaporan keuangan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas sistem keuangan suatu negara. Dengan demikian, SAK bukan hanya sekadar aturan teknis, tetapi juga instrumen penting dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan mendukung stabilitas ekonomi nasional.

2. *International Financial Reporting Standards (IFRS)*

International Financial Reporting Standards (IFRS) merupakan seperangkat standar akuntansi internasional yang disusun oleh *International Accounting Standards Board (IASB)* untuk digunakan secara global dalam pelaporan keuangan. Tujuan utama IFRS adalah menciptakan keseragaman, transparansi, dan keterbandingan laporan keuangan lintas negara, sehingga informasi yang dihasilkan dapat dipercaya dan dimanfaatkan oleh investor, kreditor, serta pihak berkepentingan lainnya di seluruh dunia (IASB, 2024). Dengan adanya IFRS, entitas bisnis di berbagai negara dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip dan pedoman yang sama, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi serta integritas pasar modal global.

Menurut Alexander dan Nobes (2023), IFRS menekankan pada prinsip *fair presentation* dan *substance over form*, yaitu bahwa laporan keuangan harus menggambarkan realitas ekonomi dari transaksi dan peristiwa, bukan sekadar bentuk hukumnya. Prinsip ini menuntut penyusunan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, sehingga pengguna laporan dapat menilai posisi dan kinerja keuangan secara objektif. IFRS juga menggunakan pendekatan berbasis prinsip (*principle-based approach*), yang berbeda dari sistem berbasis aturan (*rule-based system*) seperti US GAAP. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi akuntan dalam menerapkan standar, dengan tetap mempertahankan integritas informasi berdasarkan konteks ekonomi dan profesionalisme.

Menurut IASB (2024), IFRS memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

- a. Meningkatkan keterbandingan laporan keuangan antarnegara
- b. Menjamin transparansi informasi keuangan
- c. Memperkuat kepercayaan investor internasional
- d. Mengurangi biaya pelaporan bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai yurisdiksi.

Dengan adopsi IFRS, perusahaan tidak perlu menyiapkan laporan keuangan yang berbeda untuk setiap negara, karena menggunakan dasar akuntansi yang seragam.

Di Indonesia, konvergensi IFRS dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang disesuaikan dengan IFRS. Beberapa contoh penerapan IFRS yang telah diadopsi antara lain IFRS 15: Revenue from Contracts with Customers (PSAK 72), IFRS 16: Leases (PSAK 73), IFRS 9: Financial Instruments (PSAK 71), dan IFRS 13: Fair Value Measurement (PSAK 68). Menurut Barone dan Mas (2024), adopsi IFRS oleh negara berkembang seperti Indonesia berperan penting dalam memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan kredibilitas pelaporan, serta memperluas akses ke investasi global melalui transparansi dan keterbandingan laporan keuangan.

3. Perkembangan SAK di Indonesia

Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia menunjukkan proses adaptasi dan harmonisasi yang berkelanjutan terhadap standar akuntansi internasional. Sejak tahun 2012, Indonesia secara resmi memulai konvergensi penuh terhadap *International Financial Reporting Standards* (IFRS) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, kredibilitas, dan daya saing laporan keuangan entitas bisnis di tingkat global (IAI, 2023). Upaya konvergensi ini dilaksanakan secara bertahap oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui revisi dan pembaruan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) agar selaras dengan perkembangan IFRS yang dikeluarkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB).

Menurut IAI (2023), struktur SAK saat ini terdiri atas tiga kerangka utama yang disesuaikan dengan karakteristik entitas pelapor. Pertama, SAK Umum, yang berbasis IFRS, digunakan oleh entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan seperti perusahaan terbuka dan

lembaga keuangan. Standar ini menuntut penerapan prinsip akuntansi yang kompleks dan transparan sesuai dengan praktik internasional. Kedua, SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang diperkenalkan untuk entitas yang tidak memiliki kewajiban publik dalam pelaporan keuangan, seperti perusahaan menengah dan kecil. Standar ini lebih sederhana dibandingkan SAK Umum, namun tetap menjamin keandalan informasi keuangan. Ketiga, SAK Syariah, yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan digunakan oleh lembaga keuangan syariah serta entitas yang melakukan transaksi berbasis syariah (IAI, 2023).

IAI juga menerbitkan SAK EMKM (Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah) pada tahun 2016 sebagai bentuk penyederhanaan lebih lanjut bagi pelaku usaha mikro yang tidak mampu menerapkan SAK Umum atau SAK ETAP (IAI, 2016). Menurut Suwardjono (2022), keberadaan SAK EMKM merupakan langkah penting dalam meningkatkan inklusi akuntansi bagi UMKM yang berperan besar dalam perekonomian nasional. Lebih lanjut, Rahmawati dan Wibowo (2024) menegaskan bahwa perkembangan SAK di Indonesia tidak hanya berfokus pada konvergensi teknis terhadap IFRS, tetapi juga pada peningkatan literasi akuntansi dan penerapan tata kelola yang baik. Dengan demikian, SAK berfungsi tidak hanya sebagai alat pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat integritas dan transparansi sektor bisnis Indonesia di era globalisasi.

4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan bentuk implementasi resmi dari Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman teknis dalam penyusunan laporan keuangan entitas. PSAK disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) di bawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Setiap PSAK dirancang untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan posisi dan kinerja keuangan secara wajar, transparan, dan dapat dibandingkan lintas periode maupun antarentitas (IAI, 2023).

Menurut IAI (2023), PSAK mencakup berbagai aspek akuntansi, mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan. Beberapa PSAK utama yang memiliki peran penting dalam praktik akuntansi antara lain: PSAK 1

tentang Penyajian Laporan Keuangan, yang menetapkan struktur dan elemen laporan keuangan; PSAK 16 tentang Aset Tetap; PSAK 19 tentang Aset Takberwujud; PSAK 23 tentang Pendapatan; PSAK 25 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan; PSAK 68 tentang Pengukuran Nilai Wajar; serta PSAK 72 dan PSAK 73, yang masing-masing mengatur pengakuan pendapatan dan transaksi sewa berdasarkan prinsip IFRS terbaru.

Seiring perkembangan global, PSAK mengalami revisi dan pembaruan secara berkala agar tetap relevan dengan perubahan lingkungan bisnis dan standar internasional. Misalnya, pada tahun 2020, IAI merevisi PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73 untuk menyesuaikan dengan IFRS 9 (*Financial Instruments*), IFRS 15 (*Revenue from Contracts with Customers*), dan IFRS 16 (*Leases*) (IAI, 2020). Pembaruan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dengan menekankan prinsip *substance over form*, transparansi, serta pengakuan pendapatan dan aset yang lebih mencerminkan realitas ekonomi (Barone & Mas, 2024).

G. Latihan Soal

1. Jelaskan perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dalam hal tujuan dan pengguna laporan!
2. Sebutkan dan jelaskan empat prinsip dasar akuntansi keuangan yang penting dalam penyusunan laporan keuangan!
3. Jelaskan peran utama IFRS dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan global!
4. Apa perbedaan utama antara SAK Umum, SAK ETAP, dan SAK Syariah?
5. Jelaskan hubungan antara SAK, IFRS, dan PSAK di Indonesia!



BAB II

SIKLUS AKUNTANSI KEUANGAN

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan konsep siklus akuntansi, memahami pencatatan transaksi keuangan, memahami buku jurnal dan buku besar, memahami penyesuaian dan jurnal penyesuaian, memahami penyusunan neraca saldo dan kertas kerja, serta memahami proses penutupan buku dan neraca saldo setelah penutupan. Sehingga pembaca dapat mampu menerapkan prosedur akuntansi keuangan secara tepat, akurat, dan sesuai dengan prinsip serta standar akuntansi yang berlaku.

Materi Pembelajaran

- Konsep Siklus Akuntansi
- Pencatatan Transaksi Keuangan
- Buku Jurnal dan Buku Besar
- Penyesuaian dan Jurnal Penyesuaian
- Penyusunan Neraca Saldo dan Kertas Kerja
- Proses Penutupan Buku dan Neraca Saldo Setelah Penutupan
- Latihan Soal

A. Konsep Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi merupakan serangkaian tahapan sistematis yang dilakukan oleh entitas dalam mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan transaksi keuangan selama satu periode akuntansi tertentu. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan, dan andal sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak internal maupun eksternal. Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2022) dalam *Accounting Principles*, siklus akuntansi dimulai sejak terjadinya transaksi keuangan hingga penyusunan laporan keuangan dan penutupan buku untuk periode tersebut. Proses ini bersifat berulang dan berkesinambungan, di mana akhir satu siklus menjadi awal bagi siklus berikutnya.

1. Pengertian Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi merupakan proses sistematis yang menggambarkan urutan kegiatan dalam pengelolaan informasi keuangan, dimulai dari identifikasi transaksi hingga penyusunan laporan keuangan dan penutupan akun pada akhir periode. Menurut Horngren, Harrison, dan Oliver (2021), siklus akuntansi berfungsi sebagai kerangka kerja yang memastikan bahwa setiap transaksi keuangan perusahaan dicatat, diklasifikasikan, dan dilaporkan secara akurat. Proses ini memungkinkan entitas untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal serta memberikan gambaran yang tepat mengenai posisi dan kinerja keuangan.

Tahapan dalam siklus akuntansi mencakup identifikasi dan analisis transaksi, pencatatan dalam jurnal umum, pemindahan ke buku besar (*ledger*), penyusunan neraca saldo (*trial balance*), pembuatan jurnal penyesuaian, hingga penyusunan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Setelah laporan disusun, dilakukan jurnal penutup (*closing entries*) untuk menutup akun sementara dan menyiapkan catatan keuangan untuk periode berikutnya (Warren, Reeve, & Duchac, 2022).

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2023), siklus akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai prosedur teknis, tetapi juga sebagai alat pengendalian internal yang membantu manajemen memastikan keandalan data keuangan. Dengan mengikuti tahapan secara berurutan, perusahaan dapat menghindari kesalahan pencatatan dan meningkatkan transparansi pelaporan. Selain itu, sistem ini menjadi dasar penting dalam proses audit dan evaluasi kinerja keuangan.

2. Tujuan Siklus Akuntansi

Tujuan siklus akuntansi adalah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan perusahaan dicatat, diproses, dan dilaporkan secara sistematis, akurat, serta sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Menurut Reeve, Warren, dan Duchac (2022), siklus akuntansi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal yang membantu perusahaan menjamin keakuratan data keuangan melalui proses pencatatan dan verifikasi yang berlapis. Dengan penerapan yang konsisten, siklus akuntansi mampu meminimalkan kesalahan dan kecurangan dalam pelaporan keuangan, sehingga meningkatkan keandalan informasi bagi berbagai pemangku kepentingan.

Tujuan penting lainnya adalah menyediakan informasi keuangan yang relevan, akurat, dan tepat waktu bagi pihak internal maupun eksternal, seperti manajemen, investor, kreditor, dan regulator. Informasi yang dihasilkan dari siklus akuntansi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, baik untuk perencanaan operasional jangka pendek maupun strategi bisnis jangka panjang (Horngren, Harrison, & Oliver, 2021). Dengan demikian, siklus akuntansi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendukung efektivitas manajemen keuangan perusahaan.

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2023), siklus akuntansi juga memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi seperti PSAK di Indonesia dan IFRS secara internasional. Setiap tahap dalam siklus mulai dari pencatatan, klasifikasi, hingga pelaporan dirancang agar laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara wajar dan dapat diaudit. Selain itu, dokumentasi sistematis yang dihasilkan dari siklus akuntansi juga memudahkan proses audit eksternal, karena auditor dapat menelusuri jejak transaksi secara rinci.

3. Tahapan dalam Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi merupakan serangkaian tahapan sistematis yang dilakukan secara berulang setiap periode untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal dan sesuai dengan standar akuntansi. Menurut Warren, Reeve, dan Fess (2021), terdapat delapan tahapan utama dalam siklus akuntansi yang saling berhubungan dan membentuk suatu alur kerja terintegrasi. Tahap pertama adalah identifikasi dan analisis transaksi, yaitu proses mengenali kejadian ekonomi yang relevan dan menilai dampaknya terhadap posisi keuangan entitas. Hanya transaksi yang memiliki bukti objektif seperti faktur, kwitansi, atau kontrak yang dicatat.

Tahap kedua adalah pencatatan dalam jurnal (*journalizing*), di mana setiap transaksi dicatat ke dalam jurnal umum atau jurnal khusus menggunakan sistem debit dan kredit. Selanjutnya, tahap ketiga adalah posting ke buku besar (*posting to ledger*), yaitu pemindahan data dari jurnal ke akun-akun terkait dalam buku besar untuk mengelompokkan transaksi sejenis. Setelah itu, dilakukan penyusunan neraca saldo (*trial balance*), yang bertujuan memastikan keseimbangan antara total debit

dan kredit sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2023).

Tahap kelima, pembuatan jurnal penyesuaian (*adjusting entries*), dilakukan pada akhir periode untuk menyesuaikan akun-akun agar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, misalnya untuk mencatat beban yang masih harus dibayar atau pendapatan yang belum diterima. Setelah penyesuaian, disusun laporan keuangan (*financial statements*) yang mencakup laporan laba rugi, perubahan ekuitas, neraca, dan arus kas sebagai bentuk akhir dari proses pelaporan (Horngren, Harrison, & Oliver, 2022).

Tahap ketujuh adalah penutupan buku (*closing entries*), yaitu proses menutup akun sementara seperti pendapatan dan beban agar saldo dapat direset untuk periode berikutnya. Tahap terakhir, penyusunan neraca saldo setelah penutupan (*post-closing trial balance*), dilakukan untuk memastikan akun-akun permanen (aset, kewajiban, dan ekuitas) tetap seimbang. Melalui delapan tahapan ini, siklus akuntansi menjamin keakuratan, keteraturan, dan transparansi laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat (Wild, Subramanyam, & Halsey, 2023).

4. Contoh Penerapan Siklus Akuntansi

Penerapan siklus akuntansi dalam praktik dapat digambarkan melalui contoh perusahaan jasa CV. Anugrah Konsultan untuk periode Januari 2025. Menurut Reeve, Warren, dan Duchac (2022), setiap tahapan dalam siklus akuntansi harus dilakukan secara berurutan agar menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan andal. Proses dimulai dari identifikasi transaksi, di mana perusahaan mencatat pembelian peralatan kantor senilai Rp5.000.000 secara tunai. Transaksi ini diklasifikasikan sebagai penambahan aset tetap dan pengurangan kas, karena kedua akun tersebut mencerminkan perubahan posisi keuangan perusahaan.

Tahap berikutnya adalah pencatatan jurnal (*journalizing*), yaitu mendebit akun Peralatan sebesar Rp5.000.000 dan mengkredit akun Kas dengan jumlah yang sama. Setelah dicatat, data transaksi tersebut kemudian diposting ke buku besar (*posting to ledger*) untuk memperbarui saldo masing-masing akun. Hasil dari tahap ini akan digunakan dalam penyusunan neraca saldo (*trial balance*) guna memastikan keseimbangan antara total debit dan kredit. Jika saldo telah

seimbang, proses dilanjutkan ke penyesuaian (*adjusting entries*), misalnya mencatat penyusutan peralatan sebesar Rp500.000 pada akhir periode agar nilai aset mencerminkan kondisi sebenarnya (Weygandt, Kimmel, & Kieso, 2023).

Perusahaan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan posisi keuangan. Laporan laba rugi menunjukkan kinerja perusahaan, sedangkan neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas. Setelah itu dilakukan penutupan buku (*closing entries*), di mana akun pendapatan dan beban di-nol-kan untuk memulai periode akuntansi baru. Tahap terakhir adalah penyusunan neraca saldo setelah penutupan (*post-closing trial balance*), yang hanya memuat akun permanen seperti aset, kewajiban, dan ekuitas (Horngren, Harrison, & Oliver, 2022). Melalui tahapan ini, CV. Anugrah Konsultan dapat memastikan bahwa seluruh transaksi selama periode akuntansi telah dicatat secara sistematis, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku.

B. Pencatatan Transaksi Keuangan

Pencatatan transaksi keuangan merupakan tahap fundamental dalam siklus akuntansi yang bertujuan untuk mendokumentasikan seluruh aktivitas ekonomi perusahaan secara sistematis, kronologis, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tahapan ini memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi memiliki bukti yang sah dan tercermin dengan benar dalam catatan keuangan. Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2022), pencatatan transaksi merupakan proses awal dalam siklus akuntansi yang berfungsi sebagai dasar bagi penyusunan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya.

1. Pengertian Pencatatan Transaksi Keuangan

Pencatatan transaksi keuangan merupakan salah satu tahap paling mendasar dalam siklus akuntansi, karena berfungsi sebagai fondasi bagi penyusunan laporan keuangan yang akurat dan andal. Menurut Horngren, Harrison, dan Oliver (2021), pencatatan transaksi keuangan adalah proses sistematis dalam mendokumentasikan setiap kejadian ekonomi atau aktivitas bisnis yang memengaruhi posisi keuangan perusahaan ke dalam catatan jurnal. Setiap transaksi yang dicatat harus didukung oleh bukti transaksi yang sah, seperti faktur penjualan, nota

pembelian, bukti kas masuk, bukti kas keluar, atau kwitansi, yang berfungsi sebagai dasar hukum dan verifikasi bagi auditor atau pihak manajemen.

Proses pencatatan transaksi tidak sekadar memasukkan angka ke dalam sistem akuntansi, tetapi juga melibatkan analisis akuntansi untuk menentukan akun mana yang terpengaruh dan bagaimana arah perubahan tersebut apakah menambah atau mengurangi saldo akun tertentu (Reeve, Warren, & Duchac, 2022). Dalam sistem *double-entry bookkeeping*, setiap transaksi harus memiliki dua sisi yang seimbang, yaitu debit dan kredit, yang memastikan akurasi dan keseimbangan antara total aset, kewajiban, dan ekuitas.

Hanya transaksi yang dapat diukur dengan satuan uang dan memiliki dampak ekonomi terhadap posisi keuangan perusahaan yang dicatat dalam pembukuan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2023). Hal ini sejalan dengan Prinsip Satuan Moneter (*Monetary Unit Principle*) yang digunakan dalam praktik akuntansi modern, di mana seluruh transaksi disajikan dalam satuan mata uang yang stabil, seperti rupiah di Indonesia. Pencatatan transaksi yang baik tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan manajerial, penyusunan laporan keuangan periodik, dan memudahkan proses audit. Oleh karena itu, akurasi, ketepatan waktu, dan keandalan pencatatan transaksi menjadi elemen penting dalam menjaga integritas informasi keuangan perusahaan di era akuntansi modern (Wild, Subramanyam, & Halsey, 2023).

2. Unsur-Unsur dalam Pencatatan Transaksi

Pencatatan transaksi keuangan merupakan proses penting dalam akuntansi yang melibatkan identifikasi dan pengklasifikasian unsur-unsur utama laporan keuangan. Menurut Reeve, Warren, dan Duchac (2022), terdapat lima unsur utama yang menjadi dasar dalam pencatatan setiap transaksi, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Unsur-unsur ini saling berhubungan dan membentuk struktur fundamental dalam sistem akuntansi berbasis double-entry system, di mana setiap transaksi memengaruhi sedikitnya dua akun dengan jumlah debit dan kredit yang harus selalu seimbang.

Aset (*assets*) adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Contohnya meliputi kas, piutang, persediaan, dan peralatan. Aset

mencerminkan kapasitas perusahaan dalam menjalankan operasional serta menghasilkan pendapatan. Selanjutnya, kewajiban (*liabilities*) merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dilunasi di masa mendatang, seperti utang usaha, utang bank, dan utang gaji (Horngren, Harrison, & Oliver, 2021). Kewajiban ini menunjukkan tanggung jawab finansial yang harus dipenuhi perusahaan.

Ekuitas (*equity*) menggambarkan hak residual pemilik terhadap aset perusahaan setelah seluruh kewajiban dikurangkan. Ekuitas dapat berasal dari investasi pemilik maupun laba yang ditahan dari periode sebelumnya (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2023). Unsur berikutnya, pendapatan (*revenue*), mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi akibat aktivitas operasional seperti penjualan barang atau pemberian jasa. Di sisi lain, beban (*expense*) menggambarkan penurunan manfaat ekonomi akibat penggunaan sumber daya untuk memperoleh pendapatan, seperti beban gaji, sewa, dan listrik (Wild, Subramanyam, & Halsey, 2023).

3. Prinsip Dasar Pencatatan Transaksi

Prinsip dasar dalam pencatatan transaksi keuangan adalah sistem pencatatan berpasangan (*double-entry bookkeeping*), yang pertama kali diperkenalkan oleh Luca Pacioli pada tahun 1494 dan hingga kini menjadi fondasi utama dalam praktik akuntansi modern. Sistem ini didasarkan pada konsep bahwa setiap transaksi keuangan memiliki dua sisi yang saling berhubungan, yaitu debit (Dr) dan kredit (Cr), yang harus selalu seimbang untuk menjaga integritas laporan keuangan. Menurut Needles, Powers, dan Crosson (2020), setiap transaksi akan memengaruhi minimal dua akun secara bersamaan satu akun didebit dan akun lainnya dikredit sehingga total nilai debit selalu sama dengan total nilai kredit.

Pada penerapannya, sisi debit mencerminkan peningkatan aset atau beban, serta penurunan kewajiban dan ekuitas, sedangkan sisi kredit mencerminkan peningkatan kewajiban, pendapatan, atau ekuitas, serta penurunan aset dan beban (Warren, Reeve, & Fess, 2021). Keseimbangan ini diatur oleh persamaan dasar akuntansi, yaitu:

$$\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas}$$

Persamaan ini menjadi dasar logis dalam setiap pencatatan, karena setiap peningkatan pada satu sisi harus diimbangi oleh perubahan yang setara pada sisi lainnya. Dengan demikian, sistem pencatatan berpasangan tidak hanya menjaga akurasi numerik, tetapi juga memastikan representasi yang wajar dari posisi keuangan perusahaan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2023).

Prinsip ini memungkinkan akuntan untuk melacak asal-usul kesalahan dalam pembukuan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kredibilitas laporan keuangan. Dalam konteks modern, sistem double-entry tetap relevan meskipun telah didukung oleh teknologi akuntansi digital, karena prinsip keseimbangan debit dan kredit tetap menjadi acuan utama dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan andal (Horngren, Harrison, & Oliver, 2021).

4. Langkah-Langkah dalam Pencatatan Transaksi

Proses pencatatan transaksi keuangan dalam akuntansi dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan untuk memastikan keakuratan dan keteraturan data keuangan. Menurut Warren, Reeve, dan Fess (2021), terdapat lima langkah utama dalam proses ini, yaitu analisis transaksi, penentuan efek terhadap akun, penentuan posisi debit dan kredit, penyusunan jurnal umum, serta pemindahan ke buku besar (posting). Tahap pertama adalah analisis transaksi, yaitu proses mengidentifikasi jenis transaksi yang terjadi serta akun-akun yang terpengaruh, seperti kas, piutang, utang, atau pendapatan. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi dicatat dengan benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2023).

Tahap kedua adalah menentukan efek terhadap akun, yakni menilai apakah suatu transaksi menyebabkan peningkatan atau penurunan pada akun tertentu. Misalnya, pembelian peralatan secara tunai akan meningkatkan akun peralatan dan menurunkan akun kas. Selanjutnya, tahap ketiga adalah menentukan posisi debit dan kredit, yaitu mengklasifikasikan perubahan akun berdasarkan prinsip *double-entry bookkeeping*. Dalam sistem ini, setiap transaksi akan selalu memiliki dua sisi yang seimbang: sisi debit dan sisi kredit (Needles, Powers, & Crosson, 2020).

Tahap keempat adalah penyusunan jurnal umum, di mana transaksi dicatat secara kronologis berdasarkan tanggal kejadian,

lengkap dengan keterangan dan nilai nominal. Pencatatan ini berfungsi sebagai bukti historis seluruh aktivitas ekonomi perusahaan. Tahap terakhir adalah pemindahan ke buku besar (posting), yaitu proses memindahkan catatan dari jurnal ke akun masing-masing dalam buku besar agar dapat diketahui saldo akhir setiap akun. Menurut Horngren, Harrison, dan Oliver (2021), tahapan-tahapan ini tidak hanya menjaga ketelitian dan konsistensi data, tetapi juga membentuk dasar yang kuat untuk penyusunan laporan keuangan yang andal dan informatif.

5. Contoh Pencatatan Transaksi

Contoh pencatatan transaksi dalam jurnal umum menggambarkan penerapan prinsip dasar sistem double-entry bookkeeping, di mana setiap transaksi keuangan memengaruhi minimal dua akun dan nilai total debit selalu sama dengan total kredit. Menurut Reeve, Warren, dan Duchac (2022), sistem pencatatan berpasangan ini memastikan keseimbangan persamaan akuntansi, yaitu $\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas}$, sehingga laporan keuangan dapat disusun dengan akurat dan andal.

Sebagai ilustrasi, misalkan pada tanggal 1 Januari 2025, pemilik perusahaan “CV. Anugrah Konsultan” menyetor modal tunai sebesar Rp10.000.000. Transaksi ini dicatat dengan mendebit akun Kas sebesar Rp10.000.000 (karena aset meningkat) dan mengkredit akun Modal Pemilik sebesar Rp10.000.000 (karena ekuitas bertambah). Selanjutnya, pada 3 Januari 2025, perusahaan membeli Peralatan senilai Rp3.000.000 secara tunai. Transaksi ini dicatat dengan mendebit akun Peralatan (penambahan aset tetap) sebesar Rp3.000.000 dan mengkredit akun Kas sebesar Rp3.000.000 (pengurangan aset lancar).

Kemudian, pada 5 Januari 2025, perusahaan membayar Beban Sewa sebesar Rp1.000.000. Transaksi ini dicatat dengan mendebit akun Beban Sewa sebesar Rp1.000.000 (meningkatkan beban) dan mengkredit akun Kas sebesar Rp1.000.000 (mengurangi aset). Setiap transaksi tersebut menunjukkan hubungan saling berlawanan antara sisi debit dan kredit yang menjaga keseimbangan persamaan akuntansi.

Menurut Horngren, Harrison, dan Oliver (2021), pencatatan transaksi dalam jurnal umum berfungsi sebagai catatan kronologis pertama dari seluruh aktivitas ekonomi perusahaan, yang nantinya akan dipindahkan ke buku besar untuk proses penyusunan laporan keuangan. Dengan pencatatan yang sistematis, perusahaan dapat memastikan

transparansi, akurasi, dan keandalan informasi keuangan yang diperlukan untuk analisis dan pengambilan keputusan bisnis yang efektif.

C. Buku Jurnal dan Buku Besar

Buku jurnal dan buku besar merupakan dua elemen utama dalam siklus akuntansi keuangan yang berfungsi untuk mencatat, mengelompokkan, dan meringkas seluruh transaksi keuangan perusahaan. Proses pencatatan transaksi dimulai dari jurnal (*book of original entry*) dan kemudian diposting ke buku besar (*book of final entry*). Keduanya berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2022), jurnal dan buku besar merupakan jembatan antara proses pencatatan transaksi harian dengan penyusunan laporan keuangan periodik.

1. Pengertian Buku Jurnal

Buku jurnal merupakan salah satu komponen penting dalam sistem akuntansi yang berfungsi sebagai tempat pencatatan awal dari setiap transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Setiap transaksi yang memiliki dampak terhadap posisi keuangan perusahaan pertama kali dicatat dalam jurnal sebelum akhirnya diposting ke buku besar. Menurut Horngren, Harrison, dan Oliver (2021), jurnal disebut juga sebagai *book of original entry* karena menjadi dasar utama dalam proses pencatatan akuntansi. Melalui jurnal, seluruh transaksi dapat direkam dengan sistematis, sehingga memudahkan proses pelacakan, analisis, dan verifikasi data keuangan.

Pada praktiknya, pencatatan di buku jurnal mengikuti sistem *double-entry bookkeeping*, di mana setiap transaksi dicatat dalam dua sisi, yaitu debit dan kredit, untuk menjaga keseimbangan persamaan akuntansi ($Aset = Kewajiban + Ekuitas$). Menurut Warren, Reeve, dan Fess (2021), prinsip ini memastikan bahwa setiap perubahan dalam satu akun selalu diimbangi oleh perubahan yang sepadan dalam akun lain, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan reliabel.

Tujuan utama pembuatan jurnal, sebagaimana dijelaskan oleh Reeve, Warren, dan Duchac (2022), adalah untuk menyediakan catatan kronologis yang rapi dan sistematis dari seluruh transaksi keuangan. Hal

ini membantu akuntan dan auditor dalam menelusuri sumber data, mendeteksi kesalahan pencatatan, serta memastikan tidak ada transaksi yang terlewat atau tercatat ganda. Selain itu, jurnal juga berfungsi sebagai dasar bagi proses pemindahan data ke buku besar (*posting*), yang kemudian digunakan untuk penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian, buku jurnal memiliki peran vital dalam menjaga integritas informasi keuangan perusahaan serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam sistem akuntansi modern.

2. Bentuk dan Format Buku Jurnal

Buku jurnal umum memiliki bentuk dan format yang dirancang untuk mencatat setiap transaksi keuangan secara sistematis dan mudah ditelusuri. Format standar buku jurnal terdiri atas beberapa kolom utama, yaitu tanggal, keterangan, referensi (Ref), debit, dan kredit. Menurut Horngren, Harrison, dan Oliver (2021), struktur ini membantu akuntan dalam mencatat transaksi secara kronologis serta memastikan bahwa setiap pencatatan mengikuti prinsip dasar akuntansi berpasangan (*double-entry bookkeeping*). Dengan demikian, setiap transaksi yang dicatat di jurnal akan memiliki dampak ganda pada akun-akun terkait, yang memastikan keseimbangan antara sisi debit dan kredit dalam laporan keuangan.

Kolom tanggal digunakan untuk mencatat waktu terjadinya transaksi agar penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan secara berurutan dan mudah diaudit. Kolom keterangan berisi nama akun yang terpengaruh oleh transaksi; akun yang didebit ditulis lebih dahulu, diikuti oleh akun yang dikredit dengan sedikit indentasi, sesuai dengan pedoman yang disarankan oleh Reeve, Warren, dan Duchac (2022). Selanjutnya, kolom Ref (*Reference*) mencatat nomor atau kode akun yang digunakan untuk menelusuri transaksi ke buku besar (*ledger*), sehingga memudahkan proses *posting* dan pengawasan. Sementara itu, kolom debit dan kredit menunjukkan jumlah nominal transaksi, yang harus selalu seimbang untuk menjaga akurasi sistem pencatatan.

Menurut Warren, Reeve, dan Fess (2021), format ini tidak hanya mempermudah pencatatan, tetapi juga membantu dalam proses audit internal dan eksternal, karena setiap transaksi dapat ditelusuri dengan jelas dari sumber dokumen hingga laporan keuangan akhir. Selain itu, bentuk buku jurnal umum dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, baik secara manual maupun digital menggunakan perangkat

lunak akuntansi modern. Dengan struktur yang sistematis ini, buku jurnal menjadi instrumen penting dalam menjaga keteraturan, keakuratan, dan transparansi informasi keuangan perusahaan.

3. Jenis-Jenis Buku Jurnal

Pada sistem akuntansi modern, buku jurnal berperan penting dalam mencatat seluruh transaksi keuangan perusahaan secara sistematis. Menurut Reeve, Warren, dan Duchac (2022), jurnal dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu jurnal umum (*general journal*) dan jurnal khusus (*special journal*). Pembagian ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pencatatan transaksi, terutama di perusahaan yang memiliki volume transaksi tinggi.

Jurnal umum digunakan untuk mencatat berbagai transaksi yang tidak memiliki tempat dalam jurnal khusus, seperti jurnal penyesuaian, jurnal koreksi, dan jurnal penutup. Jurnal ini mencatat transaksi yang sifatnya tidak rutin, misalnya pencatatan beban sewa, depresiasi aset, atau koreksi kesalahan pencatatan. Sebagai contoh, pada tanggal 5 Januari 2025, transaksi pembayaran sewa sebesar Rp1.000.000 dicatat sebagai *debit* pada akun Beban Sewa dan *kredit* pada akun Kas. Menurut Warren, Reeve, dan Fess (2021), jurnal umum memiliki fleksibilitas yang tinggi karena dapat digunakan untuk semua jenis transaksi yang memerlukan penyesuaian akhir periode.

Jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi secara berulang dan sejenis, sehingga mempermudah proses pencatatan dan pengelompokan data keuangan. Berdasarkan Needles, Powers, dan Crosson (2020), terdapat empat jenis utama jurnal khusus, yaitu:

- a. *Jurnal penjualan* untuk mencatat penjualan barang secara kredit,
- b. *Jurnal pembelian* untuk mencatat pembelian barang secara kredit
- c. *Jurnal penerimaan kas* untuk mencatat semua penerimaan uang tunai
- d. *Jurnal pengeluaran kas* untuk mencatat seluruh pengeluaran kas.

Penggunaan jurnal khusus sangat disarankan bagi perusahaan besar seperti perusahaan dagang dan manufaktur, karena dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko kesalahan, serta mempermudah proses audit dan pelaporan keuangan. Dengan adanya pembagian jurnal ini, sistem akuntansi menjadi lebih terstruktur dan mendukung penyusunan laporan keuangan yang akurat, relevan, dan andal.

4. Pengertian Buku Besar (*Ledger*)

Buku besar (*ledger*) merupakan bagian penting dalam sistem akuntansi karena berfungsi untuk mengelompokkan dan meringkas semua transaksi yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Buku besar sering disebut sebagai *book of final entry* atau “buku catatan akhir” karena menjadi tempat terakhir sebelum informasi digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut Warren, Reeve, dan Fess (2021), buku besar berisi kumpulan akun-akun yang merepresentasikan elemen utama laporan keuangan, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Setiap akun dalam buku besar menunjukkan perubahan dan saldo yang terjadi akibat transaksi keuangan selama periode tertentu.

Fungsi utama buku besar adalah untuk mengelompokkan transaksi sejenis dari jurnal ke dalam akun yang relevan, sehingga memudahkan proses pelacakan dan analisis posisi keuangan perusahaan. Misalnya, semua transaksi yang berkaitan dengan kas akan dikelompokkan dalam akun kas, sementara transaksi terkait piutang akan ditempatkan dalam akun piutang. Dengan demikian, buku besar membantu dalam menentukan saldo akhir tiap akun, yang nantinya digunakan untuk menyusun *trial balance* atau neraca saldo. Hal ini sesuai dengan pendapat Horngren, Harrison, dan Oliver (2021) yang menekankan bahwa buku besar menyediakan dasar yang sistematis bagi proses penyusunan laporan keuangan dan deteksi kesalahan pencatatan.

Buku besar juga memiliki peran penting dalam menyediakan data untuk penyusunan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas. Setiap saldo akhir akun dalam buku besar akan dirangkum untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Menurut Reeve, Warren, dan Duchac (2022), buku besar juga mempermudah proses audit karena memuat rincian transaksi per akun, sehingga auditor dapat menelusuri asal-usul setiap saldo secara jelas. Dengan demikian, keberadaan buku besar tidak hanya mendukung ketepatan laporan keuangan tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem akuntansi modern.

5. Bentuk Buku Besar

Buku besar (*ledger*) memiliki berbagai bentuk penyajian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas sistem akuntansi suatu organisasi. Menurut Romney dan Steinbart (2022), terdapat empat

bentuk utama buku besar yang umum digunakan, yaitu bentuk T, bentuk skonto, bentuk berjalan, dan bentuk komputerisasi. Setiap bentuk memiliki karakteristik dan tingkat kepraktisan yang berbeda sesuai dengan skala serta sistem pencatatan perusahaan.

Bentuk T (*T-Account*) merupakan bentuk paling sederhana dan paling banyak digunakan dalam pembelajaran dasar akuntansi. Bentuk ini menyerupai huruf “T”, di mana sisi kiri menunjukkan debit dan sisi kanan menunjukkan kredit. Meskipun sederhana, bentuk ini efektif untuk memahami aliran transaksi antara akun debit dan kredit. Bentuk skonto, di sisi lain, memuat dua kolom (debit dan kredit) dalam satu halaman, sehingga lebih efisien untuk mencatat transaksi dengan volume sedang. Bentuk ini sering digunakan pada pencatatan manual di perusahaan menengah karena mudah ditelusuri.

Bentuk berjalan (*running balance*) menampilkan saldo akhir setiap kali terjadi transaksi. Menurut Horngren, Harrison, dan Oliver (2021), bentuk ini memberikan informasi yang lebih dinamis karena memungkinkan pengguna untuk memantau perubahan saldo akun secara real time tanpa harus menghitung ulang secara manual. Hal ini sangat berguna bagi perusahaan dengan frekuensi transaksi tinggi.

Pada praktik modern, sebagian besar organisasi kini menggunakan bentuk komputerisasi (*electronic ledger*) yang dikelola melalui perangkat lunak akuntansi seperti SAP, MYOB, atau Zahir Accounting. Menurut Gelinas, Dull, dan Wheeler (2023), sistem ini memungkinkan pencatatan otomatis, konsistensi data, serta kemudahan dalam menghasilkan laporan keuangan secara cepat dan akurat. Dengan demikian, perkembangan bentuk buku besar dari manual ke digital mencerminkan evolusi akuntansi menuju efisiensi, transparansi, dan ketepatan informasi dalam pengambilan keputusan keuangan.

D. Penyesuaian dan Jurnal Penyesuaian

Penyesuaian (*adjusting*) merupakan langkah penting dalam siklus akuntansi yang dilakukan pada akhir periode akuntansi untuk memastikan bahwa pendapatan dan beban diakui pada periode terjadinya sesuai dengan prinsip *accrual basis*. Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2022), jurnal penyesuaian digunakan untuk memperbarui saldo akun-akun yang tidak mencerminkan nilai sebenarnya akibat adanya transaksi yang belum dicatat atau kesalahan periode pencatatan. Proses

ini bertujuan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang wajar (*fair presentation*) mengenai posisi dan kinerja keuangan perusahaan.

1. Tujuan Penyesuaian

Penyesuaian (*adjusting entries*) dalam akuntansi keuangan merupakan langkah penting yang dilakukan pada akhir periode akuntansi untuk memastikan bahwa seluruh akun mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi yang sebenarnya. Menurut Reeve, Warren, dan Duchac (2023), tujuan utama dari proses penyesuaian adalah untuk menerapkan prinsip *matching* atau pencocokan pendapatan dan beban, yaitu memastikan bahwa pendapatan dan beban dicatat pada periode yang sama saat transaksi ekonomi terjadi, bukan ketika kas diterima atau dibayarkan. Hal ini bertujuan agar laporan laba rugi mencerminkan kinerja keuangan yang akurat pada periode tertentu.

Penyesuaian juga berfungsi untuk menentukan saldo akun yang benar, sehingga seluruh akun aset, liabilitas, pendapatan, dan beban menunjukkan nilai yang wajar sesuai dengan kondisi aktual. Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2022), tanpa penyesuaian, banyak akun dalam laporan keuangan akan menampilkan saldo yang tidak akurat karena adanya transaksi yang belum dicatat atau belum sepenuhnya direalisasikan dalam periode berjalan. Tujuan lain dari penyesuaian adalah menjaga akurasi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku umum, seperti PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dan IFRS (*International Financial Reporting Standards*). Dengan melakukan penyesuaian, perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan secara internasional.

Penyesuaian juga diperlukan untuk mencatat transaksi yang belum diakui, misalnya beban yang masih harus dibayar (*accrued expenses*), pendapatan diterima di muka (*unearned revenues*), penyusutan aset tetap (*depreciation*), dan pendapatan yang masih harus diterima (*accrued revenues*). Menurut Horngren, Harrison, dan Oliver (2021), pencatatan transaksi-transaksi tersebut memastikan bahwa seluruh perubahan ekonomi yang memengaruhi posisi keuangan perusahaan telah tercermin dengan benar. Dengan demikian, proses penyesuaian menjadi fondasi penting dalam menjaga integritas laporan

keuangan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas entitas bisnis.

2. Jenis-Jenis Penyesuaian

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2021), jurnal penyesuaian (*adjusting entries*) merupakan bagian penting dalam proses akuntansi untuk memastikan bahwa setiap akun mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya pada akhir periode pelaporan. Penyesuaian dilakukan untuk mengakui pendapatan dan beban sesuai dengan prinsip akrual (*accrual basis accounting*), bukan berdasarkan aliran kas. Terdapat lima jenis utama penyesuaian yang lazim digunakan dalam akuntansi keuangan.

- a. Pendapatan yang masih harus diterima (*accrued revenues*) adalah pendapatan yang telah diperoleh tetapi belum dicatat karena belum ditagih atau diterima kasnya. Misalnya, pendapatan bunga atau jasa yang telah diberikan namun pembayarannya baru diterima di periode berikutnya. Jenis penyesuaian ini penting untuk memastikan bahwa seluruh pendapatan yang telah dihasilkan diakui dalam periode yang tepat (Kieso et al., 2021).
- b. Beban yang masih harus dibayar (*accrued expenses*) mencerminkan kewajiban atas beban yang telah terjadi tetapi belum dibayar atau dicatat. Contohnya adalah gaji karyawan untuk akhir bulan yang baru dibayarkan pada bulan berikutnya. Penyesuaian ini memastikan bahwa laporan laba rugi mencerminkan seluruh beban aktual periode berjalan (Reeve, Warren, & Duchac, 2023).
- c. Pendapatan diterima di muka (*unearned revenues*) terjadi ketika perusahaan menerima uang sebelum barang atau jasa diserahkan. Awalnya dicatat sebagai liabilitas karena perusahaan masih memiliki kewajiban untuk memberikan layanan di masa mendatang.
- d. Beban dibayar di muka (*prepaid expenses*) adalah pembayaran atas beban yang manfaatnya akan diterima di masa mendatang, seperti sewa gedung atau asuransi. Nilai tersebut akan diakui sebagai beban secara bertahap selama masa manfaatnya (Horngren, Harrison, & Oliver, 2022).
- e. Penyusutan (*depreciation*) merupakan proses alokasi biaya perolehan aset tetap selama umur ekonomisnya. Penyesuaian ini

diperlukan agar nilai aset dan beban penyusutan diakui secara proporsional setiap periode, mencerminkan penggunaan aset secara wajar dalam menghasilkan pendapatan.

3. Proses Pembuatan Jurnal Penyesuaian

Menurut Romney dan Steinbart (2022), proses pembuatan jurnal penyesuaian (*adjusting entries*) merupakan tahap penting dalam siklus akuntansi yang bertujuan untuk memastikan seluruh akun mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi yang sebenarnya pada akhir periode. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan prinsip akrual, di mana pendapatan dan beban harus diakui pada periode terjadinya, bukan saat kas diterima atau dibayarkan.

Langkah pertama dalam proses ini adalah mengidentifikasi akun yang memerlukan penyesuaian. Akun yang biasanya disesuaikan meliputi akun sementara seperti pendapatan, beban, serta akun-akun terkait aset dan kewajiban yang belum mencerminkan kondisi terkini. Misalnya, akun sewa dibayar di muka, beban penyusutan, atau pendapatan diterima di muka. Tahap identifikasi ini penting untuk menjaga kesesuaian antara laporan keuangan dan aktivitas ekonomi perusahaan (Warren, Reeve, & Fess, 2021). Langkah kedua adalah menghitung jumlah penyesuaian yang diperlukan. Perhitungan ini dapat didasarkan pada bukti transaksi, perhitungan manual, atau estimasi berdasarkan data aktual dari periode berjalan. Akuntan harus memastikan bahwa perhitungan dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi salah saji (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2021).

Langkah ketiga yaitu menyusun jurnal penyesuaian. Dalam format umum, akun beban dicatat di sisi debit, sedangkan akun aset atau liabilitas dicatat di sisi kredit. Misalnya, untuk mencatat beban sewa yang telah digunakan, dilakukan jurnal debit pada akun “Beban Sewa” dan kredit pada “Sewa Dibayar di Muka”. Langkah terakhir adalah memindahkan jurnal penyesuaian ke buku besar (posting). Proses ini akan memperbarui saldo akhir masing-masing akun, yang kemudian digunakan dalam penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian (*adjusted trial balance*). Dengan demikian, setiap akun mencerminkan nilai sebenarnya pada akhir periode pelaporan, memastikan laporan keuangan akurat dan sesuai standar akuntansi yang berlaku (Romney & Steinbart, 2022).

4. Contoh Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian merupakan bagian penting dari proses akuntansi yang dilakukan pada akhir periode untuk memastikan seluruh akun mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Menurut Reeve, Warren, dan Duchac (2022), penyesuaian diperlukan agar pendapatan dan beban dicatat pada periode terjadinya, sesuai dengan prinsip akrual dan *matching principle* dalam akuntansi keuangan. Setiap jurnal penyesuaian dibuat untuk memperbarui akun-akun yang mengalami perubahan nilai namun belum tercatat secara otomatis selama periode berjalan. Sebagai contoh, untuk beban sewa dibayar di muka, apabila perusahaan telah membayar Rp12.000.000 untuk 12 bulan sewa, maka pada akhir bulan pertama perlu dilakukan penyesuaian sebesar Rp1.000.000. Transaksi tersebut dicatat dengan mendebit akun *Beban Sewa* dan mengkredit *Sewa Dibayar di Muka* agar mencerminkan beban sewa yang telah digunakan selama periode tersebut (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2021).

Contoh lain adalah pendapatan diterima di muka. Jika perusahaan menerima uang muka Rp6.000.000 untuk jasa tiga bulan, maka setiap akhir bulan perlu diakui Rp2.000.000 sebagai *Pendapatan Jasa*. Jurnalnya mencatat debit pada *Pendapatan Diterima di Muka* dan kredit pada *Pendapatan Jasa* agar pendapatan diakui secara proporsional sesuai jasa yang telah diberikan. Selain itu, beban gaji terutang sebesar Rp3.000.000 dicatat sebagai *Beban Gaji* (debit) dan *Gaji Terutang* (kredit) untuk mencerminkan kewajiban yang masih harus dibayar. Demikian pula, pendapatan bunga terakru sebesar Rp500.000 dicatat dengan *Piutang Bunga* (debit) dan *Pendapatan Bunga* (kredit) untuk mencatat pendapatan yang telah dihasilkan namun belum diterima tunai.

Untuk penyusutan aset tetap, misalnya peralatan senilai Rp2.000.000 per tahun, jurnal penyesuaianya adalah *Beban Penyusutan* (debit) dan *Akumulasi Penyusutan* (kredit). Menurut Romney dan Steinbart (2022), penyesuaian seperti ini sangat penting karena memastikan laporan keuangan mencerminkan nilai aset dan beban secara realistik sesuai periode akuntansi yang berlaku.

E. Penyusunan Neraca Saldo dan Kertas Kerja

Penyusunan neraca saldo (*trial balance*) dan kertas kerja (*worksheet*) merupakan tahap penting dalam siklus akuntansi yang

berfungsi sebagai jembatan antara proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan akhir. Pada tahap ini, seluruh saldo akun dari buku besar dikumpulkan dan disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa total saldo debit dan kredit berada dalam keseimbangan. Proses ini membantu mendeteksi kesalahan aritmetika dan menjadi dasar untuk penyusunan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, serta laporan perubahan ekuitas.

1. Pengertian Neraca Saldo dan Kertas Kerja

Neraca saldo dan kertas kerja merupakan dua elemen penting dalam siklus akuntansi yang berfungsi sebagai jembatan antara proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2021), neraca saldo (*trial balance*) adalah daftar seluruh akun yang terdapat dalam buku besar beserta saldo akhirnya pada akhir periode akuntansi. Tujuan utama dari penyusunan neraca saldo adalah untuk memastikan keseimbangan antara total sisi debit dan total sisi kredit sesuai dengan prinsip *double-entry bookkeeping*. Apabila kedua sisi menunjukkan jumlah yang sama, maka secara matematis pencatatan transaksi dianggap benar, meskipun keseimbangan ini belum tentu menjamin tidak adanya kesalahan klasifikasi akun atau penghilangan transaksi. Neraca saldo juga digunakan sebagai dasar awal untuk menyiapkan jurnal penyesuaian serta penyusunan laporan keuangan formal seperti laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca akhir periode.

Horngren, Harrison, dan Oliver (2022) menjelaskan bahwa kertas kerja (*worksheet*) adalah alat bantu yang disusun oleh akuntan untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan secara sistematis. Kertas kerja biasanya berbentuk tabel yang memuat beberapa kolom, seperti kolom neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca akhir. Fungsinya adalah untuk menggabungkan data dari berbagai sumber (neraca saldo dan jurnal penyesuaian) ke dalam satu format yang terintegrasi, sehingga proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih efisien dan akurat.

Menurut Reeve, Warren, dan Duchac (2023), penggunaan kertas kerja juga membantu dalam proses audit internal karena memudahkan penelusuran data dari jurnal hingga laporan keuangan akhir. Dengan demikian, baik neraca saldo maupun kertas kerja memiliki peran strategis dalam memastikan keakuratan dan keterandalan informasi

keuangan yang akan digunakan manajemen, auditor, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan.

2. Tujuan Penyusunan Neraca Saldo

Neraca saldo memiliki peran yang sangat penting dalam siklus akuntansi karena menjadi alat verifikasi awal atas ketepatan proses pencatatan transaksi keuangan. Menurut Reeve, Warren, dan Duchac (2023), tujuan utama penyusunan neraca saldo (*trial balance*) adalah untuk memeriksa keseimbangan antara total sisi debit dan total sisi kredit dalam buku besar. Hal ini didasarkan pada prinsip *double-entry system*, di mana setiap transaksi keuangan selalu memengaruhi sedikitnya dua akun dengan jumlah debit dan kredit yang sama. Dengan demikian, apabila total debit dan kredit pada neraca saldo seimbang, hal tersebut menandakan bahwa proses pencatatan telah dilakukan secara matematis benar, meskipun belum tentu bebas dari kesalahan klasifikasi atau kelalaian pencatatan.

Neraca saldo juga menjadi dasar penting dalam penyusunan laporan keuangan. Seperti dijelaskan oleh Horngren, Harrison, dan Oliver (2022), neraca saldo menyediakan data mentah yang kemudian digunakan untuk menyiapkan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca akhir periode. Dengan kata lain, neraca saldo berfungsi sebagai jembatan antara buku besar dan laporan keuangan formal yang akan disajikan kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan.

Fungsi lainnya adalah untuk mendeteksi kesalahan pencatatan. Jika terjadi ketidakseimbangan antara total debit dan kredit, hal tersebut menjadi indikator awal adanya kesalahan, seperti transaksi yang belum diposting, kesalahan nominal, atau salah klasifikasi akun. Selain itu, menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2021), neraca saldo juga membantu menyediakan informasi saldo terkini dari setiap akun, baik akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, maupun beban. Informasi ini sangat berguna bagi manajemen dalam menganalisis kondisi keuangan perusahaan dan melakukan evaluasi terhadap kinerja operasional. Dengan demikian, neraca saldo bukan hanya alat pemeriksaan teknis, tetapi juga instrumen penting dalam pengendalian dan pelaporan keuangan yang akurat serta transparan.

3. Jenis-Jenis Neraca Saldo

Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2022), neraca saldo merupakan alat penting dalam siklus akuntansi yang berfungsi untuk memastikan keseimbangan antara total debit dan kredit sebelum laporan keuangan disusun. Berdasarkan waktu penyusunannya, neraca saldo dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu neraca saldo awal, neraca saldo sebelum penyesuaian, dan neraca saldo setelah penyesuaian. Ketiganya memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda dalam proses akuntansi, namun saling berkaitan dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan andal.

- a. Neraca saldo awal (*beginning trial balance*) disusun pada awal periode akuntansi dan berisi saldo akun yang dibawa dari akhir periode sebelumnya. Seperti dijelaskan oleh Reeve, Warren, dan Duchac (2023), neraca saldo awal digunakan sebagai titik awal untuk mencatat transaksi baru pada periode berjalan, sehingga menjadi dasar bagi proses pencatatan selanjutnya. Saldo akun seperti kas, piutang, utang, dan modal pemilik dicantumkan sesuai kondisi akhir periode sebelumnya.
- b. Neraca saldo sebelum penyesuaian (*unadjusted trial balance*) disusun sebelum jurnal penyesuaian dilakukan. Menurut Horngren, Harrison, dan Oliver (2022), tujuan utamanya adalah untuk menampilkan saldo akun setelah semua transaksi rutin dicatat dalam jurnal dan diposting ke buku besar. Neraca saldo jenis ini membantu akuntan mengidentifikasi akun yang memerlukan penyesuaian, seperti beban dibayar di muka atau pendapatan diterima di muka.
- c. Neraca saldo setelah penyesuaian (*adjusted trial balance*) disusun setelah jurnal penyesuaian dicatat dan diposting. Jenis ini memberikan gambaran saldo akun yang telah disesuaikan agar mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya pada akhir periode. Seperti dikemukakan oleh Kieso, Weygandt, dan Warfield (2021), neraca saldo setelah penyesuaian menjadi dasar langsung dalam penyusunan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan neraca akhir periode. Dengan demikian, ketiga jenis neraca saldo ini berperan penting dalam menjaga akurasi dan keteraturan proses akuntansi.

4. Contoh Format Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian

Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2022), neraca saldo sebelum penyesuaian (*unadjusted trial balance*) merupakan daftar seluruh akun beserta saldo debit dan kredit yang diambil dari buku besar sebelum dilakukan jurnal penyesuaian. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa total saldo debit sama dengan total saldo kredit, sesuai dengan prinsip *double-entry system* dalam akuntansi. Meskipun keseimbangan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan transaksi telah dilakukan dengan benar secara matematis, keseimbangan ini belum menjamin bahwa seluruh akun telah mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, karena masih mungkin terdapat kesalahan klasifikasi atau pencatatan transaksi yang belum disesuaikan.

Sebagai contoh, neraca saldo sederhana dapat disusun seperti berikut: Kas Rp20.000.000, Piutang Usaha Rp8.000.000, Perlengkapan Rp2.500.000, Sewa Dibayar di Muka Rp1.000.000, Peralatan Rp12.000.000, Akumulasi Penyusutan Peralatan Rp2.000.000, Utang Usaha Rp4.000.000, Modal Pemilik Rp30.000.000, Pendapatan Jasa Rp8.000.000, Beban Gaji Rp3.500.000, dan Beban Listrik Rp1.000.000. Jika total debit (Rp48.000.000) sama dengan total kredit (Rp48.000.000), maka neraca saldo dinyatakan seimbang.

Menurut Reeve, Warren, dan Duchac (2023), penyusunan neraca saldo seperti ini merupakan langkah penting sebelum melakukan proses penyesuaian, karena membantu akuntan mengidentifikasi akun yang perlu diperbaiki atau disesuaikan, misalnya akun perlengkapan yang telah digunakan sebagian atau sewa dibayar di muka yang masa manfaatnya telah berakhir sebagian. Dengan demikian, neraca saldo sebelum penyesuaian berfungsi sebagai alat verifikasi awal dalam siklus akuntansi yang memastikan keandalan data sebelum dilakukan langkah-langkah lanjutan seperti penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan. Setelah penyesuaian dilakukan, neraca saldo akan diperbarui menjadi neraca saldo setelah penyesuaian, yang kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan akhir periode (Horngren, Harrison, & Oliver, 2022).

5. Pengertian dan Tujuan Kertas Kerja

Menurut Romney dan Steinbart (2022), kertas kerja (*worksheet*) merupakan alat bantu penting dalam proses akuntansi yang berfungsi untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Kertas kerja

menyatukan berbagai informasi keuangan yang berasal dari neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, dan hasil akhir laporan keuangan ke dalam satu format yang sistematis dan terorganisir. Dengan demikian, kertas kerja tidak hanya menjadi sarana penghubung antara pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan, tetapi juga menjadi alat analisis yang membantu akuntan dalam memastikan keakuratan dan kelengkapan data sebelum laporan keuangan diterbitkan.

Fungsi utama kertas kerja adalah untuk menyajikan data akuntansi secara lengkap dan komprehensif, sehingga memudahkan proses analisis terhadap posisi keuangan dan kinerja perusahaan (Weygandt, Kimmel, & Kieso, 2022). Melalui kertas kerja, akuntan dapat dengan mudah menelusuri hubungan antara akun-akun dan dampak penyesuaian terhadap laporan keuangan. Selain itu, kertas kerja berperan dalam mendeteksi dan memperbaiki kesalahan pencatatan atau perhitungan sebelum laporan resmi disusun, sehingga dapat meningkatkan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan.

Menurut Reeve, Warren, dan Duchac (2023), kertas kerja juga berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan, yang merupakan tahap akhir dalam siklus akuntansi. Dengan adanya kertas kerja, proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih efisien karena seluruh informasi sudah tersusun dalam format yang mudah diikuti dan diperiksa. Selain itu, kertas kerja juga berperan sebagai dokumen pendukung audit yang menunjukkan langkah-langkah analisis dan perhitungan yang dilakukan selama proses penyusunan laporan keuangan (Horngren, Harrison, & Oliver, 2022). Dengan demikian, kertas kerja tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknis, tetapi juga sebagai sarana pengendalian internal dan dokumentasi akuntansi yang penting bagi transparansi dan akurasi pelaporan keuangan.

6. Struktur Umum Kertas Kerja

Kertas kerja merupakan alat bantu akuntansi yang disusun dalam bentuk tabel sistematis untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Menurut Romney dan Steinbart (2022), struktur umum kertas kerja biasanya terdiri dari beberapa kolom utama, yaitu neraca saldo, penyesuaian, neraca disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Kolom-kolom ini memungkinkan akuntan untuk melihat seluruh aliran data

keuangan dari saldo awal hingga hasil akhir laporan keuangan dalam satu tampilan yang terorganisir.

Kolom neraca saldo mencerminkan saldo akun yang diambil dari buku besar sebelum dilakukan penyesuaian. Kolom penyesuaian digunakan untuk mencatat jurnal penyesuaian yang diperlukan agar pendapatan dan beban diakui pada periode yang tepat, sesuai prinsip matching dan accrual basis (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2021). Hasil penyesuaian ini kemudian dituangkan ke kolom neraca disesuaikan, yang menunjukkan saldo akun setelah seluruh penyesuaian dilakukan. Selanjutnya, akun-akun yang terkait dengan pendapatan dan beban dipindahkan ke kolom laporan laba rugi untuk menghitung laba atau rugi bersih periode tersebut, sedangkan akun-akun yang berkaitan dengan aset, kewajiban, dan ekuitas dicantumkan dalam kolom neraca.

Sebagai ilustrasi, akun kas dan piutang usaha dicatat pada kolom neraca saldo dan langsung diteruskan ke kolom neraca setelah penyesuaian, karena tidak memerlukan jurnal penyesuaian. Sementara itu, akun perlengkapan mengalami penyesuaian sebesar Rp500.000 untuk mencerminkan penggunaan selama periode, sehingga saldo akhir dicatat pada kolom neraca disesuaikan. Akumulasi penyusutan juga dicatat di kolom penyesuaian dan neraca disesuaikan untuk menunjukkan depresiasi aset tetap. Dengan adanya struktur ini, kertas kerja memungkinkan akuntan untuk melacak perubahan akun, memastikan keseimbangan debit dan kredit, serta mempersiapkan laporan keuangan dengan lebih efisien dan akurat.

F. Proses Penutupan Buku dan Neraca Saldo Setelah Penutupan

Proses penutupan buku merupakan tahap akhir dalam siklus akuntansi sebelum laporan keuangan disusun secara final untuk satu periode akuntansi. Proses ini bertujuan untuk memindahkan saldo akun-akun sementara (seperti pendapatan, beban, dan prive atau penarikan pemilik) ke akun modal atau laba ditahan, sehingga saldo akun tersebut menjadi nol pada awal periode akuntansi berikutnya. Dengan demikian, proses penutupan memungkinkan perusahaan untuk memisahkan hasil kegiatan keuangan tiap periode secara sistematis dan akurat (Warren et al., 2023).

1. Pengertian Penutupan Buku

Penutupan buku, atau *closing entries*, merupakan tahap penting dalam siklus akuntansi yang dilakukan pada akhir periode akuntansi untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kinerja periode tersebut secara akurat. Menurut Reeve, Warren, dan Duchac (2023), penutupan buku adalah proses pemindahan saldo dari akun nominal, seperti akun pendapatan dan beban, ke akun modal atau laba ditahan. Hal ini bertujuan untuk mereset saldo akun sementara menjadi nol, sehingga akun tersebut siap digunakan kembali pada periode berikutnya. Dengan demikian, penutupan buku mencegah pencampuran data keuangan dari periode sebelumnya ke periode berjalan, sehingga laporan laba rugi hanya menampilkan pendapatan dan beban yang terjadi selama periode tersebut.

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2022), penutupan buku juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal yang membantu memastikan keakuratan laporan keuangan. Proses ini melibatkan beberapa langkah, yaitu menutup akun pendapatan ke akun laba ditahan, menutup akun beban ke akun laba ditahan, dan akhirnya menutup akun penarikan atau prive ke akun modal (jika entitas berbentuk perusahaan perseorangan atau kemitraan). Dengan melakukan langkah-langkah ini, saldo akun sementara menjadi nol, sehingga memudahkan akuntan untuk memulai pencatatan transaksi periode baru tanpa gangguan dari sisa saldo sebelumnya.

Proses penutupan buku tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga penting dalam memberikan informasi yang dapat diandalkan bagi manajemen dan pemangku kepentingan. Dengan saldo akun nominal yang telah ditutup, perusahaan dapat menilai kinerja operasional secara lebih tepat, membuat perencanaan keuangan, serta mempersiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, baik PSAK maupun IFRS. Oleh karena itu, penutupan buku menjadi salah satu langkah esensial dalam siklus akuntansi untuk menjaga konsistensi, akurasi, dan relevansi laporan keuangan bagi pengambilan keputusan ekonomi (Horngren, Harrison, & Oliver, 2021).

2. Tujuan Proses Penutupan Buku

Proses penutupan buku memiliki peran yang sangat penting dalam siklus akuntansi karena memastikan laporan keuangan mencerminkan kinerja aktual perusahaan selama satu periode akuntansi.

Menurut Horngren, Harrison, dan Oliver (2022), tujuan utama penutupan buku adalah untuk menentukan laba atau rugi bersih pada akhir periode. Dengan menutup akun pendapatan dan beban, perusahaan dapat menghitung selisih antara total pendapatan dan total beban, yang kemudian diperbarui ke akun modal atau laba ditahan. Hal ini membantu manajemen memahami sejauh mana kinerja operasional selama periode tersebut.

Penutupan buku bertujuan untuk mengosongkan saldo akun sementara, seperti pendapatan, beban, dan penarikan, agar saldo tersebut tidak terbawa ke periode akuntansi berikutnya. Dengan langkah ini, setiap periode baru dimulai dengan akun nominal yang bersih, sehingga laporan laba rugi periode berikutnya hanya mencerminkan transaksi yang terjadi pada periode tersebut. Proses ini juga memperbarui saldo modal atau laba ditahan dengan hasil dari periode berjalan, sehingga neraca perusahaan mencerminkan posisi keuangan yang aktual dan terkini.

Tujuan lain dari penutupan buku adalah mempersiapkan laporan keuangan final yang siap disajikan kepada pemangku kepentingan, seperti laporan laba rugi dan neraca. Dengan akun-akun sementara yang telah ditutup, laporan keuangan menjadi lebih sistematis, terstruktur, dan mudah dianalisis. Hal ini juga memudahkan auditor dalam melakukan pemeriksaan karena data yang disajikan sudah terorganisir berdasarkan periode tertentu, sehingga meminimalkan risiko kesalahan atau manipulasi informasi.

3. Akun yang Ditutup dalam Proses Penutupan

Pada proses penutupan buku, fokus utama adalah akun-akun sementara yang saldonya hanya berlaku untuk satu periode akuntansi tertentu. Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2022), akun-akun sementara ini mencakup akun pendapatan, akun beban, akun prive, dan akun ikhtisar laba/rugi (*Income Summary*). Akun pendapatan meliputi semua sumber pendapatan perusahaan, seperti penjualan barang, pendapatan jasa, atau pendapatan lain yang dihasilkan selama periode berjalan. Sedangkan akun beban mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk operasional, termasuk gaji, sewa, utilitas, beban penyusutan, dan beban lain yang terkait dengan aktivitas usaha.

Akun prive atau penarikan juga termasuk akun sementara, khususnya dalam perusahaan perseorangan atau firma. Akun ini

digunakan untuk mencatat pengambilan dana atau aset oleh pemilik selama periode berjalan. Semua akun sementara ini kemudian ditutup melalui akun ikhtisar laba/rugi, yang berfungsi sebagai akun perantara untuk menghitung laba atau rugi bersih perusahaan. Proses ini memastikan bahwa saldo akun pendapatan dan beban dikompilasikan untuk menghasilkan laba atau rugi bersih yang akan ditransfer ke akun modal atau laba ditahan pada akhir periode.

Akun permanen atau akun riil, seperti kas, piutang, peralatan, utang, dan modal, tidak ditutup karena saldo akun-akun ini tetap dibawa ke periode akuntansi berikutnya. Akun permanen merepresentasikan posisi keuangan yang bersifat akumulatif, sehingga setiap saldo yang ada harus dipertahankan untuk memberikan gambaran lengkap tentang aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan di awal periode baru. Dengan pemisahan yang jelas antara akun sementara dan permanen, proses penutupan buku dapat memastikan laporan keuangan periode berikutnya dimulai dengan saldo akun nominal yang bersih, sementara akun riil tetap mencerminkan kondisi keuangan yang aktual (Reeve, Warren, & Duchac, 2023).

4. Langkah-langkah Proses Penutupan Buku

Proses penutupan buku merupakan tahap penting dalam siklus akuntansi untuk menyiapkan akun sementara pada awal periode akuntansi berikutnya. Menurut Warren, Reeve, dan Duchac (2023), proses ini terdiri dari empat langkah utama. Langkah pertama adalah menutup akun pendapatan ke akun Ikhtisar Laba/Rugi. Semua akun pendapatan yang memiliki saldo kredit dipindahkan ke akun Ikhtisar Laba/Rugi agar laba atau rugi bersih periode berjalan dapat dihitung. Contoh jurnalnya adalah: Pendapatan Jasa didebit dan Ikhtisar Laba/Rugi dikredit sesuai jumlah pendapatan.

Langkah kedua adalah menutup akun beban ke akun Ikhtisar Laba/Rugi. Semua akun beban yang memiliki saldo debit dipindahkan ke akun Ikhtisar Laba/Rugi, sehingga dapat diperoleh selisih antara pendapatan dan beban. Contoh pencatatannya, Ikhtisar Laba/Rugi didebit dan akun-akun beban dikredit sesuai jumlah masing-masing beban, seperti Beban Gaji, Beban Sewa, dan Beban Utilitas. Setelah langkah pertama dan kedua, saldo Ikhtisar Laba/Rugi mencerminkan laba atau rugi bersih periode berjalan.

Langkah ketiga adalah menutup saldo akun Ikhtisar Laba/Rugi ke akun modal atau laba ditahan. Jika perusahaan memperoleh laba, akun Ikhtisar Laba/Rugi didebit dan akun Modal dikredit. Sebaliknya, jika rugi, akun Modal didebit dan Ikhtisar Laba/Rugi dikredit. Proses ini memastikan bahwa laba atau rugi periode berjalan diperhitungkan dalam modal pemilik, sehingga laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan yang akurat.

Langkah keempat adalah menutup akun Prive atau penarikan pemilik ke akun modal. Karena prive mengurangi modal pemilik, saldo akun prive dikredit dan akun modal didebit. Dengan menyelesaikan empat langkah ini, akun sementara seperti pendapatan, beban, dan prive akan memiliki saldo nol, sehingga siap digunakan kembali pada periode akuntansi berikutnya, sementara akun permanen tetap mencerminkan posisi keuangan aktual. Proses penutupan ini sangat penting untuk menjaga keteraturan laporan keuangan dan memudahkan analisis kinerja perusahaan secara periodik.

5. Neraca Saldo Setelah Penutupan

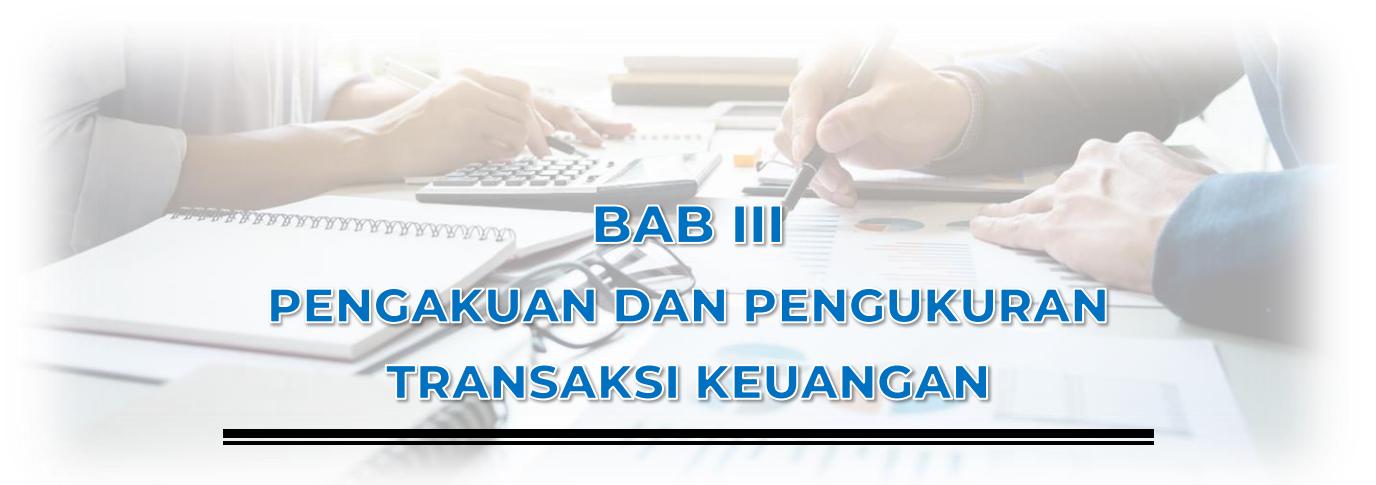
Perusahaan menyusun neraca saldo setelah penutupan (*post-closing trial balance*), yang berfungsi sebagai laporan untuk memastikan keseimbangan akhir antara debit dan kredit serta sebagai titik awal periode akuntansi berikutnya. Menurut Kimmel, Weygandt, dan Kieso (2023), neraca saldo setelah penutupan hanya mencakup akun-akun permanen atau riil, seperti kas, piutang, peralatan, utang, dan modal pemilik. Akun sementara seperti pendapatan, beban, dan prive telah ditutup dan memiliki saldo nol, sehingga tidak lagi dicantumkan dalam neraca saldo ini.

Tujuan utama penyusunan neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memverifikasi bahwa pencatatan seluruh transaksi selama periode berjalan telah dilakukan dengan benar dan bahwa total saldo debit sama dengan total saldo kredit. Neraca ini juga memberikan dasar yang jelas bagi perusahaan untuk memulai pencatatan pada periode akuntansi baru, karena akun permanen yang disajikan mencerminkan posisi keuangan aktual perusahaan pada awal periode. Dengan demikian, neraca saldo setelah penutupan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol internal tetapi juga memudahkan akuntan dalam memastikan keteraturan dan akurasi laporan keuangan.

Sebagai contoh, dalam format neraca saldo setelah penutupan, akun kas dapat menunjukkan saldo Rp50.000.000, piutang usaha Rp20.000.000, dan peralatan Rp15.000.000, sementara akun akumulasi penyusutan sebesar Rp5.000.000 dicatat di sisi kredit. Utang usaha sebesar Rp10.000.000 dan modal pemilik sebesar Rp70.000.000 juga dicatat di sisi kredit, sehingga total debit dan kredit seimbang masing-masing Rp85.000.000. Penyusunan neraca saldo setelah penutupan ini membantu perusahaan memastikan bahwa semua jurnal penutupan telah diterapkan dengan tepat, akun permanen siap digunakan, dan laporan keuangan periode berikutnya dapat disusun secara akurat dan sistematis. Dengan demikian, neraca saldo setelah penutupan menjadi komponen krusial dalam siklus akuntansi dan pengendalian internal perusahaan.

G. Latihan Soal

1. Jelaskan tujuan utama dari proses penyesuaian dalam siklus akuntansi keuangan.
2. Sebutkan dan jelaskan empat langkah dalam proses penutupan buku.
3. Mengapa akun pendapatan dan beban disebut akun sementara?
4. Apa fungsi dari neraca saldo setelah penutupan?
5. Jelaskan perbedaan antara jurnal penyesuaian dan jurnal penutupan!



BAB III

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

TRANSAKSI KEUANGAN

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan konsep pengakuan (*recognition*), memahami konsep pengukuran (*measurement*), memahami dasar pengukuran (*historical cost, fair value, dll.*), memahami kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban, serta memahami studi kasus: penerapan prinsip pengakuan dan pengukuran. Sehingga pembaca dapat mampu menerapkan prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran secara tepat, konsisten, dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku secara nasional maupun internasional.

Materi Pembelajaran

- Konsep Pengakuan (*Recognition*)
- Konsep Pengukuran (*Measurement*)
- Dasar Pengukuran (*Historical Cost, Fair Value, dll.*)
- Kriteria Pengakuan Aset, Liabilitas, Pendapatan, dan Beban
- Studi Kasus: Penerapan Prinsip Pengakuan dan Pengukuran
- Latihan Soal

A. Konsep Pengakuan (*Recognition*)

Pengakuan (*recognition*) merupakan salah satu konsep fundamental dalam akuntansi keuangan yang menentukan kapan suatu transaksi atau peristiwa ekonomi harus dicatat dan diakui dalam laporan keuangan. Menurut Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (IAI, 2023), pengakuan adalah proses memasukkan suatu pos ke dalam laporan keuangan baik sebagai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, atau beban yang memenuhi kriteria tertentu. Dengan kata lain, suatu transaksi baru dapat diakui apabila memenuhi definisi unsur laporan keuangan dan

kriteria pengakuan, yaitu memiliki manfaat ekonomi masa depan yang dapat diukur secara andal.

Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2023) menyatakan bahwa pengakuan adalah langkah awal yang sangat penting karena menentukan apakah dan kapan suatu peristiwa ekonomi akan memengaruhi posisi keuangan atau kinerja perusahaan. Jika pengakuan dilakukan terlalu cepat, laporan keuangan akan menunjukkan informasi yang menyesatkan (*overstatement*). Sebaliknya, jika pengakuan tertunda, maka laporan keuangan akan kurang relevan bagi pengambilan keputusan (*understatement*). Oleh karena itu, pengakuan bukan sekadar tindakan administratif, melainkan hasil dari pertimbangan profesional (*professional judgment*) yang berlandaskan pada prinsip akuntansi dan standar pelaporan yang berlaku, seperti PSAK berbasis IFRS di Indonesia.

1. Tujuan Pengakuan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses menentukan kapan dan bagaimana suatu transaksi atau peristiwa ekonomi dicatat dalam laporan keuangan. Tujuan utama dari pengakuan adalah memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan antarperiode maupun antarentitas, sehingga pengguna laporan dapat membuat keputusan ekonomi yang tepat. Menurut IASB (2023), pengakuan memiliki dua fokus utama: pertama, menentukan waktu yang tepat untuk mencatat transaksi atau peristiwa ekonomi, dan kedua, mengidentifikasi elemen laporan keuangan yang terpengaruh, seperti aset, liabilitas, pendapatan, atau beban. Dengan pengakuan yang tepat, laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya dari suatu entitas, bukan hanya arus kas yang terjadi.

Sebagai ilustrasi, dalam konteks penjualan barang secara kredit, pendapatan diakui pada saat barang diserahkan kepada pelanggan, bukan saat pembayaran diterima. Hal ini sesuai dengan prinsip PSAK 72 (2023) yang mengadopsi IFRS 15 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Pada titik penyerahan, risiko dan manfaat ekonomi atas barang telah berpindah ke pelanggan, sehingga pengakuan pendapatan menjadi relevan dan mencerminkan kinerja ekonomi yang sebenarnya. Begitu juga, biaya yang terkait dengan pendapatan tersebut harus diakui

dalam periode yang sama, mengikuti prinsip matching principle, sehingga laporan laba rugi dapat menunjukkan hasil usaha yang akurat.

Pengakuan yang tepat membantu memastikan konsistensi pencatatan antarperiode, memudahkan perbandingan kinerja keuangan, serta meningkatkan transparansi dan kredibilitas laporan keuangan. Tanpa prosedur pengakuan yang jelas, laporan keuangan dapat menyesatkan pengguna karena tidak mencerminkan substansi ekonomi transaksi yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pengakuan merupakan fondasi penting dalam penyusunan laporan keuangan yang andal dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, baik secara nasional (PSAK) maupun internasional (IFRS).

2. Proses Pengakuan dalam Siklus Akuntansi

Proses pengakuan dalam siklus akuntansi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi dicatat secara akurat dan tercermin dengan benar dalam laporan keuangan. Menurut Horngren, Harrison, dan Oliver (2021), proses ini dimulai dengan identifikasi transaksi, yaitu menentukan apakah suatu peristiwa memiliki dampak finansial terhadap entitas. Tahap berikutnya adalah analisis akuntansi, di mana akuntan menilai bagaimana transaksi tersebut memengaruhi akun-akun dalam laporan keuangan, seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau beban.

Tahap pengakuan dilakukan, yaitu memutuskan apakah transaksi memenuhi kriteria pengakuan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga layak dicatat dalam jurnal. Menurut Reeve, Warren, dan Duchac (2022), hanya transaksi yang relevan dan dapat diukur secara andal yang boleh diakui. Selanjutnya, tahap pencatatan memasukkan transaksi yang telah diakui ke dalam sistem akuntansi melalui jurnal umum atau jurnal khusus, menggunakan prinsip pencatatan berpasangan (*double-entry system*) agar keseimbangan debit dan kredit tetap terjaga.

Tahap terakhir adalah pelaporan, di mana transaksi yang telah dicatat ditampilkan dalam laporan keuangan akhir periode, seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Sebagai contoh, ketika perusahaan membeli peralatan senilai Rp50.000.000 secara tunai, transaksi ini pertama-tama diidentifikasi sebagai pembelian aset. Analisis akuntansi menunjukkan bahwa akun peralatan bertambah sementara kas berkurang. Transaksi kemudian diakui dan dicatat dalam

jurnal sebagai debit peralatan sebesar Rp50.000.000 dan kredit kas sebesar Rp50.000.000. Akhirnya, saldo peralatan yang baru tercermin dalam laporan posisi keuangan, menunjukkan peningkatan aset perusahaan.

3. Kriteria Pengakuan Menurut Kerangka Konseptual IAI (2023)

Menurut Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan yang diterbitkan oleh IAI (2023), suatu transaksi atau peristiwa hanya dapat diakui dalam laporan keuangan jika memenuhi dua kriteria utama, yaitu kemungkinan manfaat ekonomi masa depan dan kemampuan untuk diukur secara andal. Kriteria pertama, kemungkinan manfaat ekonomi masa depan, menekankan bahwa suatu pos hanya boleh dicatat apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir masuk atau keluar dari entitas. Contohnya, pembelian mesin untuk kegiatan produksi memenuhi kriteria ini karena mesin tersebut akan memberikan kontribusi ekonomis dalam bentuk peningkatan produksi atau efisiensi. Sebaliknya, janji atau rencana investasi yang belum pasti tidak memenuhi kriteria ini, sehingga tidak diakui sebagai aset atau kewajiban.

Kriteria kedua, dapat diukur secara andal, menuntut agar nilai transaksi dapat ditentukan dengan tingkat keandalan yang memadai. Hal ini mencakup kemampuan untuk menilai harga perolehan, nilai pasar, atau estimasi objektif lainnya yang dapat diverifikasi secara independen. Sebagai contoh, pembelian persediaan dengan faktur resmi dapat diukur secara andal karena jumlah yang harus dibayar tercatat secara jelas. Jika suatu transaksi tidak dapat diukur secara andal, pengakuan dalam laporan keuangan tidak diperbolehkan meskipun manfaat ekonominya potensial.

Apabila salah satu dari kedua kriteria tersebut tidak terpenuhi, transaksi tidak dicatat dalam laporan keuangan, namun tetap dapat diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk menjaga transparansi dan memberikan informasi relevan bagi pengguna laporan. Misalnya, kontrak kontinjenji atau komitmen masa depan dapat dijelaskan dalam CaLK tanpa dicatat sebagai aset atau kewajiban, sehingga pembaca laporan tetap memperoleh informasi yang berguna tanpa mengorbankan keandalan laporan. Dengan demikian, pengakuan transaksi berdasarkan kerangka konseptual IAI menekankan keseimbangan antara relevansi informasi dan keandalan, sehingga laporan keuangan mampu mencerminkan kondisi ekonomi entitas secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Jenis-Jenis Pengakuan dalam Akuntansi

Pada akuntansi keuangan, pengakuan transaksi dan peristiwa ekonomi dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu pengakuan awal (*initial recognition*) dan pengakuan selanjutnya (*subsequent recognition*). Menurut Reeve, Warren, dan Duchac (2023), pengakuan awal merupakan pencatatan pertama kali suatu pos dalam laporan keuangan. Pada tahap ini, nilai transaksi dicatat sesuai dengan harga perolehan atau nilai wajar pada saat terjadinya transaksi. Contohnya, ketika perusahaan membeli kendaraan operasional, nilai perolehan kendaraan tersebut diakui sebagai aset tetap dalam laporan posisi keuangan. Pengakuan awal memastikan bahwa seluruh transaksi yang memenuhi kriteria pengakuan dicatat secara tepat waktu dan memberikan gambaran yang akurat mengenai posisi ekonomi entitas pada saat transaksi terjadi (IAI, 2023).

Pengakuan selanjutnya adalah penyesuaian terhadap nilai yang telah dicatat sebelumnya untuk mencerminkan perubahan kondisi ekonomi atau konsumsi manfaat ekonomis aset dan liabilitas. Contoh yang umum adalah penyusutan aset tetap, di mana nilai aset yang telah diakui sebelumnya dikurangi secara sistematis setiap periode untuk mencatat penurunan manfaat ekonomisnya. Hal ini memastikan bahwa laporan keuangan tetap relevan dan mencerminkan kondisi keuangan yang aktual pada setiap akhir periode akuntansi (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022).

Perbedaan antara pengakuan awal dan selanjutnya terletak pada tujuan dan waktu pencatatan: pengakuan awal fokus pada pencatatan pertama transaksi sesuai nilai perolehan, sedangkan pengakuan selanjutnya berfokus pada penyesuaian nilai agar laporan keuangan tetap akurat dan dapat diandalkan. Kombinasi kedua jenis pengakuan ini memungkinkan laporan keuangan menyajikan informasi yang lengkap, relevan, dan andal bagi para pemangku kepentingan, mulai dari manajemen internal hingga investor dan pihak eksternal lainnya. Dengan demikian, pengakuan awal dan selanjutnya menjadi landasan penting dalam siklus akuntansi modern untuk menjaga integritas dan ketepatan laporan keuangan.

5. Contoh Penerapan Konsep Pengakuan

Contoh penerapan konsep pengakuan dapat dilihat pada transaksi penjualan barang oleh PT Artha Sejahtera. Pada 15 Juni 2025, perusahaan menjual barang senilai Rp100.000.000 secara kredit kepada

pelanggan. Barang telah diserahkan pada tanggal yang sama, namun pembayaran baru diterima satu bulan kemudian. Berdasarkan PSAK 72 (2023) mengenai pengakuan pendapatan, pendapatan hanya diakui ketika entitas telah memenuhi kewajiban pelaksanaan, yaitu saat barang atau jasa diserahkan kepada pelanggan. Oleh karena itu, meskipun kas belum diterima, pendapatan dari transaksi ini dicatat pada tanggal 15 Juni 2025.

Pada praktik akuntansi, pencatatan transaksi ini dilakukan dengan jurnal berikut: Piutang Usaha sebesar Rp100.000.000 didebitkan, sedangkan Pendapatan Penjualan sebesar Rp100.000.000 dikreditkan. Jurnal ini mencerminkan prinsip akuntansi akrual, di mana pendapatan dan beban diakui pada saat transaksi terjadi, bukan ketika kas diterima atau dibayarkan. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sesungguhnya pada periode tersebut, bukan sekadar arus kas.

Penerapan konsep pengakuan ini juga penting untuk memastikan keandalan dan relevansi laporan keuangan. Akuntan dapat melacak piutang yang timbul dan memastikan bahwa pendapatan yang diakui benar-benar berasal dari transaksi yang telah memenuhi kriteria pengakuan. Dengan demikian, pihak manajemen, investor, dan pemangku kepentingan lain memperoleh informasi yang akurat mengenai performa perusahaan dalam periode berjalan.

B. Konsep Pengukuran (*Measurement*)

Pengukuran (*measurement*) dalam akuntansi keuangan merupakan proses penting untuk menentukan nilai moneter yang harus diakui dan disajikan dalam laporan keuangan atas aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Menurut *International Accounting Standards Board* (IASB, 2023) dalam *Conceptual Framework for Financial Reporting*, pengukuran adalah “proses menentukan jumlah moneter yang akan diakui dalam laporan keuangan dengan cara memilih dasar pengukuran yang sesuai.” Artinya, pengukuran adalah tahap kuantifikasi yang memberikan nilai ekonomi terhadap elemen-elemen laporan keuangan sehingga informasi keuangan dapat dibandingkan, relevan, dan andal.

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2022), pengukuran berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan

peristiwa ekonomi yang terjadi dapat disajikan dalam nilai yang mencerminkan kondisi ekonomi aktual entitas. Proses ini tidak hanya mencakup pencatatan nilai historis dari suatu transaksi, tetapi juga mempertimbangkan nilai kini (*present value*), nilai wajar (*fair value*), dan nilai yang dapat direalisasikan (*realizable value*), tergantung pada kebijakan dan standar akuntansi yang berlaku.

1. Tujuan Pengukuran dalam Akuntansi

Tujuan pengukuran dalam akuntansi adalah untuk menghasilkan informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh berbagai pemangku kepentingan. Menurut IASB (2023), pengukuran bertujuan agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan relevan, artinya mampu memberikan nilai prediktif atau konfirmatori bagi pengguna laporan dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja entitas. Informasi yang relevan memungkinkan manajemen, investor, kreditur, dan pihak lain membuat keputusan yang lebih tepat terkait investasi, pembiayaan, dan kegiatan operasional perusahaan.

Pengukuran akuntansi juga menekankan pada keandalan informasi. Warren, Reeve, dan Duchac (2023) menjelaskan bahwa informasi yang andal harus bebas dari bias, lengkap, dan dapat mencerminkan keadaan ekonomi yang sebenarnya. Keandalan ini penting agar pengguna laporan keuangan dapat mempercayai data yang disajikan dan menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Sebagai contoh, nilai aset yang diukur secara akurat akan mencerminkan potensi manfaat ekonomi yang sebenarnya, sedangkan estimasi yang tidak tepat dapat menyesatkan keputusan bisnis.

Tujuan pengukuran juga mencakup komparabilitas. Informasi keuangan harus dapat dibandingkan, baik antarperiode dalam entitas yang sama maupun antarentitas yang berbeda, sehingga kinerja dan posisi keuangan dapat dievaluasi secara objektif. Misalnya, metode pengukuran aset yang konsisten dari periode ke periode memungkinkan manajemen dan investor untuk menganalisis tren pertumbuhan aset atau laba dengan lebih jelas.

2. Tahapan dalam Proses Pengukuran

Pengukuran dalam akuntansi keuangan merupakan proses penting untuk menyajikan informasi keuangan yang akurat dan dapat diandalkan. Menurut Suwardjono (2022), proses pengukuran dilakukan

melalui empat tahapan utama yang saling terkait dan sistematis. Tahap pertama adalah identifikasi, di mana entitas menentukan elemen laporan keuangan yang akan diukur, seperti aset, liabilitas, pendapatan, atau beban. Contohnya, perusahaan perlu mengidentifikasi aset tetap seperti mesin, gedung, atau kendaraan untuk dicatat dan diukur dalam laporan keuangan. Tahap kedua adalah pemilihan dasar pengukuran, yakni menentukan metode atau prinsip yang digunakan untuk menilai elemen yang telah diidentifikasi. Dasar pengukuran ini bisa berupa harga perolehan historis (*historical cost*) atau nilai wajar (*fair value*), sesuai dengan karakteristik aset dan standar akuntansi yang berlaku. Misalnya, tanah biasanya diukur berdasarkan harga perolehannya karena cenderung stabil nilainya.

Tahap ketiga adalah penentuan nilai, yaitu menghitung nilai moneter elemen laporan keuangan berdasarkan dasar pengukuran yang telah dipilih. Contohnya, penyusutan peralatan dihitung menggunakan harga perolehan dan estimasi umur manfaat aset untuk mencerminkan penurunan nilai ekonomisnya. Penentuan nilai ini memastikan bahwa setiap angka yang dicatat memiliki dasar yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahap terakhir adalah penyajian, di mana nilai hasil pengukuran ditampilkan dalam laporan keuangan secara sistematis sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga informasi yang disajikan relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Misalnya, nilai buku aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan dicantumkan di neraca untuk mencerminkan kondisi ekonomi aktual perusahaan.

3. Jenis-Jenis Pengukuran

Pada praktik akuntansi keuangan, pengukuran aset dan liabilitas dapat dilakukan dengan berbagai metode untuk memastikan laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Menurut IFRS Conceptual Framework (IASB, 2023) dan PSAK (IAI, 2024), terdapat beberapa jenis pengukuran utama yang umum digunakan. Pertama, *Historical Cost* (Biaya Historis) merupakan metode tradisional yang mencatat aset sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut atau liabilitas sebesar jumlah kas yang diterima ketika diterbitkan. Misalnya, mesin yang dibeli seharga Rp200.000.000 dicatat berdasarkan harga perolehannya. Keunggulan metode ini adalah objektif, mudah diverifikasi, dan stabil,

namun kelemahannya adalah tidak mencerminkan nilai pasar terkini, terutama dalam kondisi inflasi tinggi.

Kedua, *Current Cost* (Biaya Kini) menggambarkan jumlah kas atau setara kas yang dibutuhkan untuk memperoleh kembali aset yang sama pada saat ini. Contohnya, jika harga pasar mesin yang sama saat ini Rp250.000.000, maka nilai kini aset tersebut adalah Rp250.000.000. Metode ini lebih sesuai untuk pelaporan aset dalam kondisi ekonomi yang berubah cepat.

Ketiga, *Fair Value* (Nilai Wajar) menurut IFRS 13 adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau dibayar untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Contohnya, saham yang dimiliki perusahaan diukur dengan harga pasar terakhir di bursa efek. Nilai wajar relevan dan mencerminkan kondisi pasar terkini, tetapi dapat menimbulkan volatilitas dan memerlukan pertimbangan profesional yang kompleks.

Terdapat *Realizable Value* (Nilai yang Dapat Direalisasikan), yang menunjukkan jumlah kas yang dapat diperoleh dari penjualan aset setelah dikurangi biaya penjualan, contohnya persediaan barang dagang diukur berdasarkan nilai jual bersih. Terakhir, *Present Value* (Nilai Kini) digunakan untuk menilai arus kas masuk atau keluar di masa depan yang didiskontokan dengan tingkat bunga yang relevan, misalnya piutang jangka panjang diukur dengan nilai kini penerimaan kas yang diharapkan.

4. Keterkaitan antara Pengakuan dan Pengukuran

Pada akuntansi keuangan, pengakuan (*recognition*) dan pengukuran (*measurement*) memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling melengkapi. Pengakuan menentukan apa yang harus dicatat dalam laporan keuangan, sedangkan pengukuran menentukan berapa nilai yang dicatat. Menurut IAI (2024), suatu elemen laporan keuangan, seperti aset, liabilitas, pendapatan, atau beban, hanya dapat diukur apabila telah memenuhi kriteria pengakuan, yaitu memiliki kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan dan nilai yang dapat diukur secara andal. Dengan kata lain, pengakuan menjadi dasar bagi pengukuran, karena tanpa pengakuan, suatu transaksi atau peristiwa tidak memiliki status resmi untuk dicatat, sehingga tidak dapat diberi nilai dalam laporan keuangan.

Proses pengukuran sendiri bersifat berkelanjutan dan tidak berhenti pada pencatatan awal. Setelah transaksi diidentifikasi dan

diakui, akuntan memilih dasar pengukuran yang sesuai, seperti biaya historis, nilai wajar, atau nilai kini, sesuai standar akuntansi yang berlaku (PSAK/IFRS). Selanjutnya, nilai moneter transaksi dihitung berdasarkan dasar pengukuran tersebut dan dicatat dalam jurnal serta laporan keuangan. Pengukuran juga dilakukan secara berkala melalui penyesuaian, revaluasi, atau depresiasi, untuk memastikan bahwa nilai yang disajikan tetap relevan dan andal bagi para pengguna laporan keuangan.

Sebagai ilustrasi, ketika perusahaan membeli mesin seharga Rp200.000.000, mesin tersebut pertama-tama diakui sebagai aset tetap karena memenuhi kriteria pengakuan. Nilai perolehan sebesar Rp200.000.000 kemudian diukur dan dicatat dalam laporan keuangan. Pada periode berikutnya, nilai aset dapat disesuaikan melalui penyusutan untuk mencerminkan penurunan manfaat ekonominya. Dengan demikian, pengakuan dan pengukuran bekerja secara sinergis: pengakuan menentukan eksistensi elemen dalam laporan keuangan, sedangkan pengukuran menentukan jumlah yang dicatat dan bagaimana nilainya diperbarui dari waktu ke waktu, sehingga laporan keuangan tetap akurat, relevan, dan dapat diandalkan.

C. Dasar Pengukuran (Historical Cost, Fair Value, dll.)

Dasar pengukuran dalam akuntansi keuangan merupakan pedoman utama yang digunakan untuk menentukan nilai moneter dari elemen-elemen laporan keuangan seperti aset, liabilitas, pendapatan, dan beban. Pemilihan dasar pengukuran sangat memengaruhi tingkat relevansi, keandalan, dan keterbandingan laporan keuangan antarperiode maupun antarsatuan usaha. Menurut *International Accounting Standards Board* (IASB, 2023), dasar pengukuran (*measurement bases*) adalah konsep yang menjelaskan “cara menentukan nilai moneter suatu elemen laporan keuangan pada saat pengakuan awal dan setelahnya.” Dalam praktiknya, terdapat berbagai dasar pengukuran yang dapat digunakan, tergantung pada jenis transaksi dan tujuan pelaporan keuangan. Beberapa dasar pengukuran utama yang umum diterapkan antara lain: biaya historis (*historical cost*), biaya kini (*current cost*), nilai wajar (*fair value*), nilai realisasi (*realizable value*), dan nilai kini (*present value*).

1. *Historical Cost* (Biaya Historis)

Historical Cost (Biaya Historis) merupakan dasar pengukuran tradisional yang paling banyak digunakan dalam akuntansi keuangan. Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2022), biaya historis adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset pada saat transaksi terjadi, atau jumlah kas yang diterima ketika suatu kewajiban diterbitkan. Dengan kata lain, biaya historis mencatat nilai aset atau kewajiban berdasarkan transaksi aktual, bukan nilai pasar saat ini. Karakteristik utama dari biaya historis adalah nilainya dapat diverifikasi karena didukung oleh bukti transaksi seperti nota, faktur, atau kuitansi, serta nilainya tidak berubah akibat fluktuasi harga pasar setelah tanggal perolehan, kecuali ada depresiasi, amortisasi, atau penurunan nilai aset.

Biaya historis memiliki beberapa keunggulan. Dari sisi objektivitas, nilai aset mudah diverifikasi dan tidak bergantung pada estimasi, sehingga mengurangi risiko bias dalam pelaporan keuangan. Dari sisi stabilitas, nilai aset tetap konsisten dari waktu ke waktu, memberikan dasar yang stabil untuk penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, metode ini sangat cocok untuk aset berumur panjang seperti gedung dan mesin. Namun, biaya historis juga memiliki kelemahan. Nilainya tidak mencerminkan kondisi ekonomi terkini, sehingga kurang relevan bagi investor yang membutuhkan informasi nilai pasar aset. Selain itu, dalam kondisi inflasi tinggi, laporan keuangan berbasis biaya historis bisa menyesatkan karena nilai buku tidak mencerminkan daya beli atau nilai penggantian aset saat ini.

Sebagai contoh, PT Sinar Terang membeli mesin senilai Rp300.000.000 pada tahun 2022. Mesin tersebut dicatat sebesar harga perolehannya dan disusutkan setiap tahun sesuai umur manfaat. Meskipun nilai pasar mesin meningkat menjadi Rp350.000.000 pada tahun 2025, laporan keuangan tetap menggunakan nilai buku berdasarkan biaya historis dikurangi akumulasi penyusutan. Dengan demikian, metode biaya historis memberikan dasar yang objektif dan stabil untuk pengukuran aset, meskipun informasi nilai pasar saat ini tidak tercermin.

2. *Current Cost* (Biaya Kini)

Current Cost (Biaya Kini) merupakan salah satu dasar pengukuran dalam akuntansi yang menekankan pada nilai penggantian

aset pada tanggal pelaporan. Menurut Suwardjono (2022), *current cost* adalah jumlah kas atau setara kas yang harus dikeluarkan jika entitas ingin memperoleh kembali aset yang sama pada saat laporan keuangan disusun. Dengan kata lain, pengukuran ini mencerminkan harga penggantian terkini (*replacement cost*) dari aset yang dimiliki, sehingga nilai yang disajikan lebih relevan dengan kondisi ekonomi saat ini dibandingkan biaya historis.

Keunggulan utama dari *current cost* adalah relevansi informasi bagi pengambilan keputusan. Nilai aset yang diukur berdasarkan harga penggantian terkini memungkinkan manajemen untuk menilai efisiensi penggunaan aset, membuat perencanaan investasi, dan memperkirakan biaya penggantian di masa depan. Selain itu, investor dan kreditor mendapatkan informasi yang lebih realistik mengenai nilai aset perusahaan dalam kondisi pasar saat ini. Namun, metode ini memiliki beberapa kelemahan. Menentukan harga penggantian yang akurat bisa menjadi sulit, terutama jika pasar untuk aset tertentu tidak likuid atau harga sangat fluktuatif. Selain itu, pengumpulan data pasar untuk penilaian aset bisa memerlukan sumber daya tambahan dan biaya tinggi.

Contoh penerapan *current cost* dapat dilihat pada mesin produksi. Misalnya, sebuah mesin yang dibeli pada tahun 2022 seharga Rp300.000.000, jika pada tahun 2025 harga pasar mesin yang sama meningkat menjadi Rp350.000.000, nilai mesin dalam laporan keuangan dapat disajikan sebesar Rp350.000.000 apabila entitas menggunakan dasar *current cost*. Dengan demikian, laporan keuangan tidak hanya mencerminkan biaya perolehan historis, tetapi juga kondisi ekonomi saat ini dan potensi biaya penggantian aset.

3. *Fair Value* (Nilai Wajar)

Fair Value (Nilai Wajar) adalah konsep pengukuran aset dan liabilitas yang menekankan pada nilai pasar terkini. Menurut IFRS 13 Fair Value Measurement (IASB, 2023), nilai wajar didefinisikan sebagai “harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.” Dengan kata lain, pengukuran ini mencerminkan harga yang wajar berdasarkan kondisi pasar pada saat tertentu, bukan hanya nilai historis atau biaya perolehan. Nilai wajar menggunakan data observasi pasar sebagai dasar, dan bersifat dinamis

mengikuti perubahan kondisi ekonomi, sehingga memberikan informasi yang lebih relevan bagi pengambilan keputusan.

Pada praktiknya, IFRS 13 menetapkan tiga pendekatan utama untuk menilai nilai wajar. Market Approach mengacu pada harga pasar yang tersedia untuk aset atau liabilitas yang identik. *Income Approach* menggunakan nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan dari aset. Sedangkan *Cost Approach* mempertimbangkan biaya penggantian aset dikurangi penyusutan yang terjadi. Selain itu, hierarki nilai wajar dibagi menjadi tiga level: Level 1 menggunakan harga kuotasi pasar aktif untuk aset identik, Level 2 menggunakan input yang dapat diobservasi selain harga Level 1, dan Level 3 menggunakan asumsi manajemen ketika input pasar tidak tersedia.

Keunggulan nilai wajar terletak pada relevansi dan transparansinya. Informasi yang disajikan mencerminkan kondisi pasar terkini, meningkatkan kepercayaan investor terhadap laporan keuangan. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan, antara lain dapat menimbulkan volatilitas dalam laporan keuangan dan membutuhkan pengungkapan tambahan yang kompleks.

4. *Realizable Value* (Nilai yang Dapat Direalisasikan)

Realizable Value (Nilai yang Dapat Direalisasikan) adalah konsep pengukuran yang menekankan pada jumlah kas yang diharapkan dapat diperoleh dari penjualan suatu aset setelah dikurangi biaya penjualan, atau jumlah kas yang diperlukan untuk melunasi kewajiban terkait. Menurut Warren, Reeve, dan Duchac (2023), pengukuran ini bertujuan memberikan informasi yang lebih realistik mengenai nilai ekonomis aset bagi perusahaan, sehingga laporan keuangan mencerminkan potensi kas yang benar-benar dapat direalisasikan oleh entitas. Konsep ini sering digunakan untuk aset jangka pendek, terutama persediaan dan piutang usaha, karena relevansinya terhadap likuiditas perusahaan.

Kelebihan dari nilai yang dapat direalisasikan adalah relevansinya, karena menunjukkan jumlah kas yang sebenarnya dapat diperoleh atau dibayarkan, sehingga memudahkan manajemen dan investor dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pengukuran ini lebih dapat diandalkan untuk aset yang cepat dipasarkan, seperti persediaan barang dagang. Namun, konsep ini juga memiliki kelemahan, terutama dalam hal estimasi. Untuk aset yang tidak likuid atau memiliki pasar

yang terbatas, perhitungan nilai realisasi bisa sulit dan kurang akurat. Selain itu, jika biaya penjualan sulit diprediksi, nilai realisasi mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan nilai pasar aset tersebut.

Contoh penerapan nilai yang dapat direalisasikan dapat dilihat pada persediaan barang dagang. Misalnya, perusahaan memiliki persediaan senilai Rp100.000.000, namun harga pasar menurun sehingga nilai jual bersih yang dapat diperoleh hanya Rp90.000.000. Berdasarkan PSAK 14 tentang Persediaan (IAI, 2024), persediaan tersebut harus dicatat dalam laporan keuangan sebesar nilai realisasi bersih, yaitu Rp90.000.000, bukan harga perolehan awal. Dengan demikian, pengukuran ini memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang realistik dan relevan mengenai potensi kas dari aset yang dimiliki, sekaligus meminimalkan risiko pencatatan aset melebihi nilai yang dapat direalisasikan.

5. **Present Value (Nilai Kini)**

Present Value (Nilai Kini) adalah konsep pengukuran yang digunakan untuk menentukan nilai saat ini dari arus kas masa depan dengan memperhitungkan tingkat bunga atau diskonto yang relevan. Menurut Horngren, Sundem, Elliott, dan Philbrick (2023), pendekatan nilai kini mempertimbangkan konsep *time value of money*, yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih tinggi dibandingkan jumlah yang sama di masa depan karena potensi pendapatan bunga atau investasi. Dengan demikian, pengukuran berbasis nilai kini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang nilai ekonomi riil aset atau kewajiban jangka panjang dibandingkan hanya menggunakan nilai nominal atau biaya historis.

Secara matematis, nilai kini dihitung dengan rumus:

$$PV = \frac{FV}{(1 + r)^n}$$

di mana PV adalah nilai kini, FV adalah nilai masa depan, r adalah tingkat diskonto per periode, dan n adalah jumlah periode hingga arus kas diterima atau dibayarkan. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk menilai aset atau kewajiban secara realistik, terutama yang memiliki jangka waktu panjang atau arus kas yang tersebar di masa depan.

Contoh penerapan nilai kini dapat dilihat pada piutang jangka panjang. Misalnya, PT Maju Jaya memiliki piutang senilai Rp1.000.000.000 yang akan diterima dalam tiga tahun, dengan tingkat bunga pasar 8%. Dengan menghitung nilai kini, piutang dicatat sebesar:

$$PV = \frac{1.000.000.000}{(1 + 0,08)^3} + Rp. 793.832.000$$

Dengan demikian, laporan keuangan perusahaan mencerminkan nilai ekonomi saat ini dari piutang tersebut, bukan hanya nilai nominal yang akan diterima di masa depan. Pendekatan ini penting untuk aset jangka panjang, obligasi, sewa, dan kewajiban yang memiliki arus kas berbeda-beda, karena memberikan informasi yang lebih relevan dan andal bagi pengguna laporan keuangan, termasuk investor dan kreditur, dalam pengambilan keputusan ekonomi.

D. Kriteria Pengakuan Aset, Liabilitas, Pendapatan, dan Beban

Pengakuan (*recognition*) merupakan tahap penting dalam proses akuntansi, karena menentukan kapan suatu elemen ekonomi diakui dan dicatat dalam laporan keuangan. Menurut *Conceptual Framework for Financial Reporting* (IASB, 2023) dan PSAK terbaru (IAI, 2024), pengakuan adalah “proses pencantuman suatu pos dalam laporan keuangan baik dalam laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi apabila pos tersebut memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu elemen.” Pengakuan dilakukan agar laporan keuangan menggambarkan secara andal posisi keuangan, kinerja, serta arus kas suatu entitas. Namun, tidak semua kejadian ekonomi dapat langsung diakui. Sebuah pos hanya dapat diakui jika:

- Kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke atau keluar dari entitas, dan
- Pos tersebut memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur secara andal.

Berikut pembahasan lebih lanjut tentang kriteria pengakuan untuk setiap elemen utama dalam laporan keuangan, yaitu aset, liabilitas, pendapatan, dan beban.

1. Pengakuan Aset

Pengakuan Aset merupakan langkah penting dalam akuntansi yang memastikan bahwa sumber daya ekonomi entitas dicatat secara tepat dalam laporan keuangan. Menurut IASB (2023), aset didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan mengalir. Sedangkan menurut PSAK (IAI, 2024), pengakuan aset menekankan bahwa pencatatan tidak hanya didasarkan pada kepemilikan secara hukum, tetapi pada kemampuan entitas untuk mengendalikan sumber daya tersebut. Dengan demikian, suatu aset bisa diakui meskipun entitas tidak memiliki hak hukum penuh, asalkan manfaat ekonominya dapat dikontrol.

Aset hanya boleh diakui dalam laporan posisi keuangan jika memenuhi dua kriteria utama. Pertama, ada kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Kedua, nilai aset harus dapat diukur secara andal. Jika salah satu dari kriteria ini tidak terpenuhi misalnya, manfaat ekonominya tidak pasti atau nilai aset sulit diestimasi maka aset tidak boleh dicatat, tetapi informasi mengenai sumber daya tersebut dapat diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk menjaga transparansi dan relevansi laporan.

Contoh praktis pengakuan aset dapat dilihat pada pembelian mesin produksi seharga Rp500.000.000. Mesin ini diakui sebagai aset tetap karena diperkirakan akan memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang dan nilainya dapat diukur secara objektif. Jurnal akuntansinya dicatat sebagai berikut: debit akun Aset Tetap, Mesin sebesar Rp500.000.000 dan kredit akun Kas sebesar Rp500.000.000 pada tanggal pembelian. Sebaliknya, hak paten yang belum disahkan tidak dapat diakui sebagai aset, karena belum memberikan kepastian manfaat ekonomi bagi entitas.

2. Pengakuan Liabilitas

Pengakuan Liabilitas adalah proses pencatatan kewajiban entitas dalam laporan keuangan untuk mencerminkan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Menurut IASB (2023), liabilitas didefinisikan sebagai kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi dari entitas. Sementara itu, PSAK 1 (IAI, 2024) menekankan

bahwa liabilitas tidak hanya mencakup kewajiban hukum formal, tetapi juga kewajiban konstruktif, seperti janji moral atau kebiasaan bisnis yang menimbulkan ekspektasi pihak lain bahwa entitas akan memenuhi tanggung jawabnya. Hal ini menegaskan bahwa pengakuan liabilitas tidak semata-mata bergantung pada kontrak tertulis, tetapi juga pada ekspektasi realistik dari pemangku kepentingan.

Suatu liabilitas diakui dalam laporan keuangan apabila memenuhi tiga kriteria utama. Pertama, entitas harus memiliki kewajiban kini, baik secara hukum maupun konstruktif, yang muncul akibat peristiwa masa lalu. Kedua, penyelesaian kewajiban tersebut kemungkinan besar akan mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi, seperti kas atau aset lain, dari entitas. Ketiga, jumlah liabilitas harus dapat diukur secara andal sehingga pencatatan dalam laporan keuangan dapat dilakukan dengan tepat. Jika salah satu dari kriteria ini tidak terpenuhi, liabilitas tidak boleh diakui, namun informasi mengenai potensi kewajiban dapat diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk menjaga transparansi dan relevansi.

Sebagai contoh, utang usaha yang timbul akibat pembelian bahan baku secara kredit diakui sebagai liabilitas karena menimbulkan kewajiban pembayaran di masa depan. Sebaliknya, rencana restrukturisasi yang belum memiliki keputusan formal tidak dapat diakui sebagai liabilitas, karena kewajiban kini belum ada. Contoh jurnal pengakuan liabilitas adalah: debit akun Persediaan sebesar Rp200.000.000 dan kredit akun Utang Usaha sebesar Rp200.000.000 pada tanggal 10 Januari 2025, yang mencerminkan peningkatan aset sekaligus pengakuan kewajiban yang terkait.

3. Pengakuan Pendapatan

Pengakuan Pendapatan adalah proses pencatatan pendapatan dalam laporan keuangan untuk mencerminkan imbalan yang diperoleh entitas dari pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan. Menurut PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (IAI, 2024), yang mengadopsi IFRS 15, pendapatan didefinisikan sebagai imbalan yang diterima atau akan diterima oleh entitas atas pengalihan barang atau jasa dalam kegiatan normal usaha. Pendapatan diakui bukan sekadar saat kas diterima, melainkan ketika kendali atas barang atau jasa telah berpindah kepada pelanggan, sehingga laporan keuangan mencerminkan kinerja ekonomi yang sesungguhnya.

PSAK 72 menetapkan lima langkah kunci dalam pengakuan pendapatan. Pertama, identifikasi kontrak dengan pelanggan untuk memastikan ada perjanjian yang sah dan mengikat. Kedua, identifikasi kewajiban pelaksanaan, yaitu janji entitas untuk menyerahkan barang atau jasa tertentu. Ketiga, menentukan harga transaksi yang menjadi imbalan atas pengalihan barang atau jasa. Keempat, mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan berdasarkan nilai relatifnya. Kelima, pendapatan diakui ketika atau seiring entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan, yaitu saat barang atau jasa diserahkan dan kontrol berpindah kepada pelanggan.

Sebagai ilustrasi, PT Maju Jaya menjual barang senilai Rp50.000.000 pada 5 Maret 2025, dengan pengiriman pada 10 Maret 2025. Meskipun pembayaran diterima kemudian, pendapatan diakui pada tanggal 10 Maret 2025, saat barang diserahkan dan kendali berpindah ke pelanggan. Hal ini memastikan pencatatan pendapatan sesuai prinsip akuntansi akrual dan mencerminkan manfaat ekonomi yang telah diperoleh perusahaan.

Contoh jurnal pengakuan pendapatan pada tanggal 10 Maret 2025 adalah: debit akun Piutang Usaha sebesar Rp50.000.000 dan kredit akun Pendapatan Penjualan sebesar Rp50.000.000. Dengan penerapan prinsip ini, laporan keuangan memberikan informasi yang relevan, andal, dan mencerminkan kinerja ekonomi perusahaan secara akurat, sehingga mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya (IAI, 2024).

4. Pengakuan Beban

Pengakuan Beban merupakan proses pencatatan beban dalam laporan keuangan untuk mencerminkan penurunan manfaat ekonomi yang dialami entitas selama periode akuntansi. Menurut IASB (2023), beban adalah arus keluar sumber daya atau penurunan aset yang menyebabkan penurunan ekuitas, tidak termasuk distribusi kepada pemilik. Dalam konteks PSAK 1 (IAI, 2024), beban diakui untuk menyesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan pada periode yang sama, sesuai dengan prinsip *matching principle*, sehingga laporan laba rugi dapat menunjukkan kinerja ekonomi yang akurat.

Kriteria pengakuan beban menekankan dua aspek utama. Pertama, terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan, baik melalui penggunaan aset maupun timbulnya liabilitas. Kedua, penurunan

tersebut harus dapat diukur secara andal. Tanpa terpenuhinya kedua kriteria ini, beban tidak boleh diakui, meskipun dapat diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk tujuan transparansi.

Pada praktiknya, pengakuan beban dapat dilakukan melalui tiga pendekatan. *Direct association* diterapkan ketika beban terkait langsung dengan pendapatan, contohnya harga pokok penjualan. *Systematic allocation* dilakukan dengan cara alokasi sistematis sepanjang masa manfaat, misalnya penyusutan aset tetap. Sedangkan *immediate recognition* mengakui beban secara langsung saat terjadinya, seperti biaya administrasi atau operasional.

Sebagai ilustrasi, PT Sinar Mulia membayar gaji karyawan sebesar Rp30.000.000 untuk periode Januari 2025. Beban ini diakui pada bulan yang sama karena karyawan telah memberikan jasa. Contoh jurnal pengakuan beban pada 31 Januari 2025 adalah: debit akun Beban Gaji sebesar Rp30.000.000 dan kredit akun Kas sebesar Rp30.000.000. Dengan demikian, pengakuan beban memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan pengeluaran yang relevan dan andal, mendukung evaluasi kinerja perusahaan serta pengambilan keputusan manajerial dan investor secara tepat waktu (Warren et al., 2023; IAI, 2024).

E. Studi Kasus: Penerapan Prinsip Pengakuan dan Pengukuran

Untuk memahami penerapan prinsip pengakuan (*recognition*) dan pengukuran (*measurement*) dalam praktik akuntansi, berikut disajikan studi kasus yang mengilustrasikan bagaimana kedua konsep ini digunakan pada berbagai transaksi nyata berdasarkan PSAK (IAI, 2024) dan IFRS (IASB, 2023). Studi kasus ini mencakup pengakuan dan pengukuran atas aset tetap (PSAK 16), pendapatan (PSAK 72), liabilitas (PSAK 71), dan beban penyusutan sebagai bentuk implementasi prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan kerangka konseptual pelaporan keuangan.

1. Studi Kasus 1: Pengakuan dan Pengukuran Aset Tetap (PSAK 16 / IAS 16)

Studi kasus mengenai pengakuan dan pengukuran aset tetap dapat dilihat pada transaksi PT. Konstruksi Maju yang membeli sebuah mesin produksi pada 1 Januari 2025 seharga Rp500.000.000. Biaya

tambahan berupa ongkos pengiriman Rp20.000.000 dan biaya instalasi Rp30.000.000 meningkatkan total biaya perolehan menjadi Rp550.000.000. Berdasarkan PSAK 16 paragraf 7 (IAI, 2024), aset tetap diakui ketika manfaat ekonomi masa depan kemungkinan besar akan mengalir ke entitas dan biayanya dapat diukur secara andal. Mesin ini memenuhi kedua kriteria tersebut karena akan digunakan dalam kegiatan produksi selama 10 tahun dan seluruh biaya perolehannya dapat diverifikasi secara objektif.

Pengukuran awal aset tetap dilakukan dengan menghitung biaya perolehan yang mencakup harga pembelian dan semua biaya langsung yang diperlukan agar aset siap digunakan (PSAK 16 paragraf 15, IAI, 2024). Dalam kasus ini, total biaya perolehan mesin adalah Rp550.000.000. Setelah pengakuan awal, entitas dapat memilih model pengukuran selanjutnya: Model Biaya (*Cost Model*) atau Model Revaluasi (*Revaluation Model*). PT. Konstruksi Maju menggunakan model biaya, sehingga mesin akan disusutkan selama umur manfaatnya.

Perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) dilakukan dengan mengurangkan nilai residu dari biaya perolehan dan dibagi umur manfaat, sehingga diperoleh penyusutan tahunan sebesar Rp50.000.000:

$$\text{Penyusutan Tahunan} = \frac{550.000.000 - 50.000.000}{10} = 50.000.000$$

Jurnal transaksi untuk pencatatan mesin dan penyusutan tahunan adalah sebagai berikut:

- 1 Jan 2025: Debit Aset Tetap – Mesin Rp550.000.000, Kredit Kas Rp550.000.000.
- 31 Des 2025: Debit Beban Penyusutan Rp50.000.000, Kredit Akumulasi Penyusutan Mesin Rp50.000.000.

Alur pengakuan dan pengukuran menunjukkan bahwa setiap aset yang diperoleh dianalisis terlebih dahulu mengenai manfaat ekonomi masa depan dan kemampuan diukur secara andal sebelum dicatat sebagai aset tetap, kemudian diukur dengan biaya perolehan dan disusutkan secara periodik sesuai umur manfaat (IAI, 2024; Kieso et al., 2022). Dengan demikian, pengakuan dan pengukuran aset tetap memastikan laporan keuangan mencerminkan nilai aset yang akurat dan relevan.

2. Studi Kasus 2: Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan (PSAK 72 / IFRS 15)

Studi kasus mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dapat dilihat pada transaksi PT. Bangun Sejahtera yang menandatangani kontrak proyek konstruksi senilai Rp1.000.000.000 pada 1 Februari 2025. Proyek diperkirakan selesai dalam empat bulan, dan pembayaran dilakukan berdasarkan kemajuan pekerjaan (*progress billing*). Berdasarkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (IAI, 2024) yang mengadopsi IFRS 15, pengakuan pendapatan dilakukan seiring dengan pemenuhan kewajiban pelaksanaan, bukan hanya pada saat kas diterima.

Langkah pertama adalah identifikasi kontrak, yaitu memastikan adanya kesepakatan sah antara entitas dan pelanggan yang menciptakan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selanjutnya, identifikasi kewajiban pelaksanaan dilakukan dengan menentukan setiap komitmen yang harus dipenuhi dalam kontrak. Dalam kasus ini, kewajiban pelaksanaan adalah penyelesaian proyek konstruksi. Langkah berikutnya adalah penentuan harga transaksi, yaitu jumlah yang akan diterima entitas dari pelanggan, yakni Rp1.000.000.000.

Pengakuan pendapatan dilakukan berdasarkan kemajuan proyek yang dapat diukur secara andal. Misalnya, pada akhir Maret 2025, kemajuan proyek telah mencapai 50%. Oleh karena itu, pendapatan yang diakui untuk periode tersebut adalah 50% dari total kontrak, yakni Rp500.000.000, sesuai ketentuan PSAK 72 paragraf 35(c) yang menekankan prinsip pengakuan pendapatan sejalan dengan pemenuhan kewajiban pelaksanaan.

Jurnal pencatatan transaksi pada 31 Maret 2025 adalah:

- Debit Piutang Usaha Rp500.000.000
- Kredit Pendapatan Proyek Rp500.000.000

Pendekatan ini mencerminkan prinsip akuntansi akrual, di mana pendapatan diakui saat kendali atas hasil pekerjaan berpindah ke pelanggan, bukan saat kas diterima. Dengan demikian, laporan keuangan PT. Bangun Sejahtera mencerminkan kinerja proyek yang sebenarnya dan memberikan informasi yang relevan dan andal bagi pemangku kepentingan, memungkinkan analisis laba proyek secara periodik dan mendukung pengambilan keputusan manajerial yang lebih tepat (IAI, 2024; Kieso et al., 2022).

3. Studi Kasus 3: Pengakuan dan Pengukuran Liabilitas (PSAK 71 / IFRS 9)

Studi kasus mengenai pengakuan dan pengukuran liabilitas dapat dilihat pada transaksi PT. Mandiri Utama yang menerima pinjaman bank sebesar Rp200.000.000 pada tanggal 1 Januari 2025 dengan tingkat bunga 10% per tahun dan jatuh tempo dua tahun. Berdasarkan PSAK 71: Instrumen Keuangan (IAI, 2024) yang mengadopsi IFRS 9, liabilitas keuangan diakui pada saat entitas menjadi pihak dalam perjanjian kontraktual, yaitu ketika pinjaman diterima dan entitas memiliki kewajiban formal untuk mengembalikan dana. Dengan demikian, pengakuan awal dilakukan pada tanggal penerimaan pinjaman.

Langkah berikutnya adalah pengukuran awal, di mana liabilitas keuangan dicatat sebesar nilai wajar kas yang diterima. Dalam kasus ini, nilai wajar kas sama dengan jumlah pinjaman, yaitu Rp200.000.000. Pengukuran awal ini mencerminkan jumlah yang secara objektif dapat diverifikasi dan mencerminkan arus kas masuk yang diperoleh entitas.

Setelah pengakuan awal, liabilitas diukur secara berkelanjutan menggunakan biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost*) dengan metode suku bunga efektif. Metode ini memungkinkan pengakuan beban bunga yang mencerminkan biaya aktual pinjaman sepanjang periode. Misalnya, beban bunga tahun pertama dihitung sebesar 10% dari saldo awal liabilitas, yakni Rp20.000.000. Hal ini sesuai dengan prinsip matching, di mana biaya bunga diakui dalam periode terjadinya dan dikaitkan dengan liabilitas terkait.

Jurnal transaksi pada 1 Januari 2025 adalah:

- Debit Kas Rp200.000.000
 - Kredit Utang Bank Rp200.000.000
- Pada 31 Desember 2025, untuk mencatat beban bunga:
- Debit Beban Bunga Rp20.000.000
 - Kredit Utang Bunga Rp20.000.000

Pendekatan ini memastikan bahwa laporan posisi keuangan mencerminkan kewajiban entitas secara akurat dan beban terkait diakui sesuai periode yang tepat. Dengan demikian, laporan keuangan PT. Mandiri Utama memberikan informasi yang relevan dan andal bagi pemangku kepentingan, mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang tepat dan transparan (IAI, 2024; Warren et al., 2023).

4. Studi Kasus 4: Pengakuan Beban Penyusutan (*Matching Principle*)

Studi kasus mengenai pengakuan beban penyusutan dapat dilihat pada transaksi PT. Sejahtera yang membeli kendaraan operasional senilai Rp120.000.000 dengan estimasi umur manfaat lima tahun tanpa nilai residu. Berdasarkan PSAK 16: Aset Tetap (IAI, 2024), penyusutan merupakan alokasi sistematis biaya perolehan aset tetap selama masa manfaatnya, sehingga mencerminkan pengurangan manfaat ekonomi aset seiring penggunaannya. Pengakuan beban penyusutan bertujuan untuk menerapkan prinsip matching, yaitu mencocokkan biaya dengan pendapatan yang dihasilkan pada periode yang sama.

Langkah pertama adalah menghitung beban penyusutan tahunan. Dengan metode garis lurus (*straight-line method*), penyusutan tahunan kendaraan dihitung sebagai nilai perolehan dibagi umur manfaat aset:

$$\text{Penyusutan Tahunan} = \frac{120.000.000}{5} = 24.000.000$$

Langkah kedua adalah pencatatan jurnal akuntansi untuk pengakuan beban penyusutan. Pada akhir periode akuntansi 31 Desember 2025, beban penyusutan dicatat sebagai:

- Debit Beban Penyusutan Kendaraan Rp24.000.000
- Kredit Akumulasi Penyusutan Kendaraan Rp24.000.000

Pencatatan ini memastikan bahwa laporan laba rugi periode berjalan mencerminkan biaya penggunaan kendaraan yang relevan dengan pendapatan yang dihasilkan dari operasional kendaraan tersebut. Dengan demikian, prinsip *matching* dipenuhi, karena beban yang berkaitan dengan aset tetap diakui dalam periode yang sama dengan manfaat ekonomi yang diperoleh.

Pendekatan ini juga memungkinkan laporan posisi keuangan menampilkan nilai buku aset yang akurat, yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, sehingga memberikan informasi yang andal bagi pemangku kepentingan dalam menilai kinerja keuangan dan posisi aset perusahaan. Dengan penerapan PSAK 16 dan prinsip matching, PT. Sejahtera dapat memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan, dapat diandalkan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (IAI, 2024; Warren et al., 2023).

F. Latihan Soal

1. Jelaskan perbedaan antara pengakuan awal (*initial recognition*) dan pengukuran setelah pengakuan (*subsequent measurement*) menurut PSAK!
2. Sebutkan empat dasar pengukuran utama dalam akuntansi keuangan menurut Kerangka Konseptual IFRS!
3. Mengapa pendapatan tidak boleh diakui sebelum barang atau jasa dikirim kepada pelanggan?
4. PT. Mekar Jaya membeli peralatan produksi seharga Rp400.000.000, dengan biaya pengiriman Rp10.000.000 dan biaya instalasi Rp15.000.000. Umur manfaat 8 tahun dan nilai residu Rp25.000.000.

Pertanyaan:

- Hitung nilai perolehan aset!
 - Hitung penyusutan tahunan menggunakan metode garis lurus!
 - Buat jurnal transaksi pembelian dan penyusutan tahun pertama!
5. PT. Cipta Karya menandatangani kontrak proyek sebesar Rp1.200.000.000 pada 1 April 2025, yang diperkirakan selesai dalam 6 bulan. Pada 30 Juni 2025, kemajuan pekerjaan mencapai 40%.

Pertanyaan:

- Berapa pendapatan yang harus diakui per 30 Juni 2025?
- Buat jurnal pengakuan pendapatan!



BAB IV

AKUNTANSI UNTUK ASET LANCAR

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan kas dan setara kas, memahami piutang usaha dan penyisihan piutang tak tertagih, memahami persediaan: metode penilaian dan pencatatan, memahami investasi jangka pendek, serta memahami pengungkapan aset lancar dalam laporan keuangan. Sehingga pembaca dapat mampu menerapkan akuntansi aset lancar secara profesional dalam praktik pelaporan keuangan yang akurat dan sesuai standar.

Materi Pembelajaran

- Kas dan Setara Kas
- Piutang Usaha dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- Persediaan: Metode Penilaian dan Pencatatan
- Investasi Jangka Pendek
- Pengungkapan Aset Lancar dalam Laporan Keuangan
- Latihan Soal

A. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas merupakan elemen paling likuid dalam laporan keuangan dan menjadi dasar bagi pengelolaan keuangan perusahaan. Menurut PSAK 2 (IAI, 2022), kas (*cash*) adalah uang tunai yang tersedia untuk digunakan secara langsung, sedangkan setara kas (*cash equivalents*) adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid, mudah dikonversi menjadi kas dalam jumlah tertentu, serta memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Dalam konteks pelaporan keuangan, kas dan setara kas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan menjaga kelancaran aktivitas operasional.

1. Pengertian Kas

Kas merupakan salah satu aset paling likuid dalam laporan keuangan yang mencakup uang tunai di tangan perusahaan maupun saldo di bank yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2022) dalam *Intermediate Accounting*, kas meliputi semua alat pembayaran yang diterima secara umum dan dapat segera digunakan untuk memenuhi kewajiban perusahaan tanpa adanya pembatasan hukum. Dengan kata lain, kas mencakup seluruh dana yang siap dipakai untuk kegiatan operasional maupun pembayaran hutang jangka pendek, termasuk uang kertas dan logam, cek, giro, serta saldo rekening tabungan.

Komponen kas yang umum terdapat dalam laporan keuangan antara lain uang tunai, yaitu uang fisik yang dimiliki perusahaan; saldo rekening giro, yang merupakan dana di bank yang dapat ditarik kapan saja; cek yang diterima dari pelanggan namun belum diuangkan di bank; serta kas kecil atau *petty cash*, yaitu dana terbatas yang digunakan untuk membayar pengeluaran operasional rutin yang bersifat minor. Keberadaan kas dalam bentuk yang berbeda ini menunjukkan fleksibilitas perusahaan dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek.

Pengelolaan kas memiliki peranan penting dalam pengendalian internal perusahaan. Manajemen kas tidak hanya meliputi penyimpanan fisik dan pencatatan transaksi, tetapi juga rekonsiliasi kas secara berkala untuk memastikan saldo kas yang tercatat sesuai dengan saldo aktual di tangan maupun di bank. Prosedur ini penting untuk mencegah penyalahgunaan, pencurian, atau kesalahan pencatatan yang dapat memengaruhi laporan keuangan. Selain itu, pengelolaan kas yang efektif membantu perusahaan dalam menjaga likuiditas, merencanakan arus kas, serta membuat keputusan investasi atau pembiayaan yang tepat. Dengan demikian, kas bukan hanya sekadar aset, tetapi juga indikator penting kesehatan finansial dan efisiensi operasional perusahaan (Kieso et al., 2022).

2. Pengertian Setara Kas

Setara kas merupakan salah satu bentuk aset lancar yang sangat penting dalam laporan keuangan karena likuiditasnya yang tinggi dan kemampuannya untuk segera digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Menurut IAI (2022), setara kas didefinisikan sebagai

investasi jangka pendek yang memiliki jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya, mudah dikonversi menjadi kas, dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Dengan kata lain, aset ini siap digunakan sebagai kas tanpa menimbulkan risiko kerugian yang berarti, sehingga menjadi pelengkap kas dalam menilai likuiditas perusahaan.

Menurut Warren, Reeve, dan Duchac (2021) dalam *Financial & Managerial Accounting*, contoh investasi yang termasuk setara kas antara lain deposito berjangka dengan jangka waktu kurang dari tiga bulan, surat berharga pemerintah atau Treasury bills, serta commercial paper. Investasi-investasi tersebut dipilih karena selain memiliki jatuh tempo yang sangat singkat, juga dapat dengan cepat diuangkan atau dijual di pasar tanpa mengurangi nilai pokok secara signifikan.

Ciri utama setara kas meliputi jangka waktu yang sangat pendek (tidak lebih dari tiga bulan), likuiditas tinggi sehingga mudah dijual atau diuangkan, dan stabilitas nilai investasi sehingga risiko fluktuasi sangat rendah. Aset ini digunakan terutama untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek, bukan sebagai sarana investasi jangka panjang, sehingga perusahaan dapat dengan cepat menutupi kewajiban lancar atau melakukan pengeluaran operasional.

Pengakuan dan pengukuran setara kas dilakukan dengan memperhatikan nilai perolehan dan likuiditasnya, sehingga laporan posisi keuangan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara realistik. Dengan pengelolaan setara kas yang baik, perusahaan dapat menjaga arus kas tetap lancar dan memastikan fleksibilitas finansial yang tinggi dalam menghadapi kebutuhan mendadak maupun peluang investasi singkat (IAI, 2022; Warren et al., 2021).

3. Pengelolaan dan Pengendalian Kas

Pengelolaan dan pengendalian kas merupakan aspek krusial dalam manajemen keuangan perusahaan karena kas merupakan aset paling likuid dan paling rentan terhadap penyalahgunaan. Tujuan utama pengelolaan kas adalah menjaga keseimbangan antara ketersediaan dana tunai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi, serta memaksimalkan efisiensi penggunaan kas (Horngren et al., 2022). Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan perlu menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif sehingga seluruh transaksi kas tercatat

secara akurat dan risiko kehilangan atau penyalahgunaan dapat diminimalkan.

Beberapa metode pengendalian kas yang umum digunakan antara lain pemisahan rekening bank untuk kas operasional dan investasi, sehingga arus kas dapat dipantau secara lebih efektif. Selain itu, penerapan sistem voucher atau otorisasi pengeluaran memastikan bahwa setiap pembayaran telah disetujui oleh pihak berwenang. Rekonsiliasi bank secara berkala juga menjadi langkah penting untuk memastikan kesesuaian antara catatan perusahaan dengan laporan dari bank, sehingga setiap perbedaan dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki. Selain itu, pembentukan dana kas kecil atau *petty cash fund* memungkinkan transaksi kecil sehari-hari tetap terlaksana dengan cepat, namun tetap diawasi melalui sistem pertanggungjawaban yang jelas.

Alur pengelolaan kas dapat digambarkan melalui beberapa tahap: penerimaan kas dari penjualan tunai maupun kredit, pencatatan penerimaan tersebut dalam jurnal kas, penyetoran ke bank, rekonsiliasi bank bulanan, hingga penyusunan laporan arus kas yang menjadi dasar evaluasi likuiditas dan perencanaan kas di masa mendatang. Pendekatan sistematis ini membantu manajemen memantau ketersediaan kas, mengidentifikasi kebutuhan tambahan, dan mengoptimalkan penggunaan dana (Horngren et al., 2022).

4. Rekonsiliasi Bank

Rekonsiliasi bank merupakan proses penting dalam pengelolaan kas yang bertujuan untuk mencocokkan saldo kas menurut catatan perusahaan dengan saldo yang tercatat di laporan bank. Tujuan utama rekonsiliasi adalah memastikan bahwa saldo kas yang dilaporkan dalam laporan keuangan akurat dan mencerminkan posisi keuangan sebenarnya, sekaligus mendeteksi potensi kesalahan atau penyalahgunaan (Warren, Reeve, & Duchac, 2021). Perbedaan antara saldo perusahaan dan bank seringkali muncul karena adanya perbedaan waktu pencatatan atau kesalahan administrasi.

Beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain setoran dalam perjalanan, yaitu ketika perusahaan telah mencatat penerimaan kas, tetapi dana tersebut belum diterima dan diproses oleh bank. Selain itu, cek beredar juga menjadi penyebab umum; perusahaan telah mengeluarkan cek untuk pembayaran, namun penerima belum mencairkan cek tersebut sehingga saldo di bank masih mencerminkan

kas yang tersedia. Faktor lain yang sering terjadi adalah biaya administrasi bank, seperti biaya administrasi bulanan atau potongan lainnya yang belum dicatat dalam buku perusahaan. Kesalahan pencatatan internal, misalnya human error dalam memasukkan jumlah transaksi, juga dapat menimbulkan selisih saldo.

Proses rekonsiliasi bank dilakukan dengan menyesuaikan saldo buku perusahaan terhadap laporan bank dengan memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Pertama, saldo menurut bank disesuaikan dengan setoran dalam perjalanan dan cek beredar. Kedua, saldo buku perusahaan disesuaikan dengan biaya administrasi bank atau kesalahan pencatatan yang ditemukan. Hasil dari proses ini adalah saldo kas yang telah diperbaiki dan sesuai antara catatan perusahaan dan laporan bank, yang kemudian dicatat sebagai saldo kas akhir periode dalam laporan keuangan. Rekonsiliasi bank tidak hanya berfungsi untuk verifikasi saldo kas, tetapi juga sebagai alat pengendalian internal untuk mendeteksi penyelewengan atau kesalahan, sehingga meningkatkan keandalan informasi keuangan dan mendukung pengambilan keputusan manajerial (Warren et al., 2021).

5. Penyajian Kas dan Setara Kas dalam Laporan Keuangan

Kas dan setara kas merupakan pos yang memiliki likuiditas tertinggi dalam laporan keuangan, sehingga selalu disajikan sebagai aset lancar pertama dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Menurut PSAK 2 (IAI, 2022), kas mencakup uang tunai di tangan serta saldo rekening giro yang dapat digunakan kapan saja, sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek, mudah dicairkan, dan memiliki risiko perubahan nilai yang minimal. Penyajian kas dan setara kas secara terpisah membantu pengguna laporan keuangan memahami ketersediaan likuiditas perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan membiayai kegiatan operasional.

Kas dan setara kas juga disajikan secara rinci dalam laporan arus kas, di mana perubahan saldo dijelaskan melalui tiga aktivitas utama, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi mencerminkan arus kas yang dihasilkan atau digunakan dalam kegiatan usaha utama, seperti penerimaan dari penjualan dan pembayaran biaya operasional. Aktivitas investasi meliputi arus kas terkait perolehan atau pelepasan aset tetap dan investasi jangka panjang, sedangkan aktivitas pendanaan menunjukkan arus kas dari penerbitan saham, pinjaman, atau

pembayaran dividen kepada pemilik. Penyajian yang sistematis ini memungkinkan manajemen, investor, dan kreditur menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, memenuhi kewajiban, dan mendanai pertumbuhan.

Contoh penyajian kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan dapat dilihat sebagai berikut: kas dan setara kas sebesar Rp125.000.000 ditempatkan sebagai pos pertama dalam aset lancar, diikuti oleh piutang usaha Rp80.000.000 dan persediaan Rp150.000.000, sehingga total aset lancar mencapai Rp355.000.000. Penempatan kas dan setara kas pada posisi awal ini menekankan pentingnya likuiditas dalam menilai kesehatan finansial perusahaan.

B. Piutang Usaha dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang usaha merupakan salah satu komponen utama dari aset lancar dalam laporan keuangan perusahaan. Elemen ini timbul akibat adanya transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit kepada pelanggan. Namun, karena tidak semua piutang dapat tertagih, perusahaan perlu membentuk penyisihan piutang tak tertagih sebagai bentuk antisipasi terhadap risiko gagal bayar. Pengakuan, pengukuran, dan pelaporan piutang serta cadangan kerugiannya diatur oleh PSAK 71 (IAI, 2022) yang mengadopsi IFRS 9 – *Financial Instruments*, berfokus pada pendekatan *expected credit loss (ECL)*.

1. Pengertian Piutang Usaha

Piutang usaha merupakan salah satu aset penting dalam laporan keuangan yang mencerminkan klaim perusahaan terhadap pelanggan akibat penjualan barang atau jasa secara kredit dalam kegiatan usaha normal. Menurut PSAK 71 (IAI, 2022), piutang usaha adalah hak perusahaan untuk menerima kas di masa depan dari pelanggan yang telah memperoleh barang atau jasa, namun pembayarannya belum dilakukan. Hal ini sejalan dengan definisi yang diberikan oleh Kieso, Weygandt, dan Warfield (2022), yang menekankan bahwa piutang usaha merupakan hak perusahaan untuk menagih pembayaran di masa depan sebagai akibat dari transaksi penjualan kredit.

Secara klasifikasi, piutang usaha termasuk aset lancar karena biasanya dapat ditagih dalam jangka waktu kurang dari satu tahun atau dalam satu siklus operasi perusahaan. Pengakuan piutang usaha dalam

laporan keuangan harus memperhatikan prinsip akrual, sehingga piutang dicatat ketika pendapatan diakui, bukan saat kas diterima. Selain piutang usaha, laporan keuangan juga dapat mencakup piutang lain seperti piutang non-usaha, piutang bunga, dan piutang lain-lain. Piutang non-usaha timbul dari transaksi yang bukan bagian dari kegiatan operasional utama perusahaan, misalnya pinjaman kepada karyawan atau pihak ketiga. Piutang bunga merupakan pendapatan bunga yang masih harus diterima, sedangkan piutang lain-lain mencakup klaim yang tidak termasuk kategori sebelumnya.

Pengelolaan piutang usaha memerlukan sistem pengendalian internal yang efektif untuk memastikan penagihan tepat waktu dan meminimalkan risiko gagal bayar. Hal ini mencakup pencatatan yang akurat, pemantauan saldo piutang, dan penetapan kebijakan kredit yang sesuai dengan profil risiko pelanggan. Penyajian piutang usaha dalam laporan keuangan memberikan informasi penting bagi manajemen dan pihak eksternal mengenai likuiditas, efisiensi penagihan, dan kualitas aset lancar perusahaan, sehingga menjadi indikator kesehatan finansial jangka pendek yang kritis (Warren, Reeve, & Duchac, 2021).

2. Pengakuan Piutang Usaha

Pengakuan piutang usaha merupakan tahap penting dalam akuntansi yang memastikan bahwa hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan tercatat secara tepat waktu dan akurat. Piutang usaha diakui ketika hak atas pembayaran muncul, yang biasanya terjadi setelah barang telah dikirim atau jasa telah diberikan kepada pelanggan, sesuai dengan prinsip akuntansi akrual. Hal ini menekankan bahwa pengakuan piutang tidak bergantung pada penerimaan kas, melainkan pada pemenuhan kewajiban pelaksanaan oleh entitas (PSAK 72, IAI, 2022).

Menurut PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (IAI, 2022), pengakuan piutang usaha dilakukan ketika tiga kriteria terpenuhi. Pertama, entitas telah mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan, sehingga kendali atas barang atau jasa berpindah. Kedua, entitas memiliki hak hukum untuk menagih pembayaran dari pelanggan, yang membedakan piutang usaha dari janji pembayaran yang belum pasti. Ketiga, jumlah piutang dapat diukur secara andal, sehingga informasi yang dicatat mencerminkan nilai ekonomi yang realistik. Jika salah satu kriteria tidak terpenuhi, piutang tidak boleh diakui, meskipun

dapat diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk menjaga transparansi.

Contoh penerapan pengakuan piutang usaha dapat dilihat pada PT Andalan, yang menjual barang senilai Rp50.000.000 secara kredit pada tanggal 5 April 2025 dengan jangka waktu pembayaran 30 hari. Pada tanggal pengiriman barang, perusahaan mengakui piutang usaha sebesar Rp50.000.000 dan secara bersamaan mengakui pendapatan penjualan dengan jumlah yang sama. Jurnal akuntansi untuk transaksi ini adalah:

Piutang Usaha	Rp50.000.000
Penjualan	Rp50.000.000

Pencatatan ini mencerminkan prinsip matching dan akrual, di mana pendapatan dan piutang diakui saat hak atas pembayaran muncul, bukan saat kas diterima, sehingga laporan keuangan memberikan gambaran yang akurat mengenai posisi keuangan dan kinerja entitas pada periode berjalan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022).

3. Pengukuran Piutang Usaha

Pengukuran piutang usaha merupakan proses penting untuk memastikan bahwa nilai yang dicatat dalam laporan keuangan mencerminkan ekspektasi kas yang akan diterima oleh perusahaan. Menurut PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan (IAI, 2022), piutang usaha diukur pada saat pengakuan awal sebesar nilai wajar dari imbalan yang diterima, dikurangi dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*). Pendekatan ini memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan risiko kredit yang melekat pada piutang dan memberikan informasi yang andal bagi pengguna laporan keuangan.

Tahap pertama adalah pengukuran awal (*initial measurement*), di mana piutang usaha dicatat sebesar nilai nominal yang akan diterima dari pelanggan. Jika terdapat diskon penjualan atau potongan harga, nilai piutang dicatat setelah dikurangi diskon tersebut. Misalnya, jika PT Andalan menjual barang senilai Rp50.000.000 dengan diskon 2%, piutang yang diakui sebesar Rp49.000.000, sehingga mencerminkan jumlah yang realistik untuk diterima.

Tahap kedua adalah pengukuran setelah pengakuan awal (*subsequent measurement*), yaitu penyesuaian nilai piutang berdasarkan

nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai ini diperoleh dengan mengurangkan cadangan kerugian piutang dari jumlah piutang tercatat. Cadangan kerugian piutang dibuat berdasarkan estimasi kerugian kredit yang diharapkan, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi piutang yang kemungkinan tidak tertagih. Misalnya, jika dari piutang Rp50.000.000 diperkirakan 2% tidak tertagih, cadangan kerugian sebesar Rp1.000.000 dibentuk, dan nilai piutang yang disajikan dalam laporan keuangan adalah Rp49.000.000. Dengan pendekatan ini, pengukuran piutang usaha tidak hanya mencatat hak perusahaan untuk menerima kas, tetapi juga mempertimbangkan risiko kredit dan likuiditas, sehingga informasi yang disajikan relevan, dapat diandalkan, dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022).

4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan piutang tak tertagih merupakan praktik akuntansi yang penting untuk mencerminkan nilai piutang yang realistik dalam laporan keuangan. Tidak semua pelanggan dapat melunasi kewajibannya tepat waktu, sehingga perusahaan perlu mengestimasi potensi kerugian yang mungkin terjadi. Menurut PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan (IAI, 2022), penurunan nilai piutang diukur menggunakan pendekatan *expected credit loss* (ECL), yaitu estimasi kerugian yang diharapkan sepanjang umur piutang, bukan hanya kerugian yang sudah terjadi. Pendekatan ini memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan bagi pengguna laporan keuangan, karena mencerminkan risiko kredit yang melekat pada piutang.

Terdapat dua metode utama dalam pengakuan kerugian piutang. Pertama adalah metode langsung (*direct write-off method*), di mana kerugian piutang hanya diakui ketika piutang benar-benar tidak tertagih. Misalnya, jika PT Cahaya tidak dapat menagih piutang sebesar Rp5.000.000 dari pelanggan, perusahaan mencatat beban piutang tak tertagih sebesar Rp5.000.000 dan mengurangi piutang usaha yang bersangkutan. Metode ini tidak sesuai dengan prinsip *matching*, karena kerugian dicatat pada periode yang berbeda dari saat piutang dihasilkan, sehingga PSAK tidak merekomendasikannya untuk pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi.

Metode kedua adalah metode penyisihan (*allowance method*), di mana perusahaan memperkirakan jumlah piutang yang kemungkinan

tidak tertagih di masa depan dan membentuk akun cadangan kerugian piutang. Misalnya, jika estimasi piutang tak tertagih adalah 2% dari saldo piutang sebesar Rp100.000.000, maka perusahaan membentuk cadangan sebesar Rp2.000.000. Ketika pelanggan tertentu gagal bayar Rp1.000.000, cadangan tersebut dikurangi sesuai jumlah piutang yang tidak tertagih, sehingga piutang usaha tercatat sebesar nilai yang realistik. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip akuntansi akrual dan *matching*, karena beban diakui seiring dengan pendapatan yang dihasilkan.

5. Pendekatan *Expected Credit Loss (ECL)*

Pendekatan *Expected Credit Loss (ECL)* merupakan metode yang diadopsi dalam IFRS 9 dan PSAK 71 untuk mengukur penurunan nilai piutang secara lebih proaktif dan relevan. Menurut IASB (2022) dan IAI (2022), model ECL mempertimbangkan tiga komponen utama: probabilitas gagal bayar (*Probability of Default*, PD), eksposur pada saat gagal bayar (*Exposure at Default*, EAD), dan tingkat kerugian jika terjadi gagal bayar (*Loss Given Default*, LGD). Dengan demikian, ECL memberikan estimasi kerugian kredit yang diharapkan sepanjang umur piutang, bukan hanya kerugian yang sudah terjadi, sehingga laporan keuangan menjadi lebih realistik dan dapat diandalkan.

Rumus umum perhitungan ECL adalah:

$$ECL = PD \times LGD \times EAD$$

Contoh penerapannya dapat dijelaskan melalui PT Mandiri yang memiliki piutang sebesar Rp100.000.000. Jika probabilitas gagal bayar ditetapkan sebesar 5% dan tingkat kerugian jika gagal bayar 80%, maka cadangan kerugian piutang yang dibentuk adalah:

$$ECL = 0,05 \times 0,80 \times 100.000.000 = 4.000.000$$

Artinya, perusahaan harus membentuk cadangan kerugian piutang sebesar Rp4.000.000 untuk mengantisipasi risiko kredit.

Pendekatan ECL mengikuti alur sistematis yang dimulai dari identifikasi piutang, evaluasi risiko kredit masing-masing pelanggan, perhitungan ECL berdasarkan parameter PD, LGD, dan EAD, pembentukan cadangan kerugian piutang, hingga penyajian dalam

laporan keuangan. Metode ini tidak hanya meningkatkan relevansi informasi, tetapi juga memperkuat transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi akrual. Selain itu, ECL memungkinkan manajemen untuk melakukan pengendalian risiko kredit secara lebih efektif dan melakukan perencanaan kas yang realistik, sehingga menjaga kesehatan keuangan perusahaan.

C. Persediaan: Metode Penilaian dan Pencatatan

Persediaan (*inventory*) merupakan salah satu aset lancar yang memiliki peranan penting dalam kegiatan operasional perusahaan, terutama bagi perusahaan dagang dan manufaktur. Menurut PSAK 14 (Revisi 2022) yang mengadopsi IAS 2 – Inventories, persediaan didefinisikan sebagai aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, sedang dalam proses produksi, atau dalam bentuk bahan baku yang akan digunakan dalam produksi barang untuk dijual. Pengelolaan dan penilaian persediaan secara akurat sangat penting karena mempengaruhi laporan laba rugi (melalui harga pokok penjualan) dan laporan posisi keuangan (melalui nilai aset lancar).

1. Pengertian dan Klasifikasi Persediaan

Persediaan merupakan salah satu aset penting dalam kegiatan operasional perusahaan yang diklasifikasikan sebagai aset lancar karena diharapkan dapat direalisasikan menjadi kas atau dikonsumsi dalam jangka waktu satu tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan, mana yang lebih lama (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2022), persediaan diklasifikasikan berdasarkan jenis perusahaan yang bersangkutan, karena karakteristik dan tujuan penggunaan persediaan berbeda pada setiap jenis usaha.

Pada perusahaan dagang, persediaan umumnya berupa barang dagangan, yaitu produk jadi yang dibeli untuk dijual kembali tanpa mengalami proses produksi tambahan. Contohnya meliputi pakaian, makanan, atau barang elektronik yang siap dijual kepada pelanggan. Persediaan ini merupakan komponen utama aset perusahaan dagang dan memerlukan manajemen persediaan yang baik agar penjualan tetap lancar dan likuiditas perusahaan terjaga.

Perusahaan manufaktur memiliki persediaan yang lebih kompleks, yang dapat dibagi menjadi tiga kategori: bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Bahan baku mencakup semua material yang akan diolah menjadi produk akhir, sedangkan barang dalam proses adalah produk yang sedang melalui tahap produksi. Barang jadi adalah produk akhir yang siap dijual. Pengelolaan persediaan pada perusahaan manufaktur memerlukan sistem akuntansi yang mampu mencatat setiap tahap transformasi agar biaya produksi dan nilai persediaan tercatat secara akurat.

Perusahaan jasa biasanya memiliki persediaan yang lebih terbatas dan bersifat penunjang, seperti suku cadang, perlengkapan, atau alat kerja. Misalnya, perusahaan servis kendaraan menyimpan suku cadang, alat servis, atau perlengkapan kantor yang digunakan dalam kegiatan operasional. Persediaan ini mendukung pelayanan jasa dan perlu dicatat agar biaya dan pemakaian aset dapat dipantau dengan tepat.

2. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui sebagai aset dalam laporan keuangan ketika memenuhi kriteria tertentu yang menunjukkan adanya manfaat ekonomi bagi entitas dan kemampuan untuk mengukur nilai perolehannya secara andal. Menurut PSAK 14 tentang Persediaan (IAI, 2022), pengakuan persediaan terjadi saat entitas menguasai barang tersebut, baik melalui pembelian maupun hasil produksi internal, dan barang tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Artinya, entitas harus memiliki kendali atas persediaan, bukan hanya kepemilikan hukum, dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau memproduksi persediaan dapat diukur dengan jelas.

Pada praktik akuntansi, pencatatan persediaan dilakukan pada saat transaksi pembelian atau produksi terjadi. Misalnya, apabila perusahaan dagang membeli barang dagang senilai Rp50.000.000 secara kredit, maka jurnal yang dicatat adalah:

*Persediaan Barang Dagang ... Rp50.000.000
Kredit Kas/Utang Usaha ... Rp50.000.000*

Jika pembelian dilakukan dengan adanya potongan tunai, perusahaan dapat memilih antara dua metode pencatatan. Metode bruto mencatat persediaan sebesar harga pembelian penuh, dan diskon tunai

hanya diakui saat dimanfaatkan. Sebaliknya, metode neto mencatat pembelian setelah dikurangi potongan tunai, sehingga nilai persediaan yang dicatat langsung mencerminkan biaya perolehan bersih. Pemilihan metode ini memengaruhi laporan laba rugi karena diskon tunai yang dimanfaatkan dapat mengurangi beban pembelian atau meningkatkan laba, tetapi dari perspektif laporan posisi keuangan, metode neto lebih mencerminkan biaya perolehan aktual persediaan pada saat pengakuan.

3. Penentuan Biaya Perolehan (*Cost of Inventory*)

Penentuan biaya perolehan persediaan merupakan langkah penting dalam akuntansi persediaan karena mempengaruhi nilai persediaan yang dicatat di laporan posisi keuangan dan harga pokok penjualan di laporan laba rugi. Menurut PSAK 14 tentang Persediaan (IAI, 2022), biaya perolehan persediaan mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan terbagi menjadi tiga komponen utama. Pertama, biaya pembelian, yang meliputi harga pembelian barang, bea impor, pajak yang tidak dapat dikreditkan, serta biaya transportasi dan penanganan. Kedua, biaya konversi, yaitu biaya langsung yang berkaitan dengan produksi, termasuk tenaga kerja langsung dan overhead pabrik yang relevan. Ketiga, biaya lain-lain yang timbul secara langsung untuk membawa persediaan ke kondisi siap digunakan atau dijual, seperti biaya pengemasan khusus atau biaya pemrosesan tertentu.

Tidak semua biaya terkait persediaan dapat dimasukkan dalam biaya perolehan. Biaya penyimpanan, kecuali jika diperlukan selama proses produksi, biaya administrasi umum, dan biaya penjualan dikecualikan karena tidak terkait langsung dengan perolehan atau produksi persediaan. Pengakuan biaya perolehan yang tepat menjamin laporan keuangan mencerminkan nilai persediaan yang akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan manajerial.

Sebagai contoh, PT Prima membeli bahan baku senilai Rp100.000.000, dengan biaya transportasi sebesar Rp2.000.000 dan memperoleh diskon pembelian Rp1.000.000. Berdasarkan prinsip PSAK 14, total biaya perolehan persediaan dihitung sebagai harga pembelian ditambah biaya transportasi dikurangi diskon, sehingga menjadi Rp101.000.000. Nilai inilah yang dicatat sebagai persediaan dalam laporan keuangan. Penentuan biaya perolehan yang tepat juga mempengaruhi perhitungan harga pokok penjualan dan laba bersih

perusahaan, sehingga proses ini menjadi krusial dalam akuntansi persediaan.

4. Sistem Pencatatan Persediaan

Sistem pencatatan persediaan merupakan elemen penting dalam pengendalian aset dan penentuan harga pokok penjualan. Menurut Horngren, Harrison, dan Oliver (2022), terdapat dua sistem utama pencatatan persediaan, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Sistem periodik (*Periodic Inventory System*) mencatat perubahan persediaan hanya pada akhir periode akuntansi melalui perhitungan fisik. Selama periode berjalan, semua pembelian dicatat ke akun “Pembelian”, sedangkan penjualan tidak langsung memengaruhi akun persediaan. Contohnya, saat perusahaan membeli barang senilai Rp10.000.000, jurnalnya adalah debit pada akun Pembelian dan kredit Kas atau Utang Usaha. Pada akhir periode, perusahaan menghitung harga pokok penjualan dengan menjumlahkan persediaan awal dan pembelian, kemudian mengurangi persediaan akhir. Misalnya, persediaan awal Rp5.000.000 ditambah pembelian Rp10.000.000 dikurangi persediaan akhir Rp4.000.000 menghasilkan harga pokok penjualan Rp11.000.000. Sistem ini sederhana tetapi kurang akurat untuk pengendalian persediaan sepanjang periode.

Sistem perpetual (*Perpetual Inventory System*) memperbarui akun persediaan secara *real-time* setiap kali terjadi transaksi pembelian atau penjualan. Misalnya, saat membeli barang senilai Rp10.000.000, akun Persediaan didebit, dan Kas atau Utang Usaha dikredit. Ketika terjadi penjualan, jurnal mencatat Piutang Usaha dan Penjualan, serta secara bersamaan menghitung harga pokok penjualan dengan mengkredit Persediaan dan mendebit Harga Pokok Penjualan. Sistem ini memberikan informasi harga pokok penjualan dan saldo persediaan yang selalu terkini, sehingga mempermudah pengendalian dan perencanaan persediaan.

Perbandingan kedua sistem menunjukkan bahwa sistem periodik melakukan pencatatan hanya pada akhir periode, menggunakan akun Pembelian, dan informasi harga pokok penjualan tersedia setelah penghitungan fisik, sehingga kontrol kurang akurat. Sedangkan sistem perpetual mencatat setiap transaksi secara langsung, tidak menggunakan akun Pembelian, informasi HPP tersedia setiap saat, dan kontrol persediaan lebih tepat. Dengan demikian, pemilihan sistem pencatatan

persediaan sangat bergantung pada kebutuhan akurasi, kompleksitas operasi, dan kemampuan pengawasan perusahaan.

5. Metode Penilaian Persediaan (*Inventory Valuation Methods*)

Metode penilaian persediaan merupakan alat penting dalam akuntansi untuk menentukan biaya per unit barang yang akan dicatat dalam laporan keuangan. Penilaian yang tepat tidak hanya memengaruhi harga pokok penjualan, tetapi juga nilai persediaan akhir dan laba bersih perusahaan. Menurut PSAK 14 (IAI, 2022), perusahaan dapat menggunakan berbagai metode penilaian persediaan, kecuali metode LIFO (*Last In First Out*), yang dilarang oleh IFRS karena tidak mencerminkan nilai ekonomi terkini.

Metode FIFO (*First In First Out*) mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli adalah yang pertama dijual. Metode ini cocok untuk produk yang mudah rusak atau memiliki tanggal kedaluwarsa, seperti makanan atau obat-obatan, karena nilai persediaan akhir lebih mendekati harga pasar saat ini. Misalnya, jika persediaan awal 100 unit senilai Rp10.000 per unit dan dibeli 100 unit tambahan seharga Rp12.000 per unit, ketika dijual 120 unit, harga pokok penjualan dihitung dari persediaan awal terlebih dahulu, dan persediaan akhir mencerminkan harga pembelian terbaru.

Metode rata-rata tertimbang (*Weighted Average*) menghitung harga per unit berdasarkan rata-rata biaya barang yang tersedia. Metode ini cenderung menghaluskan fluktuasi harga dan memberikan stabilitas dalam laporan keuangan jangka panjang. Dengan contoh yang sama, harga rata-rata per unit menjadi Rp11.000, sehingga harga pokok penjualan dan nilai persediaan akhir dihitung berdasarkan rata-rata ini, memberikan perhitungan yang lebih konsisten.

Metode *specific identification* menilai setiap unit berdasarkan biaya aktualnya, cocok untuk barang bernilai tinggi atau unik, seperti mobil, perhiasan, atau karya seni. Metode ini memungkinkan pencocokan langsung antara biaya perolehan dan penjualan, sehingga memberikan keakuratan tinggi dalam laporan keuangan. Pemilihan metode penilaian persediaan sebaiknya mempertimbangkan karakteristik produk, volatilitas harga, serta tujuan pelaporan keuangan, agar mencerminkan kondisi ekonomi dan memberikan informasi relevan bagi manajemen dan investor.

D. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan salah satu komponen aset lancar dalam laporan keuangan yang memiliki karakteristik utama berupa jangka waktu kepemilikan yang relatif singkat, yaitu kurang dari satu tahun atau dalam satu siklus operasi perusahaan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022). Tujuan utama investasi jangka pendek adalah untuk memanfaatkan kelebihan kas sementara agar dapat menghasilkan pendapatan tambahan melalui bunga, dividen, atau kenaikan nilai investasi.

Menurut PSAK 55 (Revisi 2017), investasi jangka pendek dapat berupa instrumen keuangan seperti saham, obligasi, surat berharga pemerintah, deposito berjangka, atau reksa dana yang dapat segera dikonversi menjadi kas dengan risiko perubahan nilai yang rendah. Sedangkan menurut Warren, Reeve, & Fess (2022), investasi jangka pendek dikategorikan sebagai aset likuid yang dapat dijual atau dicairkan kapan saja tanpa kehilangan nilai yang signifikan.

1. Tujuan dan Karakteristik Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan salah satu strategi keuangan yang dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan kas yang tidak terpakai dan sekaligus menjaga likuiditas perusahaan. Menurut Subramanyam (2022), tujuan utama dari investasi jangka pendek adalah memastikan kas idle atau kas yang tidak digunakan dalam operasional sehari-hari dapat dimanfaatkan secara produktif, sehingga perusahaan tetap memperoleh pendapatan tambahan tanpa mengorbankan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Selain itu, investasi ini juga berfungsi sebagai cadangan likuiditas, karena mudah dicairkan apabila perusahaan membutuhkan dana secara mendesak.

Karakteristik investasi jangka pendek mencerminkan fleksibilitas dan keamanan modal. Pertama, jangka waktu kepemilikan biasanya kurang dari 12 bulan, sesuai dengan definisi aset lancar dalam laporan keuangan. Kedua, investasi ini dapat dengan mudah dijual kembali di pasar, memungkinkan perusahaan menyesuaikan portofolio secara cepat sesuai kebutuhan likuiditas atau perubahan strategi. Ketiga, tingkat risiko relatif rendah dibandingkan investasi jangka panjang, karena instrumen yang digunakan biasanya memiliki stabilitas harga dan risiko gagal bayar yang minimal. Keempat, investasi jangka pendek dapat

dikonversi menjadi kas dengan cepat tanpa kehilangan nilai yang signifikan, sehingga mendukung pengelolaan arus kas perusahaan secara efisien.

Contoh umum investasi jangka pendek mencakup deposito berjangka kurang dari tiga bulan, surat berharga pemerintah seperti Treasury bills, dan commercial paper yang diterbitkan oleh perusahaan berkualitas tinggi. Dengan demikian, investasi jangka pendek tidak hanya berperan sebagai sarana pengelolaan kas, tetapi juga sebagai instrumen untuk menambah pendapatan perusahaan melalui bunga, dividen, atau keuntungan selisih harga jual-beli sekuritas. Implementasi strategi ini membantu perusahaan mencapai keseimbangan antara efisiensi penggunaan dana dan ketersediaan likuiditas untuk mendukung operasional dan kebutuhan mendesak lainnya.

2. Jenis-Jenis Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan instrumen keuangan yang dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan kas sementara dengan tingkat likuiditas tinggi dan risiko relatif rendah. Menurut PSAK 71 (IAI, 2020), yang mengadopsi IFRS 9, investasi jangka pendek diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dimiliki untuk tujuan memperoleh pengembalian dalam jangka waktu pendek, umumnya kurang dari 12 bulan. Jenis investasi ini mencakup beberapa instrumen utama, masing-masing dengan karakteristik, tujuan, dan tingkat likuiditas yang berbeda.

Deposito berjangka pendek adalah salah satu bentuk investasi paling umum, dengan jangka waktu 1–3 bulan. Deposito ini memberikan bunga sebagai imbal hasil dan memiliki likuiditas tinggi, sehingga perusahaan dapat mencairkannya saat dibutuhkan. Surat berharga pemerintah, seperti Treasury bills atau obligasi pemerintah jangka pendek, juga populer karena menawarkan keamanan dana yang tinggi dan likuiditas sangat tinggi, cocok bagi perusahaan yang mengutamakan perlindungan modal. Selain itu, saham atau obligasi yang diperdagangkan di pasar sekunder dapat dijadikan investasi jangka pendek untuk memperoleh dividen atau capital gain. Instrumen ini cenderung memiliki likuiditas tinggi, tetapi dengan risiko nilai pasar yang lebih fluktuatif dibandingkan deposito atau surat berharga pemerintah.

Reksa dana pasar uang menjadi alternatif lain bagi perusahaan yang ingin diversifikasi portofolio dan tetap mempertahankan likuiditas tinggi. Instrumen ini memungkinkan perusahaan mengelola dana secara kolektif melalui manajer investasi, sehingga risiko tersebar dan dapat dicairkan relatif cepat. *Commercial paper*, yaitu surat utang jangka pendek yang diterbitkan perusahaan, digunakan untuk memperoleh bunga dalam jangka waktu singkat. Likuiditasnya sedang karena perdagangannya tergantung pada permintaan pasar dan kualitas penerbit. Dengan pemahaman mengenai berbagai jenis investasi jangka pendek ini, perusahaan dapat memilih instrumen yang paling sesuai dengan tujuan likuiditas, keamanan, dan pengembalian yang diinginkan, sehingga optimal dalam pengelolaan kas dan aset lancar (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022; IAI, 2020).

3. Pengakuan dan Pengukuran Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek diakui sebagai aset keuangan pada saat perusahaan memperoleh hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lain, sesuai dengan PSAK 71 (IAI, 2020). Pengakuan awal dilakukan sebesar nilai wajar (*fair value*) investasi, ditambah biaya transaksi apabila investasi tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur melalui laba rugi. Pendekatan ini memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan nilai ekonomis investasi pada saat diperoleh, sekaligus mematuhi prinsip pengukuran yang andal.

Pengukuran investasi jangka pendek tergantung pada tujuan kepemilikannya dan karakteristik arus kas yang dihasilkan. Terdapat tiga kategori utama pengukuran: pertama, *Amortized Cost*, digunakan jika investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan menghasilkan arus kas kontraktual berupa pokok dan bunga. Contohnya adalah obligasi jangka pendek yang dimiliki untuk memperoleh pendapatan bunga hingga jatuh tempo. Kedua, *Fair Value through Other Comprehensive Income (FVOCI)*, diterapkan untuk investasi yang dimiliki baik untuk arus kas maupun dijual sewaktu-waktu, seperti obligasi pemerintah. Ketiga, *Fair Value through Profit or Loss (FVTPL)*, digunakan jika investasi dimiliki untuk tujuan perdagangan jangka pendek, contohnya saham yang diperdagangkan di bursa, di mana perubahan nilai wajar diakui langsung dalam laporan laba rugi.

Sebagai ilustrasi, PT Sejahtera membeli saham publik senilai Rp100.000.000 pada 1 Januari 2024 sebagai investasi jangka pendek

dengan klasifikasi FVTPL. Pada akhir tahun, nilai pasar saham meningkat menjadi Rp110.000.000. Jurnal awal mencatat pembelian: Debit Investasi Jangka Pendek Rp100.000.000, Kredit Kas Rp100.000.000. Penyesuaian nilai wajar akhir tahun dicatat sebagai: Debit Investasi Jangka Pendek Rp10.000.000, Kredit Keuntungan Investasi Rp10.000.000. Dengan demikian, laba dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi, mencerminkan keuntungan ekonomi yang terjadi selama periode tersebut.

4. Penyajian dalam Laporan Keuangan

Investasi jangka pendek disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai bagian dari aset lancar karena memiliki likuiditas tinggi dan dapat dengan cepat dikonversi menjadi kas. Posisinya biasanya ditempatkan setelah kas dan setara kas, menggambarkan urutan likuiditas dalam neraca. Penyajian ini memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menilai ketersediaan sumber daya yang dapat segera digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan. Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2022), investasi jangka pendek yang termasuk dalam aset lancar mencakup instrumen keuangan seperti saham yang diperdagangkan, obligasi jangka pendek, deposito berjangka kurang dari tiga bulan, serta surat berharga pasar uang, sepanjang memenuhi kriteria likuiditas dan jangka waktu kepemilikan yang singkat.

Pendapatan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar investasi jangka pendek dicatat dalam laporan laba rugi. Jika investasi diklasifikasikan sebagai *Fair Value through Profit or Loss* (FVTPL), selisih nilai wajar diakui langsung sebagai laba atau rugi investasi dalam laporan laba rugi periode berjalan. Pendekatan ini memastikan bahwa laporan laba rugi mencerminkan kinerja ekonomi aktual dari investasi yang dimiliki perusahaan (IAI, 2020). Pendapatan dari dividen atau bunga yang diterima dari investasi jangka pendek juga dicatat sebagai pendapatan lain-lain, memberikan gambaran tambahan tentang kontribusi aset keuangan terhadap laba perusahaan.

Sebagai ilustrasi, laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. (2023) menunjukkan bahwa kas dan setara kas sebesar Rp250 juta, diikuti oleh investasi jangka pendek sebesar Rp110 juta, piutang usaha Rp180 juta, dan persediaan Rp220 juta, sehingga total aset lancar tercatat Rp760 juta. Penyajian ini mencerminkan transparansi dan kemudahan

analisis bagi pemangku kepentingan, serta mempermudah perbandingan antarperiode dalam menilai kinerja likuiditas dan efisiensi pengelolaan aset perusahaan.

E. Pengungkapan Aset Lancar dalam Laporan Keuangan

Pengungkapan (*disclosure*) aset lancar dalam laporan keuangan merupakan aspek penting dalam penyajian informasi keuangan yang transparan dan andal. Pengungkapan tidak hanya mencakup jumlah nominal aset lancar, tetapi juga menjelaskan kebijakan akuntansi, dasar pengukuran, estimasi, dan risiko yang terkait dengan aset tersebut. Tujuannya adalah agar para pengguna laporan keuangan dapat memahami posisi likuiditas, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek, serta efektivitas manajemen kas dan aset lancar (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022).

Menurut Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (IASB, 2018; IAI, 2021), pengungkapan informasi keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif utama, yaitu relevansi (*relevance*) dan penyajian yang andal (*faithful representation*), serta memperhatikan keterbandingan (*comparability*), keterpahaman (*understandability*), ketepatan waktu (*timeliness*), dan verifiabilitas (*verifiability*). Dalam konteks aset lancar, pengungkapan berfungsi sebagai alat bagi pengguna untuk menilai likuiditas, efisiensi penggunaan modal kerja, dan risiko kredit serta persediaan yang dihadapi perusahaan.

1. Definisi dan Tujuan Pengungkapan Aset Lancar

Aset lancar merupakan komponen penting dalam laporan posisi keuangan karena menunjukkan likuiditas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Menurut PSAK 1 (Revisi 2021) tentang Penyajian Laporan Keuangan, aset lancar didefinisikan sebagai aset yang diharapkan akan direalisasi, dijual, atau digunakan dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan. Pengungkapan aset lancar dalam laporan keuangan memiliki tujuan utama untuk memberikan informasi yang relevan dan transparan mengenai komposisi serta klasifikasi aset lancar yang dimiliki perusahaan. Informasi ini membantu pemangku kepentingan, seperti investor, kreditur, dan

manajemen, dalam menilai likuiditas, efisiensi pengelolaan aset, dan risiko yang terkait.

Pengungkapan aset lancar menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran aset, seperti metode penilaian persediaan (FIFO, *Average*, atau *Specific Identification*) dan penyisihan piutang tak tertagih, yang berdampak pada nilai tercatat aset. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dasar pengukuran dan asumsi yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Pengungkapan juga menekankan risiko dan estimasi signifikan, misalnya cadangan piutang yang mungkin tidak tertagih atau penurunan nilai persediaan, sehingga pengguna laporan dapat mengevaluasi potensi kerugian dan ketidakpastian yang mungkin mempengaruhi aset lancar di masa depan.

Pengungkapan aset lancar memungkinkan analisis perbandingan antarperiode, sehingga tren likuiditas dan efektivitas manajemen aset dapat dinilai dari tahun ke tahun. Informasi ini sangat berguna untuk pengambilan keputusan strategis dan operasional, seperti perencanaan modal kerja dan pengelolaan kas. Dengan demikian, pengungkapan aset lancar tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi transparan kepada pemangku kepentingan mengenai kondisi keuangan jangka pendek perusahaan.

2. Komponen-Komponen Aset Lancar dan Kebutuhan Pengungkapannya

Aset lancar merupakan salah satu unsur penting dalam laporan posisi keuangan karena menunjukkan likuiditas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Komponen aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, investasi jangka pendek, serta beban dibayar di muka, yang masing-masing memiliki karakteristik serta kebutuhan pengungkapan tersendiri.

Kas dan setara kas, sesuai PSAK 2 (2021), mencakup uang tunai di tangan, saldo rekening bank, kas kecil, dan investasi jangka pendek yang sangat likuid. Pengungkapan biasanya mencakup rincian saldo, kebijakan likuiditas, serta adanya pembatasan penggunaan kas, jika ada, untuk memberikan transparansi mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek (IAI, 2022). Piutang usaha, menurut PSAK 71 (2020), diungkapkan dengan nilai bruto, cadangan kerugian ekspektasian, kebijakan pengakuan, dan metode estimasi

expected credit loss (ECL), sehingga pengguna laporan keuangan dapat menilai risiko kredit dan kualitas piutang perusahaan (Kieso et al., 2022).

Persediaan, sesuai PSAK 14 (Revisi 2021), diungkapkan melalui metode penilaian yang digunakan, nilai tercatat, cadangan penurunan nilai, serta komponen biaya perolehan persediaan. Hal ini memungkinkan pemangku kepentingan menilai efektivitas pengelolaan persediaan serta potensi risiko penurunan nilai (IAI, 2021). Investasi jangka pendek yang dikategorikan sebagai aset keuangan menurut PSAK 71 (2020) diungkapkan berdasarkan klasifikasi aset keuangan (FVTPL, FVOCI, atau amortized cost), nilai wajar, dan kebijakan pengukuran, sehingga menunjukkan likuiditas dan tujuan investasi perusahaan.

Beban dibayar di muka, sebagai aset lancar, diungkapkan dengan rincian jenis beban, seperti asuransi atau sewa, serta periode manfaat ekonominya, sesuai PSAK 1 (2021). Pengungkapan ini penting untuk memahami alokasi biaya di masa depan dan dampaknya terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian, pengungkapan komponen aset lancar tidak hanya memberikan informasi kuantitatif, tetapi juga menjelaskan kebijakan akuntansi, asumsi, dan risiko yang terkait dengan aset lancar perusahaan.

3. Format Penyajian Aset Lancar dalam Laporan Posisi Keuangan

Pada laporan posisi keuangan atau neraca, aset lancar disajikan sebagai kelompok aset pertama karena tingkat likuiditasnya yang paling tinggi, yaitu kemampuan untuk dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu relatif singkat, biasanya dalam satu tahun atau satu siklus operasi perusahaan, mana yang lebih lama (PSAK 1, IAI, 2021). Penyajian aset lancar dilakukan berdasarkan urutan likuiditas, dimulai dari kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, investasi jangka pendek, hingga beban dibayar di muka.

Kas dan setara kas merupakan komponen paling likuid, meliputi uang tunai, saldo rekening bank, kas kecil, dan setara kas yang mudah dicairkan. Piutang usaha disajikan setelah kas, biasanya dalam nilai neto setelah dikurangi cadangan kerugian piutang, sehingga mencerminkan jumlah yang diharapkan dapat direalisasikan (PSAK 71, IAI, 2020). Persediaan dicatat berikutnya dan disajikan sebesar nilai tercatat, yaitu biaya perolehan dikurangi cadangan penurunan nilai, sesuai dengan

metode penilaian yang digunakan seperti FIFO atau rata-rata tertimbang (PSAK 14, IAI, 2021).

Investasi jangka pendek, seperti deposito berjangka dan surat berharga yang mudah diperdagangkan, disajikan setelah persediaan karena memiliki likuiditas tinggi namun tidak secepat kas atau piutang. Beban dibayar di muka disajikan terakhir karena walaupun dapat dimanfaatkan dalam satu periode, bentuknya belum menghasilkan manfaat ekonomi secara langsung dalam bentuk kas.

Contoh format penyajian dapat dilihat pada laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. tahun 2024, di mana kas dan setara kas sebesar Rp1.250 juta, piutang usaha neto Rp950 juta, persediaan Rp1.500 juta, investasi jangka pendek Rp600 juta, dan beban dibayar di muka Rp150 juta, sehingga total aset lancar menjadi Rp4.450 juta. Penyajian ini memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menilai likuiditas perusahaan, struktur aset, dan potensi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022).

4. Kebijakan Akuntansi dan Pengungkapan Tambahan

Kebijakan akuntansi dan pengungkapan tambahan berperan penting dalam penyajian aset lancar agar laporan keuangan memberikan informasi yang relevan, andal, dan transparan. Setiap komponen aset lancar, seperti kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, investasi jangka pendek, maupun beban dibayar di muka, harus disertai dengan penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan, termasuk dasar pengukuran, asumsi signifikan, serta estimasi yang diterapkan. Misalnya, dasar pengukuran dapat berupa historical cost, fair value, atau amortized cost, tergantung pada sifat aset dan tujuan pengukuran (PSAK 1, IAI, 2021).

Perusahaan wajib mengungkapkan informasi kuantitatif maupun kualitatif terkait risiko yang berhubungan dengan aset tersebut. Contohnya, untuk piutang usaha, perusahaan perlu menjelaskan metode cadangan kerugian piutang yang diterapkan, termasuk model kerugian kredit ekspektasian (*Expected Credit Loss/ECL*) yang mempertimbangkan riwayat gagal bayar pelanggan dan kondisi ekonomi saat ini. Sebagai ilustrasi, menurut PSAK 71 (IAI, 2020), pengungkapan catatan atas laporan keuangan dapat menyatakan bahwa “Piutang usaha disajikan sebesar nilai tercatat bersih setelah dikurangi cadangan

kerugian ekspektasian. Perusahaan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian berdasarkan riwayat gagal bayar pelanggan dan kondisi ekonomi terkini.”

Untuk persediaan, pengungkapan tambahan meliputi metode penilaian dan cadangan penurunan nilai. Berdasarkan PSAK 14 (IAI, 2021), perusahaan dapat menyatakan, “Persediaan dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan dihitung menggunakan metode first-in, first-out (FIFO). Pada tanggal 31 Desember 2024, perusahaan mengakui cadangan penurunan nilai persediaan sebesar Rp120 juta.” Pengungkapan semacam ini membantu pengguna laporan keuangan memahami asumsi manajemen, kebijakan akuntansi, serta risiko yang terkait dengan aset lancar, sehingga memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih tepat mengenai likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi operasi perusahaan.

F. Latihan Soal

1. Jelaskan perbedaan antara kas dan setara kas, serta berikan contoh masing-masing berdasarkan PSAK 2 (2023).
2. Jelaskan dua metode pencatatan piutang tak tertagih dan berikan contoh jurnalnya.
3. Sebuah perusahaan memiliki persediaan awal 500 unit @Rp10.000, pembelian 300 unit @Rp12.000, dan penjualan 400 unit. Hitung nilai persediaan akhir dengan metode FIFO dan LIFO.
4. Jelaskan perbedaan antara investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang menurut PSAK 71.
5. Sebutkan informasi yang perlu diungkapkan terkait aset lancar dalam laporan keuangan menurut PSAK 1.



BAB V

AKUNTANSI UNTUK ASET TIDAK LANCAR

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan aset tetap: pengakuan, pengukuran awal, dan penyusutan, memahami aset takberwujud (*intangible assets*), memahami penurunan nilai aset (*impairment*), memahami revaluasi aset, serta memahami penyajian dan pengungkapan aset tidak lancar. Sehingga pembaca dapat mampu menerapkan prinsip akuntansi aset tidak lancar secara profesional, akurat, dan sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan nasional maupun internasional.

Materi Pembelajaran

- Aset Tetap: Pengakuan, Pengukuran Awal, dan Penyusutan
- Aset Takberwujud (*Intangible Assets*)
- Penurunan Nilai Aset (*Impairment*)
- Revaluasi Aset
- Penyajian dan Pengungkapan Aset Tidak Lancar
- Latihan Soal

A. Aset Tetap: Pengakuan, Pengukuran Awal, dan Penyusutan

Aset tetap merupakan salah satu komponen utama dari aset tidak lancar yang memiliki peran penting dalam kegiatan operasional perusahaan. Aset tetap digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau digunakan untuk tujuan administratif dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Menurut PSAK 16 (Revisi 2020) yang mengacu pada IAS 16 Property, Plant and Equipment (IFRS Foundation, 2021), aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, serta diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi.

1. Pengakuan Aset Tetap

Pengakuan aset tetap merupakan langkah penting dalam akuntansi untuk mencatat aset yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi entitas. Menurut PSAK 16 paragraf 7 (IAI, 2020), suatu aset tetap dapat diakui jika memenuhi dua kriteria utama, yaitu kemungkinan besar manfaat ekonomis masa depan akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Contohnya, ketika perusahaan membeli mesin produksi baru, aset tersebut diakui sebagai aset tetap karena akan digunakan selama beberapa tahun untuk mendukung kegiatan operasional dan menghasilkan pendapatan. Sebaliknya, pengeluaran yang sifatnya rutin atau tidak menambah umur manfaat aset misalnya biaya perawatan atau reparasi minor tidak dikapitalisasi, melainkan dibebankan langsung sebagai biaya periode berjalan.

Perbedaan antara pengeluaran modal (*capital expenditure*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*) penting untuk dipahami agar pengakuan aset tetap dilakukan dengan tepat. Pengeluaran modal mencakup biaya yang menambah manfaat ekonomi jangka panjang, seperti pembelian mesin baru, renovasi bangunan, atau peningkatan kapasitas produksi. Biaya ini dicatat sebagai aset tetap dan kemudian disusutkan selama umur manfaat aset. Sebaliknya, pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya bertujuan mempertahankan kondisi aset tanpa menambah umur ekonomisnya, seperti biaya pemeliharaan rutin, perbaikan kecil, atau penggantian suku cadang minor. Pengeluaran ini diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya, sehingga tidak memengaruhi nilai aset tetap di neraca.

Pemahaman yang tepat mengenai pengakuan aset tetap membantu manajemen dalam membuat keputusan investasi, mengelola sumber daya perusahaan secara efisien, dan memastikan laporan keuangan menyajikan informasi yang andal mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan (Weygandt, Kieso, & Kimmel, 2022). Dengan demikian, pengakuan aset tetap bukan hanya soal pencatatan, tetapi juga tentang akurasi pengukuran manfaat ekonomi masa depan dan alokasi biaya secara sistematis.

2. Pengukuran Awal Aset Tetap

Pengukuran awal aset tetap dilakukan pada saat aset tersebut diakui untuk pertama kali dalam laporan keuangan. Menurut PSAK 16

paragraf 15 (IAI, 2020), pengukuran awal dilakukan berdasarkan biaya perolehan (*cost*), yang mencerminkan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset hingga siap digunakan sesuai tujuan manajemen. Biaya perolehan ini meliputi harga pembelian aset termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan, dikurangi diskon atau potongan harga yang diperoleh. Selain itu, biaya perolehan juga mencakup biaya langsung lain yang diperlukan agar aset dapat berfungsi, seperti biaya pengiriman, instalasi, dan uji coba. Jika perusahaan memiliki kewajiban untuk membongkar aset atau memulihkan lokasi setelah penggunaan aset, estimasi awal biaya tersebut juga termasuk dalam biaya perolehan sesuai PSAK 57 tentang Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan membeli mesin seharga Rp500.000.000, dengan biaya angkut Rp10.000.000 dan biaya instalasi Rp15.000.000. Maka, total biaya perolehan mesin yang dicatat sebagai aset tetap adalah Rp525.000.000. Diagram komponen biaya perolehan mencakup harga beli, pajak dan bea impor, biaya pengiriman dan instalasi, biaya uji coba, serta estimasi biaya pembongkaran dan pemulihan lokasi aset.

Aset tetap juga dapat diperoleh melalui pertukaran non-moneter atau hibah pemerintah. Dalam kasus tersebut, aset diakui sebesar nilai wajar (*fair value*) aset yang diterima, atau nilai wajar aset yang diserahkan jika lebih dapat diandalkan, sesuai PSAK 16 paragraf 24–28 dan PSAK 61 (Pemerintah, 2020). Pendekatan ini memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan nilai ekonomi yang realistik dari aset tetap sejak awal pengakuannya, sehingga memudahkan perusahaan dalam melakukan amortisasi atau penyusutan aset secara tepat serta memberikan informasi yang andal bagi pengguna laporan keuangan.

3. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Setelah pengakuan awal, aset tetap harus diukur secara berkelanjutan agar laporan keuangan mencerminkan nilai yang wajar dan relevan. Menurut PSAK 16 paragraf 31 (IAI, 2020), terdapat dua model pengukuran utama yang dapat diterapkan perusahaan, yaitu Model Biaya (*Cost Model*) dan Model Revaluasi (*Revaluation Model*). Pada Model Biaya, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan awal dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Model ini sederhana dan sering digunakan karena konsistensi nilai historis

memudahkan pencatatan penyusutan dan evaluasi kerugian penurunan nilai aset.

Model Revaluasi memungkinkan perusahaan menyesuaikan nilai aset tetap dengan nilai wajar yang tercermin di pasar pada tanggal revaluasi. Nilai tercatat aset setelah revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih realistik mengenai nilai ekonomi aset, terutama untuk aset yang memiliki fluktuasi nilai signifikan, seperti properti atau tanah. Misalnya, jika sebuah gedung dibeli seharga Rp1.000.000.000 dan beberapa tahun kemudian nilai wajarnya meningkat menjadi Rp1.200.000.000, perusahaan dapat melakukan revaluasi agar laporan posisi keuangan menunjukkan nilai buku yang lebih representatif sesuai kondisi pasar terkini.

Pemilihan model pengukuran ini harus konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), termasuk kebijakan penyusutan dan metode penilaian nilai wajar. Revaluasi yang dilakukan secara berkala memberikan informasi yang lebih relevan bagi pengguna laporan keuangan mengenai posisi keuangan dan kapasitas perusahaan dalam menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Model pengukuran yang tepat akan memengaruhi laba bersih dan ekuitas perusahaan, sehingga pemilihan model harus mempertimbangkan karakteristik aset, stabilitas nilai pasar, serta tujuan pelaporan keuangan (Weygandt, Kieso, & Kimmel, 2022).

4. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap merupakan proses alokasi sistematis dari jumlah yang dapat disusutkan selama umur manfaat aset untuk mencerminkan pemakaian atau penurunan manfaat ekonomis aset tersebut. Menurut PSAK 16 paragraf 43 (IAI, 2020), jumlah yang dapat disusutkan dihitung sebagai selisih antara biaya perolehan aset dengan nilai residu yang diperkirakan pada akhir umur ekonomisnya. Tujuan utama penyusutan adalah menyesuaikan biaya aset dengan pendapatan yang dihasilkan selama periode penggunaannya, sehingga prinsip akuntansi matching terpenuhi.

Terdapat beberapa metode penyusutan yang umum digunakan, masing-masing memiliki karakteristik dan aplikasi tertentu. Metode

garis lurus (*straight-line*) membebankan jumlah penyusutan yang sama setiap tahun, dihitung dengan rumus: (Biaya perolehan – Nilai residu) / Umur ekonomis. Metode ini sederhana dan memberikan beban stabil, cocok untuk aset dengan pemakaian relatif konsisten. Metode saldo menurun (*declining balance*) membebankan penyusutan lebih besar di awal umur aset, menggunakan rumus: Nilai buku awal \times tarif penyusutan, sehingga lebih sesuai untuk aset yang cepat mengalami penurunan nilai atau teknologi yang cepat usang. Metode unit produksi (*units of production*) membebankan penyusutan berdasarkan output aktual aset dibandingkan total kapasitas estimasi, relevan untuk mesin atau peralatan yang pemakaiannya berkaitan langsung dengan volume produksi.

Sebagai ilustrasi, sebuah mesin dengan biaya Rp100.000.000, nilai residu Rp10.000.000, dan umur ekonomis 5 tahun, jika menggunakan metode garis lurus, beban penyusutan tahunan adalah Rp18.000.000. Penyusutan dimulai ketika aset siap digunakan dan dihentikan jika aset diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau manfaat ekonominya tidak lagi diharapkan, sesuai PSAK 58 (IAI, 2020). Alur penyusutan mencakup pengakuan aset, penentuan umur ekonomis, pemilihan metode, perhitungan beban, hingga pencatatan dalam laporan keuangan, sehingga informasi yang disajikan akurat dan mencerminkan kondisi ekonomi aset secara realistik (Weygandt, Kieso, & Kimmel, 2022).

B. Aset Takberwujud (*Intangible Assets*)

Aset takberwujud merupakan bagian penting dari aset tidak lancar yang memberikan manfaat ekonomi di masa depan bagi perusahaan, meskipun tidak memiliki bentuk fisik seperti aset tetap. Dalam era ekonomi digital dan berbasis pengetahuan saat ini, aset takberwujud sering kali menjadi penentu utama nilai suatu entitas misalnya hak paten, merek dagang, lisensi, perangkat lunak, dan *goodwill*. Menurut PSAK 19 (Revisi 2020) yang mengadopsi IAS 38 Intangible Assets (IFRS Foundation, 2021), aset takberwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif.

1. Pengakuan Aset Takberwujud

Pengakuan aset takberwujud merupakan proses pencatatan aset non-fisik yang memiliki nilai ekonomis dan manfaat masa depan bagi perusahaan. Menurut PSAK 19 paragraf 21 (IAI, 2020), suatu aset takberwujud hanya dapat diakui jika kemungkinan besar manfaat ekonomis masa depan yang terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas, serta biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset takberwujud dapat diperoleh melalui pembelian dari pihak eksternal, misalnya hak cipta, paten, atau lisensi, maupun melalui pengembangan internal, seperti perangkat lunak atau pengembangan merek sendiri, selama memenuhi kriteria pengakuan yang ditetapkan.

PSAK 19 membedakan secara tegas antara biaya penelitian (*research*) dan biaya pengembangan (*development*). Biaya penelitian adalah pengeluaran untuk menemukan pengetahuan baru atau ide inovatif tanpa kepastian manfaat ekonomi langsung. Oleh karena itu, biaya penelitian harus diakui sebagai beban periode berjalan dan tidak dapat dikapitalisasi. Sebaliknya, biaya pengembangan merupakan penerapan hasil penelitian untuk menciptakan produk, layanan, atau proses baru yang dapat digunakan secara komersial. Jika biaya pengembangan memenuhi kriteria pengakuan aset, seperti kemampuan menyelesaikan proyek, penggunaan atau penjualan produk yang dihasilkan, serta kemampuan mengukur biaya dengan andal, maka biaya tersebut dapat dikapitalisasi sebagai aset takberwujud.

Contoh pengakuan aset takberwujud termasuk biaya pembuatan perangkat lunak internal yang siap digunakan untuk operasional perusahaan atau biaya pengembangan merek yang dapat menghasilkan pendapatan masa depan. Pencatatan yang tepat terhadap aset takberwujud penting karena mempengaruhi laporan posisi keuangan dan kinerja perusahaan, serta membantu pemangku kepentingan memahami nilai ekonomi tidak berwujud yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian, pengakuan aset takberwujud harus dilakukan secara hati-hati, mempertimbangkan karakteristik aset, tujuan penggunaannya, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku (Weygandt, Kieso, & Kimmel, 2022).

2. Pengukuran Awal Aset Takberwujud

Pengukuran awal aset takberwujud dilakukan pada saat aset tersebut diakui, dan dasar pengukurannya adalah biaya perolehan (*cost*)

sesuai dengan PSAK 19 paragraf 24 (IAI, 2020). Biaya perolehan mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh aset dan membuatnya siap digunakan sesuai tujuan manajemen. Untuk aset yang diperoleh melalui pembelian, biaya perolehan meliputi harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak yang tidak dapat dikreditkan, dikurangi diskon atau potongan harga. Selain itu, biaya langsung yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar siap digunakan, seperti biaya instalasi, pelatihan, lisensi, dan pengujian, juga harus dimasukkan dalam biaya perolehan.

Pada kasus aset takberwujud yang dikembangkan secara internal, seperti perangkat lunak atau produk baru, pengukuran awal hanya memasukkan biaya yang dapat diatribusikan langsung pada kegiatan pengembangan, pengujian, dan penyempurnaan produk atau sistem. Biaya penelitian yang bersifat eksploratif atau investigatif tidak boleh dikapitalisasi dan harus dibebankan sebagai beban periode berjalan. Dengan demikian, hanya biaya yang secara nyata menambah nilai aset dan dapat diukur secara andal yang dimasukkan dalam biaya perolehan.

Sebagai contoh, PT ABC membeli perangkat lunak senilai Rp100.000.000 dan menanggung biaya tambahan untuk instalasi serta pelatihan karyawan sebesar Rp20.000.000. Total biaya perolehan aset takberwujud yang dicatat dalam laporan keuangan adalah Rp120.000.000. Pendekatan ini memastikan bahwa nilai tercatat aset takberwujud mencerminkan seluruh biaya yang diperlukan agar aset tersebut siap digunakan, sehingga laporan keuangan memberikan informasi yang akurat tentang sumber daya ekonomi perusahaan.

3. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dapat diukur menggunakan salah satu dari dua model pengukuran yang diatur oleh PSAK 19 paragraf 72, yaitu model biaya (*Cost Model*) dan model revaluasi (*Revaluation Model*) (IAI, 2020). Dalam model biaya, aset dicatat sebesar biaya perolehan awal dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai. Pendekatan ini bersifat konservatif dan mudah diterapkan karena mengandalkan biaya historis yang tercatat secara andal. Model biaya cocok digunakan untuk aset yang tidak memiliki pasar aktif atau sulit untuk dinilai secara wajar, sehingga stabilitas nilai buku lebih terjaga, meskipun tidak mencerminkan nilai pasar terkini.

Model revaluasi memungkinkan aset dicatat berdasarkan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai setelah revaluasi. Model ini memberikan informasi yang lebih relevan dan *up-to-date* bagi pengguna laporan keuangan, karena mencerminkan estimasi nilai ekonomi aset saat ini. Namun, penerapan model revaluasi terbatas pada aset yang memiliki pasar aktif atau dapat dinilai secara andal, seperti lisensi telekomunikasi, hak siar, atau hak paten tertentu. Keterbatasan lainnya adalah proses penilaian yang kompleks dan membutuhkan penilaian independen untuk menentukan nilai wajar aset.

Pemilihan model pengukuran harus mempertimbangkan karakteristik aset dan kebutuhan informasi bagi pengguna laporan keuangan. Misalnya, jika PT XYZ memiliki lisensi software yang aktif diperdagangkan di pasar sekunder, model revaluasi dapat memberikan gambaran nilai aset yang lebih realistik. Sebaliknya, untuk aset takberwujud internal yang unik, seperti pengembangan merek perusahaan, model biaya lebih sesuai karena tidak terdapat pasar aktif untuk menentukan nilai wajar. Dengan demikian, model pengukuran setelah pengakuan awal membantu perusahaan menyajikan aset takberwujud secara akurat dan relevan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, memastikan laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya (IFRS Foundation, 2021; Weygandt, Kieso, & Kimmel, 2022).

4. Amortisasi Aset Takberwujud

Amortisasi aset takberwujud adalah proses sistematis untuk mengalokasikan biaya perolehan aset selama masa manfaatnya. Menurut PSAK 19 dan PSAK 48, aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi mulai saat aset tersebut siap digunakan dan dihentikan ketika aset diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual (IAI, 2020). Tujuan utama amortisasi adalah mencerminkan konsumsi manfaat ekonomi yang diperoleh dari aset takberwujud tersebut dalam periode akuntansi. Metode amortisasi umumnya mengikuti pola konsumsi manfaat ekonomi aset; jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, metode garis lurus (*straight-line*) digunakan sebagai pendekatan default.

Rumus amortisasi garis lurus menghitung beban amortisasi tahunan dengan membagi selisih antara biaya perolehan dan nilai residu aset dengan umur ekonomis aset. Misalnya, sebuah perusahaan membeli perangkat lunak senilai Rp120.000.000 dengan umur manfaat empat tahun dan tanpa nilai residu. Berdasarkan metode garis lurus, amortisasi tahunan yang dicatat perusahaan adalah Rp30.000.000 per tahun. Jurnalnya akan mencatat beban amortisasi sebagai pengurang nilai aset takberwujud di laporan posisi keuangan dan sebagai beban amortisasi di laporan laba rugi, sehingga memberikan representasi yang lebih akurat atas biaya penggunaan aset dalam menghasilkan pendapatan.

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, seperti merek terkenal atau hak cipta jangka panjang, tidak diamortisasi. Namun, perusahaan wajib melakukan pengujian penurunan nilai (*impairment test*) setiap tahun untuk memastikan nilai tercatat aset tidak melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, sebagaimana diatur dalam PSAK 48 (IAI, 2020). Proses ini membantu mengidentifikasi kemungkinan kerugian nilai aset akibat perubahan kondisi pasar, teknologi, atau strategi bisnis. Dengan demikian, kebijakan amortisasi dan uji penurunan nilai aset takberwujud berperan penting dalam menyajikan laporan keuangan yang relevan, andal, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, memberikan gambaran yang jelas tentang penggunaan dan nilai ekonomi aset takberwujud dalam jangka panjang.

5. Penurunan Nilai Aset Takberwujud (*Impairment*)

Penurunan nilai aset takberwujud merupakan proses penting untuk memastikan bahwa nilai tercatat aset dalam laporan keuangan tidak melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*). Menurut PSAK 48 (IAI, 2020), entitas wajib melakukan uji penurunan nilai ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatat suatu aset takberwujud mungkin tidak dapat dipulihkan. Indikasi tersebut dapat berupa perubahan signifikan dalam kondisi pasar, teknologi, hukum, atau strategi bisnis yang mempengaruhi kemampuan aset menghasilkan manfaat ekonomi masa depan.

Proses penurunan nilai dimulai dengan menentukan nilai yang dapat dipulihkan dari aset, yaitu nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual (*fair value less costs to sell*) dan nilai pakai (*value in use*) aset. Jika nilai tercatat melebihi nilai yang dapat

dipulihkan, selisihnya diakui sebagai rugi penurunan nilai dalam laporan laba rugi periode berjalan. Rumus sederhana untuk menghitung rugi penurunan nilai adalah selisih antara nilai tercatat dan nilai yang dapat dipulihkan. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki lisensi perangkat lunak dengan nilai tercatat Rp80.000.000. Setelah dilakukan evaluasi, nilai yang dapat dipulihkan dari lisensi tersebut hanya sebesar Rp60.000.000. Selisih Rp20.000.000 dicatat sebagai rugi penurunan nilai, yang langsung mempengaruhi laba bersih periode tersebut.

Penurunan nilai ini tidak hanya berdampak pada laporan laba rugi, tetapi juga mempengaruhi nilai buku aset takberwujud pada laporan posisi keuangan, sehingga memberikan gambaran yang lebih realistik mengenai kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, entitas diwajibkan untuk mengungkapkan kebijakan dan asumsi yang digunakan dalam penentuan nilai yang dapat dipulihkan, termasuk tingkat diskonto, proyeksi arus kas, dan faktor risiko lainnya, untuk memberikan transparansi kepada pengguna laporan keuangan (Weygandt, Kieso, & Kimmel, 2022). Dengan demikian, uji penurunan nilai menjadi alat penting dalam menjaga relevansi dan reliabilitas informasi keuangan terkait aset takberwujud.

C. Penurunan Nilai Aset (*Impairment*)

Penurunan nilai aset (*impairment of assets*) merupakan suatu kondisi di mana jumlah tercatat (*carrying amount*) suatu aset melebihi jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) dari aset tersebut. Konsep ini diatur secara komprehensif dalam PSAK 48 (Revisi 2023): Penurunan Nilai Aset, yang mengadopsi prinsip-prinsip dari IAS 36 (*Impairment of Assets*) yang diterbitkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB, 2022). Tujuan utama dari standar ini adalah memastikan bahwa aset tidak dicatat melebihi jumlah yang dapat diperoleh kembali, sehingga laporan keuangan menyajikan nilai yang wajar dan tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan.

1. Pengertian dan Tujuan Penurunan Nilai Aset

Penurunan nilai aset merupakan konsep penting dalam akuntansi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aset yang dicatat dalam laporan keuangan mencerminkan nilai ekonomi yang realistik. Menurut PSAK 48 (IAI, 2023), penurunan nilai terjadi ketika nilai tercatat suatu aset

melebihi jumlah yang dapat diperoleh kembali melalui penggunaan atau penjualan aset tersebut. Dengan kata lain, jika potensi manfaat ekonomi masa depan yang dapat dihasilkan oleh aset lebih rendah daripada nilai buku yang tercatat, perusahaan harus mengakui kerugian penurunan nilai untuk menyesuaikan nilai aset tersebut.

Tujuan utama pengujian penurunan nilai adalah untuk menjaga keandalan dan relevansi laporan keuangan. Proses ini membantu mencegah overstatement atau penggelembungan nilai aset, yang dapat menyesatkan investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menilai posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Selain itu, penurunan nilai aset memberikan informasi yang lebih transparan mengenai kondisi ekonomi perusahaan, termasuk potensi risiko terkait aset yang dimiliki. Dengan demikian, pengungkapan kerugian penurunan nilai meningkatkan akuntabilitas manajemen dalam pengelolaan aset, karena manajemen diharuskan menilai dan melaporkan secara objektif nilai aset yang dimiliki.

Secara praktis, pengakuan penurunan nilai juga membantu investor dan analis dalam mengambil keputusan ekonomi yang lebih tepat, karena nilai aset yang disesuaikan mencerminkan ekspektasi manfaat masa depan secara lebih akurat. Penurunan nilai dapat terjadi pada berbagai jenis aset, termasuk aset tetap, aset takberwujud, persediaan, dan investasi jangka panjang, sehingga perusahaan perlu melakukan evaluasi secara periodik untuk mendeteksi indikasi penurunan nilai. Evaluasi ini umumnya didasarkan pada indikator internal maupun eksternal, seperti perubahan kondisi pasar, kemajuan teknologi, atau kinerja ekonomi perusahaan (Weygandt, Kieso, & Kimmel, 2022).

2. Indikator Penurunan Nilai Aset

Penilaian terhadap kemungkinan terjadinya penurunan nilai aset dimulai dengan identifikasi adanya indikator penurunan nilai, yang dapat bersifat eksternal maupun internal. Indikator eksternal meliputi perubahan kondisi pasar atau ekonomi yang signifikan, seperti penurunan drastis nilai pasar aset, perubahan teknologi atau regulasi yang merugikan, serta fluktuasi tingkat suku bunga yang meningkatkan tingkat diskonto sehingga menurunkan nilai kini arus kas masa depan aset. Selain itu, apabila kapitalisasi pasar perusahaan berada di bawah

nilai tercatat aset bersihnya, hal ini juga menjadi sinyal bahwa aset mungkin telah mengalami penurunan nilai (PSAK 48, IAI, 2023).

Indikator internal berkaitan dengan kondisi operasional dan fisik aset itu sendiri. Kerusakan fisik aset, perubahan pola penggunaan aset, seperti penghentian operasi atau restrukturisasi, serta penurunan kinerja ekonomi aset dibandingkan dengan ekspektasi awal, menjadi faktor yang menunjukkan kemungkinan terjadinya penurunan nilai. Misalnya, mesin produksi yang mengalami kerusakan signifikan atau tidak lagi digunakan secara optimal dapat menunjukkan bahwa nilai tercatatnya melebihi manfaat ekonomis yang akan diperoleh.

Identifikasi indikator ini bersifat kritis karena menjadi dasar bagi entitas untuk melakukan pengujian penurunan nilai (impairment test). PSAK 48 (IAI, 2023) menekankan bahwa jika satu atau lebih indikator tersebut teridentifikasi, perusahaan wajib menghitung nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset dan membandingkannya dengan nilai tercatatnya. Apabila nilai tercatat lebih tinggi daripada jumlah yang dapat diperoleh kembali, perusahaan harus mengakui rugi penurunan nilai dalam laporan laba rugi.

3. Pengukuran Jumlah yang Dapat Diperoleh Kembali (*Recoverable Amount*)

Jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) merupakan konsep kunci dalam penilaian penurunan nilai aset. Menurut PSAK 48 (IAI, 2023), *recoverable amount* adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual (*fair value less costs to sell*) dan nilai pakai (*value in use*). Konsep ini memastikan bahwa aset tidak dicatat lebih tinggi daripada manfaat ekonomis masa depan yang dapat dihasilkan dari penggunaannya atau penjualannya.

Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual mencerminkan jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan aset dalam transaksi wajar antara pihak-pihak yang berkeinginan, memahami kondisi pasar, dan tanpa tekanan tertentu. Penilaian ini biasanya mengacu pada harga pasar aktif atau melalui penilaian profesional independen sesuai prinsip *Fair Value Hierarchy* dalam IFRS 13. Biaya untuk menjual meliputi biaya transaksi yang langsung terkait dengan pelepasan aset, sehingga nilai yang dicatat lebih realistik dan konservatif.

Nilai pakai (*value in use*) merupakan pendekatan berbasis arus kas, yang menilai aset berdasarkan estimasi arus kas masa depan yang diharapkan diperoleh dari penggunaan berkelanjutan aset tersebut dan pelepasannya pada akhir umur manfaat. Perhitungan nilai pakai dilakukan dengan mendiskontokan arus kas masa depan menggunakan tingkat diskonto yang mencerminkan risiko spesifik aset, sehingga nilai kini yang dihasilkan mencerminkan risiko dan waktu terkait manfaat ekonomi. Rumus umum yang digunakan adalah:

$$VIU = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

di mana CF_t adalah arus kas bersih pada periode ke-t, r adalah tingkat diskonto, dan (n) adalah jumlah periode estimasi manfaat ekonomi.

Dengan membandingkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai, entitas dapat menentukan jumlah yang dapat diperoleh kembali secara konservatif dan akurat. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa nilai tercatat aset mencerminkan potensi manfaat ekonomi yang realistik, meningkatkan keandalan laporan keuangan, serta memberikan informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan mengenai kondisi keuangan perusahaan (Weygandt, Kieso, & Kimmel, 2022).

4. Perlakuan Akuntansi atas Penurunan Nilai

Perlakuan akuntansi atas penurunan nilai aset merupakan bagian penting untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan nilai aset yang realistik dan tidak melebih-lebihkan posisi keuangan perusahaan. Menurut PSAK 48 (IAI, 2023), jika jumlah tercatat suatu aset melebihi jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*), selisihnya harus diakui sebagai rugi penurunan nilai (*impairment loss*). Rugi ini mencerminkan kerugian ekonomi yang timbul karena penurunan manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, baik akibat perubahan kondisi pasar, kerusakan fisik, maupun penurunan kinerja ekonomi aset.

Pada praktik akuntansi, penurunan nilai aset tetap dicatat dengan mendebit akun Rugi Penurunan Nilai Aset dan mengkredit akun Akumulasi Penurunan Nilai Aset. Jurnal ini mencatat secara sistematis

kerugian yang dialami aset pada periode terjadinya, sehingga laporan laba rugi memberikan informasi yang relevan dan andal mengenai dampak penurunan nilai aset terhadap kinerja keuangan perusahaan. Misalnya, jika sebuah mesin memiliki nilai tercatat Rp500.000.000 dan jumlah yang dapat diperoleh kembali hanya Rp400.000.000, maka selisih Rp100.000.000 diakui sebagai rugi penurunan nilai.

Untuk aset yang dicatat menggunakan model revaluasi, penurunan nilai aset dicatat dengan cara berbeda. Rugi penurunan nilai pertama-tama mengurangi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, sesuai ketentuan PSAK 16 dan PSAK 48. Jika saldo surplus revaluasi tidak cukup untuk menutupi rugi, sisa kerugian diakui langsung dalam laporan laba rugi. Pendekatan ini menjaga konsistensi nilai buku aset yang direvaluasi dan menghindari overstated asset, sekaligus memberikan informasi transparan kepada pemangku kepentingan tentang dampak perubahan nilai aset terhadap posisi keuangan perusahaan.

D. Revaluasi Aset

Revaluasi aset merupakan salah satu topik penting dalam akuntansi keuangan yang berhubungan dengan pengukuran kembali nilai aset tetap agar mencerminkan nilai wajar (*fair value*) pada tanggal laporan keuangan. Revaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa nilai tercatat (*carrying amount*) aset tidak berbeda secara material dari nilai wajarnya. Konsep ini diatur dalam PSAK 16 (Revisi 2023): Aset Tetap, yang selaras dengan IAS 16 (*Property, Plant and Equipment*) yang diterbitkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB, 2022). Tujuan utama revaluasi adalah untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan melalui penyajian nilai aset yang lebih realistik terhadap kondisi pasar terkini.

1. Pengertian Revaluasi Aset

Revaluasi aset adalah proses penyesuaian nilai tercatat aset tetap agar mencerminkan nilai wajarnya pada tanggal revaluasi, dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai setelah revaluasi. Menurut PSAK 16 paragraf 31 (IAI, 2023), tujuan utama revaluasi adalah memastikan bahwa laporan keuangan memberikan informasi yang relevan dan andal mengenai nilai aset tetap, sehingga nilai buku

tidak menyimpang jauh dari nilai pasar atau nilai ekonomi aset tersebut. Revaluasi tidak hanya sekadar perubahan angka akuntansi, tetapi juga mencerminkan perubahan kondisi ekonomi, fluktuasi harga pasar, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai aset.

Pada praktiknya, revaluasi dapat dilakukan secara berkala atau setiap kali terdapat perubahan signifikan pada nilai wajar aset. Misalnya, sebuah gedung yang awalnya dicatat senilai Rp5 miliar dengan akumulasi penyusutan Rp1 miliar mungkin saat ini memiliki nilai pasar Rp7 miliar. Melalui revaluasi, nilai buku gedung tersebut disesuaikan menjadi Rp7 miliar, dan akumulasi penyusutan disesuaikan sehingga laporan posisi keuangan mencerminkan nilai wajar terkini. Selisih antara nilai revaluasi dan nilai tercatat awal dicatat dalam akun surplus revaluasi di ekuitas, kecuali jika revaluasi menghasilkan rugi yang mengurangi surplus sebelumnya, yang kemudian diakui dalam laba rugi sesuai ketentuan PSAK 16.

Revaluasi juga memengaruhi penyusutan berikutnya, karena beban penyusutan di masa mendatang dihitung berdasarkan nilai tercatat baru. Dengan demikian, revaluasi aset memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai posisi keuangan perusahaan dan mendukung pengambilan keputusan manajemen serta analisis pemangku kepentingan. Hal ini menjadi penting terutama untuk aset dengan nilai signifikan dan pasar yang aktif, seperti properti, pabrik, dan peralatan berat, di mana perubahan nilai wajar dapat berdampak material terhadap laporan keuangan (Weygandt, Kieso, & Kimmel, 2022).

2. Tujuan dan Manfaat Revaluasi Aset

Revaluasi aset memiliki tujuan strategis yang penting bagi perusahaan, baik dari perspektif pelaporan keuangan maupun manajemen. Menurut PSAK 16 (IAI, 2023), tujuan utama revaluasi adalah untuk mencerminkan nilai ekonomi yang wajar dari aset tetap di laporan keuangan, sehingga nilai tercatat aset tidak menyimpang jauh dari nilai pasar atau manfaat ekonomi yang diharapkan. Dengan melakukan revaluasi, perusahaan dapat meningkatkan transparansi dan kredibilitas laporan keuangannya di mata investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya, karena angka-angka yang disajikan lebih relevan dan akurat.

Revaluasi aset dapat menyesuaikan nilai tercatat aset terhadap inflasi atau perubahan nilai pasar yang signifikan, sehingga laporan

keuangan mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih realistik. Dampak positif lain dari revaluasi adalah peningkatan ekuitas melalui akun surplus revaluasi, yang secara tidak langsung dapat memperbaiki rasio keuangan seperti *debt-to-equity ratio*. Hal ini penting bagi perusahaan yang sedang mempertimbangkan strategi pembiayaan, merger, atau akuisisi, karena penilaian perusahaan (*valuation*) menjadi lebih akurat dan mencerminkan nilai aset yang sebenarnya.

Manfaat revaluasi tidak hanya terbatas pada aspek pelaporan, tetapi juga membantu manajemen dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan aset, investasi tambahan, atau divestasi. Dengan informasi nilai wajar, manajemen dapat merencanakan pemeliharaan, penggantian, atau pemanfaatan aset secara lebih efektif. Namun, revaluasi juga memiliki risiko tertentu. Nilai aset yang meningkat akibat revaluasi akan menimbulkan beban penyusutan yang lebih tinggi di periode mendatang, sehingga dapat mempengaruhi laba bersih. Selain itu, proses revaluasi memerlukan penilaian profesional dan audit yang lebih kompleks, sehingga menimbulkan biaya tambahan bagi perusahaan (Weygandt, Kieso, & Kimmel, 2022). Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan manfaat dan risiko secara seimbang sebelum melakukan revaluasi aset tetap.

3. Model Pengukuran dalam PSAK 16

Pada PSAK 16, setelah pengakuan awal, aset tetap dapat diukur menggunakan dua model utama, yakni Model Biaya (*Cost Model*) dan Model Revaluasi (*Revaluation Model*), yang masing-masing memiliki karakteristik dan implikasi akuntansi berbeda. Model Biaya menetapkan bahwa aset dicatat sebesar biaya perolehan awal dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai yang mungkin timbul. Model ini bersifat stabil dan mudah diterapkan karena tidak memerlukan penilaian nilai wajar secara berkala, sehingga laporan keuangan cenderung lebih konsisten dari periode ke periode. Penyusutan dihitung berdasarkan nilai historis aset, dan tidak ada pengaruh langsung terhadap ekuitas perusahaan selain akumulasi penyusutan (PSAK 16, IAI, 2023).

Model Revaluasi memungkinkan aset dicatat sebesar nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai setelah revaluasi. Model ini memberikan informasi yang lebih relevan karena mencerminkan kondisi pasar dan nilai ekonomi terkini dari aset tetap. Penggunaan model ini hanya diperbolehkan jika

nilai wajar aset dapat diukur secara andal. Revaluasi dilakukan secara periodik, terutama ketika terdapat perubahan signifikan dalam nilai wajar aset. Dampak dari revaluasi langsung memengaruhi ekuitas melalui akun surplus revaluasi, dan penyusutan dihitung berdasarkan nilai setelah revaluasi, sehingga laba periode berjalan dapat berubah dibandingkan dengan Model Biaya (Weygandt, Kieso, & Kimmel, 2022).

Pemilihan antara kedua model ini tergantung pada tujuan pelaporan perusahaan dan relevansi informasi bagi pemangku kepentingan. Model Biaya cocok bagi perusahaan yang mengutamakan kesederhanaan dan konsistensi, sedangkan Model Revaluasi lebih relevan untuk aset dengan fluktuasi nilai signifikan atau ketika perusahaan ingin menunjukkan nilai aset yang lebih aktual dalam laporan keuangan. Dengan demikian, pemilihan model pengukuran aset tetap memiliki dampak penting terhadap penyajian laporan keuangan dan keputusan manajerial.

4. Proses Revaluasi Aset

Proses revaluasi aset merupakan rangkaian langkah sistematis yang bertujuan untuk menyesuaikan nilai tercatat aset tetap agar mencerminkan nilai wajarnya sesuai dengan standar akuntansi, khususnya PSAK 16 (IAI, 2023). Tahap pertama dalam proses ini adalah identifikasi aset yang akan direvaluasi. PSAK 16 menekankan bahwa revaluasi harus dilakukan pada seluruh kelompok aset yang sejenis, misalnya semua gedung, mesin, atau kendaraan, agar konsistensi dan keterbandingan informasi keuangan tetap terjaga. Dengan demikian, perusahaan tidak dapat melakukan revaluasi hanya pada satu aset secara parsial dalam kelompok tersebut.

Tahap berikutnya adalah penentuan nilai wajar (*fair value*) aset. Penilaian nilai wajar dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain menggunakan harga pasar aktif jika tersedia, melibatkan penilai profesional independen (*appraisal*), atau menggunakan teknik penilaian berbasis arus kas masa depan (*income approach*) untuk aset yang tidak memiliki pasar aktif. Penentuan nilai wajar yang andal sangat penting karena akan menjadi dasar penyesuaian nilai buku aset.

Tahap selanjutnya adalah penyesuaian nilai buku aset. Nilai tercatat aset disesuaikan dengan nilai wajar yang baru, dan selisih antara nilai baru dan nilai lama diakui sebagai surplus revaluasi dalam ekuitas,

bukan melalui laporan laba rugi. Hal ini memastikan bahwa laporan laba rugi tidak terpengaruh langsung oleh fluktuasi nilai pasar jangka pendek, sekaligus meningkatkan transparansi dan relevansi laporan keuangan. Tahap terakhir adalah penyusutan aset setelah revaluasi. Aset yang telah direvaluasi disusutkan berdasarkan nilai revaluasi dan sisa umur manfaat yang direvisi. Dengan demikian, beban penyusutan masa depan mencerminkan nilai ekonomis terkini dari aset tersebut. Proses revaluasi yang terstruktur ini tidak hanya memperbarui nilai buku aset, tetapi juga memberikan informasi yang lebih akurat dan relevan bagi manajemen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya.

E. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tidak Lancar

Penyajian dan pengungkapan aset tidak lancar dalam laporan keuangan memiliki peran penting dalam memberikan gambaran yang akurat dan transparan mengenai posisi keuangan perusahaan. Aset tidak lancar, yang meliputi aset tetap, aset takberwujud, dan investasi jangka panjang, merupakan sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi entitas. Oleh karena itu, penyajian dan pengungkapan harus mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang diatur dalam standar akuntansi keuangan seperti PSAK 16 (Aset Tetap), PSAK 19 (Aset Takberwujud), serta PSAK 48 (Penurunan Nilai Aset).

1. Penyajian Aset Tidak Lancar di Neraca

Penyajian aset tidak lancar dalam laporan posisi keuangan dilakukan secara terpisah dari aset lancar untuk memberikan informasi yang jelas mengenai sumber daya perusahaan yang memberikan manfaat ekonomi di masa depan, sesuai dengan PSAK 1 (IAI, 2023). Aset tidak lancar merupakan aset yang tidak diharapkan untuk direalisasi, dijual, atau digunakan dalam jangka waktu satu tahun atau siklus operasi normal perusahaan. Dengan penyajian terpisah, pengguna laporan keuangan, termasuk investor dan kreditur, dapat mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang.

Komponen utama aset tidak lancar mencakup aset tetap, aset takberwujud, investasi jangka panjang, dan properti investasi. Aset tetap, seperti tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan, diakui dan diukur berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai sesuai PSAK 16 (IAI, 2023). Aset takberwujud,

termasuk hak paten, lisensi, merek dagang, dan goodwill, diukur berdasarkan biaya perolehan dikurangi amortisasi dan penurunan nilai sesuai PSAK 19 (IAI, 2023). Investasi jangka panjang, seperti saham atau obligasi yang dimiliki lebih dari satu tahun, diukur pada nilai wajar atau biaya perolehan tergantung pada klasifikasi aset keuangan menurut PSAK 71 (IAI, 2023). Sementara itu, properti investasi, seperti gedung yang disewakan atau diharapkan mengalami kenaikan nilai, dapat diukur menggunakan model nilai wajar atau model biaya sesuai PSAK 13 (IAI, 2023).

Pada praktiknya, perusahaan dapat memilih antara model biaya (*cost model*) atau model revaluasi (*revaluation model*) dalam penyajian aset tidak lancar, tergantung pada kebijakan akuntansi yang diadopsi dan karakteristik aset yang dimiliki (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2023). Model revaluasi biasanya digunakan untuk aset tetap yang memiliki pasar aktif sehingga nilai wajarnya dapat diukur secara andal, sedangkan model biaya lebih umum diterapkan untuk aset yang nilai pasarnya tidak mudah ditentukan. Penyajian yang jelas dan konsisten membantu pengguna laporan keuangan dalam menilai likuiditas jangka panjang, kapasitas produksi, serta potensi pertumbuhan nilai aset perusahaan.

2. Pengungkapan Aset Tetap (PSAK 16, 2023)

Pengungkapan aset tetap menurut PSAK 16 (IAI, 2023) merupakan bagian penting dalam laporan keuangan yang bertujuan memberikan informasi lengkap dan transparan mengenai aset tetap yang dimiliki perusahaan. Pengungkapan ini memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami kapasitas produktif perusahaan, kebijakan akuntansi yang diterapkan, serta potensi manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari aset tersebut. Informasi yang wajib diungkapkan meliputi dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto, metode penyusutan yang diterapkan, umur manfaat atau tarif penyusutan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode, serta rekonsiliasi jumlah tercatat selama periode berjalan.

Metode penyusutan dapat berupa garis lurus (*straight-line*) yang membebankan biaya secara merata sepanjang umur manfaat, atau metode saldo menurun (*declining balance*) yang memberikan beban lebih besar pada awal penggunaan aset. Umur manfaat dan nilai residu aset tetap juga harus diungkapkan karena keduanya memengaruhi

perhitungan penyusutan dan mencerminkan ekspektasi pemakaian ekonomis aset. Selain itu, rekonsiliasi aset tetap membantu pengguna laporan keuangan melihat perubahan nilai tercatat akibat penambahan aset baru, pelepasan aset lama, akumulasi penyusutan, serta rugi penurunan nilai.

Contoh pengungkapan aset tetap dapat ditunjukkan melalui tabel yang mencantumkan jenis aset, biaya perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Misalnya, tanah dicatat sebesar Rp2.000.000.000 tanpa penyusutan karena memiliki umur manfaat tak terbatas, bangunan senilai Rp3.500.000.000 dengan akumulasi penyusutan Rp700.000.000, dan mesin serta peralatan senilai Rp1.800.000.000 dengan akumulasi penyusutan Rp600.000.000, sehingga total nilai buku aset tetap menjadi Rp6.000.000.000. Penyajian informasi ini meningkatkan transparansi, membantu analisis tren aset tetap, serta memberikan gambaran realistik mengenai kapasitas operasional dan posisi keuangan perusahaan.

3. Pengungkapan Aset Takberwujud (PSAK 19, 2023)

Aset takberwujud memiliki karakteristik khusus karena tidak memiliki bentuk fisik, tetapi tetap memberikan manfaat ekonomi bagi entitas. Menurut PSAK 19 (IAI, 2023), pengungkapan aset takberwujud dalam laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan transparan mengenai sifat, nilai, serta pemanfaatannya, sehingga pengguna laporan dapat memahami kontribusi aset tersebut terhadap kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Informasi yang wajib diungkapkan meliputi apakah masa manfaat aset bersifat terbatas atau tidak terbatas, metode amortisasi yang digunakan, serta umur manfaat yang ditetapkan.

Entitas harus mengungkapkan jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode, serta faktor-faktor yang menyebabkan perubahan nilai tercatat selama periode pelaporan, seperti penambahan, pelepasan, atau penurunan nilai aset. Untuk aset takberwujud dengan masa manfaat tidak terbatas, pengungkapan juga harus mencakup alasan dan justifikasi penentuan masa manfaat tersebut, karena aset semacam ini tidak diamortisasi tetapi tetap harus diuji penurunan nilai setiap tahun.

Contoh pengungkapan aset takberwujud dapat berupa pernyataan: "Perusahaan memiliki hak paten dengan masa manfaat 10 tahun. Aset ini diamortisasi menggunakan metode garis lurus. Pada akhir

tahun 2024, nilai tercatat hak paten sebesar Rp450.000.000 setelah dikurangi amortisasi sebesar Rp50.000.000.” Pernyataan ini memberikan informasi jelas mengenai nilai aset, metode amortisasi yang diterapkan, dan sisa manfaat ekonomi yang dapat diperoleh.

Pengungkapan semacam ini penting untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan nilai wajar dan penggunaan aset secara akurat. Hal ini membantu investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menilai potensi keuntungan dan risiko yang terkait dengan aset takberwujud. Dengan demikian, pengungkapan yang lengkap mendukung transparansi, akuntabilitas manajemen, dan relevansi laporan keuangan bagi pengambilan keputusan ekonomi.

4. Pengungkapan Penurunan Nilai Aset (PSAK 48, 2023)

Pengungkapan penurunan nilai aset merupakan bagian penting dari transparansi laporan keuangan karena memberikan informasi mengenai apakah nilai tercatat aset masih mencerminkan manfaat ekonomis yang dapat diperoleh darinya. Menurut PSAK 48 (IAI, 2023), entitas wajib mengungkapkan adanya indikasi penurunan nilai, jumlah kerugian akibat penurunan nilai yang diakui selama periode berjalan, unit penghasil kas (UPK) tempat aset tersebut dialokasikan, serta asumsi utama yang digunakan dalam menentukan nilai terpulihkan (*recoverable amount*). Hal ini bertujuan agar pengguna laporan keuangan memahami risiko penurunan nilai aset dan implikasinya terhadap kinerja dan posisi keuangan perusahaan.

Proses evaluasi penurunan nilai dimulai dengan identifikasi adanya indikator penurunan nilai, baik bersifat eksternal seperti penurunan signifikan harga pasar atau perubahan kondisi ekonomi, maupun internal seperti kerusakan fisik aset atau perubahan rencana penggunaan aset. Setelah indikator teridentifikasi, entitas menghitung *recoverable amount*, yaitu nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai (*value in use*) yang dihitung berdasarkan arus kas masa depan yang didiskontokan. Selanjutnya, nilai tercatat aset dibandingkan dengan *recoverable amount*. Jika nilai tercatat lebih tinggi, selisihnya diakui sebagai rugi penurunan nilai dalam laporan laba rugi periode berjalan. Sebaliknya, jika nilai tercatat lebih rendah atau sama dengan *recoverable amount*, tidak ada pengakuan penurunan nilai.

Pengungkapan yang lengkap meliputi metode dan asumsi yang digunakan dalam penentuan nilai terpulihkan, misalnya tingkat diskonto, proyeksi arus kas, serta faktor risiko yang dipertimbangkan. Informasi ini memungkinkan investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya menilai seberapa besar kemungkinan aset kehilangan nilai dan bagaimana hal tersebut memengaruhi keputusan ekonomi. Dengan demikian, pengungkapan penurunan nilai mendukung prinsip akuntabilitas, relevansi, dan keandalan laporan keuangan.

5. Pengungkapan Revaluasi Aset (PSAK 16 Par. 77–83, 2023)

Pengungkapan revaluasi aset merupakan bagian penting dari pelaporan keuangan untuk entitas yang menerapkan model revaluasi dalam mengukur aset tetapnya. Menurut PSAK 16 paragraf 77–83 (IAI, 2023), informasi yang diungkapkan harus cukup lengkap agar pengguna laporan keuangan memahami dampak revaluasi terhadap ekuitas dan posisi keuangan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi tanggal efektif revaluasi, apakah penilaian dilakukan oleh penilai independen, serta metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam menentukan nilai wajar aset. Hal ini penting karena nilai wajar dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar, tingkat inflasi, dan metode penilaian yang digunakan, sehingga transparansi sangat diperlukan untuk menilai reliabilitas informasi.

Laporan harus menyajikan nilai tercatat aset sebelum dan sesudah revaluasi serta selisih revaluasi yang muncul. Selisih tersebut diakui sebagai surplus revaluasi dalam ekuitas, bukan dalam laporan laba rugi, sehingga tidak memengaruhi laba bersih periode berjalan, tetapi meningkatkan ekuitas perusahaan. Misalnya, tanah yang sebelumnya dicatat sebesar Rp2.000.000.000 setelah revaluasi menjadi Rp2.500.000.000, dan gedung dari Rp3.000.000.000 menjadi Rp3.600.000.000, menghasilkan selisih revaluasi total sebesar Rp1.100.000.000. Jumlah ini dicatat sebagai surplus revaluasi dalam ekuitas, mencerminkan peningkatan nilai aset tanpa memengaruhi kinerja operasi perusahaan.

Pengungkapan tambahan juga meliputi akumulasi surplus revaluasi yang telah dicatat sebelumnya, kebijakan penyusutan setelah revaluasi, serta dampaknya terhadap laporan keuangan di masa depan. Tujuan utama pengungkapan ini adalah memberikan informasi yang relevan, andal, dan transparan kepada investor, kreditor, dan pemangku

kepentingan lainnya, sehingga dapat membuat keputusan ekonomi yang lebih tepat berdasarkan nilai aset yang lebih mencerminkan kondisi pasar saat ini (Kieso et al., 2023; IAI, 2023). Dengan demikian, pengungkapan revaluasi bukan hanya kewajiban akuntansi, tetapi juga alat strategis untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan.

F. Latihan Soal

1. Jelaskan kriteria pengakuan aset tetap menurut PSAK 16 (2023).
2. Sebutkan dan jelaskan dua metode penyusutan yang umum digunakan dalam akuntansi.
3. Apa perbedaan utama antara aset tetap dan aset takberwujud?
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan penurunan nilai aset (*impairment*) dan bagaimana proses pengukurannya.
5. Apa saja informasi yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan terkait aset tidak lancar?



BAB VI

AKUNTANSI UNTUK

KEWAJIBAN (LIABILITAS)

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan liabilitas jangka pendek, memahami liabilitas jangka panjang, memahami utang obligasi dan instrumen utang lainnya, memahami provisi dan kewajiban kontinjensi, serta memahami penyajian dan pengungkapan liabilitas. Sehingga pembaca dapat mampu mengasah keterampilan analitis dan teknis dalam menyusun serta menafsirkan laporan kewajiban secara profesional dan sesuai standar pelaporan keuangan.

Materi Pembelajaran

- Liabilitas Jangka Pendek
- Liabilitas Jangka Panjang
- Utang Obligasi dan Instrumen Utang Lainnya
- Provisi dan Kewajiban Kontinjensi
- Penyajian dan Pengungkapan Liabilitas
- Latihan Soal

A. Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek (*current liabilities*) merupakan bagian penting dari struktur keuangan perusahaan yang mencerminkan kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu dekat, biasanya dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan. Kewajiban ini menjadi indikator utama likuiditas perusahaan dan kemampuan entitas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar. Menurut PSAK 1 (Revisi 2021) dan IAS 1 *Presentation of Financial Statements*, suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek apabila:

- Diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasi normal entitas;
- Dimiliki terutama untuk tujuan perdagangan;
- Akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan; atau
- Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pelunasan kewajiban tersebut selama setidaknya 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

1. Definisi dan Karakteristik

Liabilitas jangka pendek merupakan kewajiban yang harus diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang, baik melalui penggunaan kas, aset lancar lainnya, maupun dengan penciptaan kewajiban jangka pendek baru (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2023). Karakteristik utama liabilitas jangka pendek mencakup jangka waktu penyelesaian yang singkat, biasanya dalam satu tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan; sumber pelunasan yang berasal dari aset lancar seperti kas, piutang, atau persediaan; tujuan transaksi yang umumnya terkait dengan kegiatan operasional rutin; serta jumlah kewajiban yang pasti atau dapat diestimasi, terutama pada beban akrual yang memerlukan perkiraan.

Contoh liabilitas jangka pendek yang umum ditemukan dalam praktik akuntansi meliputi utang usaha, yaitu kewajiban kepada pemasok atas pembelian barang atau jasa secara kredit. Wesel bayar adalah surat utang jangka pendek dengan jangka waktu dan tingkat bunga tertentu yang harus dilunasi sesuai perjanjian. Beban yang masih harus dibayar atau accrued expenses merupakan beban yang telah terjadi tetapi belum dibayarkan, seperti gaji, bunga, dan pajak yang masih terutang. Selain itu, pendapatan diterima di muka atau unearned revenue menunjukkan kewajiban perusahaan atas kas yang telah diterima untuk barang atau jasa yang belum diserahkan, sedangkan utang pajak adalah kewajiban kepada pemerintah atas pajak yang terutang namun belum dibayarkan.

Pemahaman mengenai definisi dan karakteristik liabilitas jangka pendek penting bagi pengguna laporan keuangan karena memberikan informasi tentang kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka pendek dan sumber daya yang tersedia untuk menyelesaiannya. Informasi ini juga membantu analisis likuiditas perusahaan, pengelolaan arus kas, dan

penilaian risiko keuangan. Dengan demikian, pengungkapan liabilitas jangka pendek yang lengkap dan akurat mendukung transparansi dan kredibilitas laporan keuangan, sekaligus memfasilitasi pengambilan keputusan manajerial dan investasi (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2023).

2. Pengakuan Liabilitas Jangka Pendek

Pengakuan liabilitas jangka pendek didasarkan pada prinsip bahwa kewajiban hanya dicatat dalam laporan keuangan jika memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh standar akuntansi. Menurut PSAK 57 (Revisi 2020) tentang Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi, suatu liabilitas diakui apabila entitas memiliki kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, terdapat kemungkinan besar arus keluar sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, dan jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal. Prinsip ini memastikan bahwa liabilitas yang dicatat mencerminkan kewajiban nyata yang harus dipenuhi perusahaan, sehingga laporan keuangan memberikan gambaran yang akurat mengenai posisi keuangan dan risiko likuiditas perusahaan (IAI, 2020).

Sebagai contoh praktis, ketika perusahaan membeli persediaan secara kredit senilai Rp100.000.000, pengakuan liabilitas dilakukan melalui jurnal akuntansi: Persediaan didebit sebesar Rp100.000.000 untuk mencatat peningkatan aset, sedangkan Utang Usaha dikredit sebesar Rp100.000.000 untuk mencerminkan kewajiban yang timbul akibat transaksi kredit tersebut. Jurnal ini menunjukkan bahwa meskipun kas belum keluar, perusahaan telah memiliki kewajiban yang sah dan harus diselesaikan dalam jangka pendek. Ketika utang tersebut dibayarkan pada saat jatuh tempo, jurnal penyesuaian dibuat dengan mendebit Utang Usaha dan mengkredit Kas sebesar jumlah yang sama, sehingga kewajiban terselesaikan dan kas keluar dari perusahaan sesuai arus kas aktual.

Pengakuan liabilitas jangka pendek secara tepat tidak hanya penting untuk tujuan pelaporan keuangan tetapi juga untuk manajemen arus kas dan pengelolaan likuiditas. Dengan mengakui kewajiban yang nyata dan dapat diukur, perusahaan dapat memantau dan merencanakan kebutuhan kas jangka pendek, menghindari risiko gagal bayar, serta memberikan informasi yang relevan bagi investor dan kreditur dalam mengevaluasi kesehatan keuangan dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

3. Pengukuran Awal dan Selanjutnya

Pengukuran liabilitas jangka pendek mencakup tahap pengukuran awal dan pengukuran setelah pengakuan, yang berperan penting dalam penyajian kewajiban perusahaan secara akurat dalam laporan keuangan. Menurut PSAK 57 (IAI, 2020) dan Kieso, Weygandt, & Warfield (2023), pada saat pengakuan awal, liabilitas jangka pendek diukur sebesar nilai wajar dari imbalan yang diterima atau nilai nominal yang telah disepakati dalam transaksi. Misalnya, apabila perusahaan menerima pinjaman bank jangka pendek senilai Rp200.000.000 dengan tingkat bunga 10%, maka liabilitas awal yang dicatat adalah sebesar Rp200.000.000. Nilai ini mencerminkan kewajiban nyata yang harus dilunasi dan memastikan bahwa laporan keuangan merepresentasikan posisi keuangan yang sebenarnya.

Liabilitas jangka pendek umumnya diukur sebesar jumlah yang akan dibayarkan kepada pihak lawan transaksi. Karena jangka waktu penyelesaian liabilitas ini relatif singkat biasanya kurang dari satu tahun pengaruh diskonto terhadap nilai kini sering dianggap tidak material, sehingga nilai nominal yang harus dibayarkan sudah mencerminkan ukuran kewajiban secara memadai. Namun, dalam kasus liabilitas jangka pendek yang menyertakan bunga tersirat atau jika terdapat pengaturan yang mempengaruhi arus kas di masa depan, pengukuran nilai kini dapat diterapkan untuk mencerminkan biaya ekonomis yang lebih akurat.

Pendekatan pengukuran ini memberikan beberapa manfaat, yaitu memastikan kewajiban dicatat secara realistik, memudahkan perencanaan arus kas, dan meningkatkan relevansi informasi bagi pengguna laporan keuangan. Dengan demikian, pengukuran awal dan pengukuran setelah pengakuan liabilitas jangka pendek tidak hanya mematuhi standar akuntansi, tetapi juga mendukung manajemen risiko likuiditas dan transparansi pelaporan keuangan.

4. Jenis dan Contoh Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek merupakan kewajiban yang harus diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun atau siklus operasi normal perusahaan, dan terdiri dari berbagai jenis yang umum dijumpai dalam praktik akuntansi. Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2023), salah satu jenis liabilitas jangka pendek yang paling umum adalah utang usaha (*accounts payable*). Utang usaha timbul akibat pembelian barang atau

jasa secara kredit dari pemasok. Pencatatan utang usaha harus mengikuti prinsip matching, yaitu mencocokkan beban dengan pendapatan yang terkait pada periode yang sama, sehingga laporan keuangan mencerminkan kinerja ekonomi yang akurat dan relevan.

Wesel bayar (*notes payable*) juga termasuk liabilitas jangka pendek. Wesel bayar merupakan surat janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal jatuh tempo. Apabila wesel bayar disertai bunga, maka perusahaan harus mengakui beban bunga secara proporsional terhadap periode pinjaman. Sebagai contoh, perusahaan menerbitkan wesel 3 bulan senilai Rp100.000.000 dengan bunga 12% per tahun. Beban bunga yang harus diakui pada akhir periode adalah Rp3.000.000, yang dihitung sebagai $Rp100.000.000 \times 12\% \times 3/12$. Jurnal pengakuananya adalah: Beban Bunga Rp3.000.000 dan Utang Bunga Rp3.000.000, sehingga liabilitas bunga tercatat secara akurat sampai pembayaran dilakukan.

Jenis lain dari liabilitas jangka pendek yang penting, meskipun tidak dibahas secara rinci dalam contoh ini, meliputi beban yang masih harus dibayar (*accrued expenses*), pendapatan diterima di muka (*unearned revenue*), dan utang pajak (*taxes payable*). Semua jenis liabilitas ini memiliki karakteristik yang sama, yaitu diselesaikan dalam jangka pendek menggunakan kas atau aset lancar lain, dan relevan untuk analisis likuiditas serta manajemen modal kerja perusahaan.

B. Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang (*long-term liabilities*) adalah kewajiban yang jatuh temponya lebih dari satu tahun atau melampaui satu siklus operasi normal perusahaan, mana yang lebih panjang. Liabilitas ini sering digunakan untuk membiayai ekspansi bisnis, investasi aset tetap, atau kegiatan jangka panjang lainnya. Menurut PSAK 1 (Revisi 2021) dan IAS 1 (IFRS Foundation, 2022), suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika perusahaan memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban tersebut setidaknya selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

1. Definisi dan Karakteristik

Liabilitas jangka panjang merupakan kewajiban keuangan yang penyelesaiannya diperkirakan memerlukan waktu lebih dari satu tahun sejak tanggal pelaporan. Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2023) dalam *Intermediate Accounting*, jenis liabilitas ini biasanya melibatkan pembayaran bunga, pokok, atau kombinasi keduanya dalam jangka waktu tertentu. Berbeda dengan liabilitas jangka pendek yang diselesaikan menggunakan kas atau aset lancar dalam satu tahun, liabilitas jangka panjang dirancang untuk mendukung kegiatan strategis perusahaan, seperti pembiayaan investasi, ekspansi usaha, atau pengadaan aset tetap.

Karakteristik utama liabilitas jangka panjang mencakup beberapa aspek penting. Pertama, jangka waktu pelunasan yang lebih dari 12 bulan memerlukan perencanaan dan pengelolaan arus kas jangka panjang agar perusahaan dapat memenuhi kewajibannya tanpa mengganggu operasi sehari-hari. Kedua, nilai bunga dan diskonto yang signifikan menuntut penghitungan nilai kini (*present value*) untuk memastikan pengakuan dan pengukuran yang akurat dalam laporan keuangan. Hal ini juga membantu pengguna laporan keuangan memahami beban keuangan yang terkait dengan liabilitas tersebut.

Ketiga, liabilitas jangka panjang sering digunakan untuk mendukung proyek dan kegiatan strategis perusahaan, sehingga memengaruhi keputusan manajemen terkait investasi dan pembiayaan. Misalnya, penerbitan obligasi atau pinjaman bank jangka panjang memungkinkan perusahaan membiayai pembelian mesin atau perluasan pabrik tanpa mengurangi likuiditas jangka pendek. Keempat, liabilitas jangka panjang memengaruhi struktur modal dan leverage keuangan perusahaan, yang berdampak pada rasio solvabilitas dan risiko keuangan yang harus dikelola secara hati-hati.

2. Jenis-Jenis Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang mencakup berbagai kewajiban yang penyelesaiannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun, dan setiap jenis memiliki karakteristik serta tujuan spesifik dalam struktur keuangan perusahaan. Salah satu jenis yang paling umum adalah utang obligasi (*bonds payable*), yaitu kewajiban yang timbul dari penerbitan surat utang kepada investor dengan jangka waktu tertentu dan bunga tetap atau variabel. Obligasi memungkinkan perusahaan memperoleh

dana dalam jumlah besar tanpa harus mengurangi likuiditas jangka pendek, serta menjadi instrumen pembiayaan strategis untuk ekspansi usaha (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2023).

Pinjaman bank jangka panjang (*long-term bank loans*) merupakan liabilitas yang diperoleh dari lembaga keuangan dengan jangka waktu pelunasan lebih dari satu tahun. Pinjaman ini biasanya digunakan untuk pembiayaan aset tetap atau proyek investasi besar, dan pelunasannya dapat dilakukan secara angsuran berkala. Kewajiban sewa pembiayaan (*finance lease liabilities*) muncul dari perjanjian sewa yang secara substansi merupakan pembelian aset; perusahaan mengakui aset dan kewajiban sewa sesuai PSAK 73, sehingga mencerminkan kepemilikan ekonomi atas aset tersebut.

Perusahaan juga menghadapi kewajiban imbalan kerja (*employee benefit obligations*), seperti pensiun atau pesangon, yang diatur dalam PSAK 24. Liabilitas ini mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan di masa depan. Utang hipotek (*mortgage payable*) adalah pinjaman jangka panjang yang dijamin dengan aset tetap, seperti tanah atau bangunan, memberikan keamanan bagi kreditur dan fleksibilitas bagi perusahaan. Terakhir, liabilitas pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*) timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba kena pajak, sesuai PSAK 46, dan mencerminkan kewajiban pajak yang akan jatuh tempo di masa mendatang.

3. Pengakuan dan Pengukuran Liabilitas Jangka Panjang

Pengakuan dan pengukuran liabilitas jangka panjang mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam PSAK 71 (2020), yang mengadopsi IFRS 9 mengenai instrumen keuangan. Pengakuan awal liabilitas jangka panjang terjadi ketika entitas menjadi pihak dalam perjanjian kontraktual yang menimbulkan kewajiban untuk menyerahkan sumber daya ekonomi di masa depan. Pada tahap ini, liabilitas diakui sebesar nilai wajar imbalan yang diterima, yang umumnya mencerminkan jumlah dana atau aset lain yang diterima oleh entitas. Misalnya, apabila perusahaan memperoleh pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp 1.000.000.000, jurnal pengakuanya adalah:

Kas.....	Rp 1.000.000.000
Utang Bank Jangka Panjang.....	Rp 1.000.000.000

Setelah pengakuan awal, liabilitas jangka panjang diukur secara berkelanjutan menggunakan biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost*) dengan metode suku bunga efektif (*effective interest method*). Metode ini memperhitungkan amortisasi premi atau diskon pada saat pengakuan awal serta bunga yang timbul selama umur liabilitas, sehingga mencerminkan biaya efektif aktual atas pinjaman atau utang. Dalam praktiknya, biaya perolehan diamortisasi membantu memastikan bahwa pengakuan bunga secara periodik konsisten dengan tingkat pengembalian ekonomis atas liabilitas tersebut.

Pada kondisi tertentu, liabilitas jangka panjang dapat diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL – *Fair Value Through Profit or Loss*). Klasifikasi ini biasanya dipilih jika liabilitas dimiliki untuk diperdagangkan atau jika penggunaan nilai wajar memberikan informasi yang lebih relevan bagi pengambilan keputusan. Nilai wajar ini dihitung berdasarkan harga pasar instrumen serupa atau teknik penilaian yang sesuai, dan setiap perubahan nilai wajar diakui langsung dalam laporan laba rugi.

4. Amortisasi dan Nilai Kini

Amortisasi dan konsep nilai kini (*present value*) merupakan aspek penting dalam pengukuran liabilitas jangka panjang, khususnya untuk kewajiban yang memiliki pembayaran berkala di masa depan. Menurut Warren et al. (2023), nilai kini dihitung dengan mendiskontokan arus kas masa depan menggunakan tingkat bunga efektif yang mencerminkan biaya sebenarnya dari kewajiban tersebut. Perhitungan ini memastikan bahwa liabilitas dicatat sesuai dengan nilai ekonomisnya pada saat pengakuan dan sepanjang umur liabilitas. Rumus dasar nilai kini adalah:

$$PV = \frac{F}{(1 + i)^n}$$

di mana (F) adalah nilai nominal yang akan dibayar di masa depan, (i) adalah tingkat bunga per periode, dan (n) adalah jumlah periode pembayaran. Dengan pendekatan ini, setiap arus kas masa depan dikonversi ke nilai saat ini sehingga mencerminkan beban liabilitas secara akurat.

Sebagai contoh, jika perusahaan memperoleh pinjaman jangka panjang sebesar Rp 500.000.000 dengan bunga 10% per tahun selama tiga tahun, pembayaran bunga dilakukan pada akhir setiap tahun. Beban bunga tahunan dihitung berdasarkan saldo liabilitas awal dikalikan dengan tingkat bunga efektif, yaitu Rp 50.000.000 per tahun. Pada tahun pertama dan kedua, pembayaran bunga hanya menurunkan kas tanpa mengurangi pokok, sehingga saldo akhir tetap Rp 500.000.000. Pada tahun ketiga, perusahaan membayar pokok sekaligus bunga, yaitu total Rp 550.000.000, sehingga saldo liabilitas menjadi nol.

Metode ini menunjukkan prinsip amortisasi berbasis nilai kini, di mana bunga dihitung secara periodik dan pokok dilunasi sesuai jadwal. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan realitas ekonomi kewajiban, tetapi juga memfasilitasi pengungkapan yang akurat dalam laporan keuangan, meningkatkan transparansi bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya.

C. Utang Obligasi dan Instrumen Utang Lainnya

Utang obligasi dan instrumen utang lainnya merupakan bentuk liabilitas jangka panjang yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana dari publik atau lembaga keuangan. Obligasi memberikan alternatif pendanaan di luar pinjaman bank dan memungkinkan perusahaan memperoleh dana besar dengan biaya modal yang terukur. Menurut PSAK 71 (IAI, 2020) dan IFRS 9, instrumen utang didefinisikan sebagai kontrak keuangan yang menimbulkan kewajiban bagi satu entitas untuk menyerahkan kas atau aset keuangan kepada entitas lain pada masa mendatang. Dalam praktik, utang obligasi menjadi salah satu instrumen utama pembiayaan jangka panjang karena sifatnya yang fleksibel, dapat diperdagangkan, dan memberikan tingkat bunga tetap atau mengambang.

1. Pengertian Utang Obligasi

Utang obligasi atau bonds payable merupakan salah satu bentuk liabilitas jangka panjang yang diterbitkan perusahaan untuk memperoleh dana dari investor dengan janji pengembalian pokok beserta pembayaran bunga secara periodik sampai jatuh tempo. Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2023) dalam *Intermediate Accounting*, utang obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan kepada investor

dengan ketentuan pembayaran bunga dan pokok sesuai jadwal yang disepakati. Sementara itu, Warren, Reeve, & Fess (2023) menjelaskan obligasi sebagai perjanjian tertulis antara penerbit dan pemegang obligasi yang menegaskan komitmen perusahaan untuk membayar bunga secara berkala serta mengembalikan nilai nominal pada tanggal jatuh tempo.

Obligasi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari liabilitas jangka panjang lainnya. Nilai nominal atau *face value* merupakan jumlah pokok yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo. Tingkat bunga atau *coupon rate* adalah persentase tertentu dari nilai nominal yang dibayarkan secara periodik sebagai imbal hasil bagi investor. Jangka waktu obligasi (*maturity*) menunjukkan periode sampai pokok obligasi harus dilunasi, yang biasanya berkisar dari beberapa tahun hingga beberapa dekade. Harga penerbitan obligasi dapat berbeda dari nilai nominal, tergantung pada kondisi pasar dan tingkat bunga saat penerbitan. Obligasi diterbitkan pada par (100% dari nilai nominal), premium (lebih dari 100%), atau diskonto (kurang dari 100%), sehingga mempengaruhi beban bunga efektif yang akan dicatat oleh perusahaan.

Secara ekonomis, obligasi memungkinkan perusahaan untuk membiayai proyek jangka panjang tanpa mengalihkan kepemilikan, berbeda dengan ekuitas yang melibatkan kepemilikan saham. Bagi investor, obligasi memberikan arus kas yang relatif stabil melalui pembayaran bunga berkala dan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo, sehingga menjadi instrumen investasi yang dianggap lebih aman dibanding saham biasa. Dengan demikian, pengertian dan karakteristik utang obligasi penting untuk dipahami baik dari sisi akuntansi maupun pengelolaan keuangan strategis perusahaan.

2. Jenis-Jenis Obligasi

Obligasi merupakan instrumen utang jangka panjang yang diterbitkan perusahaan untuk memperoleh dana dari investor dengan janji pembayaran bunga dan pengembalian pokok pada waktu tertentu. Berdasarkan karakteristik dan fitur khususnya, obligasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2023) dan Warren, Reeve, & Fess (2023), salah satu jenis adalah obligasi atas nama (*registered bonds*), di mana nama pemegang obligasi tercatat dalam register perusahaan dan pembayaran bunga serta pokok dilakukan kepada pemegang yang tercatat tersebut. Berbeda dengan itu, obligasi

pembawa (*bearer bonds*) tidak mencatat nama pemilik; hak atas pembayaran diberikan kepada siapa pun yang memegang surat obligasi, sehingga lebih anonim.

Obligasi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jadwal pelunasan pokok. Obligasi berjangka (*term bonds*) memiliki seluruh pokok yang dibayarkan pada satu tanggal jatuh tempo tertentu, sementara obligasi serial (*serial bonds*) membayar pokok secara bertahap pada beberapa tanggal jatuh tempo, sehingga mengurangi beban likuiditas pada saat jatuh tempo penuh. Jenis lain adalah obligasi konversi (*convertible bonds*), yang memberikan hak kepada pemegang untuk menukar obligasi dengan saham perusahaan penerbit, sehingga menggabungkan karakteristik utang dan ekuitas.

Pada jaminan, obligasi dapat dibedakan menjadi obligasi dengan jaminan (*secured bonds*) dan obligasi tanpa jaminan (*debenture bonds*). Obligasi dengan jaminan dijamin oleh aset tertentu seperti tanah, bangunan, atau mesin, sehingga memberikan perlindungan lebih bagi investor jika penerbit gagal membayar. Sebaliknya, obligasi tanpa jaminan hanya mengandalkan reputasi dan kredibilitas penerbit, tanpa jaminan aset tertentu.

3. Pengakuan Awal Utang Obligasi

Pengakuan awal utang obligasi terjadi pada saat perusahaan menerima dana dari investor sebagai imbalan atas penerbitan obligasi. Menurut PSAK 71 (2020), pengakuan liabilitas keuangan, termasuk obligasi, dilakukan pada nilai wajar imbalan yang diterima. Nilai wajar ini umumnya dihitung sebagai nilai kini arus kas masa depan baik pembayaran pokok maupun bunga yang didiskontokan menggunakan tingkat bunga pasar efektif pada saat penerbitan. Pendekatan ini memastikan bahwa utang obligasi dicatat secara akurat mencerminkan kewajiban ekonomi yang timbul dari kontrak obligasi tersebut.

Sebagai ilustrasi, PT Sentosa menerbitkan obligasi dengan nilai nominal Rp 1.000.000.000, tingkat bunga kupon 10% per tahun yang dibayarkan setiap 31 Desember, jatuh tempo 5 tahun, dan tingkat bunga pasar saat penerbitan sama yaitu 10%. Karena tingkat bunga kupon sama dengan tingkat pasar, harga penerbitan obligasi sama dengan nilai nominalnya, yaitu Rp 1.000.000.000. Dengan demikian, saat dana diterima dari investor, perusahaan mencatat kas sebesar Rp 1.000.000.000 dan utang obligasi sebesar Rp 1.000.000.000, sehingga

jurnal akuntansinya adalah: Kas sebesar Rp 1.000.000.000 didebet, dan Utang Obligasi sebesar Rp 1.000.000.000 dikredit.

Pendekatan ini berlaku juga jika obligasi diterbitkan dengan premi atau diskonto. Jika tingkat bunga kupon lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan tingkat pasar, maka harga penerbitan obligasi akan berbeda dari nilai nominal dan selisihnya dicatat sebagai premi atau diskonto obligasi. Premi atau diskonto ini kemudian diamortisasi selama masa obligasi menggunakan metode suku bunga efektif untuk mencerminkan biaya bunga yang sebenarnya. Dengan demikian, pengakuan awal utang obligasi tidak hanya mencatat jumlah kas yang diterima, tetapi juga menetapkan dasar akuntansi yang akurat untuk pengukuran bunga dan amortisasi di periode-periode berikutnya (Kieso et al., 2023; Warren et al., 2023).

4. Obligasi dengan Diskonto dan Premium

Harga obligasi dipengaruhi secara langsung oleh perbandingan antara tingkat bunga kupon yang ditetapkan oleh penerbit dan tingkat bunga pasar saat obligasi diterbitkan. Apabila tingkat kupon sama dengan tingkat bunga pasar, obligasi diterbitkan pada nilai nominal atau par value, yang mencerminkan harga 100% dari nilai pokok obligasi. Namun, jika kupon lebih tinggi daripada tingkat pasar, investor bersedia membayar lebih untuk obligasi tersebut sehingga obligasi diterbitkan dengan premi (premium), yakni harga di atas nilai nominal. Sebaliknya, jika kupon lebih rendah dibandingkan tingkat bunga pasar, obligasi dijual dengan diskonto, yaitu harga di bawah nilai nominal.

Obligasi diskonto muncul ketika obligasi diterbitkan di bawah nilai nominal, dan selisih antara nilai nominal dan harga penerbitan dicatat sebagai diskonto obligasi. Misalnya, obligasi bernilai nominal Rp 1.000.000.000 dijual seharga Rp 950.000.000, sehingga diskonto sebesar Rp 50.000.000 diakui. Jurnal akuntansinya mencatat kas sebesar Rp 950.000.000 didebet, diskonto utang obligasi sebesar Rp 50.000.000 didebet, dan utang obligasi sebesar Rp 1.000.000.000 dikredit. Diskonto ini kemudian diamortisasi selama masa obligasi menggunakan metode suku bunga efektif untuk menyesuaikan biaya bunga yang sebenarnya.

Obligasi premium terjadi ketika obligasi diterbitkan di atas nilai nominal karena kupon lebih tinggi dari tingkat bunga pasar. Contohnya, obligasi nominal Rp 1.000.000.000 dijual seharga Rp 1.050.000.000, sehingga premium sebesar Rp 50.000.000 dicatat. Jurnalnya adalah kas

didebet sebesar Rp 1.050.000.000, utang obligasi dikredit sebesar Rp 1.000.000.000, dan premium utang obligasi dikredit sebesar Rp 50.000.000. Premium ini juga diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif sehingga beban bunga yang dilaporkan mencerminkan biaya bunga efektif selama umur obligasi (Kieso et al., 2023; Warren et al., 2023).

D. Provisi dan Kewajiban Kontinjensi

Pada akuntansi keuangan, provisi dan kewajiban kontinjensi merupakan dua jenis kewajiban yang sering muncul akibat ketidakpastian masa depan, baik dalam bentuk estimasi pengeluaran maupun potensi tanggungan. Pemahaman yang tepat mengenai kedua konsep ini penting untuk menjaga keandalan, relevansi, serta transparansi laporan keuangan. Menurut PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi (revisi 2020), penyajian dan pengukuran provisi serta kewajiban kontinjensi harus mempertimbangkan tingkat kepastian, probabilitas arus kas keluar, serta kemampuan entitas dalam mengestimasi nilai kewajiban dengan andal.

1. Pengertian Provisi dan Kewajiban Kontinjensi

Provisi dan kewajiban kontinjensi merupakan konsep penting dalam akuntansi yang berkaitan dengan kewajiban perusahaan yang memiliki tingkat ketidakpastian tertentu. Menurut PSAK 57 (IAI, 2020), provisi adalah kewajiban kini yang muncul akibat peristiwa masa lalu, di mana penyelesaiannya diperkirakan akan menimbulkan arus keluar sumber daya ekonomi, namun jumlah atau waktunya belum pasti. Dengan kata lain, provisi merupakan bentuk kewajiban yang diakui dalam laporan keuangan karena memiliki unsur ketidakpastian, baik dalam hal besaran maupun waktu pembayaran. Contoh umum provisi meliputi provisi garansi produk, provisi restrukturisasi perusahaan, provisi litigasi, serta provisi untuk pemeliharaan atau pembongkaran aset (*asset retirement obligation*). Provisi dicatat sebagai liabilitas di neraca dan diamortisasi atau disesuaikan sesuai estimasi terbaru selama periode pelaporan, sehingga laporan keuangan mencerminkan kewajiban yang realistik.

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, namun keberadaannya tergantung pada

kejadian di masa depan yang berada di luar kendali perusahaan. Berdasarkan IAS 37 (IFRS Foundation, 2023), kewajiban kontinjensi tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena belum memenuhi kriteria pengakuan, tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jika kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi dianggap mungkin (*probable*). Contoh kewajiban kontinjensi mencakup gugatan hukum yang belum diputuskan pengadilan, jaminan pihak ketiga atas utang perusahaan lain, serta potensi denda pajak yang sedang dalam proses banding.

Perbedaan utama antara provisi dan kewajiban kontinjensi terletak pada tingkat kepastian dan pengakuannya: provisi diakui sebagai liabilitas karena adanya kewajiban kini dengan estimasi yang dapat diukur, sedangkan kewajiban kontinjensi hanya diungkapkan karena sifatnya yang potensial dan belum pasti. Pemahaman yang tepat mengenai kedua konsep ini penting agar laporan keuangan menyajikan informasi yang andal dan relevan bagi pengguna, serta mencerminkan risiko dan kewajiban yang mungkin dihadapi perusahaan secara transparan.

2. Perbedaan Provisi dan Kewajiban Kontinjensi

Provisi dan kewajiban kontinjensi memiliki karakteristik dan perlakuan akuntansi yang berbeda meskipun keduanya terkait dengan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu. Menurut PSAK 57 (IAI, 2020), provisi adalah kewajiban kini yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi dan jumlahnya dapat diestimasi secara andal. Artinya, perusahaan memiliki tanggung jawab aktual untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, dan kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi bersifat *probable* atau kemungkinan besar terjadi. Karena memenuhi kriteria pengakuan, provisi dicatat sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Contoh provisi meliputi provisi garansi produk, provisi litigasi, provisi restrukturisasi, dan provisi pemeliharaan atau pembongkaran aset.

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang keberadaannya tergantung pada peristiwa masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Berdasarkan IAS 37 (IFRS Foundation, 2023), arus keluar sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban kontinjensi bersifat *possible* atau mungkin terjadi, dan jumlahnya tidak dapat diestimasi secara andal. Karena

ketidakpastian ini, kewajiban kontinjensi tidak diakui dalam laporan posisi keuangan, tetapi wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memberikan informasi mengenai risiko yang mungkin dihadapi perusahaan. Contoh kewajiban kontinjensi meliputi potensi denda pajak, gugatan hukum yang belum diputuskan, dan jaminan pihak ketiga atas utang pihak lain.

Perbedaan utama antara provisi dan kewajiban kontinjensi terletak pada status kewajiban, tingkat kepastian arus keluar sumber daya ekonomi, kemampuan estimasi, dan perlakuan akuntansi. Provisi diakui karena kewajibannya nyata dan dapat diukur, sedangkan kewajiban kontinjensi hanya diungkapkan karena sifatnya yang potensial dan belum pasti. Pemahaman yang tepat mengenai perbedaan ini sangat penting agar laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang andal, relevan, dan transparan bagi para pengguna, serta mencerminkan eksposur risiko perusahaan secara akurat.

3. Kriteria Pengakuan Provisi

Pengakuan provisi dalam laporan keuangan mensyaratkan pemenuhan kriteria tertentu agar kewajiban yang dicatat mencerminkan kewajiban nyata dan dapat diukur secara andal. Menurut PSAK 57 paragraf 14–16 (IAI, 2020), provisi diakui hanya apabila terdapat tiga kriteria utama. Pertama, harus ada kewajiban kini (*present obligation*) yang muncul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu (*past event*). Kewajiban ini merupakan tanggung jawab aktual yang timbul dan menuntut entitas untuk melakukan penyelesaian kewajiban di masa depan. Contohnya, perusahaan yang memberikan garansi produk memiliki kewajiban untuk memperbaiki atau mengganti produk jika terjadi kerusakan, sehingga tercipta kewajiban yang nyata meskipun penyelesaiannya terjadi di masa mendatang.

Kriteria kedua adalah adanya kemungkinan besar (*probable*) bahwa penyelesaian kewajiban akan menimbulkan arus keluar sumber daya ekonomi. Probabilitas ini umumnya dianggap lebih dari 50%, yang menunjukkan bahwa risiko terjadinya kewajiban cukup signifikan. Dengan demikian, perusahaan harus mengantisipasi arus keluar kas atau aset lainnya yang diperlukan untuk menutup kewajiban tersebut.

Kriteria ketiga adalah kemampuan untuk mengestimasi jumlah kewajiban secara andal (*reliable estimate*). Pengukuran kewajiban harus dapat dihitung dengan cukup pasti agar tercatat sebagai provisi. Jika

jumlah kewajiban tidak dapat diestimasi secara andal, kewajiban tersebut tidak diakui sebagai provisi, tetapi diungkapkan sebagai kewajiban kontinjenji dalam catatan atas laporan keuangan. Hal ini memberikan transparansi kepada pengguna laporan keuangan mengenai eksposur risiko yang mungkin dihadapi perusahaan, meskipun belum dapat diukur secara pasti.

4. Pengukuran Provisi

Pengukuran provisi merupakan tahap penting dalam akuntansi kewajiban, karena menentukan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Menurut PSAK 57 paragraf 36–52 (IAI, 2020), provisi harus diukur sebesar nilai terbaik estimasi (*best estimate*) dari pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pada akhir periode pelaporan. Nilai terbaik estimasi ini mencerminkan perkiraan paling realistik atas arus keluar sumber daya ekonomi yang diperlukan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang melekat pada kewajiban tersebut.

Metode pengukuran provisi dapat berbeda tergantung pada karakteristik kewajiban. Untuk kewajiban yang berasal dari satu peristiwa, digunakan pendekatan tunggal (*single obligation approach*), di mana entitas memperkirakan jumlah pembayaran yang paling mungkin terjadi. Sebaliknya, jika kewajiban melibatkan beberapa hasil yang mungkin, pendekatan nilai harapan (*expected value approach*) diterapkan, yakni menghitung rata-rata tertimbang berdasarkan probabilitas masing-masing hasil. Pendekatan ini lebih sesuai untuk kewajiban yang kompleks atau memiliki berbagai kemungkinan hasil, misalnya litigasi dengan beberapa potensi tuntutan.

Apabila efek nilai waktu uang dianggap material, provisi dihitung berdasarkan nilai kini (*present value*) dari arus kas keluar yang diharapkan. Diskonto ini menyesuaikan estimasi biaya di masa depan agar mencerminkan nilai saat ini, sehingga laporan keuangan lebih akurat dan realistik. Sebagai contoh, sebuah kewajiban diperkirakan memiliki dua kemungkinan biaya: Rp100 juta dengan probabilitas 60% dan Rp150 juta dengan probabilitas 40%. Dengan pendekatan nilai harapan, nilai tertimbang masing-masing adalah Rp60 juta, sehingga total provisi yang diakui sebesar Rp120 juta. Pendekatan ini memungkinkan entitas mencatat kewajiban yang mencerminkan ekspektasi realistik terhadap pengeluaran di masa depan, sekaligus

memberikan transparansi dan akurasi informasi bagi pengguna laporan keuangan.

E. Penyajian dan Pengungkapan Liabilitas

Penyajian dan pengungkapan liabilitas dalam laporan keuangan merupakan bagian penting dari proses pelaporan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. Menurut PSAK 1 (Revisi 2023) tentang *Penyajian Laporan Keuangan*, entitas diwajibkan untuk mengklasifikasikan liabilitas ke dalam dua kategori utama, yaitu liabilitas jangka pendek (*current liabilities*) dan liabilitas jangka panjang (*non-current liabilities*). Klasifikasi ini dilakukan berdasarkan jangka waktu pelunasan atau siklus operasi normal entitas, dengan tujuan agar pengguna laporan dapat menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya.

1. Prinsip Penyajian Liabilitas

Penyajian liabilitas dalam laporan posisi keuangan harus dilakukan secara sistematis agar mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2022), liabilitas disajikan berdasarkan prinsip klasifikasi yang konsisten, pemisahan antara liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, serta pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan. Klasifikasi yang konsisten penting agar laporan keuangan dapat dibandingkan antarperiode, sehingga pengguna memperoleh informasi yang akurat mengenai perubahan posisi keuangan perusahaan.

Pemisahan liabilitas menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang jangka waktu penyelesaian kewajiban. Liabilitas jangka pendek mencakup kewajiban yang diharapkan diselesaikan dalam waktu satu tahun atau siklus operasi normal, misalnya utang usaha, utang pajak, biaya masih harus dibayar, dan utang dividen. Sementara itu, liabilitas jangka panjang merupakan kewajiban yang pelunasannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun, seperti utang obligasi, pinjaman bank jangka panjang, dan kewajiban sewa pembiayaan. Pemisahan ini membantu pengguna laporan keuangan menilai likuiditas dan risiko solvabilitas perusahaan.

Pengungkapan kebijakan akuntansi yang diterapkan, termasuk dasar pengakuan, metode pengukuran, dan estimasi signifikan yang digunakan dalam menentukan jumlah liabilitas, sangat penting untuk transparansi. Hal ini memungkinkan pengguna memahami asumsi dan pertimbangan manajemen dalam mengakui dan menilai kewajiban perusahaan. Penyajian liabilitas yang sesuai standar ini memberikan gambaran realistik mengenai struktur kewajiban, baik dari sisi jangka pendek maupun jangka panjang, serta membantu investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membuat keputusan ekonomi yang tepat. Dengan demikian, prinsip penyajian liabilitas tidak hanya mendukung akurasi laporan keuangan, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan relevansi informasi keuangan.

2. Klasifikasi Liabilitas

Klasifikasi liabilitas merupakan aspek penting dalam penyajian laporan posisi keuangan, karena membantu pengguna laporan memahami jangka waktu penyelesaian kewajiban perusahaan. Menurut PSAK 1 (2023), liabilitas dikategorikan sebagai jangka pendek apabila memenuhi salah satu dari beberapa kriteria: kewajiban tersebut diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasi normal perusahaan, dimiliki untuk tujuan diperdagangkan, jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, atau perusahaan tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban lebih dari 12 bulan. Liabilitas yang memenuhi kriteria ini umumnya berkaitan dengan operasi rutin perusahaan dan pembiayaan jangka pendek. Contohnya termasuk utang usaha, utang pajak, beban akrual, dan utang dividen.

Liabilitas diklasifikasikan sebagai jangka panjang jika tidak memenuhi kriteria liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka panjang biasanya memiliki jangka waktu pelunasan lebih dari satu tahun dan sering digunakan untuk mendanai investasi strategis, ekspansi usaha, atau pengadaan aset tetap. Contoh liabilitas jangka panjang antara lain utang bank jangka panjang, obligasi yang diterbitkan, dan liabilitas imbalan kerja.

Sebagai ilustrasi, pada laporan posisi keuangan PT ABC per 31 Desember 2025, total liabilitas jangka pendek tercatat sebesar Rp 190.000 juta, terdiri dari utang usaha Rp 150.000 juta, utang pajak Rp 25.000 juta, beban akrual Rp 10.000 juta, dan utang dividen Rp 5.000 juta. Sementara itu, total liabilitas jangka panjang mencapai Rp 650.000

juta, meliputi utang bank jangka panjang Rp 250.000 juta, obligasi yang diterbitkan Rp 300.000 juta, dan liabilitas imbalan kerja Rp 100.000 juta. Dengan demikian, total liabilitas perusahaan sebesar Rp 840.000 juta, yang disajikan secara terpisah antara jangka pendek dan jangka panjang untuk memberikan transparansi mengenai struktur kewajiban dan likuiditas perusahaan. Klasifikasi ini memungkinkan investor, kreditor, dan pihak terkait untuk menilai risiko likuiditas dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya tepat waktu.

3. Pengungkapan Liabilitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Pengungkapan liabilitas dalam catatan atas laporan keuangan memiliki peran penting untuk memberikan informasi tambahan yang tidak dapat disajikan secara lengkap dalam neraca. Menurut PSAK 1 (2023) dan PSAK 57 (2020), catatan atas laporan keuangan berfungsi menjelaskan sifat, jumlah, dan risiko terkait liabilitas, sehingga memungkinkan pengguna laporan untuk memahami kewajiban perusahaan secara lebih mendalam. Pengungkapan ini mencakup rincian jenis dan jumlah liabilitas utama, termasuk tanggal jatuh tempo dan tingkat bunga, apabila relevan. Hal ini membantu pengguna menilai profil risiko likuiditas dan struktur pembiayaan perusahaan.

Catatan laporan keuangan harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pengakuan dan pengukuran liabilitas, seperti metode amortisasi atau tingkat diskonto yang digunakan untuk liabilitas jangka panjang. Informasi mengenai liabilitas kontinjensi juga wajib dicantumkan, termasuk kemungkinan kewajiban yang timbul dari gugatan hukum, jaminan, atau komitmen lainnya yang belum pasti jumlah atau waktunya. Pengungkapan ini penting agar investor dan kreditor memahami potensi arus keluar sumber daya ekonomi di masa depan.

Perubahan signifikan pada liabilitas selama periode pelaporan, baik berupa penambahan, pembayaran, atau pengalihan kewajiban, juga harus dijelaskan secara transparan. Rekonsiliasi saldo awal dan akhir liabilitas, terutama untuk kewajiban jangka panjang seperti utang obligasi atau liabilitas sewa, memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika kewajiban perusahaan. Misalnya, catatan dapat menyajikan saldo awal utang usaha Rp 100.000 juta, penambahan Rp 250.000 juta, pembayaran Rp 200.000 juta, sehingga saldo akhir menjadi Rp 150.000

juta. Sementara itu, utang obligasi dan utang bank dapat disajikan dengan saldo awal dan akhir yang sama jika tidak ada perubahan selama periode pelaporan.

4. Pengungkapan Liabilitas Kontinjenyi dan Provisi

Pengungkapan liabilitas kontinjenyi dan provisi merupakan bagian penting dalam catatan atas laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai kewajiban potensial dan kewajiban yang mungkin timbul di masa depan. Liabilitas kontinjenyi, berbeda dengan liabilitas aktual, keberadaannya bergantung pada kejadian di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Menurut PSAK 57 (2023), perusahaan diwajibkan mengungkapkan sifat dari kewajiban kontinjenyi tersebut, perkiraan dampak keuangan yang mungkin timbul, tingkat ketidakpastian terkait jumlah atau waktu penyelesaian, serta kemungkinan adanya penggantian dari pihak ketiga, misalnya melalui asuransi. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan mengenai potensi arus keluar sumber daya ekonomi akibat kewajiban yang belum pasti.

Jika liabilitas kontinjenyi menunjukkan kemungkinan besar untuk terjadi dan jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal, maka kewajiban tersebut harus diakui sebagai provisi dalam laporan posisi keuangan. Provisi sendiri merupakan kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, di mana penyelesaiannya kemungkinan akan mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi perusahaan. Pengukuran provisi dilakukan berdasarkan estimasi terbaik (*best estimate*) dari jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, dan jika relevan, dapat didiskontokan ke nilai kini.

Contoh pengungkapan provisi dapat mencakup beberapa jenis, seperti provisi garansi produk dan provisi gugatan hukum. Misalnya, perusahaan memiliki saldo awal provisi garansi produk sebesar Rp 50.000 juta, menambah Rp 20.000 juta selama periode berjalan, dan menggunakan Rp 10.000 juta untuk klaim, sehingga saldo akhir menjadi Rp 60.000 juta. Sementara provisi gugatan hukum tetap sebesar Rp 30.000 juta sepanjang periode jika tidak ada penyelesaian atau perubahan estimasi. Pengungkapan ini membantu pengguna laporan keuangan

menilai risiko keuangan dan potensi kewajiban yang mungkin muncul di masa mendatang, serta transparansi dalam pengelolaan kewajiban kontinjensi dan provisi perusahaan.

F. Latihan Soal

1. Jelaskan perbedaan utama antara provisi dan kewajiban kontinjensi berdasarkan PSAK 57 dan IAS 37!
2. Sebutkan tiga contoh liabilitas jangka panjang dan jelaskan karakteristiknya!
3. Jelaskan tujuan penyajian liabilitas secara terpisah antara jangka pendek dan jangka panjang dalam laporan posisi keuangan!
4. Mengapa provisi harus ditinjau ulang pada setiap akhir periode pelaporan keuangan?
5. Jelaskan perbedaan perlakuan akuntansi antara utang bunga dan beban bunga pada obligasi!



BAB VII

AKUNTANSI UNTUK EKUITAS

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan pengertian dan komponen ekuitas, memahami modal saham dan agio/disagio, memahami laba ditahan dan cadangan, memahami dividen dan pembagian laba, serta memahami penyajian dan pengungkapan ekuitas. Sehingga pembaca dapat mampu memahami, mencatat, dan menganalisis transaksi yang memengaruhi ekuitas perusahaan secara profesional, akurat, dan sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku.

Materi Pembelajaran

- Pengertian dan Komponen Ekuitas
- Modal Saham dan Agio/Disagio
- Laba Ditahan dan Cadangan
- Dividen dan Pembagian Laba
- Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas
- Latihan Soal

A. Pengertian dan Komponen Ekuitas

Ekuitas merupakan salah satu elemen utama dalam laporan posisi keuangan yang mencerminkan kepemilikan pemilik atas aset bersih suatu entitas setelah dikurangi seluruh kewajiban. Menurut PSAK 1 (Revisi 2023), ekuitas didefinisikan sebagai “selisih antara aset dan liabilitas entitas pada tanggal pelaporan.” Dengan kata lain, ekuitas mencerminkan hak residual pemilik terhadap aset perusahaan setelah seluruh kewajiban diselesaikan. Konsep ekuitas sangat penting karena menggambarkan kekayaan bersih entitas yang menjadi dasar penilaian nilai perusahaan dan kesejahteraan pemilik atau pemegang saham.

Pada perspektif kerangka konseptual IFRS (IASB, 2023), ekuitas bukan hanya sekadar jumlah yang tersisa setelah mengurangkan liabilitas dari aset, tetapi juga menunjukkan kontribusi modal, hasil kinerja masa lalu, serta kebijakan distribusi laba. Dengan demikian,

perubahan dalam ekuitas dari satu periode ke periode lainnya menunjukkan aktivitas ekonomi yang memengaruhi posisi keuangan perusahaan, seperti laba bersih, dividen, revaluasi aset, serta transaksi pemilik (seperti penerbitan atau pembelian kembali saham).

1. Konsep Dasar Ekuitas

Konsep dasar ekuitas mencerminkan kepemilikan pemilik atau pemegang saham dalam suatu entitas, yang menjadi bagian residual atas aset setelah dikurangi seluruh liabilitas. Dalam entitas perseorangan, ekuitas dikenal sebagai modal pemilik (*owner's equity*), sedangkan pada perseroan terbatas (PT), istilah yang digunakan adalah modal saham (*shareholders' equity*). Di koperasi, ekuitas muncul dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah modal. Ekuitas bersifat dinamis, artinya nilainya dapat berubah seiring dengan aktivitas operasional dan kebijakan keuangan yang dijalankan oleh perusahaan.

Beberapa faktor dapat meningkatkan ekuitas perusahaan. Pertama, laba bersih yang diperoleh dari kegiatan operasional atau non-operasional akan menambah nilai ekuitas, karena merupakan keuntungan yang belum dibagikan kepada pemilik. Kedua, tambahan setoran modal dari pemilik atau pemegang saham meningkatkan bagian kepemilikan dalam perusahaan. Ketiga, surplus revaluasi aset, yang terjadi ketika nilai aset meningkat dan dicatat melalui model revaluasi, juga meningkatkan ekuitas. Selain itu, hibah modal dari pihak eksternal dapat menjadi sumber peningkatan ekuitas yang signifikan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022).

Ekuitas dapat menurun akibat beberapa faktor. Rugi bersih dari operasi atau aktivitas non-operasional mengurangi ekuitas karena mencerminkan kerugian yang harus ditanggung pemilik. Pembagian dividen atau keuntungan kepada pemilik mengurangi ekuitas karena arus keluar kas. Selain itu, pembelian kembali saham (*treasury stock*) dan penarikan modal oleh pemilik juga menurunkan total ekuitas perusahaan. Dinamika ini menunjukkan bahwa ekuitas tidak hanya dipengaruhi oleh laba atau rugi, tetapi juga oleh keputusan manajerial terkait distribusi keuntungan, struktur modal, dan strategi investasi. Pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ekuitas penting bagi investor, kreditor, dan manajemen untuk menilai kesehatan keuangan, potensi pertumbuhan, dan daya tahan perusahaan terhadap risiko finansial.

2. Komponen-Komponen Ekuitas

Ekuitas perusahaan merupakan bagian residual atas aset setelah dikurangi seluruh liabilitas, dan terdiri dari beberapa komponen utama yang mencerminkan kepemilikan dan akumulasi laba perusahaan. Menurut PSAK 1 (2023) dan IAS 1 (*Presentation of Financial Statements*), dalam perseroan terbatas, komponen ekuitas mencakup modal saham, agio/disagio saham, laba ditahan, cadangan, dan komponen ekuitas lainnya. Modal saham (*share capital*) merupakan dana yang disetorkan oleh pemegang saham sebagai bukti kepemilikan. Modal saham terbagi menjadi modal dasar (*authorized capital*), modal ditempatkan (*issued capital*), dan modal disetor (*paid-in capital*). Misalnya, PT Nusantara memiliki modal dasar 1.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham; 700.000 saham telah diterbitkan dan 600.000 saham telah disetor penuh, sehingga modal disetor tercatat Rp600.000.000.

Selisih antara harga jual saham dan nilai nominalnya diakui sebagai agio saham (*share premium*) jika lebih tinggi, atau disagio saham (*share discount*) jika lebih rendah, dan disajikan terpisah dari modal saham sesuai PSAK 1 (2023). Laba ditahan (*retained earnings*) merupakan akumulasi laba bersih perusahaan yang belum dibagikan sebagai dividen dan dapat digunakan untuk ekspansi, investasi kembali, atau menutup kerugian. Laba ditahan dihitung sebagai saldo awal ditambah laba bersih dikurangi dividen yang dibayarkan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022).

Cadangan (*reserves*) adalah bagian dari laba yang dialokasikan untuk tujuan tertentu, seperti cadangan umum, cadangan legal, atau cadangan revaluasi. Sesuai UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 70, cadangan umum wajib dibentuk minimal 20% dari modal disetor. Komponen ekuitas lainnya mencakup surplus revaluasi aset tetap, keuntungan atau kerugian pengukuran kembali program imbalan kerja, serta selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan luar negeri, yang diatur dalam PSAK 10 (2023). Dengan demikian, pengungkapan komponen ekuitas memberikan gambaran menyeluruh mengenai kepemilikan, kinerja, dan kebijakan alokasi laba perusahaan kepada pemegang saham dan pengguna laporan keuangan.

3. Penyajian Ekuitas dalam Laporan Keuangan

Pada laporan posisi keuangan, ekuitas disajikan setelah total liabilitas untuk mencerminkan bagian residual dari aset perusahaan yang menjadi hak pemilik atau pemegang saham setelah seluruh kewajiban dipenuhi. Menurut PSAK 1 (2023), struktur penyajian ekuitas mencakup beberapa komponen utama, seperti modal saham disetor, agio saham, laba ditahan, cadangan revaluasi aset, serta komponen ekuitas lainnya yang relevan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat menyajikan modal saham disetor sebesar Rp500.000.000, agio saham Rp50.000.000, laba ditahan Rp200.000.000, dan cadangan revaluasi aset Rp25.000.000, sehingga total ekuitas tercatat sebesar Rp775.000.000. Penyajian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi pemilik terhadap perusahaan serta akumulasi laba yang belum dibagikan atau dialokasikan untuk tujuan tertentu.

PSAK 1 (2023) menekankan pentingnya penyajian Laporan Perubahan Ekuitas sebagai pelengkap laporan posisi keuangan. Laporan ini menyajikan informasi mengenai pergerakan masing-masing komponen ekuitas selama periode pelaporan, termasuk laba atau rugi komprehensif, setoran modal tambahan, distribusi dividen, serta dampak perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi kesalahan periode sebelumnya. Misalnya, laba bersih periode berjalan akan menambah laba ditahan, sedangkan pembayaran dividen akan menguranginya. Begitu pula, penyesuaian revaluasi aset tetap akan dicatat sebagai cadangan revaluasi di bagian ekuitas.

Penyajian ekuitas secara rinci dan transparan bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan bagi pemegang saham, investor potensial, kreditur, dan pengguna laporan keuangan lainnya dalam menilai stabilitas keuangan, kemampuan perusahaan menghasilkan laba, serta kebijakan alokasi laba atau modal. Dengan demikian, kombinasi laporan posisi keuangan dan laporan perubahan ekuitas memungkinkan pemangku kepentingan memahami baik posisi akhir maupun dinamika ekuitas perusahaan selama periode pelaporan.

4. Contoh Kasus: Analisis Ekuitas PT Garuda Nusantara

Analisis ekuitas PT Garuda Nusantara dapat dijelaskan melalui penyusunan laporan perubahan ekuitas yang mencerminkan dinamika masing-masing komponen selama periode pelaporan. Berdasarkan data

yang tersedia, modal disetor perusahaan tetap sebesar Rp1.000.000.000, menunjukkan tidak ada penambahan atau pengurangan modal dari pemegang saham. Agio saham juga tetap tercatat sebesar Rp100.000.000, menandakan tidak ada transaksi penerbitan saham dengan harga di atas nilai nominal selama periode tersebut.

Laba ditahan mengalami perubahan signifikan, meningkat dari Rp250.000.000 menjadi Rp350.000.000. Peningkatan ini berasal dari laba bersih periode berjalan sebesar Rp150.000.000, yang menambah saldo laba ditahan, dikurangi pembayaran dividen sebesar Rp50.000.000 kepada pemegang saham. Perubahan ini menunjukkan hubungan langsung antara kinerja operasional perusahaan dan posisi ekuitas, karena laba yang dihasilkan dari aktivitas usaha meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menahan modal internal.

Cadangan umum juga bertambah dari Rp50.000.000 menjadi Rp60.000.000, mencerminkan alokasi sebagian laba untuk tujuan cadangan sesuai kebijakan perusahaan atau persyaratan peraturan. Akumulasi dari perubahan tersebut menyebabkan total ekuitas meningkat dari Rp1.400.000.000 menjadi Rp1.510.000.000, menunjukkan pertumbuhan ekuitas sebesar Rp110.000.000 selama periode laporan.

Contoh kasus ini menekankan pentingnya laporan perubahan ekuitas sebagai alat analisis bagi pemegang saham, investor, dan pihak eksternal lainnya. Laporan ini tidak hanya menunjukkan saldo akhir masing-masing komponen ekuitas, tetapi juga menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan, termasuk laba bersih, distribusi dividen, dan alokasi cadangan. Dengan demikian, laporan perubahan ekuitas membantu pengguna laporan keuangan memahami keterkaitan antara kinerja perusahaan, kebijakan distribusi laba, serta strategi pengelolaan modal internal.

5. Konsep Ekuitas dalam IFRS dan PSAK

Konsep ekuitas dalam kerangka akuntansi internasional dan Indonesia menekankan perbedaan mendasar antara ekuitas dan liabilitas. Menurut IAS 1 (2023) dan IAS 32 (2023), ekuitas didefinisikan sebagai hak residual pemilik atas aset setelah dikurangi seluruh liabilitas, yang berarti tidak terdapat kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset lain kepada pihak luar. Dengan kata lain, ekuitas mencerminkan kepemilikan dan klaim residual terhadap kekayaan bersih perusahaan.

Prinsip ini diadopsi dalam PSAK 1 (2023), yang menegaskan bahwa setiap instrumen keuangan yang tidak memenuhi definisi liabilitas diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Penyajian ekuitas dalam laporan keuangan juga mengikuti prinsip transparansi dan keterbandingan. PSAK 1 mewajibkan perusahaan menyajikan laporan perubahan ekuitas yang memuat rincian setiap komponen, termasuk modal saham, agio/disagio saham, laba ditahan, cadangan, serta komponen ekuitas lainnya. Hal ini sejalan dengan IAS 1 yang menempatkan laporan ekuitas sebagai bagian integral dari laporan keuangan, memberikan informasi tentang perubahan kepemilikan dan transaksi dengan pemilik selama periode pelaporan.

Instrumen keuangan yang terkait dengan ekuitas juga diatur secara spesifik. Dalam konteks PSAK, instrumen keuangan ekuitas diatur melalui PSAK 50 dan PSAK 55, sedangkan dalam IFRS, IAS 32 dan IFRS 9 memberikan pedoman terkait klasifikasi, pengukuran, dan pengungkapan instrumen keuangan. Kedua kerangka tersebut menekankan pentingnya membedakan antara liabilitas dan ekuitas, terutama dalam hal kewajiban kontraktual dan hak residual, yang berdampak langsung pada interpretasi posisi keuangan dan pengambilan keputusan oleh investor.

B. Modal Saham dan Agio/Disagio

Modal saham dan agio/disagio merupakan komponen utama dari ekuitas yang mencerminkan kepemilikan pemegang saham serta selisih nilai antara harga penerbitan saham dan nilai nominalnya. Kedua unsur ini memiliki peran penting dalam struktur permodalan perusahaan karena menunjukkan bagaimana entitas memperoleh dana dari investor serta bagaimana nilai pasar saham dibandingkan dengan nilai nominal yang ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Dalam konteks pelaporan keuangan, perlakuan akuntansi terhadap modal saham dan agio/disagio diatur secara rinci dalam PSAK 1 (Penyajian Laporan Keuangan, 2023) dan PSAK 50 (Instrumen Keuangan: Penyajian, 2023) yang mengacu pada standar internasional IAS 1 dan IAS 32.

1. Pengertian Modal Saham

Modal saham merupakan dana yang diperoleh perusahaan dari penerbitan saham kepada pemegang saham sebagai tanda kepemilikan

atas entitas tersebut. Dalam konteks perseroan terbatas (PT), modal saham mencerminkan kontribusi pemodal yang berhak atas bagian laba serta klaim atas aset perusahaan. Menurut PSAK 1 (IAI, 2023), modal saham diklasifikasikan sebagai bagian dari ekuitas dan bukan sebagai liabilitas, karena perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal tersebut kepada pemegang saham. Dengan demikian, modal saham menjadi sumber pendanaan jangka panjang yang mendukung kegiatan operasional dan pengembangan perusahaan.

Secara akuntansi, modal saham dibagi menjadi beberapa jenis yang masing-masing memiliki arti dan perlakuan berbeda. Pertama, modal dasar (*authorized capital*) adalah jumlah maksimum saham yang dapat diterbitkan sesuai anggaran dasar perusahaan. Misalnya, PT Cemerlang memiliki modal dasar 1.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Kedua, modal ditempatkan (*issued capital*) adalah jumlah saham dari modal dasar yang telah diterbitkan kepada investor. Dari modal dasar 1.000.000 lembar, perusahaan dapat menerbitkan 800.000 lembar saham yang menunjukkan kepemilikan investor. Ketiga, modal disetor (*paid-in capital*) adalah jumlah saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang saham. Dari 800.000 lembar saham yang diterbitkan, 700.000 lembar telah disetor penuh, sehingga jumlah ini yang diakui dalam laporan posisi keuangan sebagai bagian dari ekuitas.

Pemahaman mengenai jenis-jenis modal saham penting untuk menilai struktur modal perusahaan dan hak pemegang saham. Modal saham tidak hanya mencerminkan kontribusi modal awal, tetapi juga memberikan dasar untuk pembagian dividen dan partisipasi dalam keputusan strategis perusahaan. Dengan pengungkapan yang tepat dalam laporan keuangan, pemegang saham dan pemangku kepentingan dapat memahami komposisi dan nilai modal yang tersedia untuk mendukung aktivitas bisnis perusahaan.

2. Pengakuan dan Pengukuran Modal Saham

Pengakuan dan pengukuran modal saham merupakan bagian penting dari akuntansi ekuitas karena mencerminkan kontribusi pemegang saham terhadap perusahaan. Menurut PSAK 1 (IAI, 2023), modal saham diakui sebesar nilai nominal atau par value dari saham yang diterbitkan. Apabila saham diterbitkan tanpa nilai nominal (*no par value shares*), pengakuan dilakukan sebesar jumlah yang diterima perusahaan

dari investor pada saat penerbitan. Hal ini memastikan bahwa laporan posisi keuangan mencerminkan dengan tepat jumlah modal yang disetorkan oleh pemegang saham sebagai ekuitas perusahaan.

Sebagai contoh, PT Nusantara menerbitkan 10.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dan dijual kepada investor dengan harga Rp1.200 per saham. Dalam hal ini, nilai nominal saham yang dicatat adalah $10.000 \times \text{Rp}1.000 = \text{Rp}10.000.000$, sementara selisih antara harga penerbitan dan nilai nominal, yaitu Rp2.000.000, dicatat sebagai tambahan modal disetor atau agio saham. Jurnal akuntansi yang dibuat adalah: debit Kas sebesar Rp12.000.000, kredit Modal Saham sebesar Rp10.000.000, dan kredit Agio Saham sebesar Rp2.000.000. Dengan pencatatan ini, perusahaan memisahkan antara modal dasar yang diakui pada nilai nominal dan kelebihan penerimaan yang mencerminkan nilai tambahan bagi pemegang saham.

Pendekatan ini penting karena membantu dalam pelaporan keuangan yang transparan dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Pengukuran modal saham yang tepat juga memungkinkan investor, manajemen, dan pihak eksternal lain untuk menilai struktur modal perusahaan dan potensi dividen. Selain itu, pemisahan antara modal saham dan agio saham mempermudah pengawasan atas penggunaan dana dan pembagian laba kepada pemegang saham di masa depan. Dengan demikian, pengakuan dan pengukuran modal saham bukan hanya sekadar pencatatan, tetapi juga bagian dari manajemen ekuitas dan transparansi keuangan perusahaan.

3. Agio dan Disagio Saham

Agio dan disagio saham merupakan konsep penting dalam akuntansi ekuitas yang berkaitan dengan perbedaan antara harga penerbitan saham dan nilai nominalnya. Agio saham, atau share premium, adalah selisih lebih antara harga jual saham dengan nilai nominal yang diterbitkan. Menurut PSAK 1 (IAI, 2023), agio saham diakui sebagai bagian dari tambahan modal disetor (*additional paid-in capital*) dan disajikan terpisah dari modal saham. Hal ini mencerminkan keuntungan perusahaan saat menerbitkan saham di atas nilai nominal, namun keuntungan tersebut tidak boleh diakui sebagai laba operasional karena bersumber dari transaksi modal, bukan kegiatan usaha inti. Sebagai ilustrasi, PT Merdeka menerbitkan 100.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp500 per saham, dijual seharga Rp800 per saham.

Nilai nominal yang dicatat adalah Rp50.000.000, sementara agio saham sebesar Rp30.000.000, sehingga total kas yang diterima perusahaan mencapai Rp80.000.000. Jurnal akuntansi yang dibuat adalah debit Kas Rp80.000.000, kredit Modal Saham Rp50.000.000, dan kredit Agio Saham Rp30.000.000, sehingga pemisahan antara modal saham dan agio saham jelas terlihat dalam laporan keuangan.

Disagio saham (*share discount*) adalah selisih kurang antara nilai nominal saham dan harga jual saat penerbitan. Menurut IAI (2023), praktik penerbitan saham di bawah nilai nominal tidak diperbolehkan di Indonesia karena melanggar prinsip perlindungan modal (*capital maintenance principle*) sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam konteks akademik atau yurisdiksi yang memperbolehkan, disagio saham dicatat sebagai pengurang modal disetor dan dapat dikompensasikan dengan agio saham atau laba ditahan. Misalnya, jika saham bernilai nominal Rp1.000 dijual seharga Rp900, maka selisih Rp100 dicatat sebagai disagio saham. Jurnalnya adalah debit Kas Rp9.000.000, debit Disagio Saham Rp1.000.000, dan kredit Modal Saham Rp10.000.000.

4. Penyajian Modal Saham dan Agio/Disagio dalam Laporan Keuangan

Penyajian modal saham dan agio atau disagio saham dalam laporan keuangan merupakan bagian penting dari ekuitas yang memberikan informasi transparan mengenai kepemilikan perusahaan dan sumber daya yang diperoleh dari pemegang saham. Menurut PSAK 1 (IAI, 2023), modal saham yang telah disetor penuh dicatat sebesar nilai nominal saham yang diterbitkan, sedangkan selisih lebih dari harga penerbitan dibandingkan nilai nominal dicatat sebagai agio saham dan disajikan terpisah dari modal saham. Disagio saham, jika terjadi dalam konteks yurisdiksi yang memperbolehkan, dicatat sebagai pengurang modal disetor.

Contoh penyajian dalam laporan posisi keuangan menunjukkan bagaimana komponen ini diintegrasikan ke dalam ekuitas: modal saham disetor penuh sebesar Rp500.000.000, agio saham Rp75.000.000, laba ditahan Rp125.000.000, dan cadangan umum Rp25.000.000, sehingga total ekuitas perusahaan mencapai Rp725.000.000. Informasi tambahan mengenai modal saham dan agio disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK), yang mencakup rincian jumlah saham yang beredar,

nilai nominal per saham, dan sumber agio saham, seperti pada contoh: “Modal saham terdiri dari 500.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000 per saham, seluruhnya telah disetor penuh. Agio saham sebesar Rp75.000.000 berasal dari penerbitan saham di atas nilai nominal.”

Pengungkapan wajib mencakup hak dan keistimewaan setiap kelas saham, rekonsiliasi perubahan jumlah saham selama periode pelaporan, serta pembatasan terkait distribusi dividen atau modal, agar pemangku kepentingan memperoleh gambaran lengkap mengenai posisi ekuitas dan fleksibilitas finansial perusahaan. Penyajian yang sistematis ini membantu investor dan analis menilai struktur modal, potensi distribusi laba, serta risiko dan peluang yang terkait dengan kepemilikan saham. Dengan demikian, laporan keuangan tidak hanya mencerminkan jumlah modal yang disetor, tetapi juga kualitas dan hak-hak pemegang saham dalam perusahaan (PSAK 1 Paragraf 79, IAI, 2023).

C. Laba Ditahan dan Cadangan

Laba ditahan (*retained earnings*) dan cadangan (*reserves*) merupakan komponen penting dalam ekuitas yang mencerminkan akumulasi laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham serta alokasi laba untuk tujuan tertentu. Kedua komponen ini memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam membiayai operasional, ekspansi, dan distribusi dividen di masa depan. Sesuai dengan PSAK 1 (2023) dan PSAK 1 paragraf 79, laba ditahan dan cadangan harus disajikan secara terpisah dalam laporan ekuitas dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan agar pengguna laporan dapat memahami sumber perubahan ekuitas.

1. Pengertian Laba Ditahan

Laba ditahan merupakan bagian penting dari ekuitas perusahaan yang mencerminkan akumulasi laba bersih yang belum dibagikan kepada pemegang saham. Secara konseptual, laba ditahan mencerminkan keputusan manajemen untuk menahan sebagian laba guna mendukung pertumbuhan perusahaan, menutupi kerugian, atau membiayai investasi kembali, bukan dibagikan sebagai dividen (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022). Dengan kata lain, laba ditahan adalah laba

yang tetap berada dalam perusahaan untuk memperkuat posisi keuangan dan mendukung kegiatan operasional atau ekspansi di masa mendatang.

Perhitungan laba ditahan akhir didasarkan pada laba ditahan awal ditambah laba bersih periode berjalan, dikurangi dividen yang dibayarkan, baik dalam bentuk tunai maupun saham. Rumus sederhananya adalah:

$$\text{Laba Ditahan}_{\text{akhir}} = \text{Laba Ditahan}_{\text{awal}} + \text{Laba Bersih} - \text{Dividen}$$

Contoh praktiknya dapat dilihat pada PT Sejahtera yang memiliki laba ditahan awal sebesar Rp500.000.000. Selama tahun berjalan, perusahaan mencatat laba bersih sebesar Rp200.000.000 dan membayarkan dividen tunai sebesar Rp50.000.000. Dengan demikian, laba ditahan akhir perusahaan dihitung menjadi Rp650.000.000 ($500.000.000 + 200.000.000 - 50.000.000$). Jumlah ini kemudian dicatat sebagai bagian dari ekuitas pada laporan posisi keuangan dan menjadi sumber internal bagi pendanaan investasi atau pengembangan usaha.

Laba ditahan juga berfungsi sebagai buffer untuk menghadapi ketidakpastian bisnis dan membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis terkait alokasi sumber daya. Laba ditahan yang memadai memungkinkan perusahaan untuk membiayai proyek baru tanpa harus mengandalkan pembiayaan eksternal, sehingga meningkatkan fleksibilitas keuangan dan mengurangi risiko leverage. Dengan demikian, laba ditahan bukan hanya ukuran akumulasi keuntungan, tetapi juga alat strategis untuk pertumbuhan dan stabilitas perusahaan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022).

2. Fungsi Laba Ditahan

Laba ditahan memiliki peran yang sangat strategis dalam pengelolaan keuangan perusahaan karena memberikan fleksibilitas dan keamanan finansial. Salah satu fungsi utamanya adalah sebagai sumber pembiayaan internal. Dengan laba ditahan, perusahaan dapat mendanai berbagai kegiatan penting seperti investasi dalam proyek baru, pembelian aset tetap, riset dan pengembangan, maupun ekspansi usaha tanpa perlu mengandalkan utang atau menerbitkan saham baru, sehingga mengurangi beban biaya bunga dan risiko dilusi kepemilikan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022). Selain itu, laba ditahan berfungsi sebagai

penstabil ekuitas. Dengan menahan sebagian laba, perusahaan dapat menjaga struktur ekuitas agar tetap kuat, sehingga lebih siap menghadapi fluktuasi ekonomi, penurunan pendapatan, atau kerugian tak terduga. Hal ini membantu perusahaan mempertahankan likuiditas dan solvabilitas, memberikan rasa aman bagi investor dan kreditur.

Laba ditahan juga memiliki peran dalam memenuhi persyaratan regulasi tertentu. Misalnya, dalam konteks hukum Indonesia, laba ditahan dapat digunakan untuk membentuk cadangan umum atau cadangan hukum sesuai ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 70, yang wajibkan perusahaan membentuk cadangan minimal 20% dari modal disetor. Dengan demikian, laba ditahan tidak hanya bermanfaat secara operasional tetapi juga untuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku (IAI, PSAK 1, 2023).

Laba ditahan juga berpengaruh terhadap persepsi eksternal. Investor dan kreditur menilai laba ditahan sebagai indikator kesehatan keuangan dan kapasitas perusahaan untuk memperbaiki pertumbuhan jangka panjang. Semakin besar laba ditahan yang tersedia, semakin tinggi potensi perusahaan untuk membiayai ekspansi atau menghadapi risiko tanpa mengganggu stabilitas keuangan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar dan nilai perusahaan secara keseluruhan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022).

3. Pengertian Cadangan (*Reserves*)

Cadangan (*reserves*) merupakan bagian dari laba perusahaan yang dialokasikan untuk tujuan tertentu sehingga tidak sepenuhnya tersedia untuk distribusi dividen kepada pemegang saham. Fungsi utama cadangan adalah meningkatkan keamanan finansial perusahaan, memitigasi risiko, serta memenuhi persyaratan hukum atau regulasi yang berlaku. Menurut White, Sondhi, & Fried (2023), cadangan berperan sebagai buffer yang memungkinkan perusahaan menghadapi ketidakpastian ekonomi dan fluktuasi operasional tanpa mengganggu likuiditas atau stabilitas ekuitas.

Cadangan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuan dan sifatnya. Cadangan umum (*general reserve*) disiapkan untuk menghadapi risiko tak terduga atau kerugian mendadak. Misalnya, perusahaan dapat mengalokasikan 10% dari laba bersih setiap tahun sebagai cadangan umum untuk memperkuat posisi keuangan jangka panjang. Cadangan wajib atau legal reserve dibentuk sesuai

dengan ketentuan undang-undang atau regulasi perusahaan. Di Indonesia, sesuai UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 70, perusahaan wajib membentuk cadangan umum minimal 20% dari modal disetor sebagai perlindungan terhadap modal dan kepentingan pemegang saham (PSAK 1, 2023).

Cadangan revaluasi (*revaluation reserve*) terbentuk dari surplus hasil revaluasi aset tetap, misalnya kenaikan nilai properti perusahaan dicatat sebagai cadangan revaluasi, sehingga mencerminkan nilai aset yang lebih realistik dalam laporan keuangan. Sementara itu, cadangan tujuan khusus (*specific reserve*) dialokasikan untuk membiayai proyek atau ekspansi tertentu, seperti pembangunan fasilitas baru, riset dan pengembangan, atau pembelian peralatan strategis.

4. Pengakuan dan Penyajian Laba Ditahan dan Cadangan

Laba ditahan dan cadangan merupakan komponen penting dalam ekuitas perusahaan yang mencerminkan penggunaan laba untuk tujuan jangka panjang dan keamanan finansial. Laba ditahan adalah akumulasi laba bersih yang belum dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Dalam laporan posisi keuangan, laba ditahan disajikan secara terpisah dari modal saham dan agio saham untuk menunjukkan bagian laba yang tetap berada dalam perusahaan guna mendukung pertumbuhan, menutup kerugian, atau membiayai investasi kembali. Perubahan laba ditahan selama periode pelaporan, termasuk laba bersih yang diperoleh dan dividen yang dibayarkan, diungkapkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas sehingga pemangku kepentingan dapat menilai kebijakan distribusi laba perusahaan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022; PSAK 1, 2023).

Cadangan, di sisi lain, adalah bagian laba yang dialokasikan dari laba ditahan untuk tujuan tertentu, seperti cadangan umum, cadangan hukum, cadangan revaluasi, atau cadangan proyek khusus. Cadangan diakui sebagai bagian dari ekuitas dan harus diungkapkan secara jelas dalam catatan atas laporan keuangan (CALK), termasuk dasar pembentukan, besaran, dan tujuannya. Misalnya, jika perusahaan memperoleh laba bersih Rp100.000.000 dan mengalokasikan 10% untuk cadangan umum, jurnal akuntansinya adalah: Dr Laba Ditahan Rp10.000.000 dan Cr Cadangan Umum Rp10.000.000. Dengan demikian, cadangan menunjukkan kebijakan konservatif perusahaan

dalam menjaga stabilitas keuangan dan memitigasi risiko di masa depan (White, Sondhi, & Fried, 2023; PSAK 1, 2023).

Penyajian yang jelas dan sistematis dari laba ditahan dan cadangan membantu pemangku kepentingan, termasuk investor dan kreditur, memahami posisi keuangan perusahaan dan kemampuan manajemen dalam mengelola laba untuk pertumbuhan berkelanjutan. Selain itu, pengungkapan yang transparan sesuai PSAK 1 dan standar internasional memberikan informasi yang relevan mengenai alokasi laba dan cadangan, yang penting untuk analisis keuangan dan pengambilan keputusan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022; IAI, 2023).

D. Dividen dan Pembagian Laba

Dividen dan pembagian laba merupakan bagian penting dalam manajemen ekuitas perusahaan, karena mencerminkan distribusi keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Keputusan mengenai dividen tidak hanya berdampak pada kepuasan investor, tetapi juga memengaruhi likuiditas, struktur modal, dan pertumbuhan perusahaan. Menurut PSAK 1 (2023) dan literatur akuntansi modern (Kieso, Weygandt & Warfield, 2022), dividen diakui ketika dewan direksi telah menetapkan pembayaran dividen dan pemegang saham memiliki hak untuk menerimanya.

1. Pengertian Dividen

Dividen adalah bagian dari laba bersih yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham sebagai imbal hasil atas investasinya. Menurut sumber dari Corporate Finance Institute (2024), dividen merujuk pada *“distribution of profits to shareholders”* yang mencerminkan pengembalian modal investor ketika perusahaan memiliki arus kas berlebih dan peluang reinvestasi terbatas. Di Indonesia, pendistribusian dividen juga diatur secara hukum, yakni dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 71, yang menyatakan bahwa perusahaan hanya bisa membagikan dividen dari laba ditahan atau cadangan yang tersedia.

Pada praktiknya, dividen bisa diberikan dalam beberapa bentuk. Pertama, dividen tunai (*cash dividend*) yaitu pembayaran dalam bentuk uang tunai langsung ke pemegang saham, yang paling umum dan terfavorit karena likuiditasnya. Kedua, dividen saham (*stock dividend*),

yaitu pembayaran dalam bentuk tambahan saham perusahaan, bukan kas yang berarti jumlah saham pemegang saham bertambah tanpa perusahaan mengeluarkan kas. Ketiga, dividen properti (*property dividend*), yang merupakan pembayaran dalam bentuk aset non-kas seperti properti atau saham perusahaan lain, walaupun dalam praktiknya relatif jarang digunakan akibat kompleksitasnya.

Pembayaran dividen bukanlah kewajiban tetap melainkan keputusan manajemen dan direksi yang mempertimbangkan kondisi keuangan, arus kas, serta regulasi yang berlaku. Karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa pembayaran tidak mengganggu kelangsungan operasi maupun persyaratan hukum yang mensyaratkan bahwa dividen hanya bisa dibagikan bila terdapat laba ditahan atau cadangan yang sesuai. Dengan demikian, dividen merupakan salah satu sarana penting dalam hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham mewakili bagian dari keuntungan yang didapat perusahaan dan menjadi sinyal bagi investor tentang kesehatan keuangan perusahaan.

2. Pengakuan Dividen

Pengakuan dividen dalam laporan keuangan tergantung pada jenis dividen dan waktu deklarasi yang menimbulkan kewajiban bagi perusahaan. Menurut panduan internasional, apabila sebuah entitas mengumumkan (menetapkan) dividen tunai misalnya melalui keputusan dewan direksi atau persetujuan pemegang saham maka pada saat itulah muncul kewajiban yang dapat diakui sebagai liabilitas (*liability*). Sebagaimana diterangkan oleh Deloitte dalam “10.3 Dividends” bahwa “*An entity recognizes a liability for dividends on common stock when the dividends are declared, at which time an obligation to pay them has been created*”. Dengan demikian, jurnal yang Anda beri untuk dividen tunai (mendebit laba ditahan dan mengkredit dividen dibayar) menggambarkan langkah pengakuan tepat saat deklarasi. Setelah pembayaran, liabilitas “Dividen Dibayar” dilikuidasi dengan mencatat kas keluar seperti contoh Anda.

Dividen saham tidak menimbulkan arus kas keluar dan lebih merupakan pengalihan ekuitas daripada kewajiban. Karena perusahaan tidak harus membayar kas tetapi hanya menambah jumlah saham, maka dari sudut akuntansi tidak muncul liabilitas, melainkan pengurangan laba ditahan sekaligus peningkatan modal saham (atau akun ekuitas terkait). Beberapa artikel praktis menyebut bahwa untuk dividen saham, entitas

mencatat pengalihan ini dengan mendebit laba ditahan dan mengkredit modal saham sebagaimana jumlah saham tambahan dikalikan nilai nominal atau nilai lain yang relevan.

Penting diperhatikan bahwa menurut IAS 10 *Events after the Reporting Period*, apabila deklarasi dividen dilakukan setelah akhir periode pelaporan namun sebelum laporan keuangan diterbitkan, maka dividen tersebut tidak dapat diakui sebagai liabilitas pada tanggal neraca karena pada tanggal itu belum ada kewajiban yang pasti. Dengan kata lain: pengakuan dividen sebagai liabilitas hanya sah setelah deklarasi dan kewajiban menjadi nyata, bukan hanya karena laba tersedia atau secara sukarela akan dibayarkan.

3. Faktor Penentu Pembayaran Dividen

Keputusan pembagian dividen oleh perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang secara bersama-saling berkaitan. Pertama, laba bersih dan likuiditas perusahaan menjadi dasar utama: tinjauan literatur menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi serta kas bebas atau aliran kas internal yang memadai cenderung lebih mungkin membayar dividen. Tanpa laba atau arus kas yang cukup, pembayaran dividen bisa mengganggu stabilitas keuangan perusahaan sehingga perusahaan memilih untuk menahan pembayaran.

Kedua, kebijakan dividen perusahaan seperti kebijakan dividen tetap (*stable dividend policy*), residual dividend, atau kebijakan dividen fleksibel/variabel mempengaruhi keputusan. Perusahaan dengan kebijakan dividen stabil ingin memberikan sinyal positif kepada investor bahwa kondisi keuangannya sehat dan konsisten, sedangkan kebijakan residual menempatkan pembayaran dividen sebagai sisa setelah investasi dan kebutuhan modal terpenuhi. Studi menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki prospek pertumbuhan besar sering memilih untuk menahan laba untuk investasi dan membayar dividen lebih rendah.

Ketiga, kebutuhan pendanaan untuk ekspansi menjadi pertimbangan penting: apabila perusahaan memiliki banyak peluang investasi atau pertumbuhan, maka pengeluaran kas untuk dividen yang terlalu besar bisa mengurangi dana internal yang tersedia untuk ekspansi, dan menjaskannya fleksibilitas keuangan atau memaksa perusahaan memperoleh pendanaan eksternal dengan biaya yang lebih tinggi. Hal ini dikemukakan dalam studi bahwa perusahaan yang memiliki prospek investasi tinggi cenderung membayar dividen yang lebih rendah.

Keempat, kondisi ekonomi dan regulasi juga berperanan: variabel makroekonomi seperti tingkat inflasi, suku bunga, dan kondisi pasar global bisa mempengaruhi kebijakan dividen. Sebagai contoh penelitian menemukan bahwa variabel ekonomi makro berpengaruh signifikan terhadap kebijakan pembayaran dividen. (Selain itu, regulasi dan perundang-undangan di masing-masing negara menetapkan batasan terkait pembayaran dividen (misalnya dari laba ditahan atau cadangan) yang membatasi fleksibilitas perusahaan.

4. Dampak Dividen terhadap Ekuitas

Pembayaran dividen memiliki dampak langsung terhadap komponen ekuitas dalam laporan keuangan, dan efeknya tergantung pada jenis dividen yang dibayarkan. Ketika perusahaan membagikan dividen tunai, maka terjadi pengurangan kas (aset) dan pengurangan laba ditahan (*retained earnings*) dalam ekuitas. Seperti dijelaskan oleh sumber bahwa “*dividends have a direct impact on the statement of changes in equity, reflecting the reduction in retained earnings and overall equity*”. Karena kas keluar dan laba ditahan menurun, maka total ekuitas akan berkurang – sesuai dengan ilustrasi bahwa total ekuitas turun dari Rp 775.000.000 menjadi Rp 725.000.000 setelah dividen tunai. Dengan demikian, dividen tunai dianggap sebagai distribusi kepada pemegang saham yang mengurangi hak pemilik (*equity*) dalam perusahaan.

Ketika perusahaan memilih untuk membagikan dividen saham, maka perusahaan tidak mengeluarkan kas dan tidak menambah kewajiban kas, melainkan hanya merealokasi jumlah dari laba ditahan ke modal saham (atau akun modal saham/agio saham) dalam kelompok ekuitas. Dalam hal ini, total ekuitas tidak berubah karena pengurangannya pada laba ditahan diimbangi dengan peningkatan pada modal saham seperti pada contoh yang Anda berikan, total tetap Rp 725.000.000. Hal ini selaras dengan penjelasan bahwa “*stock dividends only rearrange the equity funds by transferring the value from retained earnings to paid-in capital*” (Investopedia). Dengan kata lain, meskipun komposisi ekuitas berubah laba ditahan berkurang, modal saham (atau akun setara) meningkat jumlah keseluruhan ekuitas tetap sama.

Pada perspektif akuntansi dan hukum, pembayaran dividen tunai juga mengurangi aset perusahaan dan dapat membatasi kemampuan

perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada kreditor. Seperti dijelaskan dalam literatur, “*The payment of a dividend ... leaves the company with fewer assets with which to meet its liabilities to its creditors.*” Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa pembayaran dividen tunai dilakukan hanya jika tersedia laba ditahan dan kas yang memadai, agar tidak mengganggu posisi keuangan atau melanggar regulasi.

E. Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas

Penyajian dan pengungkapan ekuitas dalam laporan keuangan merupakan bagian penting untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada pemegang saham, investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Ekuitas mencerminkan kepemilikan residual atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban, sehingga penyajian yang jelas membantu memahami struktur modal, sumber laba, dan kebijakan distribusi keuntungan. Sesuai dengan PSAK 1 (2023), ekuitas harus disajikan secara terpisah dengan komponen-komponen yang jelas, termasuk modal saham, agio/disagio saham, laba ditahan, cadangan, dan komponen ekuitas lainnya.

1. Komponen Ekuitas

Komponen ekuitas mencerminkan hak residual pemilik atas aset suatu entitas setelah dikurangi kewajiban, dan menurut *Intermediate Accounting: IFRS Edition* oleh Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt & Terry D. Warfield (2022) serta standar lokal PSAK 1 (IAI 2023) komponen-komponen utama ekuitas meliputi beberapa elemen yang penting untuk pemahaman penyajian laporan keuangan.

- a. *Modal Saham (Share Capital)* merupakan jumlah modal yang disetor oleh pemegang saham pada saat pendirian atau penerbitan saham tambahan; ini menggambarkan komitmen awal investor terhadap entitas. Kieso dkk. (2022) menunjukkan bahwa modal saham adalah bagian dari contributed capital yang harus diakui dan dipisahkan dari komponen ekuitas lainnya.
- b. *Agio Saham (Share Premium)* muncul ketika saham diterbitkan dengan harga di atas nilai nominalnya. Selisih antara harga penerbitan dan nilai nominal ini disajikan sebagai agio saham dan, menurut standar serta literatur, tidak dapat dibagikan

- sebagai dividen karena merupakan bagian dari ekuitas yang bukan laba ditahan. (Kieso et al., 2022)
- c. Laba Ditahan (*Retained Earnings*) adalah akumulasi laba bersih entitas yang belum dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan digunakan untuk reinvestasi dalam entitas ataupun dialokasikan sebagai cadangan. Kieso et al. menekankan bahwa laba ditahan mencerminkan kemampuan entitas untuk menghasilkan laba dan menahan sebagian untuk pengembangan.
 - d. Cadangan (*Reserves*) mencakup bagian laba yang dialokasikan untuk tujuan spesifik, misalnya cadangan umum, cadangan hukum atau revaluasi aset. Dalam konteks PSAK 1, perubahan dalam cadangan serta transaksi dengan pemilik dijelaskan sebagai bagian dari laporan perubahan ekuitas. (PSAK 1, 2023)
 - e. Terdapat Komponen Ekuitas Lain (*Other Equity Components*) yang dapat mencakup selisih kurs penjabaran laporan keuangan asing (*foreign currency translation adjustments*), surplus revaluasi aset, dan instrumen ekuitas derivatif. Menurut Kieso et al., istilah “*reserve*” di IFRS sering digunakan untuk menampung pos-pos ini guna menunjukkan perubahan ekuitas yang bukan berasal langsung dari transaksi pemilik maupun laba periode berjalan.

2. Penyajian Ekuitas dalam Laporan Keuangan

Penyajian ekuitas dalam laporan keuangan memiliki peranan penting sebagai sarana transparansi terhadap perubahan hak pemilik antar periode. Berdasarkan IAS 1 *Presentation of Financial Statements* (2023), entitas wajib menyajikan *Statement of Changes in Equity* (Laporan Perubahan Ekuitas) sebagai bagian dari satu set laporan keuangan lengkap, bersama dengan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dan laporan arus kas. Sementara itu, panduan lokal seperti PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan (2023) di Indonesia menegaskan bahwa perusahaan harus mengungkap jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor, cadangan, serta kebijakan dividen dalam bagian ekuitasnya.

Pada praktiknya, laporan perubahan ekuitas menyajikan tiga jenis informasi utama: pertama, perubahan ekuitas selama periode tertentu, misalnya laba bersih yang dihasilkan, distribusi dividen pembayaran, penerbitan saham baru, atau transaksi dengan pemilik

lainnya. Kedua, sumber perubahan, yakni secara eksplisit menunjukkan dari mana perubahan itu datang apakah berasal dari laba ditahan, pengeluaran dividen, atau penerbitan modal baru. Ketiga, alokasi dan penggunaan komponen ekuitas, seperti pembentukan cadangan, pengalihan laba ditahan ke cadangan, atau perubahan lain dalam komponen ekuitas selain hasil operasi.

Contoh format tabel sederhana: dimulai dengan saldo awal untuk setiap komponen ekuitas (modal saham, agio saham, laba ditahan, cadangan) kemudian ditambahkan laba bersih, dikurangi dividen tunai, dan dicatat pembentukan cadangan umum; akhirnya menghasilkan saldo akhir. Penggunaan format semacam itu memudahkan pengguna laporan keuangan untuk melacak “arus” ekuitas dan memahami transaksi-khusus pemilik atau kebijakan perusahaan yang mempengaruhi ekuitas.

3. Pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Pengungkapan dalam PSAK 1 (Penyajian Laporan Keuangan) melalui bagian Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) berperanan penting untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai komposisi ekuitas dan perubahannya selama periode. Standar ini mensyaratkan entitas mengungkapkan, antara lain, informasi terkait modal yang disetor, cadangan, laba ditahan, serta transaksi ekuitas lainnya.

- a. Mengenai modal saham dan agio saham, entitas harus mengungkap jumlah saham yang diterbitkan dan ditempatkan, nilai nominal serta harga penerbitannya, dan setiap perubahan dalam modal saham selama periode pelaporan. Hal ini memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi struktur modal dan kontribusi pemegang saham. Misalnya, jumlah saham, nilai nominal per saham, serta agio yaitu selisih antara harga penerbitan dan nilai nominal harus dijelaskan agar transparan.
- b. Untuk cadangan, pengungkapan harus mencakup jenis cadangan (umum, hukum, revaluasi, tujuan khusus), dasar pembentukan, serta saldo awal dan akhir cadangan tersebut. UBS-dan literatur akuntansi menegaskan bahwa cadangan menunjukkan alokasi laba yang tidak tersedia untuk distribusi bebas dan memiliki tujuan tertentu sehingga pengungkapan ini penting bagi analisis keuangan perusahaan.

- c. Terkait dengan laba ditahan, entitas wajib mengungkapkan perubahan yang terjadi akibat laba bersih tahun berjalan, distribusi dividen, dan alokasi ke cadangan. Selain itu, kebijakan dividen perusahaan bagaimana dan kapan dividen dibagikan juga perlu diungkapkan agar pengguna laporan memahami bagaimana keputusan manajemen mempengaruhi ekuitas.
- d. Pengungkapan mengenai transaksi ekuitas lainnya memuat instrumen ekuitas derivatif yang signifikan, selisih kurs penjabaran laporan keuangan asing, serta dampak perubahan kebijakan akuntansi terhadap ekuitas. Misalnya, jika ada instrumen derivatif yang diklasifikasikan sebagai ekuitas atau unsur selisih kurs yang mempengaruhi ekuitas, maka hal tersebut harus diuraikan secara ringkas namun jelas dalam CALK.

4. Studi Kasus Singkat

Pada periode pelaporan, ekuitas PT Nusantara meningkat dari saldo awal Rp 775.000.000 menjadi saldo akhir Rp 885.000.000, yang menunjukkan peningkatan sebesar Rp 110.000.000. Peningkatan ini terutama berasal dari laba bersih sebesar Rp 150.000.000 yang ditambahkan ke laba ditahan dan pembentukan cadangan umum sebesar Rp 10.000.000 dari laba tersebut. Sementara itu, perusahaan juga membayarkan dividen tunai sebesar Rp 50.000.000, yang mengurangi laba ditahan. Dengan demikian, perubahan dalam komponen-ekuitas menggambarkan bagaimana keuntungan perusahaan tidak seluruhnya didistribusikan, tetapi sebagian diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan melalui penahanan laba dan pembentukan cadangan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa peningkatan laba ditahan dari Rp 200.000.000 menjadi Rp 300.000.000 mencerminkan keberhasilan operasional yang menghasilkan laba bersih dan keputusan manajemen untuk memperkuat keuangan perusahaan dengan mengalokasikan sebagian laba untuk cadangan. Pembentukan cadangan umum dari Rp 25.000.000 menjadi Rp 35.000.000 juga menunjukkan kebijakan konservatif, menyediakan buffer atau dana cadangan untuk menghadapi risiko atau kebutuhan strategis di masa datang. Kebijakan tersebut juga memberi sinyal positif kepada pemegang saham bahwa perusahaan menjaga keseimbangan antara distribusi dividen dan reinvestasi.

Pengungkapan bahwa dividen tunai sebesar Rp 50.000.000 telah dibagikan memberikan informasi transparan tentang kebijakan distribusi laba perusahaan kepada pemegang saham. Ini penting karena, seperti dijelaskan dalam literatur, laporan perubahan ekuitas (*“statement of changes in equity”*) berfungsi untuk menunjukkan secara rinci bagaimana komponen-ekuitas berubah sepanjang periode: laba atau rugi, distribusi kepada pemilik, dan investasi pemilik dalam entitas. Dengan demikian, pengguna laporan keuangan mendapat gambaran jelas mengenai bagaimana perusahaan mengelola modal, laba ditahan, dan cadangan dalam mendukung pertumbuhan dan menjaga kestabilan.

F. Latihan Soal

1. Jelaskan perbedaan antara laba ditahan dan cadangan dalam laporan ekuitas!
2. Bagaimana pengaruh pembayaran dividen tunai terhadap total ekuitas perusahaan? Jelaskan dengan contoh jurnal!
3. Sebutkan dan jelaskan tiga jenis dividen yang biasa digunakan perusahaan!
4. Jelaskan pentingnya pengungkapan ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)!
5. PT Sejahtera memiliki laporan ekuitas awal sebagai berikut:
 - Modal Saham: Rp500.000.000
 - Agio Saham: Rp50.000.000
 - Laba Ditahan: Rp200.000.000
 - Cadangan Umum: Rp25.000.000

Jika perusahaan memperoleh laba bersih Rp150.000.000, membayarkan dividen tunai Rp50.000.000, dan membentuk cadangan umum Rp10.000.000, hitung saldo akhir ekuitas dan buat tabel laporan perubahan ekuitas!



BAB VIII

AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BEBAN

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan konsep pengakuan pendapatan (*revenue recognition*), memahami PSAK 72: pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, memahami pengakuan beban dan *matching principle*, memahami akuntansi untuk beban operasional dan non-operasional, serta memahami pengungkapan pendapatan dan beban. Sehingga pembaca dapat memahami hubungan antara pendapatan, beban, dan laba perusahaan, serta mampu menerapkan prinsip akuntansi pendapatan dan beban secara profesional, akurat, dan relevan dengan praktik bisnis modern.

Materi Pembelajaran

- Konsep Pengakuan Pendapatan (*Revenue Recognition*)
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- Pengakuan Beban dan *Matching Principle*
- Akuntansi untuk Beban Operasional dan Non-Operasional
- Pengungkapan Pendapatan dan Beban
- Latihan Soal

A. Konsep Pengakuan Pendapatan (*Revenue Recognition*)

Pendapatan adalah arus masuk manfaat ekonomi ke entitas selama periode pelaporan yang meningkatkan ekuitas, kecuali yang berasal dari kontribusi pemilik (PSAK Kerangka Konseptual, 2023). Pengakuan pendapatan (*revenue recognition*) adalah proses mencatat dan melaporkan pendapatan dalam laporan keuangan pada periode yang tepat sehingga mencerminkan kinerja ekonomi perusahaan secara akurat.

1. Definisi Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu elemen fundamental dalam laporan keuangan yang mencerminkan arus masuk ekonomi bruto yang diperoleh oleh perusahaan dari aktivitas operasional normalnya. Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2022), pendapatan dapat berupa kas, piutang, atau bentuk aset lain yang menambah ekuitas, dengan pengecualian kontribusi dari pemilik. Dengan kata lain, pendapatan menunjukkan sumber utama pertumbuhan ekonomi perusahaan melalui kegiatan bisnis inti, seperti penjualan barang dan jasa. Contoh konkret pendapatan mencakup penjualan produk, penerimaan jasa profesional, bunga dari simpanan atau pinjaman yang diberikan, royalti atas penggunaan hak kekayaan intelektual, serta dividen yang diterima dari investasi pada entitas lain.

Secara akuntansi, pendapatan harus dicatat secara gross, yaitu sebelum dikurangi biaya atau beban yang terkait dengan perolehan pendapatan tersebut. Hal ini penting agar laporan laba rugi dapat mencerminkan performa operasi perusahaan secara akurat, dan tidak hanya perubahan bersih kas atau aset. IAS 1 *Presentation of Financial Statements* (2023) menegaskan bahwa pendapatan harus diakui ketika kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan dan jumlahnya dapat diukur dengan andal. Prinsip ini juga sejalan dengan PSAK 23 (2023) di Indonesia, yang menekankan bahwa pengakuan pendapatan harus mencerminkan realisasi ekonomi dari transaksi yang terjadi dalam kegiatan normal perusahaan.

Pendapatan bukan hanya ukuran kinerja finansial, tetapi juga berfungsi sebagai dasar bagi pengambilan keputusan manajerial, penilaian investasi, dan perhitungan kewajiban pajak. Pengukuran yang tepat terhadap pendapatan sangat penting, karena kesalahan dalam pengakuan dapat menimbulkan distorsi terhadap laba bersih, ekuitas, dan indikator kinerja lainnya. Dengan demikian, pendapatan tidak hanya mencerminkan jumlah aset yang diterima perusahaan, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan aktivitas operasional yang menjadi inti dari strategi bisnis jangka panjang. Referensi yang valid, seperti Kieso, Weygandt, & Warfield (2022) dan standar PSAK/IAS terbaru, memastikan bahwa definisi ini mengikuti prinsip akuntansi internasional dan praktik terbaik.

2. Tujuan Pengakuan Pendapatan

Tujuan pengakuan pendapatan dalam akuntansi adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kinerja ekonomi perusahaan secara andal dan relevan bagi para pengguna informasi keuangan. Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2022), pengakuan pendapatan bertujuan memberikan gambaran yang akurat mengenai seberapa efektif perusahaan menghasilkan arus masuk ekonomi dari aktivitas operasionalnya, sehingga investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya dapat menilai profitabilitas dan keberlanjutan bisnis. Dengan pengakuan yang tepat, laba yang dilaporkan mencerminkan transaksi yang benar-benar telah direalisasikan dan bukan hanya perkiraan atau transaksi masa depan, sehingga meningkatkan kredibilitas laporan laba rugi.

Pengakuan pendapatan membantu memastikan bahwa laba dan pendapatan dicatat pada periode akuntansi yang tepat, sesuai dengan prinsip akuntansi akrual. Hal ini penting karena kesalahan penjadwalan pengakuan pendapatan dapat menyebabkan distorsi kinerja keuangan, seperti overstating atau understating laba bersih pada periode tertentu. Sebagai contoh, pendapatan dari penjualan yang belum terealisasi atau belum ditagih tidak seharusnya diakui sebelum perusahaan memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang atau jasa kepada pelanggan, sesuai dengan kriteria pengakuan pendapatan.

Pengakuan pendapatan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, yaitu PSAK 72 (2023) tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. PSAK 72 menekankan lima langkah pengakuan pendapatan: identifikasi kontrak, identifikasi kewajiban kinerja, penetapan harga transaksi, alokasi harga transaksi, dan pengakuan saat kewajiban kinerja dipenuhi. (psak.or.id, 2023) Dengan mengikuti standar ini, perusahaan dapat menyajikan pendapatan secara konsisten dan transparan, meminimalkan risiko manipulasi laba, serta memberikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal dan internal.

3. Prinsip Dasar Pengakuan Pendapatan

Prinsip dasar pengakuan pendapatan merupakan landasan penting dalam akuntansi untuk memastikan bahwa pendapatan yang dicatat mencerminkan kinerja ekonomi nyata perusahaan dan memberikan informasi yang andal bagi pengguna laporan keuangan.

Berdasarkan Kieso, Weygandt, & Warfield (2022), pengakuan pendapatan dilakukan dengan mengacu pada dua prinsip utama, yaitu prinsip realisasi (*realization principle*) dan prinsip kenaikan ekuitas atau pendapatan yang diperoleh (*earned principle*).

Prinsip realisasi menekankan bahwa pendapatan hanya dapat diakui ketika barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan dan perusahaan memiliki hak untuk menerima imbalan. Dengan kata lain, pendapatan tidak boleh diakui berdasarkan janji atau kontrak masa depan semata, melainkan ketika manfaat ekonomi yang dihasilkan dari transaksi telah benar-benar terealisasi. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari pencatatan pendapatan yang prematur, sehingga laporan laba rugi mencerminkan nilai yang dapat diandalkan dan realistik dari aktivitas operasional perusahaan. Contohnya, penjualan barang diakui sebagai pendapatan saat barang dikirim dan diterima oleh pelanggan, bukan saat pesanan dibuat.

Prinsip kenaikan ekuitas (*earned principle*) menegaskan bahwa pendapatan diakui ketika perusahaan telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan kontrak, yang berarti pelanggan telah memperoleh pengendalian atas barang atau jasa. PSAK 72 (2023) menekankan bahwa pengakuan pendapatan harus mengikuti lima langkah, termasuk identifikasi kontrak dan alokasi harga transaksi, sehingga pendapatan hanya diakui saat kewajiban kinerja terpenuhi. Prinsip ini memastikan bahwa pengakuan pendapatan mencerminkan pertambahan ekuitas yang sah dan bukan sekadar perubahan arus kas atau aset lainnya.

4. Kriteria Pengakuan Pendapatan Tradisional

Kriteria pengakuan pendapatan tradisional merupakan pedoman penting dalam akuntansi untuk memastikan bahwa pendapatan yang dicatat mencerminkan arus masuk ekonomi yang sah dan dapat diandalkan. Menurut Horngren, Datar, & Rajan (2021), pendapatan hanya dapat diakui ketika beberapa kondisi utama terpenuhi, sehingga laporan keuangan memberikan informasi yang akurat dan relevan bagi para pengguna, termasuk investor, kreditor, dan manajemen.

- a. Pendapatan harus berasal dari penyerahan barang atau pemberian jasa kepada pelanggan. Artinya, perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya dalam kontrak sehingga pelanggan memperoleh pengendalian atas barang atau jasa tersebut. Pengakuan pendapatan sebelum penyerahan dianggap prematur dan dapat

- menyesatkan pengguna laporan keuangan mengenai kinerja operasional perusahaan.
- b. Harus ada bukti transaksi yang sah, yang biasanya berupa kontrak tertulis, faktur, atau dokumen pendukung lainnya yang menunjukkan bahwa transaksi telah disetujui dan diakui oleh kedua belah pihak. Bukti ini menjamin bahwa transaksi benar-benar terjadi dan dapat diverifikasi, sehingga pendapatan yang diakui dapat dipercaya.
 - c. Jumlah pendapatan harus dapat diukur secara andal. Hal ini memastikan bahwa nilai yang dicatat dalam laporan laba rugi sesuai dengan nilai ekonomi yang diterima atau akan diterima perusahaan. Ketidakpastian dalam pengukuran dapat menyebabkan distorsi laba, sehingga pengakuan hanya dilakukan jika estimasi jumlah dapat diandalkan.
 - d. Pengakuan pendapatan memerlukan kemungkinan manfaat ekonomi akan masuk ke perusahaan. Ini berarti ada keyakinan yang wajar bahwa perusahaan akan menerima kas, piutang, atau aset lain sebagai imbalan dari transaksi.
 - e. Biaya yang terkait dengan pendapatan juga harus dapat diukur secara andal, karena pengukuran laba bersih bergantung pada kesesuaian antara pendapatan yang diakui dan biaya yang terkait. Tanpa kemampuan untuk mengukur biaya dengan tepat, pengakuan pendapatan dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan.

B. PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

PSAK 72 adalah standar akuntansi yang mengatur pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, mengadopsi IFRS 15 (*Revenue from Contracts with Customers*). Tujuan utama PSAK 72 adalah memberikan pedoman yang konsisten, transparan, dan dapat dibandingkan terkait pengakuan pendapatan di seluruh industri, terutama untuk transaksi yang kompleks seperti kontrak gabungan, imbalan variabel, dan layanan berlangganan (IAI, 2023).

1. Lima Langkah Pengakuan Pendapatan menurut PSAK 72

Menurut PSAK 72 (Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan), pengakuan pendapatan harus dilakukan dengan mengikuti lima langkah

sistematis yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa pendapatan yang diakui benar-benar mencerminkan arus manfaat ekonomi yang dialihkan kepada pelanggan.

- a. Entitas harus mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontrak di sini merupakan suatu perjanjian antara dua pihak yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat ditegakkan secara hukum. Kontrak tersebut harus menunjukkan persetujuan kedua pihak, hak dan kewajiban masing-masing pihak, besaran pembayaran yang dapat diidentifikasi, serta adanya kemungkinan arus kas masuk manfaat ekonomi.
- b. Entitas harus mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan (*performance obligations*) dalam kontrak tersebut. Kewajiban pelaksanaan adalah janji untuk menyerahkan barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan. Apabila dalam kontrak terdapat lebih dari satu kewajiban pelaksanaan, maka setiap kewajiban harus diidentifikasi secara terpisah agar alokasi pendapatan dapat dilakukan dengan tepat.
- c. Entitas harus menentukan harga transaksi (*transaction price*) yaitu jumlah imbalan yang entitas berhak terima dari pelanggan sebagai imbalan atas penyerahan barang atau jasa. Harga transaksi ini dapat mencakup komponen variabel seperti diskon, bonus, atau faktor tidak pasti lainnya yang harus dipertimbangkan dalam penetapannya.
- d. Langkah berikutnya adalah mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan yang telah diidentifikasi. Jika kontrak memiliki beberapa kewajiban pelaksanaan, entitas harus mengalokasikan harga transaksi berdasarkan nilai relatif tiap kewajiban. Tujuannya agar pengakuan pendapatan mencerminkan bagian imbalan yang dialokasikan ke masing-masing kewajiban.
- e. Entitas mengakui pendapatan ketika (atau sepanjang waktu) entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan tersebut. Pendapatan diakui pada saat pelanggan memperoleh pengendalian atas barang atau jasa yang dijanjikan yaitu ketika kewajiban pelaksanaan dialihkan kepada pelanggan. Pengakuan dapat dilakukan sekaligus (*at a point in time*) atau sepanjang waktu (*over time*) tergantung sifat kewajiban pelaksanaan.

2. Contoh Penerapan PSAK 72

Penerapan PSAK 72 dapat dijelaskan melalui studi kasus PT XYZ, yang menjual sebuah mesin sekaligus menyediakan layanan pemeliharaan selama dua tahun dengan total harga transaksi sebesar Rp 240.000.000. Dalam penerapan lima langkah PSAK 72, langkah pertama adalah identifikasi kontrak, di mana kontrak antara PT XYZ dan pelanggan telah jelas, menciptakan hak dan kewajiban yang dapat ditegakkan secara hukum. Kontrak ini menjadi dasar pengakuan pendapatan karena memuat komitmen kedua belah pihak terkait penyerahan mesin dan layanan pemeliharaan.

Langkah kedua adalah identifikasi kewajiban pelaksanaan (*performance obligations*). Dalam kontrak ini terdapat dua kewajiban pelaksanaan yang terpisah, yaitu penyerahan mesin dan pemberian layanan pemeliharaan selama dua tahun. Pemisahan kewajiban ini penting agar harga transaksi dapat dialokasikan secara tepat sesuai kontribusi masing-masing kewajiban terhadap total imbalan yang diterima.

Langkah ketiga adalah penentuan harga transaksi, yang dalam kasus ini adalah Rp 240.000.000, mencakup harga mesin sebesar Rp 200.000.000 dan harga layanan pemeliharaan sebesar Rp 40.000.000. Selanjutnya, langkah keempat adalah alokasi harga transaksi ke masing-masing kewajiban pelaksanaan berdasarkan nilai relatifnya. Dengan demikian, mesin dialokasikan Rp 200.000.000 dan layanan Rp 40.000.000.

Langkah terakhir adalah pengakuan pendapatan saat kewajiban pelaksanaan dipenuhi. Pendapatan dari mesin diakui saat mesin diserahkan kepada pelanggan, karena pengendalian atas mesin telah berpindah. Sedangkan pendapatan dari layanan pemeliharaan diakui sepanjang periode layanan, yaitu Rp 20.000.000 per tahun selama dua tahun. Jurnal akuntansi saat penyerahan mesin mencatat kas sebesar Rp 240.000.000, pendapatan mesin Rp 200.000.000, dan liabilitas layanan Rp 40.000.000. Kemudian, setiap tahun diakui pendapatan layanan sebesar Rp 20.000.000 dengan mengurangi liabilitas layanan yang telah dicatat sebelumnya.

3. Pengungkapan PSAK 72

Pengungkapan pendapatan menurut PSAK 72 bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan dan relevan kepada pengguna

laporan keuangan mengenai sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan yang diakui oleh perusahaan. Standar ini menekankan bahwa perusahaan harus menyajikan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan pendapatan, termasuk metode alokasi harga transaksi, penentuan kewajiban pelaksanaan, dan pengakuan pendapatan atas kontrak yang bersifat material. Hal ini penting agar laporan keuangan mencerminkan praktik yang konsisten dan dapat dibandingkan dari periode ke periode.

Perusahaan juga harus mengungkapkan informasi mengenai kontrak material dengan pelanggan, termasuk sifat dan jangka waktu kontrak, serta kewajiban pelaksanaan yang signifikan. Pengungkapan ini membantu pengguna laporan keuangan memahami eksposur perusahaan terhadap kontrak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan. Informasi tentang imbalan variabel dan estimasi terkait juga harus dijelaskan, seperti diskon, bonus, atau penyesuaian harga yang mungkin mempengaruhi jumlah pendapatan yang akan diterima perusahaan, sehingga pengguna dapat menilai ketidakpastian arus kas di masa depan.

PSAK 72 juga menuntut pengungkapan mengenai aset kontrak, yaitu hak perusahaan untuk menerima kas atau imbalan lain dari pelanggan, serta liabilitas kontrak, yang mencerminkan kewajiban pelaksanaan yang belum diserahkan. Perubahan saldo liabilitas kontrak selama periode pelaporan harus diuraikan untuk menunjukkan bagaimana perusahaan menyesuaikan pengakuan pendapatan sesuai penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Dengan demikian, pengungkapan ini memberikan gambaran lengkap mengenai arus pendapatan dan kewajiban yang terkait dengan kontrak pelanggan.

C. Pengakuan Beban dan Matching Principle

Beban (*expenses*) adalah arus keluar atau pengorbanan manfaat ekonomi oleh entitas selama periode tertentu yang mengakibatkan penurunan ekuitas, kecuali yang berasal dari distribusi kepada pemilik (PSAK Kerangka Konseptual, 2023). Pengakuan beban harus dilakukan secara sistematis dan konsisten untuk mencerminkan kinerja keuangan perusahaan. Matching principle (*prinsip pencocokan*) adalah konsep akuntansi yang menekankan pengakuan beban pada periode yang sama

dengan pendapatan yang dihasilkannya, agar laporan laba rugi memberikan gambaran akurat tentang profitabilitas.

1. Konsep Pengakuan Beban

Konsep pengakuan beban merupakan prinsip dasar dalam akuntansi yang bertujuan untuk memastikan bahwa beban dicatat pada periode yang tepat dan sesuai dengan manfaat ekonomi yang dikonsumsi perusahaan. Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2022), pengakuan beban dilakukan ketika terjadi penurunan manfaat ekonomi bagi entitas, yang berarti sumber daya perusahaan, seperti kas, aset, atau jasa, telah digunakan untuk mendukung kegiatan operasional atau menghasilkan pendapatan. Dengan kata lain, beban diakui saat manfaat ekonomi terkait dikonsumsi, bukan sekadar saat pembayaran dilakukan, sesuai dengan prinsip akrual.

Jumlah beban harus dapat diukur secara andal, sehingga pengakuannya dalam laporan laba rugi dapat memberikan informasi yang akurat mengenai kinerja keuangan perusahaan. Beban yang tidak dapat diukur secara andal tidak boleh diakui, karena akan menimbulkan distorsi terhadap laba bersih dan posisi keuangan perusahaan. Prinsip penting lainnya adalah hubungan beban dengan pendapatan yang dihasilkan, yang dikenal sebagai matching principle. Beban diakui bersamaan dengan pendapatan yang terkait untuk mencerminkan laba bersih yang sebenarnya pada periode tertentu. Contohnya, gaji karyawan diakui sebagai beban pada periode di mana karyawan memberikan jasanya, walaupun pembayaran gaji mungkin dilakukan di periode berikutnya. Begitu pula, beban depresiasi aset tetap diakui sesuai dengan penggunaan aset untuk menghasilkan pendapatan selama masa manfaatnya. Hal ini memastikan bahwa laporan laba rugi mencerminkan kontribusi biaya yang benar terhadap pendapatan yang diperoleh.

Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat menyusun laporan laba rugi yang transparan, andal, dan relevan, sehingga membantu manajemen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan ekonomi. Konsep pengakuan beban yang konsisten juga mendukung kepatuhan terhadap standar akuntansi seperti PSAK 16 dan PSAK 24, yang mengatur pengakuan dan pengukuran beban, serta memastikan informasi keuangan dapat dibandingkan dari periode ke periode (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022; PSAK 16, 2023).

2. *Matching Principle*

Matching principle merupakan konsep fundamental dalam akuntansi akrual yang menekankan bahwa beban harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan dari beban tersebut. Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2022), prinsip ini bertujuan untuk menyajikan laporan laba rugi yang lebih realistik dan mencerminkan kinerja ekonomi perusahaan secara akurat. Dengan menerapkan matching principle, perusahaan dapat memastikan bahwa laba yang dilaporkan tidak terdistorsi oleh pengakuan pendapatan atau beban yang tidak sesuai dengan periode yang relevan.

Tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk mencegah pengakuan pendapatan tanpa beban yang terkait atau sebaliknya, sehingga laba bersih yang dicatat benar-benar mencerminkan aktivitas operasional perusahaan dalam periode tertentu. Misalnya, jika perusahaan menjual barang senilai Rp50.000.000 pada Januari dan biaya pokok penjualan (COGS) terkait sebesar Rp30.000.000, maka laporan laba rugi Januari harus mencatat pendapatan penjualan sebesar Rp50.000.000 dan COGS sebesar Rp30.000.000, menghasilkan laba kotor Rp20.000.000. Dengan demikian, pendapatan dan beban yang terkait dicocokkan dalam periode yang sama, memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai profitabilitas transaksi tersebut.

Matching principle juga berlaku untuk berbagai jenis beban, termasuk gaji karyawan, depresiasi aset tetap, dan beban operasional lain yang mendukung pendapatan pada periode tertentu. Sebagai contoh, beban depresiasi mesin yang digunakan untuk produksi diakui sepanjang masa manfaatnya, sejalan dengan pendapatan yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Hal ini memastikan bahwa laporan laba rugi mencerminkan kontribusi biaya terhadap pendapatan secara tepat, bukan sekadar arus kas keluar.

Penerapan prinsip ini merupakan salah satu unsur kunci akuntansi akrual dan menjadi dasar bagi standar akuntansi seperti PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, yang menekankan relevansi dan andalitas informasi keuangan. Dengan demikian, matching principle membantu perusahaan menghasilkan laporan keuangan yang transparan, akurat, dan dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan, termasuk manajemen, investor, dan kreditor (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022; PSAK 1, 2023).

3. Jenis Beban dan Pengakuannya

Jenis-jenis beban dan pengakuannya merupakan konsep penting dalam akuntansi akrual, karena memastikan bahwa beban dicatat pada periode yang tepat sehingga laporan laba rugi mencerminkan kinerja perusahaan secara akurat (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022). Beban dapat dibedakan menjadi beberapa kategori utama berdasarkan sifat dan hubungan dengan operasi perusahaan.

Pertama, beban operasional adalah beban rutin yang timbul dari kegiatan utama perusahaan, seperti gaji karyawan, sewa, listrik, dan bahan baku. Beban ini diakui ketika manfaat ekonominya telah dikonsumsi atau digunakan untuk mendukung aktivitas operasional. Misalnya, gaji karyawan yang dibayarkan pada akhir bulan diakui sebagai beban pada periode kerja karyawan tersebut, meskipun pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya. Hal ini memastikan penerapan prinsip matching antara pendapatan yang dihasilkan dan biaya yang terkait.

Kedua, beban non-operasional mencakup biaya yang tidak terkait langsung dengan operasi inti perusahaan, seperti rugi penjualan aset, bunga pinjaman, dan denda. Beban ini diakui saat terjadinya transaksi atau peristiwa yang menimbulkan kewajiban, sehingga mencerminkan dampak ekonomi secara tepat pada periode laporan keuangan. Selain itu, terdapat beban akrual (*accrued expenses*), yaitu beban yang telah terjadi tetapi belum dibayar. Contohnya, gaji karyawan Desember yang dibayarkan Januari dicatat sebagai beban Desember. Sebaliknya, beban dibayar dimuka (*prepaid expenses*) adalah beban yang dibayarkan sebelum manfaat ekonominya diterima. Beban dibayar dimuka awalnya dicatat sebagai aset, kemudian diakui sebagai beban secara bertahap sesuai periode manfaat. Misalnya, sewa 12 bulan yang dibayarkan di awal Januari dicatat sebagai aset dan diakui sebagai beban per bulan.

Penerapan pengakuan beban yang tepat berdasarkan jenisnya membantu perusahaan menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan, mendukung pengambilan keputusan manajerial, serta mematuhi standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK terkait aset dan kewajiban (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022; PSAK 1, 2023). Dengan demikian, perusahaan dapat mencerminkan kinerja ekonomi sebenarnya kepada pemangku kepentingan.

4. Jurnal Pengakuan Beban

Jurnal pengakuan beban merupakan bagian penting dalam akuntansi akrual untuk memastikan bahwa beban dicatat pada periode yang sesuai dengan terjadinya konsumsi manfaat ekonomi. Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2022), pencatatan ini memungkinkan laporan laba rugi mencerminkan kinerja perusahaan secara akurat dan relevan bagi pemangku kepentingan.

Untuk beban operasional, misalnya gaji karyawan, jurnal pengakuan dilakukan ketika kewajiban untuk membayar gaji telah timbul, meskipun pembayaran mungkin dilakukan di periode berikutnya. Contohnya, jika gaji karyawan sebesar Rp10.000.000 timbul pada Desember, jurnal yang dicatat adalah: Beban Gaji Rp10.000.000, dikredit Utang Gaji Rp10.000.000. Pencatatan ini memastikan penerapan matching principle, di mana beban gaji dicocokkan dengan pendapatan yang dihasilkan pada periode yang sama.

Pada beban dibayar dimuka, perusahaan mencatat pembayaran terlebih dahulu sebagai aset, kemudian mengalokasikannya secara bertahap sebagai beban sesuai periode manfaat. Misalnya, pembayaran sewa Rp2.000.000 di awal periode dicatat sebagai: Beban Sewa Rp2.000.000, dikredit Sewa Dibayar Dimuka Rp2.000.000. Seiring berjalannya waktu, beban sewa akan diakui pada laporan laba rugi sesuai alokasi periode, sehingga mencerminkan penggunaan manfaat ekonomi yang sesungguhnya.

Untuk beban akrual, yaitu beban yang telah terjadi tetapi belum dibayar, jurnal pengakuan dilakukan dengan mencatat kewajiban yang timbul. Contohnya, tagihan listrik sebesar Rp1.500.000 yang jatuh tempo bulan berikutnya dicatat sebagai: Beban Listrik Rp1.500.000, dikredit Utang Listrik Rp1.500.000. Dengan demikian, laporan laba rugi periode berjalan mencerminkan seluruh beban yang terkait dengan aktivitas operasional, meskipun kas belum dikeluarkan.

Penerapan jurnal pengakuan beban secara tepat membantu perusahaan menghasilkan laporan keuangan yang andal, relevan, dan sesuai standar akuntansi seperti PSAK 1 (2023), PSAK 16 tentang aset tetap, dan PSAK 24 tentang kewajiban. Dengan demikian, pengguna laporan keuangan dapat menilai kinerja perusahaan dan mengambil keputusan ekonomi yang lebih tepat berdasarkan informasi keuangan yang lengkap dan akurat (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022; PSAK 1, 2023).

D. Akuntansi untuk Beban Operasional dan Non-Operasional

Pada akuntansi keuangan, beban dibagi menjadi beban operasional dan beban non-operasional, sesuai fungsinya dalam kegiatan perusahaan. Beban operasional berkaitan langsung dengan aktivitas utama perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, sedangkan beban non-operasional merupakan pengorbanan ekonomi yang terjadi dari kegiatan yang tidak terkait langsung dengan operasi inti, seperti bunga pinjaman, kerugian penjualan aset, atau denda (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022). Pemisahan ini penting agar laporan laba rugi memberikan informasi yang jelas dan relevan bagi pengambil keputusan.

1. Beban Operasional

Beban operasional adalah biaya yang muncul dari aktivitas inti perusahaan dalam rangka menjalankan operasional sehari-hari dan mendukung kegiatan bisnis untuk menghasilkan pendapatan. Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2022), beban operasional mencakup berbagai jenis biaya yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan produksi barang atau jasa, pengelolaan perusahaan, serta aktivitas pemasaran dan penjualan.

Salah satu komponen utama beban operasional adalah beban pokok penjualan (*Cost of Goods Sold/COGS*), yaitu biaya yang terkait langsung dengan produksi barang atau penyediaan jasa. Biaya ini mencakup bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk atau layanan yang dijual. Pengakuan COGS penting karena menentukan laba kotor yang akan dicantumkan dalam laporan laba rugi, sehingga mempengaruhi evaluasi kinerja perusahaan.

Terdapat beban administrasi dan umum (*General & Administrative Expenses/G&A*) yang meliputi gaji karyawan, biaya listrik, air, telekomunikasi, dan sewa kantor. Beban ini mendukung kegiatan operasional perusahaan secara keseluruhan, meskipun tidak secara langsung terkait dengan produksi barang atau jasa. Pengakuanannya dilakukan saat biaya tersebut terjadi atau dikonsumsi, sesuai prinsip akrual dan matching principle, sehingga laporan laba rugi mencerminkan biaya yang sebenarnya terkait dengan periode berjalan.

Komponen lain adalah beban penjualan dan pemasaran, seperti komisi penjualan, biaya iklan, dan promosi produk. Beban ini diakui saat

aktivitas pemasaran dilakukan atau jasa penjualan telah diberikan, untuk mencocokkan biaya dengan pendapatan yang dihasilkan. Sebagai contoh, perusahaan mencatat jurnal beban operasional sebagai berikut: Beban Gaji Rp50.000.000, Beban Listrik Rp5.000.000, Beban Sewa Rp10.000.000, dikredit Kas/Bank Rp65.000.000. Pencatatan ini memastikan bahwa seluruh biaya yang terkait dengan operasional perusahaan diakui secara tepat dan transparan dalam laporan keuangan, sehingga mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen dan pemangku kepentingan lainnya (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022; PSAK 1, 2023).

2. Beban Non-Operasional

Beban non-operasional adalah biaya yang timbul dari aktivitas yang tidak terkait langsung dengan kegiatan inti perusahaan, tetapi tetap mempengaruhi laba bersih periode berjalan. Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2022), beban ini muncul dari transaksi atau peristiwa yang sifatnya insidental, sehingga berbeda dengan beban operasional yang mendukung aktivitas utama bisnis. Beban non-operasional biasanya dicatat secara terpisah dalam laporan laba rugi untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai sumber laba atau rugi perusahaan.

Salah satu contoh beban non-operasional adalah beban bunga, yang timbul dari kewajiban perusahaan atas pinjaman bank, obligasi, atau instrumen utang lainnya. Beban bunga diakui pada periode di mana bunga tersebut menjadi kewajiban, terlepas dari waktu pembayaran, sesuai prinsip akrual. Pengakuan tepat beban bunga penting untuk menilai profitabilitas operasional perusahaan tanpa mempengaruhi evaluasi terhadap kegiatan utama. Selain itu, rugi penjualan aset tetap termasuk dalam beban non-operasional. Rugi ini terjadi ketika harga jual aset tetap, seperti mesin atau kendaraan, lebih rendah daripada nilai bukunya di laporan keuangan. Pencatatan rugi penjualan aset memastikan bahwa laba bersih mencerminkan dampak transaksi non-operasional yang bersifat insidental.

Beban non-operasional juga mencakup denda atau penalti, yang muncul akibat pelanggaran kewajiban hukum atau kontraktual. Beban ini diakui ketika peristiwa yang menimbulkan kewajiban terjadi, sehingga laporan laba rugi menampilkan semua biaya yang mempengaruhi hasil akhir, termasuk kejadian yang bersifat eksternal dan tidak rutin. Contoh pencatatan jurnal beban non-operasional adalah:

Beban Bunga Rp2.000.000, Beban Denda Rp500.000, dikredit Kas/Bank Rp2.500.000. Pencatatan ini membantu perusahaan menyajikan laporan laba rugi yang transparan dan memisahkan biaya operasional dari biaya non-operasional, sehingga pemangku kepentingan dapat menilai kinerja inti perusahaan secara lebih akurat (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022; PSAK 1, 2023).

3. Penyajian dalam Laporan Laba Rugi

Penyajian laporan laba rugi bertujuan memberikan informasi yang jelas mengenai kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu, membedakan antara aktivitas inti dan aktivitas insidental. Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2022) dan PSAK 1 (2023), laporan laba rugi disusun dengan memisahkan pendapatan dan beban operasional dari pendapatan dan beban non-operasional, sehingga memudahkan analisis profitabilitas inti perusahaan dan dampak kejadian luar biasa.

Pada laporan laba rugi, pendapatan operasional dikurangi beban operasional menghasilkan laba operasi (*operating income*). Laba operasi mencerminkan kinerja ekonomi perusahaan yang berasal dari aktivitas inti, seperti penjualan produk atau jasa, setelah memperhitungkan biaya pokok penjualan (COGS), beban administrasi, dan beban penjualan. Misalnya, jika pendapatan penjualan sebesar Rp200.000.000 dan beban pokok penjualan Rp120.000.000, laba kotor sebesar Rp80.000.000. Setelah dikurangi beban operasional Rp20.000.000, diperoleh laba operasi Rp60.000.000.

Pendapatan non-operasional dikurangi beban non-operasional menghasilkan laba sebelum pajak (*profit before tax*). Pendapatan non-operasional dapat berupa bunga atau keuntungan dari penjualan aset, sedangkan beban non-operasional mencakup biaya bunga, rugi penjualan aset, atau denda. Dalam contoh ini, pendapatan non-operasional Rp5.000.000 dikurangi beban non-operasional Rp2.500.000 menghasilkan laba sebelum pajak Rp62.500.000.

Penyajian yang terstruktur seperti ini membantu pemangku kepentingan membedakan kinerja utama perusahaan dari pengaruh transaksi insidental, memungkinkan analisis lebih mendalam mengenai profitabilitas operasional, efisiensi biaya, dan kontribusi kegiatan non-operasional terhadap laba bersih. Dengan memisahkan komponen-komponen tersebut, laporan laba rugi menjadi alat yang efektif untuk

pengambilan keputusan manajerial, evaluasi investor, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022; PSAK 1, 2023).

E. Pengungkapan Pendapatan dan Beban

Pengungkapan pendapatan dan beban dalam laporan keuangan merupakan bagian penting dari transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Tujuannya adalah memberikan informasi yang cukup kepada pemakai laporan keuangan mengenai sumber, jumlah, dan karakteristik pendapatan serta beban, agar dapat membuat keputusan ekonomi yang tepat (IAI, 2023; Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022). Pengungkapan ini juga memenuhi prinsip kewajaran (*fair presentation*) dan kesesuaian dengan standar akuntansi, termasuk PSAK 72 untuk pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

1. Pengungkapan Pendapatan

Pengungkapan pendapatan merupakan bagian penting dalam laporan keuangan untuk memberikan informasi yang transparan dan relevan mengenai sumber serta sifat pendapatan perusahaan. Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2022) dan PSAK 72 (2023), perusahaan wajib mengungkapkan informasi terkait pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, termasuk total pendapatan selama periode pelaporan, kategori pendapatan utama berdasarkan jenis produk, jasa, atau wilayah geografis, serta kewajiban pelaksanaan yang belum terpenuhi (*contract liabilities*). Hal ini memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami kontribusi setiap segmen terhadap kinerja perusahaan dan menilai eksposur perusahaan terhadap kewajiban yang masih harus dipenuhi.

Perusahaan juga harus mengungkapkan imbalan variabel, yaitu diskon, bonus, pengembalian barang, atau insentif yang mempengaruhi jumlah pendapatan yang diakui. Estimasi perubahan pendapatan terkait imbalan variabel harus dicatat dan dijelaskan untuk memberikan gambaran realistik mengenai potensi fluktuasi pendapatan. Pengungkapan ini membantu pemangku kepentingan memahami ketidakpastian dan asumsi yang digunakan manajemen dalam mengestimasi pendapatan.

Untuk kontrak jangka panjang, seperti proyek konstruksi atau layanan pemeliharaan, perusahaan wajib mengungkapkan metode pengakuan pendapatan yang digunakan, apakah diakui over time atau point in time, nilai kontrak, serta progres pekerjaan. Informasi ini memungkinkan pengguna laporan keuangan menilai bagaimana perusahaan mengakui pendapatan sepanjang siklus kontrak dan seberapa besar kontribusi kontrak jangka panjang terhadap pendapatan periode berjalan.

Sebagai contoh, tabel pengungkapan pendapatan dapat menunjukkan kategori pendapatan, nilai masing-masing, dan metode pengakuan, misalnya: penjualan barang Rp150.000.000 (*point in time*), jasa pemeliharaan Rp40.000.000 (*over time*), serta pendapatan lain-lain Rp10.000.000 (*point in time*), sehingga total pendapatan mencapai Rp200.000.000. Penyajian ini sesuai dengan PSAK 72 (2023) dan prinsip akuntansi internasional IFRS 15, yang menekankan transparansi, relevansi, dan keandalan informasi pendapatan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022).

2. Pengungkapan Beban

Pengungkapan beban dalam laporan keuangan sangat penting untuk memberikan informasi yang jelas mengenai struktur biaya perusahaan dan dampaknya terhadap profitabilitas. Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2022) dan PSAK 1 (2023), beban harus diungkapkan secara rinci agar pemakai laporan keuangan dapat menilai efisiensi operasional, profitabilitas, serta risiko keuangan yang dihadapi perusahaan. Salah satu komponen utama yang harus diungkapkan adalah Beban Pokok Penjualan (COGS), yang mencakup biaya langsung produksi barang atau penyediaan jasa. Komponen ini meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang digunakan dalam proses produksi. Pengungkapan COGS penting karena secara langsung memengaruhi laba kotor perusahaan, sehingga pemangku kepentingan dapat menilai kinerja operasional inti.

Beban operasional juga harus dijelaskan, termasuk beban administrasi, penjualan, dan umum. Rincian pengungkapan beban operasional memungkinkan pemakai laporan untuk memahami besaran biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan utama perusahaan, seperti gaji karyawan, biaya listrik, sewa kantor, dan biaya pemasaran. Dengan pengungkapan yang memadai, pengguna dapat mengevaluasi

efisiensi pengelolaan biaya operasional. Tidak kalah penting, beban non-operasional juga harus diungkapkan. Beban ini mencakup biaya bunga, kerugian dari penjualan aset, atau denda. Pengungkapan beban non-operasional membantu pemangku kepentingan menilai risiko keuangan dan dampak transaksi insidental terhadap laba bersih perusahaan, sehingga analisis kinerja menjadi lebih komprehensif.

Sebagai contoh, tabel pengungkapan beban dapat menunjukkan: Beban Pokok Penjualan Rp120.000.000, Beban Gaji & Administrasi Rp20.000.000, Beban Sewa Kantor Rp10.000.000, dan Beban Bunga Pinjaman Rp2.500.000, sehingga total beban mencapai Rp152.500.000. Penyajian ini membantu transparansi laporan keuangan, memisahkan biaya operasional dan non-operasional, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat oleh manajemen dan pemangku kepentingan lainnya (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022; PSAK 1, 2023).

3. Informasi Tambahan yang Harus Diungkapkan

Pengungkapan informasi tambahan dalam laporan keuangan merupakan aspek penting untuk meningkatkan transparansi dan relevansi informasi yang disajikan kepada pemangku kepentingan. Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2022) dan PSAK 72 & PSAK 1 (2023), perusahaan wajib mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan dan beban. Hal ini mencakup metode pengukuran, dasar pengakuan, serta prosedur estimasi yang diterapkan, sehingga pengguna laporan keuangan memahami bagaimana angka-angka laba dan biaya dihitung.

Perusahaan juga harus mengungkapkan estimasi signifikan dan asumsi yang terkait dengan pendapatan variabel maupun beban akrual. Estimasi ini penting karena pendapatan atau beban tertentu bergantung pada perkiraan manajemen, seperti diskon, pengembalian barang, bonus, atau biaya yang belum jatuh tempo. Pengungkapan ini membantu pengguna menilai tingkat ketidakpastian dan risiko yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Perusahaan perlu mengungkapkan aset kontrak dan liabilitas kontrak. Aset kontrak mencerminkan hak perusahaan untuk menerima kas atau imbalan lainnya dari pelanggan, sedangkan liabilitas kontrak menunjukkan kewajiban perusahaan untuk menyerahkan barang atau jasa yang belum diselesaikan. Informasi ini memberikan gambaran mengenai kewajiban jangka pendek dan hak ekonomi perusahaan yang

terkait dengan kontrak yang sedang berjalan, sehingga pengguna dapat mengevaluasi likuiditas dan risiko operasional.

Pengungkapan segmen bisnis atau wilayah geografis yang material sangat penting, terutama bagi perusahaan yang memiliki operasi multisegment atau lintas negara. Informasi ini mencakup kontribusi pendapatan dan laba dari masing-masing segmen, sehingga pemangku kepentingan dapat memahami sumber utama pendapatan, profil risiko, dan profitabilitas tiap segmen. Misalnya, perusahaan dapat mengungkapkan bahwa segmen penjualan domestik menyumbang 60% pendapatan, sedangkan segmen ekspor menyumbang 40%, dengan laba berbeda sesuai risiko dan biaya operasional masing-masing segmen.

4. Manfaat Pengungkapan yang Jelas

Pengungkapan yang jelas dalam laporan keuangan memberikan manfaat signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk manajemen, investor, kreditor, dan analis keuangan. Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2022) dan PSAK 1 (2023), pengungkapan yang transparan memungkinkan pengguna laporan untuk memahami sumber dan penggunaan ekonomi perusahaan, mulai dari pendapatan yang dihasilkan, beban yang dikeluarkan, hingga perubahan ekuitas. Dengan informasi yang lengkap, pemangku kepentingan dapat menilai bagaimana perusahaan mengalokasikan sumber daya dan mengelola kewajiban serta asetnya secara efektif.

Pengungkapan yang memadai sangat membantu analis, investor, dan kreditor dalam menilai kinerja dan risiko bisnis. Misalnya, pengungkapan pendapatan dari kontrak jangka panjang, imbalan variabel, aset dan liabilitas kontrak, serta rincian beban operasional dan non-operasional memberikan gambaran lebih akurat mengenai profitabilitas, likuiditas, dan eksposur risiko perusahaan. Dengan informasi tersebut, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat, sementara kreditor dapat menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya.

Pengungkapan yang jelas juga memastikan perusahaan memenuhi kepatuhan terhadap standar akuntansi dan prinsip kewajaran, seperti PSAK 72 untuk pengakuan pendapatan dan PSAK 1 untuk penyajian laporan keuangan. Kepatuhan ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas laporan perusahaan. Dengan mengikuti

standar dan praktik terbaik, perusahaan menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, yang penting dalam membangun reputasi dan mempertahankan hubungan baik dengan investor dan pihak eksternal lainnya.

F. Latihan Soal

1. Jelaskan lima langkah pengakuan pendapatan menurut PSAK 72.
2. Apa perbedaan antara beban operasional dan non-operasional?
3. Mengapa matching principle penting dalam akuntansi akrual?
4. Bagaimana pengakuan pendapatan untuk kontrak jangka panjang berbeda dari penjualan tunai biasa?
5. Berikan contoh transaksi beban dibayar dimuka dan jelaskan jurnalnya.



BAB IX

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan laporan posisi keuangan (neraca), memahami laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, memahami laporan perubahan ekuitas, memahami laporan arus kas, memahami catatan atas laporan keuangan (CaLK), serta memahami hubungan antar-laporan keuangan. Sehingga pembaca dapat mampu menyusun laporan keuangan yang lengkap, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan (PSAK dan IFRS), serta mampu menginterpretasikan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi yang tepat dan bertanggung jawab.

Materi Pembelajaran

- Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Laporan Arus Kas
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- Hubungan Antar-Laporan Keuangan
- Latihan Soal

A. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan posisi keuangan, atau yang umum dikenal sebagai neraca, merupakan salah satu komponen utama laporan keuangan yang disusun oleh setiap entitas ekonomi. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada suatu tanggal tertentu (IAI, 2023). Dengan kata lain, neraca memperlihatkan sumber daya ekonomi yang dimiliki entitas (aset), kewajiban kepada pihak lain (liabilitas), serta hak residual pemilik (ekuitas). Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2022), laporan posisi

keuangan berperan penting dalam menilai likuiditas, solvabilitas, dan struktur modal suatu perusahaan, sehingga menjadi dasar bagi investor, kreditur, dan manajemen dalam pengambilan keputusan ekonomi.

1. Komponen Utama Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan, atau Neraca, merupakan salah satu laporan keuangan utama yang menyajikan kondisi keuangan entitas pada suatu titik waktu tertentu. Menurut PSAK 1 (2023), komponen utama laporan posisi keuangan terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas, yang saling terkait untuk menunjukkan sumber daya dan kewajiban perusahaan serta hak residual pemilik.

Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh (PSAK 1, 2023). Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar merupakan sumber daya yang diharapkan dapat direalisasi atau digunakan dalam jangka waktu satu tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan, contohnya kas, piutang usaha, persediaan, dan beban dibayar di muka. Sementara itu, aset tidak lancar adalah sumber daya yang tidak dapat segera direalisasi dalam waktu dekat dan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha jangka panjang, seperti tanah, bangunan, mesin, investasi jangka panjang, dan aset takberwujud.

Liabilitas mencerminkan kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi (IAI, 2023). Liabilitas dibedakan menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Liabilitas jangka pendek mencakup utang yang jatuh tempo dalam satu tahun atau satu siklus operasi normal, seperti utang usaha, beban akrual, utang pajak, dan bagian lancar utang jangka panjang. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, contohnya utang obligasi, pinjaman bank jangka panjang, dan kewajiban imbalan kerja.

Ekuitas adalah hak residual pemilik atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas (PSAK 1, 2023). Komponen ekuitas meliputi modal disetor atau modal saham, agio/disagio saham, laba ditahan yang digunakan untuk reinvestasi, serta cadangan revaluasi atau cadangan lainnya yang dialokasikan untuk tujuan tertentu. Dengan menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas secara jelas, laporan posisi keuangan memberikan gambaran komprehensif mengenai kesehatan finansial

perusahaan dan kemampuan entitas untuk memenuhi kewajiban serta mendukung pengambilan keputusan manajerial maupun eksternal.

2. Struktur Dasar Neraca

Struktur dasar neraca atau laporan posisi keuangan mencerminkan hubungan antara aset, liabilitas, dan ekuitas pada suatu titik waktu tertentu. Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2022) dan PSAK 1 (2023), neraca dapat disusun menggunakan dua format utama, yaitu format akun (*account form*) dan format laporan (*report form*).

Pada format akun, aset disajikan di sisi kiri neraca, sedangkan liabilitas dan ekuitas ditempatkan di sisi kanan, membentuk tampilan menyerupai huruf “T”. Format ini menekankan keseimbangan antara sumber daya yang dimiliki perusahaan (aset) dan klaim atas sumber daya tersebut, baik oleh pihak eksternal berupa liabilitas maupun oleh pemilik berupa ekuitas. Format akun banyak digunakan dalam praktik tradisional karena memudahkan visualisasi hubungan saldo debit dan kredit serta keseimbangan antara sisi aktiva dan pasiva.

Format laporan menyajikan aset terlebih dahulu, diikuti oleh liabilitas dan ekuitas secara vertikal. Format ini menyerupai bentuk laporan modern yang umum digunakan di sebagian besar perusahaan saat ini. Keunggulan format laporan adalah penyajian yang lebih ringkas dan mudah dibaca, terutama untuk tujuan analisis finansial dan pelaporan eksternal. Format ini juga memudahkan penyajian informasi tambahan, seperti klasifikasi aset dan liabilitas menjadi jangka pendek dan jangka panjang, serta pengungkapan rincian ekuitas, sehingga membantu pemangku kepentingan memahami struktur keuangan perusahaan secara lebih sistematis.

Pemilihan format neraca biasanya bergantung pada kebijakan perusahaan, kebutuhan pengguna laporan, serta praktik industri. Meskipun berbeda dalam tampilan, kedua format tetap mematuhi prinsip dasar akuntansi yaitu keseimbangan antara aset dan jumlah total liabilitas ditambah ekuitas. Dengan struktur yang jelas, neraca tidak hanya menampilkan posisi keuangan perusahaan secara akurat, tetapi juga memudahkan analisis likuiditas, solvabilitas, dan stabilitas finansial (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022; PSAK 1, 2023).

3. Contoh Format Neraca (*Report Form*)

Contoh format neraca dalam bentuk *report form* menunjukkan bagaimana laporan posisi keuangan disusun secara vertikal, menampilkan aset terlebih dahulu, diikuti oleh liabilitas dan ekuitas. Misalnya, pada PT Cemerlang Abadi per 31 Desember 2024, total aset perusahaan sebesar Rp770.000.000, terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas sebesar Rp150.000.000, piutang usaha Rp100.000.000, serta persediaan Rp120.000.000, sehingga total aset lancar mencapai Rp370.000.000. Aset tidak lancar terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp300.000.000 dan peralatan Rp200.000.000, dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp100.000.000, sehingga total aset tidak lancar sebesar Rp400.000.000.

Di sisi liabilitas dan ekuitas, liabilitas jangka pendek mencakup utang usaha sebesar Rp80.000.000 dan utang pajak Rp20.000.000, sehingga total liabilitas jangka pendek mencapai Rp100.000.000. Liabilitas jangka panjang meliputi utang obligasi sebesar Rp150.000.000, sehingga total liabilitas perusahaan menjadi Rp250.000.000. Ekuitas perusahaan terdiri dari modal disetor Rp200.000.000 dan laba ditahan Rp120.000.000, sehingga total ekuitas sebesar Rp320.000.000. Jumlah total liabilitas dan ekuitas sebesar Rp770.000.000, yang seimbang dengan total aset, mencerminkan prinsip dasar akuntansi bahwa aset sama dengan jumlah liabilitas ditambah ekuitas (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022; PSAK 1, 2023).

Format laporan vertikal ini memudahkan pemahaman struktur keuangan perusahaan dan analisis lebih lanjut, seperti rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Dengan menampilkan klasifikasi aset dan liabilitas secara rinci, laporan ini memberikan informasi transparan bagi investor, kreditor, dan pihak eksternal lainnya. Selain itu, penyajian secara vertikal juga mempermudah pengungkapan tambahan, seperti rincian cadangan, laba ditahan, dan modal disetor, yang penting untuk penilaian posisi keuangan jangka panjang serta pengambilan keputusan strategis perusahaan.

4. Persamaan Dasar Akuntansi

Persamaan dasar akuntansi merupakan prinsip fundamental yang menjadi fondasi bagi penyusunan laporan posisi keuangan. Persamaan ini dirumuskan sebagai $\text{Aset} = \text{Liabilitas} + \text{Ekuitas}$, yang menunjukkan bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan dibiayai melalui klaim pihak eksternal maupun internal. Aset mencerminkan sumber daya

ekonomi yang dikendalikan perusahaan, dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh, seperti kas, piutang, persediaan, tanah, dan peralatan. Liabilitas merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak eksternal yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi, misalnya utang usaha, utang pajak, dan utang jangka panjang. Ekuitas merepresentasikan hak residual pemilik atas aset setelah dikurangi seluruh liabilitas, termasuk modal disetor, agio saham, laba ditahan, dan cadangan lain (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022; PSAK 1, 2023).

Persamaan ini tidak hanya menjelaskan struktur keuangan perusahaan, tetapi juga menjadi dasar bagi pencatatan transaksi akuntansi. Setiap transaksi keuangan harus mempengaruhi setidaknya dua akun agar persamaan tetap seimbang. Misalnya, pembelian peralatan secara tunai meningkatkan aset peralatan sekaligus mengurangi aset kas, sehingga total aset tetap sama, atau ketika perusahaan mengambil pinjaman bank, aset kas bertambah sementara liabilitas utang bank juga bertambah, sehingga persamaan tetap seimbang.

Pemahaman persamaan dasar akuntansi juga penting untuk analisis keuangan, karena memungkinkan pemangku kepentingan menilai bagaimana perusahaan membiayai asetnya—apakah lebih bergantung pada utang atau modal sendiri—and menilai kesehatan serta stabilitas keuangan perusahaan. Dengan demikian, persamaan ini tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga praktis dalam mendukung pencatatan akuntansi yang akurat, pengendalian internal, dan pengambilan keputusan manajerial yang tepat (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022). Persamaan ini juga menegaskan prinsip keseimbangan, yang menjadi dasar penyusunan seluruh laporan keuangan.

B. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain merupakan salah satu komponen utama laporan keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Laporan ini menyajikan informasi tentang pendapatan (*revenue*), beban (*expenses*), laba atau rugi (*profit or loss*), serta penghasilan komprehensif lain (*other comprehensive income*) yang belum direalisasi. Berdasarkan PSAK 1 (Revisi 2021), laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain memberikan gambaran menyeluruh tentang hasil

usaha entitas selama periode tertentu serta menunjukkan perubahan ekuitas yang bukan berasal dari transaksi dengan pemilik.

1. Pengertian dan Tujuan

Laporan laba rugi, menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2022), merupakan salah satu laporan keuangan utama yang berfungsi untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini menyajikan informasi mengenai pendapatan yang diperoleh, biaya yang dikeluarkan, serta laba atau rugi yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan. Tujuan utama dari laporan laba rugi adalah memberikan gambaran yang jelas bagi pemangku kepentingan termasuk investor, kreditor, dan manajemen tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, mengelola biaya operasional, serta mempertahankan kelangsungan usaha. Informasi ini menjadi dasar penting untuk pengambilan keputusan investasi, evaluasi efisiensi operasional, dan perencanaan strategis.

Laporan penghasilan komprehensif lain (*other comprehensive income/OCI*) juga menjadi bagian penting dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. OCI mencakup elemen-elemen pendapatan dan beban yang belum direalisasi, namun tetap berdampak pada ekuitas perusahaan. Contohnya termasuk perubahan nilai wajar aset keuangan, keuntungan atau kerugian aktuaria atas kewajiban imbalan kerja, serta selisih kurs yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing (Barth & Landsman, 2021). Dengan memasukkan OCI, laporan keuangan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang perubahan kekayaan bersih perusahaan yang tidak tercermin secara langsung dalam laba rugi periode berjalan.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan relevansi informasi keuangan. Laporan ini membantu para pemangku kepentingan dalam menilai performa ekonomi, risiko, dan potensi pertumbuhan perusahaan, sekaligus mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, kedua laporan ini tidak hanya menilai kinerja historis, tetapi juga memberikan dasar analisis untuk keputusan keuangan di masa depan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022; Barth & Landsman, 2021).

2. Komponen Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Berdasarkan PSAK 1 (IAI, 2021), laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain merupakan alat penting untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, dan terdiri dari dua komponen utama. Bagian pertama adalah laporan laba rugi (*profit or loss statement*), yang menyajikan pendapatan dan beban perusahaan selama periode tertentu untuk menghitung laba bersih. Komponen ini mencakup pendapatan (*revenue*) yang diperoleh dari aktivitas utama perusahaan, beban pokok penjualan (*cost of goods sold*) untuk menghitung laba bruto, serta beban operasi (*operating expenses*) yang meliputi beban administrasi, penjualan, dan umum untuk memperoleh laba operasi. Selanjutnya, laporan laba rugi memasukkan pendapatan dan beban lain-lain (*other income and expenses*), laba sebelum pajak (*profit before tax*), pajak penghasilan (*income tax*), hingga laba bersih (*net profit*) yang menunjukkan hasil akhir kinerja perusahaan dalam periode tersebut.

Bagian kedua adalah penghasilan komprehensif lain (*other comprehensive income – OCI*), yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan beban yang belum direalisasi namun tetap memengaruhi ekuitas perusahaan. Contohnya adalah keuntungan atau kerugian dari revaluasi aset tetap, keuntungan atau kerugian dari penjabaran laporan keuangan entitas asing, perubahan nilai wajar instrumen keuangan yang diklasifikasikan sebagai *available-for-sale*, serta keuntungan atau kerugian aktuaria dari program imbalan kerja sesuai PSAK 24. Selain itu, bagian ini juga mencakup bagian entitas asosiasi atas OCI dari entitas yang diinvestasikan.

Penyajian kedua komponen ini dapat dilakukan dalam satu laporan gabungan (*single statement of comprehensive income*) atau dalam dua laporan terpisah (*separate statements*), tergantung kebijakan perusahaan. Tujuan utama pengungkapan kedua komponen ini adalah memberikan informasi yang lengkap dan transparan mengenai kinerja keuangan perusahaan, termasuk elemen-elemen yang berdampak pada laba bersih maupun ekuitas, sehingga para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan ekonomi yang lebih tepat dan berbasis informasi (IAI, 2021; Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022).

3. Format Laporan Laba Rugi

Format laporan laba rugi merupakan salah satu elemen kunci dalam penyajian kinerja keuangan perusahaan. Salah satu format yang umum digunakan adalah format bertahap (*multiple-step income statement*), yang membedakan secara jelas antara berbagai jenis pendapatan dan beban untuk memberikan informasi yang lebih rinci bagi pengguna laporan keuangan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022). Pada laporan laba rugi PT ABC Tbk untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024, pendapatan usaha tercatat sebesar Rp5.000.000.000, sedangkan beban pokok penjualan sebesar Rp3.200.000.000, sehingga menghasilkan laba bruto Rp1.800.000.000. Laba bruto ini mencerminkan selisih antara pendapatan dari aktivitas utama perusahaan dan biaya langsung yang terkait dengan produksi barang atau jasa yang dijual.

Laporan menampilkan beban penjualan dan administrasi sebesar Rp600.000.000, yang mencakup biaya operasional rutin seperti gaji karyawan, biaya pemasaran, dan sewa kantor. Setelah dikurangi, diperoleh laba operasi sebesar Rp1.200.000.000, yang menunjukkan kinerja operasional inti perusahaan sebelum memperhitungkan pendapatan dan beban non-operasional. Laporan ini juga mencatat pendapatan lain-lain sebesar Rp150.000.000 dan beban lain-lain sebesar Rp50.000.000, menghasilkan laba sebelum pajak Rp1.300.000.000. Beban pajak penghasilan sebesar Rp260.000.000 kemudian dikurangkan untuk memperoleh laba bersih setelah pajak sebesar Rp1.040.000.000, yang merupakan indikator utama kinerja keuangan perusahaan yang dapat digunakan oleh investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya.

Format bertahap ini memberikan keuntungan dibanding format tunggal, karena memungkinkan analisis yang lebih mendetail terkait profitabilitas dari operasi inti, efisiensi biaya, serta dampak aktivitas non-operasional (IAI, 2021). Dengan memisahkan laba bruto, laba operasi, dan laba sebelum pajak, laporan laba rugi format bertahap membantu manajemen dan pemangku kepentingan untuk menilai sumber laba, pengendalian biaya, dan potensi risiko keuangan secara lebih transparan. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan memudahkan perbandingan kinerja antar periode dan antar perusahaan dalam industri sejenis.

4. Format Laporan Penghasilan Komprehensif Lain

Laporan penghasilan komprehensif lain (*other comprehensive income/OCI*) menyajikan unsur-unsur pendapatan dan beban yang belum direalisasi namun mempengaruhi ekuitas perusahaan, di luar laba bersih yang dihasilkan dari operasi utama (PSAK 1, 2023; Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022). Pada laporan PT ABC Tbk untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024, laba bersih setelah pajak tercatat sebesar Rp1.040.000.000. Laporan ini kemudian menambahkan penghasilan komprehensif lain, yang mencakup keuntungan revaluasi aset tetap sebesar Rp200.000.000 dan kerugian penjabaran laporan keuangan entitas asing sebesar Rp50.000.000. Dengan demikian, jumlah penghasilan komprehensif lain setelah pajak mencapai Rp150.000.000.

Total penghasilan komprehensif, yang merupakan kombinasi dari laba bersih dan penghasilan komprehensif lain, tercatat sebesar Rp1.190.000.000. Penyajian OCI memberikan informasi tambahan yang penting bagi pemangku kepentingan mengenai perubahan nilai ekuitas perusahaan yang tidak melalui laporan laba rugi, seperti keuntungan atau kerugian yang berasal dari penyesuaian nilai wajar aset tetap, perubahan kurs valuta asing pada laporan keuangan luar negeri, atau keuntungan dan kerugian aktuaria dari program imbalan kerja.

Format laporan penghasilan komprehensif ini dapat disajikan dalam bentuk laporan tunggal (*single statement of comprehensive income*) yang menggabungkan laba bersih dan OCI, atau dalam dua laporan terpisah namun konsisten, tergantung kebijakan akuntansi entitas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi, memberikan gambaran lebih lengkap mengenai kinerja keuangan, serta membantu investor, analis, dan kreditor dalam menilai dampak faktor-faktor yang belum direalisasi terhadap ekuitas perusahaan (Barth & Landsman, 2021).

C. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan pergerakan atau perubahan dalam akun ekuitas perusahaan selama suatu periode akuntansi. Laporan ini memberikan gambaran tentang bagaimana laba, rugi, distribusi dividen, kontribusi pemilik, dan unsur penghasilan komprehensif lain memengaruhi total ekuitas entitas. Menurut PSAK 1 (Revisi 2021),

entitas diwajibkan menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai bagian dari laporan keuangan lengkap agar pengguna laporan dapat memahami perubahan yang terjadi dalam modal perusahaan.

1. Pengertian dan Tujuan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas (*statement of changes in equity*) merupakan salah satu laporan keuangan yang penting dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai pergerakan ekuitas suatu entitas selama periode tertentu. Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2022), laporan ini merinci perubahan pada setiap komponen ekuitas, termasuk modal saham, agio saham, laba ditahan, cadangan, serta penghasilan komprehensif lain (*other comprehensive income/OCI*). Dengan demikian, laporan ini tidak hanya menunjukkan saldo akhir ekuitas, tetapi juga menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan, seperti laba bersih yang diperoleh perusahaan, distribusi dividen kepada pemegang saham, penerbitan saham baru, atau penyesuaian nilai wajar aset.

Tujuan utama penyusunan laporan perubahan ekuitas adalah untuk memberikan transparansi kepada pemangku kepentingan mengenai sumber dan penggunaan ekuitas perusahaan. Laporan ini memungkinkan investor, kreditor, dan analis keuangan memahami bagaimana laba yang diperoleh perusahaan dialokasikan, baik untuk cadangan internal maupun distribusi kepada pemilik, serta bagaimana komponen ekuitas lainnya berubah sepanjang periode pelaporan. Dalam konteks kerangka konseptual pelaporan keuangan yang diterbitkan oleh IAI (2021), ekuitas didefinisikan sebagai “hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitasnya.” Dengan definisi ini, laporan perubahan ekuitas berfungsi sebagai penghubung antara laporan laba rugi, yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan, dan neraca, yang menyajikan posisi keuangan pada akhir periode.

Laporan perubahan ekuitas membantu menilai stabilitas keuangan dan strategi perusahaan dalam mempertahankan keseimbangan antara distribusi keuntungan kepada pemilik dan penahanan laba untuk pengembangan bisnis. Informasi yang disajikan secara rinci mengenai perubahan tiap komponen ekuitas juga meningkatkan transparansi, mempermudah evaluasi kebijakan dividen, dan memberikan dasar bagi analisis tren pertumbuhan ekuitas perusahaan. Dengan demikian, laporan perubahan ekuitas menjadi alat

penting bagi pemangku kepentingan dalam membuat keputusan investasi, penilaian risiko, dan pemantauan kinerja manajemen secara menyeluruh.

2. Komponen Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai pergerakan ekuitas suatu entitas selama periode tertentu, termasuk kontribusi pemilik dan hasil operasi perusahaan. Menurut PSAK 1 paragraf 106–110 (IAI, 2023), laporan perubahan ekuitas minimal harus mencakup beberapa komponen utama yang memberikan gambaran lengkap mengenai perubahan ekuitas. Komponen pertama adalah saldo ekuitas awal periode, yang mencerminkan jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk maupun kepentingan nonpengendali. Informasi ini menjadi titik awal untuk menilai perubahan yang terjadi selama periode pelaporan.

Laporan mencakup perubahan ekuitas akibat laba atau rugi bersih yang diperoleh dari laporan laba rugi. Laba bersih meningkatkan ekuitas, sedangkan rugi menurunkannya, sehingga komponen ini menunjukkan kontribusi kinerja perusahaan terhadap pertumbuhan ekuitas. Selain itu, laporan perubahan ekuitas juga harus menyertakan perubahan akibat penghasilan komprehensif lain (*other comprehensive income/OCI*). Contoh OCI meliputi keuntungan revaluasi aset tetap, selisih kurs akibat penjabaran laporan keuangan entitas luar negeri, serta keuntungan atau kerugian atas instrumen derivatif. Pengungkapan OCI penting karena memberikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang belum terealisasi tetapi berdampak pada posisi keuangan perusahaan.

Komponen berikutnya adalah transaksi dengan pemilik, yang mencakup setoran modal baru, pembelian kembali saham (*treasury stock*), dan pembayaran dividen. Transaksi ini mencerminkan aktivitas langsung antara perusahaan dan pemegang saham yang memengaruhi ekuitas. Akhirnya, laporan harus menampilkan saldo ekuitas akhir periode, yang merupakan akumulasi dari semua perubahan selama periode pelaporan. Dengan menyajikan komponen-komponen ini secara transparan, laporan perubahan ekuitas memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai sumber dan penggunaan ekuitas, kinerja manajemen dalam membagikan laba, serta stabilitas keuangan

perusahaan secara keseluruhan. Informasi ini juga penting untuk analisis tren, perencanaan investasi, dan evaluasi risiko keuangan perusahaan.

3. Struktur dan Format Penyajian

Laporan perubahan ekuitas memiliki struktur dan format yang dirancang untuk memberikan gambaran jelas mengenai pergerakan ekuitas perusahaan selama periode tertentu. Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2022) dan PSAK 1 (IAI, 2023), laporan ini biasanya menyajikan setiap komponen ekuitas secara terpisah, termasuk modal saham, agio saham, laba ditahan, cadangan, dan penghasilan komprehensif lain (OCI). Format yang umum digunakan mengikuti bentuk tabel yang memuat saldo awal, perubahan selama periode, dan saldo akhir, sehingga memudahkan pemangku kepentingan untuk melihat kontribusi masing-masing komponen terhadap total ekuitas.

Sebagai contoh, PT ABC Tbk menyusun laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024. Tabel laporan mencantumkan saldo awal modal saham sebesar Rp1.000.000.000 dan agio saham Rp300.000.000. Selama tahun berjalan, laporan mencatat laba bersih perusahaan yang meningkatkan ekuitas, penghasilan komprehensif lain yang mempengaruhi komponen tertentu, serta dividen tunai yang menurunkan laba ditahan. Selain itu, laporan menyertakan transaksi dengan pemilik seperti penambahan modal disetor sebesar Rp200.000.000 untuk modal saham dan Rp50.000.000 untuk agio saham. Akumulasi dari semua perubahan tersebut menghasilkan saldo akhir per 31 Desember 2024, yaitu modal saham Rp1.200.000.000 dan agio saham Rp350.000.000.

Format penyajian ini memungkinkan pembaca laporan untuk menilai secara transparan bagaimana laba bersih, distribusi dividen, kontribusi pemegang saham baru, dan perubahan nilai OCI memengaruhi ekuitas perusahaan. Dengan menampilkan perubahan setiap komponen secara rinci, laporan perubahan ekuitas membantu investor, kreditor, dan analis dalam menilai kinerja manajemen, kapasitas perusahaan dalam menghasilkan laba, serta keputusan strategis terkait distribusi keuntungan dan reinvestasi modal. Hal ini juga memastikan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi informasi keuangan perusahaan.

4. Jenis-Jenis Perubahan Ekuitas

Perubahan ekuitas perusahaan dapat terjadi akibat berbagai faktor yang memengaruhi hak residual pemilik atas aset setelah dikurangi liabilitas. Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2022) dan PSAK 1 (IAI, 2023), perubahan ekuitas umumnya dibagi menjadi beberapa jenis utama, masing-masing memiliki dampak berbeda terhadap saldo ekuitas. Salah satu faktor utama adalah laba bersih (net profit), yang meningkatkan saldo laba ditahan dan mencerminkan hasil positif dari operasi perusahaan. Sebaliknya, kerugian (net loss) akan mengurangi laba ditahan dan menurunkan total ekuitas, sebagai konsekuensi dari kinerja negatif.

Distribusi laba kepada pemilik melalui dividen juga menurunkan ekuitas, karena dana yang dibayarkan keluar dari perusahaan. Misalnya, pembagian dividen tunai sebesar Rp100 juta akan mengurangi laba ditahan secara langsung. Setoran modal baru dari pemegang saham atau investor menambah ekuitas, mencerminkan aliran dana masuk ke perusahaan dan meningkatkan modal disetor, contohnya penerbitan saham baru senilai Rp300 juta.

Perubahan ekuitas juga dapat terjadi melalui komponen penghasilan komprehensif lain (OCI). Revaluasi aset tetap, seperti peningkatan nilai tanah sebesar Rp50 juta, dicatat dalam OCI dan menambah ekuitas tanpa memengaruhi laba rugi. Selain itu, fluktuasi nilai tukar terhadap investasi luar negeri dapat menghasilkan selisih kurs penjabaran yang memengaruhi ekuitas, contohnya kerugian kurs sebesar Rp25 juta yang mengurangi ekuitas melalui OCI.

Dengan memahami jenis-jenis perubahan ekuitas ini, perusahaan dan pemangku kepentingan dapat menilai sumber dan penggunaan ekuitas secara lebih transparan. Laporan perubahan ekuitas menjadi alat penting untuk menunjukkan bagaimana laba, distribusi kepada pemilik, setoran modal, dan perubahan nilai aset atau kurs memengaruhi posisi keuangan dan kapasitas perusahaan dalam mempertahankan keberlanjutan usaha. Pendekatan ini juga membantu memastikan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi informasi keuangan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022; IAI, 2023).

D. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas (*statement of cash flows*) adalah salah satu komponen utama laporan keuangan yang menggambarkan perubahan posisi kas dan setara kas perusahaan selama satu periode pelaporan. Laporan ini menunjukkan bagaimana kas diperoleh dan digunakan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang kemampuan entitas dalam menghasilkan kas serta kebutuhan penggunaan kas tersebut (IAI, 2023; Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022).

1. Pengertian dan Tujuan Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan salah satu laporan keuangan utama yang menyajikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas perusahaan selama periode tertentu. Menurut PSAK 2 (Revisi 2021), laporan ini mengklasifikasikan arus kas ke dalam tiga aktivitas utama, yakni operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi mencerminkan arus kas yang dihasilkan atau digunakan dari kegiatan inti perusahaan, seperti penjualan produk atau jasa. Aktivitas investasi menggambarkan arus kas yang terkait dengan perolehan atau pelepasan aset jangka panjang, sedangkan aktivitas pendanaan menunjukkan arus kas dari transaksi dengan pemilik dan kreditor, termasuk penerbitan saham, pinjaman, dan pembayaran dividen.

Tujuan utama laporan arus kas adalah memberikan gambaran yang jelas tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa depan, sekaligus menilai likuiditas dan solvabilitasnya. Dengan informasi ini, pemangku kepentingan dapat membedakan antara laba akuntansi dan kas yang sesungguhnya tersedia, sehingga memahami sejauh mana laba bersih mencerminkan arus kas aktual dari aktivitas operasi. Selain itu, laporan arus kas menunjukkan dampak aktivitas investasi dan pendanaan terhadap posisi keuangan perusahaan, memberikan wawasan tentang pengelolaan aset dan struktur modal perusahaan.

Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2022), laporan arus kas juga berfungsi sebagai alat analisis penting untuk menilai efisiensi pengelolaan kas, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, serta kinerja manajemen dalam mengatur sumber daya keuangan. Informasi yang tersaji membantu investor, kreditor, dan pihak internal perusahaan membuat keputusan yang lebih tepat terkait

investasi, pembiayaan, dan strategi operasional. Dengan demikian, laporan arus kas tidak hanya melengkapi laporan laba rugi dan neraca, tetapi juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika kas yang memengaruhi kesehatan finansial dan keberlanjutan usaha perusahaan. Laporan ini menjadi instrumen penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan perusahaan (PSAK 2, 2021; Kieso et al., 2022).

2. Komponen Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai pergerakan kas dan setara kas perusahaan selama periode tertentu. Menurut PSAK 2 (IAI, 2023), laporan arus kas dibagi menjadi tiga komponen utama, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, yang masing-masing mencerminkan aspek berbeda dari pengelolaan kas perusahaan.

Aktivitas operasi (*operating activities*) mencerminkan arus kas yang berasal dari kegiatan inti perusahaan dalam menghasilkan laba. Contohnya meliputi penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, pembayaran kepada pemasok dan karyawan, serta pembayaran pajak penghasilan. Penyusunan arus kas operasi dapat dilakukan dengan metode langsung, yang menampilkan penerimaan dan pengeluaran kas secara eksplisit, atau metode tidak langsung, yang memulai perhitungan dari laba bersih yang disesuaikan dengan pos nonkas dan perubahan modal kerja. Informasi ini penting untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari operasi inti dan memelihara likuiditas jangka pendek.

Aktivitas investasi (*investing activities*) berkaitan dengan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk kas dan setara kas. Contoh aktivitas ini meliputi pembelian atau penjualan aset tetap, pembelian atau penjualan investasi jangka panjang, serta penerimaan bunga dan dividen. Aktivitas investasi mencerminkan strategi manajemen dalam memanfaatkan aset produktif jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan operasional perusahaan.

Aktivitas pendanaan (*financing activities*) menunjukkan perubahan dalam jumlah dan komposisi modal serta pinjaman perusahaan. Contohnya termasuk penerimaan kas dari penerbitan saham atau obligasi, pembayaran dividen kepada pemegang saham, dan

pelunasan utang jangka panjang. Informasi ini memberikan gambaran mengenai kebijakan perusahaan dalam memperoleh dana untuk membiayai operasi dan investasi, serta kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban terhadap pemegang saham dan kreditor.

3. Struktur dan Format Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan pergerakan kas dan setara kas perusahaan selama periode tertentu, diklasifikasikan berdasarkan aktivitas utama perusahaan, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan, sesuai PSAK 2 (IAI, 2023). Struktur laporan arus kas dirancang untuk memberikan informasi yang jelas mengenai sumber dan penggunaan kas, sehingga memudahkan pemangku kepentingan menilai likuiditas, solvabilitas, dan kinerja keuangan perusahaan.

Arus kas dari aktivitas operasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang terkait langsung dengan kegiatan utama perusahaan dalam menghasilkan laba. Contohnya, penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok dan karyawan, serta pembayaran pajak penghasilan. Dalam format laporan, kas bersih dari aktivitas operasi dihitung sebagai selisih antara penerimaan dan pengeluaran kas, yang mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari operasi inti.

Arus kas dari aktivitas investasi menampilkan arus kas masuk dan keluar yang berkaitan dengan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang, seperti pembelian aset tetap, penjualan investasi jangka panjang, serta penerimaan bunga atau dividen dari investasi. Aktivitas ini memberikan informasi mengenai strategi perusahaan dalam mengelola aset produktif jangka panjang untuk mendukung operasi dan pertumbuhan di masa depan.

Arus kas dari aktivitas pendanaan menggambarkan perubahan kas yang berasal dari transaksi dengan pemilik atau kreditor, termasuk penerimaan kas dari penerbitan saham, pembayaran dividen, dan pelunasan utang jangka panjang. Bagian ini memberikan gambaran mengenai kebijakan perusahaan dalam memperoleh dan mengembalikan dana, serta pengelolaan modal dan struktur pembiayaan.

Total arus kas bersih dari ketiga aktivitas ini menunjukkan perubahan bersih kas dan setara kas selama periode laporan. Dengan menambahkan saldo kas awal tahun, diperoleh saldo kas akhir tahun,

yang mencerminkan posisi likuiditas perusahaan pada akhir periode. Format laporan arus kas yang terstruktur secara jelas memudahkan analisis dan pengambilan keputusan oleh investor, kreditor, dan manajemen (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022; PSAK 2, 2023).

4. Metode Penyusunan Laporan Arus Kas

Laporan arus kas dapat disusun menggunakan dua metode utama untuk mengukur arus kas dari aktivitas operasi, yaitu metode langsung (*direct method*) dan metode tidak langsung (*indirect method*), sesuai dengan PSAK 2 dan panduan IAI (2023) serta Horngren et al. (2022). Metode langsung menyajikan arus kas secara eksplisit dengan menampilkan penerimaan kas dari pelanggan dan pembayaran kas kepada pihak-pihak terkait, seperti pemasok, karyawan, dan pembayaran pajak. Keunggulan metode ini adalah memberikan informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami mengenai arus kas yang masuk dan keluar secara aktual, sehingga memudahkan pemangku kepentingan untuk menilai likuiditas perusahaan secara real time. Namun, kelemahannya terletak pada kesulitan penyusunan karena memerlukan data rinci mengenai semua penerimaan dan pengeluaran kas, yang sering kali memerlukan sistem pencatatan kas yang lebih kompleks.

Metode tidak langsung dimulai dari laba bersih perusahaan yang diperoleh dari laporan laba rugi, kemudian disesuaikan dengan pos-pos nonkas, seperti penyusutan, amortisasi, dan kerugian atau keuntungan nonoperasional. Selain itu, metode ini juga memperhitungkan perubahan saldo akun neraca, termasuk piutang, persediaan, dan utang usaha, untuk merefleksikan arus kas yang sebenarnya. Contohnya, laba bersih Rp900.000.000 ditambah penyusutan Rp200.000.000 dan kenaikan utang usaha Rp50.000.000, dikurangi kenaikan piutang usaha Rp100.000.000, menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp1.050.000.000. Metode tidak langsung lebih mudah diterapkan karena memanfaatkan informasi yang sudah tersedia dalam laporan keuangan dan akun neraca, sehingga tidak memerlukan pencatatan rinci setiap transaksi kas.

Kedua metode ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari operasi, namun pendekatannya berbeda. Pemilihan metode tergantung pada kebutuhan informasi dan kemampuan entitas dalam menyediakan data kas yang rinci. Metode langsung lebih informatif, sedangkan

metode tidak langsung lebih praktis untuk penyusunan laporan arus kas periodik. Dengan demikian, baik metode langsung maupun tidak langsung tetap memenuhi prinsip transparansi dan relevansi dalam pelaporan keuangan (IAI, 2023; Horngren et al., 2022).

E. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan (*Notes to Financial Statements*), atau disingkat CaLK, merupakan bagian integral dari laporan keuangan yang memberikan penjelasan, rincian, serta informasi tambahan yang tidak dapat disajikan secara memadai dalam laporan utama seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. CaLK menjadi sarana penting bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami konteks, kebijakan akuntansi, dan rincian angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan utama (IAI, 2023; Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022).

1. Pengertian dan Tujuan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian integral dari laporan keuangan yang menyediakan informasi tambahan dan penjelasan terkait pos-pos yang disajikan dalam laporan utama. Menurut PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan (IAI, 2023), tujuan utama CaLK adalah memberikan dasar penyusunan laporan keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan oleh entitas. Hal ini mencakup metode pengukuran aset dan liabilitas, kebijakan pengakuan pendapatan dan beban, serta estimasi dan pertimbangan manajemen yang memengaruhi angka-angka dalam laporan. Dengan demikian, CaLK memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami prinsip-prinsip akuntansi yang mendasari penyusunan laporan serta memberikan konteks bagi angka-angka yang tersaji.

CaLK berfungsi untuk mengungkapkan informasi tambahan yang tidak ditampilkan secara langsung dalam laporan keuangan utama namun relevan bagi pemahaman menyeluruh atas posisi keuangan dan kinerja entitas. Informasi ini dapat berupa rincian aset tetap, piutang, utang, pendapatan, beban, serta aset dan liabilitas kontinjensi. CaLK juga menyajikan informasi mengenai risiko, komitmen, dan kontinjensi yang dapat memengaruhi arus kas atau posisi keuangan di masa depan,

sehingga memberikan gambaran lebih lengkap tentang eksposur risiko perusahaan.

Menurut Horngren et al. (2022), CaLK juga menjadi instrumen transparansi yang menunjukkan kebijakan manajemen, pertimbangan profesional, dan estimasi akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan kata lain, CaLK tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga menjembatani antara angka-angka kuantitatif dan narasi kualitatif, sehingga memungkinkan pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, dan analis, untuk memahami “cerita di balik angka” yang tercermin dalam laporan keuangan. Dengan pengungkapan yang lengkap dan jelas, CaLK meningkatkan kualitas informasi akuntansi, mendukung pengambilan keputusan yang tepat, serta memperkuat kredibilitas dan transparansi laporan keuangan perusahaan.

2. Struktur dan Isi Utama Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) memiliki struktur dan isi yang dirancang untuk memberikan informasi tambahan dan penjelasan rinci yang mendukung pemahaman laporan keuangan utama. Berdasarkan PSAK 1 (Revisi 2021) dan IAI (2023), CaLK umumnya disusun dalam tiga bagian utama. Bagian pertama berisi informasi umum entitas, meliputi identitas perusahaan, dasar hukum pendirian, bidang usaha, alamat kantor, struktur kepemilikan, tanggal pendirian, serta periode pelaporan. Bagian ini memberikan konteks penting bagi pengguna laporan keuangan, sehingga dapat memahami siapa yang melaporkan, lingkup operasinya, dan kerangka waktu laporan yang disajikan.

Bagian kedua mencakup kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan oleh entitas. Pada bagian ini dijelaskan metode dan asumsi akuntansi yang digunakan, seperti pengakuan pendapatan, metode penyusutan aset tetap, pengukuran aset dan liabilitas, serta kebijakan estimasi yang memengaruhi laporan keuangan. Tujuan bagian ini adalah untuk memberikan dasar yang jelas tentang prinsip dan prosedur yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga angka-angka yang tersaji dapat dipahami dalam konteks metodologi yang konsisten dan dapat diandalkan.

Bagian ketiga memuat pengungkapan rinci dan informasi tambahan yang relevan. Ini termasuk penjelasan terperinci mengenai setiap pos laporan keuangan, seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan,

dan beban. Selain itu, bagian ini juga mengungkapkan risiko keuangan, komitmen, kontinjensi, serta peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal pelaporan. Dengan pengungkapan ini, pengguna laporan memperoleh transparansi yang lebih besar dan rincian yang memungkinkan menilai posisi keuangan, kinerja, dan risiko yang dihadapi entitas secara lebih akurat.

3. Bagian 1: Informasi Umum Entitas

Bagian pertama Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi umum entitas, yang bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai identitas dan kegiatan usaha perusahaan. Informasi ini penting agar pengguna laporan keuangan dapat memahami siapa pelapor, ruang lingkup operasinya, serta dasar hukum dan struktur organisasi yang mendasari kegiatan bisnis. Berdasarkan PSAK 1 (IAI, 2023), informasi yang biasanya dicantumkan meliputi nama entitas dan status hukumnya, tanggal pendirian dan dasar hukum pembentukan, alamat kantor pusat, kegiatan utama perusahaan, serta informasi mengenai perusahaan induk atau entitas pengendali jika ada. Selain itu, jumlah karyawan per akhir periode juga sering disajikan untuk memberikan gambaran mengenai skala operasional perusahaan.

Sebagai contoh, PT ABC Tbk, sebuah perusahaan manufaktur bahan bangunan, mendokumentasikan identitasnya dalam CaLK sebagai berikut: “PT ABC Tbk (‘Perusahaan’) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 45 tanggal 12 Mei 2005 di Jakarta. Perusahaan bergerak di bidang manufaktur bahan bangunan dan berkedudukan di Jakarta Timur. Perusahaan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 2006.” Penjelasan ini tidak hanya menyatakan identitas hukum dan lokasi perusahaan, tetapi juga menegaskan bidang usaha utama dan sejarah operasional perusahaan, sehingga memberikan konteks penting bagi para pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, dan analis keuangan.

Penyajian informasi umum ini membantu menghubungkan data numerik dalam laporan keuangan dengan profil bisnis perusahaan, sehingga pengguna dapat menilai relevansi dan materialitas informasi keuangan dalam konteks operasional nyata. Selain itu, transparansi mengenai entitas pengendali dan struktur organisasi mendukung pemahaman risiko terkait pengaruh pihak ketiga terhadap keputusan strategis perusahaan (Horngren et al., 2022). Dengan demikian, Bagian

1 CaLK menjadi fondasi penting bagi seluruh catatan selanjutnya, yang menjelaskan kebijakan akuntansi, transaksi signifikan, dan pengungkapan tambahan yang lebih rinci.

4. Bagian 2: Kebijakan Akuntansi Signifikan

Bagian kedua Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berfokus pada kebijakan akuntansi signifikan, yang menjadi inti dari laporan karena menjelaskan kerangka dasar penyusunan laporan keuangan dan standar akuntansi yang digunakan. Pengungkapan kebijakan ini penting untuk memberikan transparansi mengenai pertimbangan manajemen dan metodologi yang paling memengaruhi angka-angka dalam laporan keuangan, sehingga memungkinkan pengguna untuk menilai konsistensi dan relevansi informasi keuangan (IAI, 2023; Kieso et al., 2022).

Kebijakan akuntansi signifikan mencakup berbagai aspek, dimulai dari dasar penyusunan laporan keuangan, yang biasanya berbasis akrual dan menggunakan biaya historis sebagai prinsip pengukuran. Mata uang pelaporan dan kebijakan translasi mata uang asing juga harus dijelaskan, terutama bagi entitas yang memiliki transaksi atau operasi luar negeri. Pengakuan pendapatan merupakan kebijakan penting yang diatur berdasarkan PSAK 72, termasuk metode pengakuan pendapatan untuk kontrak dengan pelanggan serta penentuan harga transaksi, alokasi kewajiban pelaksanaan, dan pengakuan pendapatan selama waktu tertentu atau pada saat pengendalian berpindah.

Kebijakan penyusutan aset tetap, misalnya menggunakan metode garis lurus, harus diungkapkan karena memengaruhi laba dan nilai tercatat aset. Penilaian persediaan, apakah menggunakan metode FIFO, LIFO, atau rata-rata tertimbang, juga merupakan kebijakan signifikan yang memengaruhi beban pokok penjualan dan laba. Kebijakan pengukuran dan klasifikasi instrumen keuangan berdasarkan PSAK 71, serta pengakuan beban dan estimasi akuntansi seperti cadangan kerugian piutang, turut dijelaskan untuk memberikan gambaran risiko dan ketidakpastian yang dihadapi entitas.

5. Bagian 3: Pengungkapan Rinci atas Pos Laporan Keuangan

Bagian ketiga Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berfokus pada pengungkapan rinci atas setiap pos dalam laporan keuangan utama, dengan tujuan memberikan transparansi dan konteks tambahan bagi pengguna laporan agar dapat memahami “cerita di balik angka” yang

disajikan. Menurut PSAK 1 (IAI, 2023) dan Kieso et al. (2022), pengungkapan ini mencakup aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, serta risiko dan kontinjensi yang relevan.

Untuk pos kas dan setara kas, CaLK menjelaskan rincian saldo yang dimiliki di bank, kas kecil, deposito berjangka, serta pembatasan penggunaan kas, jika ada. Piutang usaha diungkapkan secara lengkap, termasuk nilai bruto, cadangan kerugian piutang, pihak berelasi, dan umur piutang untuk menilai risiko kredit. Persediaan dijelaskan metode penilaianya, rincian jenis persediaan, dan nilai tercatat setelah penyisihan penurunan nilai.

Aset tetap memerlukan pengungkapan metode penyusutan, umur manfaat aset, nilai buku, serta aset yang dijaminkan sebagai informasi penting mengenai kebijakan pengelolaan aset dan risiko. Liabilitas jangka panjang, termasuk utang dan kewajiban lainnya, diuraikan dengan tingkat bunga, jadwal pembayaran, dan identitas kreditur utama. Pendapatan dan beban dijelaskan secara rinci, mencakup sumber pendapatan utama, pengakuan beban pokok penjualan, dan pos non-operasional agar pemakai laporan dapat menilai profitabilitas secara menyeluruh.

CaLK juga mengungkapkan komitmen dan kontinjensi, seperti perjanjian penting, jaminan, atau potensi kewajiban hukum yang dapat memengaruhi posisi keuangan perusahaan di masa depan. Peristiwa setelah tanggal pelaporan juga dijelaskan, yaitu kejadian material yang terjadi setelah tanggal neraca namun sebelum laporan keuangan diterbitkan, yang relevan untuk pengambilan keputusan.

F. Hubungan Antar-Laporan Keuangan

Hubungan antar-laporan keuangan merupakan aspek fundamental dalam akuntansi keuangan karena setiap laporan tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dan saling melengkapi dalam menggambarkan kondisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan secara utuh. Empat laporan utama, Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas bersama dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), membentuk satu kesatuan sistem pelaporan keuangan yang komprehensif (IAI, 2023; Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022).

1. Konsep Dasar Keterkaitan Antar Laporan Keuangan

Konsep dasar keterkaitan antar laporan keuangan menekankan bahwa setiap laporan keuangan saling berhubungan dan berasal dari transaksi keuangan yang sama, namun disajikan dari perspektif berbeda untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan perusahaan. Menurut PSAK 1 (IAI, 2023) dan Horngren et al. (2022), laporan laba rugi mencerminkan kinerja perusahaan selama periode tertentu dengan menunjukkan laba atau rugi yang dihasilkan dari operasi dan aktivitas lainnya. Informasi ini kemudian memengaruhi laporan perubahan ekuitas, yang menunjukkan bagaimana laba bersih atau rugi periode tersebut berdampak pada ekuitas pemilik, termasuk distribusi dividen, setoran modal baru, dan penghasilan komprehensif lain.

Laporan posisi keuangan (neraca) menyajikan posisi akhir aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu, yang merupakan hasil kumulatif dari seluruh transaksi dan kegiatan selama periode tersebut. Neraca ini secara langsung mencerminkan saldo akhir ekuitas yang dilaporkan pada laporan perubahan ekuitas, sehingga menunjukkan kesinambungan antara kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Laporan arus kas menambahkan dimensi likuiditas dengan menjelaskan perubahan kas dan setara kas akibat aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, yang memungkinkan pemangku kepentingan menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas untuk membiayai operasional dan kewajiban finansial.

Catatan atas laporan keuangan (CaLK) berfungsi sebagai penghubung yang memperkuat keterkaitan antar laporan dengan memberikan informasi tambahan, penjelasan kebijakan akuntansi, rincian pos signifikan, serta risiko dan kontinjensi yang memengaruhi laporan utama. Dengan keterpaduan ini, pengguna laporan keuangan dapat menilai kinerja, posisi keuangan, arus kas, dan risiko perusahaan secara konsisten dan menyeluruh. Konsep ini memastikan bahwa laporan keuangan tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk sistem informasi terpadu yang mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang lebih akurat dan transparan (IAI, 2023; Horngren et al., 2022).

2. Hubungan antara Laporan Laba Rugi dan Laporan Perubahan Ekuitas

Hubungan antara laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas sangat erat karena laba bersih yang dihasilkan dari laporan laba

rugi menjadi komponen utama dalam menentukan perubahan saldo ekuitas perusahaan. Menurut PSAK 1 (IAI, 2023) dan Kieso, Weygandt, & Warfield (2022), laba bersih atau rugi bersih periode tertentu akan langsung memengaruhi akun laba ditahan dalam laporan perubahan ekuitas. Secara sederhana, jika perusahaan memperoleh laba bersih, saldo laba ditahan akan meningkat, sehingga menambah total ekuitas. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami rugi bersih, saldo laba ditahan berkurang, sehingga menurunkan ekuitas pemilik.

Misalnya, sebuah perusahaan mencatat pendapatan sebesar Rp 2.000.000.000 dan beban operasional Rp 1.500.000.000, menghasilkan laba bersih Rp 500.000.000. Laba bersih ini kemudian dicatat sebagai tambahan pada akun laba ditahan dalam laporan perubahan ekuitas. Jika saldo awal laba ditahan pada awal periode adalah Rp 1.200.000.000 dan perusahaan membagikan dividen sebesar Rp 200.000.000, maka saldo akhir laba ditahan menjadi Rp 1.500.000.000. Dengan demikian, laba bersih dari laporan laba rugi menjadi input utama yang menentukan perubahan ekuitas, khususnya pada komponen laba ditahan.

Penghasilan komprehensif lain yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (OCI) juga memengaruhi ekuitas melalui laporan perubahan ekuitas. Contohnya termasuk keuntungan atau kerugian revaluasi aset tetap, perubahan nilai wajar instrumen keuangan, dan selisih kurs penjabaran laporan keuangan entitas asing. Informasi ini membantu pemangku kepentingan memahami bagaimana kinerja operasi dan keputusan manajerial perusahaan berdampak langsung pada hak residual pemilik atas aset perusahaan. Dengan demikian, laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas membentuk aliran informasi yang logis, di mana hasil operasional perusahaan menjadi dasar perubahan ekuitas yang tercermin dalam laporan keuangan secara keseluruhan (IAI, 2023; Kieso et al., 2022).

3. Hubungan antara Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Hubungan antara laporan perubahan ekuitas dan laporan posisi keuangan (neraca) bersifat integral, karena saldo akhir ekuitas yang dihasilkan dari laporan perubahan ekuitas menjadi salah satu komponen utama dalam laporan posisi keuangan. Menurut PSAK 1 (IAI, 2023) dan Kieso, Weygandt, & Warfield (2022), laporan perubahan ekuitas menyajikan aliran perubahan setiap komponen ekuitas termasuk modal

saham, agio saham, laba ditahan, dan cadangan lainnya selama periode tertentu, yang mencerminkan dampak dari laba bersih, dividen, transaksi dengan pemilik, serta penghasilan komprehensif lain.

Saldo akhir dari laporan perubahan ekuitas kemudian dicatat sebagai bagian ekuitas dalam neraca. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki modal saham sebesar Rp 2.000.000.000, agio saham Rp 500.000.000, dan laba ditahan sebesar Rp 1.500.000.000 berdasarkan laporan perubahan ekuitas. Ketiga komponen ini digabungkan dalam neraca untuk menghasilkan total ekuitas sebesar Rp 4.000.000.000. Dengan demikian, total ekuitas di neraca tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan akumulasi dari semua perubahan yang terjadi selama periode berjalan yang telah dijelaskan secara rinci dalam laporan perubahan ekuitas.

Keterkaitan ini memastikan konsistensi informasi antara laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas memberikan konteks dinamis terhadap bagaimana laba bersih, distribusi dividen, setoran modal baru, dan penyesuaian lain memengaruhi ekuitas, sedangkan neraca menyajikan posisi ekuitas secara statis pada akhir periode pelaporan. Hal ini penting bagi pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan analis keuangan untuk menilai kekuatan finansial dan struktur modal perusahaan secara menyeluruh. Dengan demikian, laporan perubahan ekuitas dan laporan posisi keuangan bekerja secara sinergis untuk memberikan gambaran lengkap tentang hak residual pemilik atas aset perusahaan dan memastikan transparansi serta keterpaduan dalam penyajian laporan keuangan (IAI, 2023; Kieso et al., 2022).

4. Hubungan antara Laporan Arus Kas dan Laporan Laba Rugi

Hubungan antara laporan arus kas dan laporan laba rugi bersifat erat karena arus kas operasi merupakan representasi kas dari laba bersih yang dihasilkan selama periode tertentu. Menurut PSAK 2 (IAI, 2023) dan Kieso, Weygandt, & Warfield (2022), laba bersih yang disajikan dalam laporan laba rugi bersifat berbasis akrual, sehingga mencerminkan pendapatan dan beban yang diakui saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Oleh karena itu, untuk mengetahui arus kas aktual dari operasi, laba bersih harus disesuaikan dengan transaksi nonkas dan perubahan modal kerja.

Contohnya, perusahaan memiliki laba bersih sebesar Rp 500.000.000 menurut laporan laba rugi. Untuk menghitung arus kas

bersih dari aktivitas operasi, dilakukan penyesuaian terhadap pos nonkas dan perubahan akun neraca. Penyusutan aset tetap sebesar Rp 100.000.000 ditambahkan kembali karena merupakan beban nonkas yang mengurangi laba bersih tanpa memengaruhi kas. Selanjutnya, kenaikan piutang usaha sebesar Rp 50.000.000 dikurangkan karena menunjukkan pendapatan yang diakui tetapi kasnya belum diterima. Sebaliknya, kenaikan utang usaha sebesar Rp 80.000.000 ditambahkan karena menunjukkan beban yang diakui tetapi kasnya belum dibayarkan. Dengan penyesuaian tersebut, arus kas bersih dari aktivitas operasi menjadi Rp 630.000.000, yang berbeda dari laba bersih awal.

Keterkaitan ini penting karena memungkinkan pemangku kepentingan memahami perbedaan antara profitabilitas akrual dan likuiditas kas perusahaan. Laporan arus kas memberikan informasi yang lebih nyata mengenai kemampuan perusahaan menghasilkan kas, membayar kewajiban, dan mendanai investasi atau pendanaan. Dengan demikian, laporan laba rugi dan laporan arus kas saling melengkapi; laba rugi menilai kinerja ekonomi perusahaan, sedangkan arus kas menunjukkan dampak kas dari kinerja tersebut (Horngren et al., 2022; IAI, 2023). Hubungan ini juga membantu dalam analisis manajemen dan pengambilan keputusan investasi atau kredit secara lebih akurat.

G. Latihan Soal

1. Jelaskan secara rinci bagaimana keterkaitan antara laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan.
2. Mengapa laporan arus kas dianggap sebagai pelengkap penting bagi laporan laba rugi dalam menilai kinerja keuangan perusahaan?
3. Diskusikan peran Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam meningkatkan transparansi dan kredibilitas laporan keuangan.
4. Bagaimana pengaruh kebijakan dividen terhadap laporan keuangan secara keseluruhan?
5. Jelaskan proses penyusunan laporan keuangan mulai dari neraca saldo hingga terbentuk laporan keuangan lengkap.



BAB X

ANALISIS DAN INTERPRETASI

LAPORAN KEUANGAN

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan analisis rasio keuangan, memahami analisis tren dan perbandingan, memahami analisis likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas, memahami keterbatasan analisis laporan keuangan, serta memahami pengambilan keputusan berdasarkan laporan keuangan. Sehingga pembaca dapat menilai kesehatan finansial perusahaan secara komprehensif dan mendukung pengambilan keputusan yang akurat, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Materi Pembelajaran

- Analisis Rasio Keuangan
- Analisis Tren dan Perbandingan
- Analisis Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas
- Keterbatasan Analisis Laporan Keuangan
- Pengambilan Keputusan Berdasarkan Laporan Keuangan
- Latihan Soal

A. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan salah satu metode paling penting dalam mengevaluasi kinerja dan kesehatan keuangan suatu perusahaan. Rasio keuangan digunakan untuk menilai hubungan antarpos dalam laporan keuangan, seperti laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (neraca), dan laporan arus kas, sehingga manajemen, investor, kreditur, maupun pihak eksternal lainnya dapat memahami posisi keuangan serta kinerja operasional perusahaan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2023). Melalui analisis ini, pengguna laporan keuangan dapat menilai efisiensi penggunaan aset, kemampuan perusahaan

memenuhi kewajiban, serta profitabilitas yang dicapai selama periode tertentu.

Menurut Fraser dan Ormiston (2022), rasio keuangan adalah alat analitis yang mengubah data akuntansi menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi. Rasio-rasio ini biasanya dibandingkan dengan periode sebelumnya, dengan perusahaan sejenis (*industry benchmark*), atau dengan standar yang ditetapkan oleh manajemen. Analisis rasio tidak hanya memberikan gambaran kuantitatif tentang kondisi keuangan, tetapi juga memberikan wawasan kualitatif mengenai tren dan potensi risiko ke depan.

1. Pengertian dan Tujuan Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat utama dalam evaluasi kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Menurut Hery (2023), analisis ini adalah proses membandingkan satu angka keuangan dengan angka lainnya, baik dalam periode yang sama maupun antarperiode, untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai kinerja dan stabilitas perusahaan. Dengan menggunakan rasio keuangan, pihak internal maupun eksternal dapat menilai bagaimana perusahaan mengelola sumber daya, mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan struktur keuangannya, dan menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, rasio keuangan membantu manajemen dalam merencanakan strategi bisnis, mengendalikan biaya, serta mengevaluasi efektivitas penggunaan aset dan modal.

Brigham dan Houston (2022) menekankan bahwa tujuan utama analisis rasio adalah menilai efisiensi operasional, likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas perusahaan. Rasio efisiensi menunjukkan seberapa baik perusahaan memanfaatkan aset dan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan, sedangkan rasio likuiditas menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio solvabilitas menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat menanggung beban utang jangka panjang, sementara rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualan atau modal yang digunakan.

Analisis rasio keuangan juga berfungsi sebagai alat komunikasi penting antara perusahaan dan pemangku kepentingan eksternal, termasuk investor, kreditur, dan analis pasar modal. Informasi yang

diperoleh dari rasio keuangan memberikan dasar untuk pengambilan keputusan investasi, pemberian kredit, serta penilaian risiko dan peluang usaha. Dengan demikian, analisis rasio bukan hanya sekadar alat pengukuran kinerja historis, tetapi juga instrumen strategis yang mendukung perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan bisnis secara menyeluruh, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan.

2. Jenis-Jenis Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan alat analisis yang sangat penting dalam menilai kinerja dan kesehatan finansial perusahaan. Secara umum, rasio keuangan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama, masing-masing memiliki fungsi dan tujuan tertentu. Pertama, rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat aset dapat dikonversi menjadi kas untuk membayar utang lancar. Beberapa rasio likuiditas yang umum digunakan antara lain *Current Ratio*, *Quick Ratio (Acid Test)*, dan *Cash Ratio*. *Current Ratio* dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar, sedangkan *Quick Ratio* mengurangi persediaan dari aset lancar untuk menilai likuiditas tanpa memperhitungkan persediaan. *Cash Ratio* lebih konservatif, hanya memperhitungkan kas dan setara kas. Menurut Gitman dan Zutter (2023), rasio likuiditas yang tinggi menandakan stabilitas keuangan jangka pendek, namun terlalu tinggi dapat menunjukkan penggunaan aset yang tidak efisien.

Kedua, rasio solvabilitas atau leverage menunjukkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang dan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang. Contohnya, *Debt to Assets Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, dan *Times Interest Earned (TIE)*. Brigham & Ehrhardt (2022) menyatakan bahwa leverage moderat dapat meningkatkan pengembalian bagi pemegang saham, tetapi leverage berlebihan meningkatkan risiko gagal bayar.

Ketiga, rasio aktivitas atau efisiensi operasional menilai efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan. Rasio seperti *Inventory Turnover*, *Receivables Turnover*, dan *Total Asset Turnover* memberikan gambaran efisiensi pengelolaan persediaan, penagihan piutang, dan penggunaan total aset. Horngren et al. (2023) menegaskan bahwa rasio aktivitas tinggi mencerminkan

efisiensi operasional, tetapi terlalu tinggi dapat menandakan kekurangan modal kerja.

Keempat, rasio profitabilitas menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba, termasuk *Gross Profit Margin*, *Net Profit Margin*, *Return on Assets* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE). Kieso et al. (2023) menekankan bahwa rasio profitabilitas merupakan indikator utama keberhasilan manajemen dalam memanfaatkan sumber daya untuk menciptakan nilai ekonomi.

Rasio pasar digunakan untuk menilai nilai saham dan prospek pertumbuhan, seperti *Earnings per Share* (EPS), *Price Earnings Ratio* (PER), dan *Book Value per Share*. Ross, Westerfield, & Jordan (2023) menyatakan bahwa rasio pasar mencerminkan persepsi investor terhadap nilai intrinsik perusahaan dan prospek laba di masa depan. Dengan demikian, berbagai jenis rasio keuangan memberikan wawasan menyeluruh bagi manajemen dan investor untuk pengambilan keputusan yang tepat.

3. Langkah-Langkah Melakukan Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan alat penting untuk menilai kinerja dan kesehatan finansial perusahaan. Menurut White, Sondhi, dan Fried (2022), langkah pertama dalam melakukan analisis rasio adalah pemilihan laporan keuangan yang tepat. Laporan yang digunakan harus lengkap, akurat, dan telah diaudit agar hasil analisis mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Laporan ini mencakup laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

Langkah kedua adalah identifikasi rasio yang relevan dengan tujuan analisis. Misalnya, jika tujuan analisis adalah menilai profitabilitas perusahaan untuk kebutuhan investor, rasio yang relevan meliputi margin laba bersih, ROA, dan ROE. Jika fokusnya pada likuiditas atau kemampuan membayar kewajiban jangka pendek, maka Current Ratio, Quick Ratio, atau Cash Ratio menjadi prioritas. Pemilihan rasio yang tepat sangat penting agar analisis memberikan informasi yang berguna dan sesuai dengan konteks pengambilan keputusan.

Langkah berikutnya adalah perhitungan rasio dengan menggunakan rumus standar yang berlaku. Proses ini membutuhkan ketelitian dalam mengumpulkan data numerik dari laporan keuangan, termasuk jumlah aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Setelah perhitungan selesai, hasil rasio dibandingkan dengan periode

sebelumnya, perusahaan sejenis, atau rata-rata industri. Perbandingan ini memberikan konteks, sehingga pengguna dapat menilai apakah kinerja perusahaan meningkat, menurun, atau tetap stabil.

Langkah terakhir adalah interpretasi hasil dan penyusunan rekomendasi. Hasil rasio dianalisis untuk memahami kekuatan dan kelemahan perusahaan. Misalnya, rasio likuiditas yang rendah dapat mengindikasikan risiko likuiditas, sementara rasio profitabilitas yang tinggi menandakan efektivitas operasional. Berdasarkan interpretasi ini, analis dapat memberikan rekomendasi strategis bagi manajemen, seperti pengelolaan kas yang lebih efisien atau strategi peningkatan penjualan. Secara keseluruhan, analisis rasio keuangan tidak hanya memberikan gambaran kuantitatif, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan yang informatif bagi investor, kreditur, dan manajemen perusahaan (White, Sondhi, & Fried, 2022).

B. Analisis Tren dan Perbandingan

Analisis tren dan perbandingan (*trend and comparative analysis*) merupakan bagian penting dari analisis laporan keuangan yang bertujuan untuk menilai perubahan kinerja dan posisi keuangan perusahaan dari waktu ke waktu serta membandingkan hasilnya dengan entitas lain atau standar tertentu. Melalui metode ini, manajemen dan pemangku kepentingan dapat memahami arah perkembangan perusahaan, menilai efektivitas strategi yang dijalankan, dan mengidentifikasi potensi masalah keuangan yang mungkin timbul.

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2023), analisis tren adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kecenderungan perubahan akun-akun dalam laporan keuangan selama beberapa periode akuntansi. Sedangkan analisis perbandingan digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan atau kesamaan kinerja antara dua atau lebih entitas bisnis, baik dalam industri yang sama maupun antarperiode. Dengan kata lain, analisis tren memberikan gambaran dinamis tentang perubahan internal, sedangkan analisis perbandingan memberikan gambaran relatif terhadap benchmark eksternal.

1. Konsep Dasar Analisis Tren dan Perbandingan

Analisis tren dan analisis perbandingan merupakan dua pendekatan penting dalam evaluasi laporan keuangan yang memberikan

wawasan mengenai perkembangan dan posisi keuangan perusahaan dari berbagai perspektif. Analisis tren (*trend analysis*) berfokus pada perubahan data keuangan secara berurutan dari waktu ke waktu, dengan tujuan mengidentifikasi pola apakah nilai suatu pos keuangan mengalami peningkatan, penurunan, atau tetap stabil. Subramanyam (2023) menjelaskan bahwa analisis tren sangat berguna bagi manajemen dan investor untuk menilai arah perkembangan perusahaan dalam jangka panjang, misalnya tren pertumbuhan pendapatan, penurunan margin laba, atau peningkatan utang. Perhitungan tren biasanya menggunakan tahun dasar (*base year*) sebagai acuan, di mana nilai pada tahun-tahun berikutnya dibandingkan terhadap nilai tahun dasar tersebut. Rumus yang digunakan adalah persentase tren, yaitu nilai tahun N dibagi nilai tahun dasar, dikalikan 100, sehingga memudahkan pembaca untuk melihat proporsi perubahan dari periode awal.

Analisis perbandingan (*comparative analysis*) dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan dari dua periode atau lebih, atau antara dua perusahaan yang berbeda, untuk menilai perubahan signifikan dalam posisi keuangan, kinerja operasional, atau struktur modal. Fraser dan Ormiston (2022) menyatakan bahwa metode ini memungkinkan identifikasi perubahan penting, seperti peningkatan beban operasional, pertumbuhan aset, atau perubahan struktur liabilitas yang dapat memengaruhi strategi perusahaan. Hasil analisis perbandingan biasanya disajikan dalam laporan keuangan komparatif, yang memudahkan pembaca melihat perbedaan dari satu periode ke periode berikutnya. Rumus dasar untuk menghitung perubahan antarperiode adalah selisih nilai tahun N dan tahun sebelumnya, dibagi nilai tahun sebelumnya, dikalikan 100 untuk mendapatkan persentase perubahan.

2. Jenis-Jenis Analisis Tren dan Perbandingan

Analisis tren dan perbandingan merupakan metode penting untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dari berbagai perspektif. Menurut Hery (2023), jenis analisis ini dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk yang masing-masing memiliki tujuan khusus. Pertama, analisis tren horizontal (*horizontal analysis*) berfokus pada perubahan suatu akun dari waktu ke waktu, biasanya dari tahun ke tahun. Metode ini memungkinkan manajemen dan investor untuk mengidentifikasi arah dan kecepatan perubahan kinerja, seperti pertumbuhan penjualan, peningkatan biaya operasional, atau fluktuasi laba bersih. Dengan

demikian, analisis tren horizontal membantu dalam meramalkan perkembangan masa depan berdasarkan pola historis.

Kedua, analisis perbandingan vertikal atau *common size analysis* menekankan proporsi setiap akun terhadap total tertentu, misalnya total aset atau penjualan. Analisis ini memudahkan evaluasi struktur dan komposisi keuangan perusahaan dengan melihat kontribusi masing-masing pos terhadap keseluruhan. Misalnya, manajemen dapat menilai persentase beban operasional terhadap total penjualan untuk mengukur efisiensi biaya atau proporsi liabilitas terhadap total aset untuk menilai risiko keuangan.

Analisis industri (*industry comparison*) membandingkan kinerja perusahaan dengan rata-rata industri. Pendekatan ini memberikan informasi mengenai posisi kompetitif perusahaan di pasar dan mengidentifikasi area di mana perusahaan unggul atau tertinggal dibandingkan pesaing. Analisis ini sering digunakan oleh investor dan kreditor untuk menilai kesehatan keuangan relatif terhadap standar industri.

Analisis benchmarking melibatkan perbandingan dengan target internal atau perusahaan terbaik (*best practices*). Tujuannya adalah mengevaluasi efisiensi operasional dan strategi bisnis, sehingga manajemen dapat menyesuaikan praktik internal untuk mencapai standar optimal. Dengan kombinasi berbagai jenis analisis ini, perusahaan memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja keuangan, struktur organisasi, dan posisi kompetitif di pasar (Hery, 2023). Analisis tren dan perbandingan ini menjadi alat strategis untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data.

3. Contoh Analisis Tren

Analisis tren merupakan metode yang efektif untuk mengamati perubahan kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Contoh sederhana dapat dilihat pada laporan laba rugi PT XYZ selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021, perusahaan mencatat penjualan sebesar Rp 10.000 juta dengan laba bersih Rp 1.200 juta. Pada tahun berikutnya, penjualan meningkat menjadi Rp 12.000 juta dan laba bersih menjadi Rp 1.500 juta, mencerminkan tren penjualan sebesar 120% dan tren laba bersih 125% dibandingkan tahun dasar 2021. Tren ini terus berlanjut pada tahun 2023 dengan penjualan Rp 14.400 juta dan laba bersih Rp 1.800 juta, serta pada tahun 2024 penjualan mencapai Rp 16.000 juta

dengan laba bersih Rp 2.000 juta. Tren persentase menunjukkan peningkatan yang konsisten, yaitu 144% dan 150% pada tahun 2023, serta 160% dan 167% pada tahun 2024, menunjukkan pertumbuhan yang stabil baik dalam penjualan maupun laba bersih.

Peningkatan penjualan dan laba bersih yang konsisten ini menggambarkan efektivitas strategi penjualan, manajemen biaya, dan pengendalian operasional perusahaan. Analisis tren semacam ini tidak hanya menunjukkan arah pertumbuhan, tetapi juga membantu manajemen dalam perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan strategis, seperti penentuan anggaran, evaluasi target penjualan, dan alokasi sumber daya (Subramanyam, 2023).

Tren yang positif dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur, karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan pertumbuhan laba yang berkelanjutan. Dengan menggunakan tren sebagai alat analisis, perusahaan dapat mengidentifikasi pola kinerja yang konsisten dan menilai apakah strategi bisnis yang diterapkan berhasil atau memerlukan penyesuaian. Menurut Fraser & Ormiston (2022), analisis tren memungkinkan perbandingan antarperiode yang lebih jelas dan mendalam, sehingga membantu dalam mengevaluasi arah jangka panjang dan potensi pertumbuhan perusahaan secara objektif. Secara keseluruhan, contoh tren ini menegaskan pentingnya penggunaan analisis tren sebagai alat evaluasi kinerja yang berkelanjutan dan berbasis data historis.

4. Contoh Analisis Perbandingan Vertikal (*Common Size Analysis*)

Analisis perbandingan vertikal atau common size adalah teknik yang digunakan untuk menilai struktur keuangan perusahaan dengan mengubah setiap pos laporan keuangan menjadi persentase dari total kategori utama, seperti total penjualan atau total aset. Teknik ini memudahkan identifikasi proporsi masing-masing pos dan evaluasi efisiensi biaya maupun distribusi sumber daya. Sebagai contoh, pada laporan laba rugi PT XYZ untuk tahun 2023–2024, penjualan bersih meningkat dari Rp 20.000 juta menjadi Rp 24.000 juta, menunjukkan pertumbuhan sebesar 20%. Harga pokok penjualan (HPP) tetap berada pada 60% dari total penjualan untuk kedua tahun tersebut, sedangkan laba kotor tercatat sebesar 40% dari penjualan, menandakan bahwa margin kotor tetap stabil.

Beban operasional juga konsisten pada 20% dari penjualan, sehingga laba bersih meningkat dari Rp 2.800 juta menjadi Rp 3.600 juta, atau dari 14% menjadi 15% terhadap penjualan. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun volume penjualan bertambah, perusahaan mampu menjaga efisiensi operasional dan mengelola biaya secara konsisten, yang berdampak positif pada profitabilitas. Analisis *common size* seperti ini memudahkan manajemen, investor, dan analis eksternal untuk membandingkan performa perusahaan dari tahun ke tahun tanpa terpengaruh oleh perubahan absolut nilai moneter (Hery, 2023).

Analisis *common size* dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan dengan ukuran berbeda atau dengan rata-rata industri, sehingga memungkinkan evaluasi struktur biaya, margin, dan efisiensi relatif. Menurut Fraser & Ormiston (2022), pendekatan ini sangat efektif dalam mengidentifikasi tren proporsional dan perubahan signifikan dalam komponen laporan keuangan. Dengan demikian, *common size analysis* tidak hanya membantu dalam mengevaluasi performa historis, tetapi juga menjadi alat penting untuk pengambilan keputusan manajerial dan perencanaan strategis jangka panjang, karena memberikan pandangan yang jelas mengenai bagaimana setiap pos berkontribusi terhadap kinerja keseluruhan perusahaan.

C. Analisis Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas

Analisis terhadap likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas merupakan bagian penting dalam menilai kinerja dan kesehatan keuangan suatu perusahaan. Ketiga analisis ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (likuiditas), jangka panjang (solvabilitas), dan kemampuan menghasilkan laba (profitabilitas). Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2022), analisis ini merupakan fondasi utama bagi para pengguna laporan keuangan baik manajemen, investor, kreditur, maupun analis keuangan untuk menilai risiko dan prospek keuangan perusahaan.

1. Analisis Likuiditas

Analisis likuiditas merupakan evaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa menimbulkan tekanan keuangan. Likuiditas mencerminkan sejauh mana aset lancar

perusahaan dapat diubah menjadi kas untuk membayar utang yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Brigham dan Houston (2021) menekankan bahwa perusahaan yang likuid memiliki kemampuan fleksibel untuk menyesuaikan arus kasnya, sehingga operasi sehari-hari tetap berjalan lancar dan risiko gagal bayar diminimalkan. Oleh karena itu, likuiditas menjadi indikator penting bagi stabilitas operasional dan kepercayaan kreditur maupun investor.

Untuk menilai likuiditas, sejumlah rasio utama digunakan. *Current ratio*, yang dihitung sebagai perbandingan aset lancar terhadap liabilitas lancar, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek dengan aset yang dimilikinya, dengan nilai ideal umumnya di atas 1,5. *Quick ratio* atau *acid-test ratio* mengecualikan persediaan dari aset lancar untuk menilai kemampuan membayar kewajiban segera tanpa mengandalkan penjualan persediaan. *Cash ratio* lebih konservatif lagi karena hanya memperhitungkan kas dan setara kas untuk menilai kemampuan membayar utang secara langsung. Selain itu, *working capital ratio*, yang merupakan selisih antara aset lancar dan liabilitas lancar, memberikan gambaran sederhana tentang likuiditas bersih perusahaan.

Interpretasi rasio likuiditas harus dilakukan secara hati-hati. Rasio yang terlalu rendah dapat menandakan risiko kesulitan keuangan dan kemungkinan gagal memenuhi kewajiban jangka pendek, sedangkan rasio yang terlalu tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mungkin tidak memanfaatkan aset lancarnya secara optimal. Sebagai contoh, current ratio sebesar 3,0 dapat mengindikasikan kelebihan kas atau aset lancar yang kurang produktif, yang seharusnya dapat diinvestasikan untuk memperoleh imbal hasil lebih tinggi (Wild, Subramanyam, & Halsey, 2021). Dengan demikian, analisis likuiditas tidak hanya menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, tetapi juga membantu manajemen menyeimbangkan efisiensi penggunaan aset dan keamanan keuangan jangka pendek.

2. Analisis Solvabilitas

Analisis solvabilitas merupakan evaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, termasuk pelunasan pokok dan pembayaran bunga pinjaman. Konsep ini menekankan keseimbangan antara utang dan modal sendiri untuk menjaga kesehatan struktur modal perusahaan. Menurut Kieso et al.

(2022), perusahaan yang solvabel memiliki struktur pembiayaan yang seimbang sehingga mampu menanggung risiko keuangan dan menjaga keberlanjutan operasional jangka panjang. Dengan kata lain, solvabilitas menjadi indikator penting bagi investor dan kreditur dalam menilai risiko jangka panjang serta kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya.

Beberapa rasio utama digunakan untuk mengukur solvabilitas perusahaan. *Debt to Assets Ratio* menunjukkan proporsi aset yang dibiayai oleh utang, di mana nilai yang rendah menandakan keamanan finansial lebih tinggi. *Debt to Equity Ratio* (DER) membandingkan total utang dengan ekuitas pemilik, dengan nilai ideal di bawah 2, yang menandakan keseimbangan antara dana kreditur dan modal sendiri. *Times Interest Earned* (TIE) mengukur kemampuan laba operasi untuk menutupi beban bunga, dengan standar ideal di atas 3. Selain itu, *Long-Term Debt to Capitalization Ratio* menunjukkan seberapa besar pendanaan jangka panjang berasal dari utang dibandingkan total modal jangka panjang, memberikan gambaran tentang risiko finansial dalam struktur modal perusahaan.

Analisis solvabilitas perlu dikaitkan dengan risiko. Tingkat utang yang terlalu tinggi, meskipun dapat meningkatkan potensi pengembalian, juga meningkatkan risiko gagal bayar karena perusahaan harus memenuhi kewajiban bunga tetap meskipun pendapatan menurun (Higgins, 2022). Oleh karena itu, perusahaan perlu menyeimbangkan antara leverage yang dapat meningkatkan profitabilitas dan risiko finansial jangka panjang. Hubungan antara likuiditas dan solvabilitas juga penting: likuiditas menekankan kemampuan jangka pendek dalam memenuhi kewajiban kas, sedangkan solvabilitas menekankan stabilitas jangka panjang melalui struktur modal dan utang. Keduanya saling memengaruhi dan menjadi faktor kunci dalam menilai kesehatan keuangan serta keberlanjutan usaha. Dengan demikian, analisis solvabilitas membantu manajemen, investor, dan kreditur dalam memahami kapasitas perusahaan untuk bertahan dan berkembang secara finansial dalam jangka panjang.

3. Analisis Profitabilitas

Analisis profitabilitas merupakan evaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari seluruh aktivitas operasionalnya. Konsep ini menekankan seberapa efektif manajemen

dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menciptakan keuntungan. Menurut Gitman dan Zutter (2022), profitabilitas mencerminkan kinerja inti perusahaan, menunjukkan efisiensi produksi, pengendalian biaya, dan strategi penetapan harga yang diterapkan oleh manajemen. Dengan kata lain, tingkat profitabilitas yang baik menjadi indikator keberhasilan operasional dan potensi pertumbuhan perusahaan.

Beberapa rasio utama digunakan untuk menilai profitabilitas. Gross Profit Margin mengukur efisiensi produksi dan kemampuan perusahaan dalam menetapkan harga jual, dihitung dari selisih penjualan dan harga pokok penjualan dibagi penjualan. *Operating Profit Margin* menilai efisiensi operasi sebelum pengaruh beban bunga dan pajak, sedangkan *Net Profit Margin* menunjukkan laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. *Return on Assets* (ROA) menggambarkan kemampuan total aset menghasilkan laba, sementara *Return on Equity* (ROE) mengukur pengembalian yang diterima pemegang saham atas modal yang ditanamkan. Selain itu, *Earnings per Share* (EPS) memberikan informasi laba yang dihasilkan per lembar saham, yang sangat relevan bagi investor dalam menilai kinerja saham.

Analisis profitabilitas juga memerlukan pemahaman konteks keuangan perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen dan strategi yang efektif dalam menghasilkan keuntungan. Misalnya, ROE sebesar 20% berarti setiap rupiah modal pemegang saham menghasilkan laba 20 sen, yang mencerminkan kinerja positif. Namun, Horne dan Wachowicz (2021) menekankan bahwa peningkatan ROE tidak selalu mencerminkan efisiensi operasional, karena dapat dipengaruhi oleh peningkatan leverage atau utang perusahaan. Oleh karena itu, analisis profitabilitas harus dikombinasikan dengan analisis struktur modal dan risiko untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja perusahaan. Dengan demikian, evaluasi profitabilitas menjadi alat penting bagi manajemen, investor, dan kreditur dalam menilai keberhasilan operasional dan prospek pertumbuhan perusahaan di masa depan.

4. Hubungan Antara Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas

Likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas merupakan tiga aspek utama dalam analisis keuangan yang saling terkait dan secara bersama-sama mencerminkan kesehatan finansial perusahaan. Likuiditas berfokus pada jangka pendek dan menggambarkan kemampuan perusahaan untuk

memenuhi kewajiban lancarnya tanpa mengalami kesulitan kas. Rasio seperti Current Ratio dan Quick Ratio digunakan untuk menilai sejauh mana aset lancar dapat menutupi utang lancar, sehingga likuiditas yang memadai menjadi fondasi bagi operasi yang stabil (Brigham & Houston, 2021).

Solvabilitas menekankan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang, termasuk pembayaran pokok dan bunga utang. Rasio seperti *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Times Interest Earned* (TIE) menunjukkan struktur permodalan perusahaan dan kemampuan manajemen dalam menjaga keseimbangan antara dana eksternal dan modal sendiri. Perusahaan yang memiliki solvabilitas baik cenderung memiliki kepercayaan investor yang tinggi karena risiko gagal bayar relatif rendah (Kieso et al., 2022).

Profitabilitas, di sisi lain, menilai efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari operasi dan aset yang dimiliki. Rasio seperti *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM) mengukur kemampuan perusahaan menciptakan nilai ekonomis dan pengembalian bagi pemegang saham. Profitabilitas yang tinggi tidak hanya mencerminkan kinerja operasional yang efisien, tetapi juga meningkatkan likuiditas dan solvabilitas melalui peningkatan arus kas dan modal kerja (Gitman & Zutter, 2022).

Hubungan ketiga aspek ini bersifat timbal balik. Likuiditas yang sehat mendukung solvabilitas karena perusahaan mampu membayar utang jangka panjang tepat waktu. Solvabilitas yang baik memberikan landasan bagi pertumbuhan dan profitabilitas jangka panjang. Sebaliknya, profitabilitas yang tinggi memperkuat likuiditas dan solvabilitas, karena laba yang dihasilkan dapat digunakan untuk membayar utang, menambah modal, atau menahan laba. Dengan demikian, evaluasi ketiga aspek ini secara bersamaan memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan finansial perusahaan, kemampuan manajemen dalam mengelola risiko, serta potensi pertumbuhan di masa depan.

D. Keterbatasan Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan merupakan alat penting dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan. Namun demikian, sebagaimana disampaikan oleh Kieso, Weygandt, dan Warfield (2022),

hasil analisis laporan keuangan tidak selalu memberikan gambaran yang sepenuhnya akurat mengenai posisi dan kinerja ekonomi perusahaan. Hal ini disebabkan oleh sejumlah keterbatasan inheren dalam metode analisis, ketersediaan data, serta karakteristik dasar laporan keuangan itu sendiri. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap keterbatasan analisis laporan keuangan menjadi sangat penting agar para pengguna informasi keuangan seperti manajer, investor, kreditur, dan regulator dapat menafsirkan hasil analisis secara hati-hati dan proporsional.

Berikut ini beberapa keterbatasan utama dalam analisis laporan keuangan berdasarkan literatur terbaru:

1. Keterbatasan Akibat Prinsip Akuntansi dan Estimasi

Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK atau IFRS, yang menekankan penerapan prinsip-prinsip tertentu untuk mencapai konsistensi, transparansi, dan keterbandingan informasi keuangan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi biaya historis (*historical cost*), prinsip pencocokan (*matching principle*), dan prinsip pengakuan pendapatan (*revenue recognition principle*). Meskipun prinsip-prinsip ini penting untuk menjaga keandalan dan konsistensi laporan, penerapannya juga membawa keterbatasan, terutama dalam mencerminkan kondisi ekonomi yang dinamis. Sebagai contoh, nilai aset yang dicatat berdasarkan biaya perolehan historis mungkin tidak mencerminkan nilai pasar saat ini. Hal ini dapat menyebabkan distorsi dalam analisis rasio keuangan atau tren kinerja perusahaan, sehingga pengguna laporan keuangan mungkin mengambil kesimpulan yang kurang akurat (Horngren et al., 2021).

Laporan keuangan sering kali memerlukan estimasi manajemen, seperti penyisihan piutang tak tertagih, cadangan persediaan, depresiasi aset tetap, dan kewajiban kontinjensi. Estimasi ini bersifat subjektif karena bergantung pada pertimbangan profesional manajemen, asumsi masa depan, dan kondisi ekonomi yang ada. Perbedaan asumsi atau metode estimasi dapat menghasilkan laporan yang berbeda, meskipun transaksi dasarnya sama. Sebagai akibatnya, analisis keuangan yang menggunakan data tersebut harus mempertimbangkan potensi bias atau ketidakpastian yang terkandung di dalamnya (Kieso et al., 2022).

Keterbatasan akibat prinsip akuntansi dan estimasi ini menekankan perlunya pengguna laporan keuangan untuk tidak hanya mengandalkan angka yang disajikan, tetapi juga memperhatikan

informasi tambahan seperti Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang menjelaskan kebijakan akuntansi signifikan dan asumsi manajemen. Dengan pemahaman yang tepat terhadap keterbatasan ini, investor, kreditor, dan manajemen dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana, serta menilai risiko dan peluang perusahaan secara lebih realistik. Dengan demikian, analisis keuangan yang efektif memerlukan kombinasi antara pemahaman kuantitatif dan interpretasi kualitatif terhadap laporan keuangan.

2. Tidak Memperhitungkan Faktor Non-Keuangan

Analisis laporan keuangan secara tradisional berfokus pada informasi numerik yang tercermin dalam laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Pendekatan ini sangat berguna untuk menilai aspek keuangan perusahaan seperti likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan efisiensi operasional. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena tidak mempertimbangkan faktor non-keuangan yang juga dapat memengaruhi kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Faktor-faktor non-keuangan seperti reputasi perusahaan, kepuasan pelanggan, kualitas sumber daya manusia, inovasi teknologi, dan budaya organisasi memiliki dampak signifikan terhadap daya saing dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan (Rees, 2020).

Sebagai contoh, sebuah perusahaan dengan rasio keuangan yang kuat tetapi memiliki masalah internal dalam hal kepuasan karyawan atau kualitas layanan mungkin menghadapi risiko penurunan kinerja secara bertahap. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki reputasi baik di pasar, loyalitas pelanggan, dan tim yang inovatif dapat menumbuhkan nilai perusahaan lebih tinggi meskipun rasio keuangan awalnya tampak lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh angka keuangan, tetapi juga oleh faktor-faktor non-keuangan yang mendukung efisiensi, produktivitas, dan pertumbuhan berkelanjutan.

Analisis dan manajemen perlu mengintegrasikan informasi non-keuangan ke dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa metode yang digunakan termasuk balanced scorecard, indikator kinerja non-keuangan, survei kepuasan pelanggan, dan penilaian budaya organisasi. Dengan mempertimbangkan kedua aspek keuangan dan non-keuangan perusahaan dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi dan potensi kinerjanya. Pendekatan ini membantu

investor, kreditor, dan manajemen dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan berorientasi jangka panjang, mengurangi risiko yang tidak terlihat melalui analisis angka saja, serta meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan.

3. Perbandingan Antarperusahaan yang Tidak Selalu Relevan

Analisis perbandingan antarperusahaan merupakan metode yang umum digunakan untuk menilai kinerja relatif suatu entitas dalam industri tertentu. Tujuannya adalah memberikan konteks terhadap rasio keuangan atau indikator kinerja sehingga dapat diketahui apakah perusahaan berada di atas atau di bawah standar industri. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan yang signifikan karena hasil perbandingan tidak selalu relevan atau sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebanding. Menurut Fraser dan Ormiston (2018), perbedaan kebijakan akuntansi antarperusahaan dapat memengaruhi angka laporan keuangan secara substansial. Misalnya, metode depresiasi aset tetap yang diterapkan oleh satu perusahaan mungkin berbeda dengan perusahaan lain, atau pengakuan pendapatan dilakukan pada titik waktu yang berbeda, sehingga rasio profitabilitas atau efisiensi yang dihasilkan tidak sebanding secara langsung.

Perbedaan dalam struktur modal, skala operasi, dan strategi bisnis juga memengaruhi interpretasi rasio. Perusahaan besar dengan leverage tinggi dan diversifikasi usaha mungkin menunjukkan rasio likuiditas atau solvabilitas yang berbeda dibanding perusahaan kecil yang lebih fokus pada satu lini produk. Demikian pula, strategi investasi jangka panjang atau kebijakan dividen yang berbeda akan memengaruhi arus kas dan laba ditahan, sehingga perbandingan langsung bisa menyesatkan.

Analisis perlu mempertimbangkan faktor-faktor non-keuangan dan konteks operasional perusahaan saat melakukan perbandingan. Pendekatan yang lebih akurat adalah melakukan analisis perbandingan yang disesuaikan dengan kebijakan akuntansi, ukuran, dan karakteristik bisnis masing-masing perusahaan. Dengan demikian, meskipun perbandingan antarperusahaan dapat memberikan wawasan awal, hasilnya harus diinterpretasikan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru mengenai kinerja atau posisi keuangan suatu entitas. Analisis yang mempertimbangkan perbedaan

konteks ini akan lebih valid dan bermanfaat bagi manajemen, investor, maupun kreditor dalam pengambilan keputusan strategis.

4. Keterbatasan Akibat Inflasi dan Perubahan Nilai Mata Uang

Inflasi dan fluktuasi nilai mata uang merupakan faktor eksternal yang dapat membatasi relevansi dan akurasi analisis laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip historical cost mencatat aset dan liabilitas sesuai harga perolehan awal, tanpa memperhitungkan perubahan nilai uang seiring waktu. Akibatnya, nilai buku aset tetap atau persediaan mungkin jauh lebih rendah dibandingkan biaya penggantinya pada kondisi ekonomi saat ini, sehingga rasio solvabilitas atau profitabilitas bisa terdistorsi. Misalnya, laba bersih yang tampak stabil mungkin sebenarnya menurun dalam istilah daya beli riil karena inflasi yang tinggi, dan modal kerja yang tercatat bisa tidak mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membiayai operasi secara efektif (White, Sondhi, & Fried, 2020).

Perusahaan yang melakukan transaksi internasional juga menghadapi risiko perubahan nilai tukar mata uang. Fluktuasi nilai tukar dapat memengaruhi nilai aset, liabilitas, dan arus kas dalam laporan keuangan yang dilaporkan dalam mata uang domestik. Sebagai contoh, utang denominasi asing dapat meningkat nilainya ketika nilai mata uang lokal melemah, sehingga rasio leverage dan likuiditas bisa terlihat memburuk tanpa ada perubahan operasional yang sebenarnya.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, analis disarankan menggunakan penyesuaian inflasi atau konversi mata uang yang sesuai. Metode ini meliputi pengindeksan aset dan liabilitas dengan indeks harga konsumen atau menggunakan kurs rata-rata dan kurs akhir periode untuk mengukur efek fluktuasi nilai tukar. Dengan demikian, analisis laporan keuangan akan mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih realistik dan membantu manajemen, investor, dan kreditor dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Penyesuaian ini menjadi krusial di negara dengan inflasi tinggi atau eksposur valuta asing yang signifikan, karena memberikan informasi yang lebih akurat mengenai profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan (White et al., 2020).

E. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan alat utama dalam proses pengambilan keputusan ekonomi bagi berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Keputusan-keputusan ini dapat mencakup investasi, pendanaan, kebijakan operasional, hingga evaluasi kinerja manajemen. Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2022), laporan keuangan yang disusun secara andal dan relevan membantu pengguna memahami kondisi keuangan perusahaan dan memproyeksikan kinerjanya di masa depan.

1. Konsep Dasar Pengambilan Keputusan Keuangan

Pengambilan keputusan keuangan merupakan proses penting dalam manajemen perusahaan yang menggunakan informasi dari laporan keuangan untuk memilih alternatif terbaik dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Brigham dan Houston (2021), pengambilan keputusan keuangan mencakup tiga ranah utama, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dividen. Keputusan investasi berkaitan dengan alokasi dana perusahaan untuk memperoleh aset produktif atau proyek yang diharapkan memberikan pengembalian optimal. Dalam hal ini, laporan keuangan, khususnya neraca dan laporan arus kas, memberikan gambaran mengenai sumber daya yang tersedia serta arus kas masuk dan keluar dari proyek atau aset yang sedang atau akan dijalankan.

Keputusan pendanaan fokus pada pemilihan sumber dana yang paling efisien untuk mendukung kegiatan perusahaan. Pilihan ini dapat berupa pembiayaan melalui utang jangka panjang, penerbitan saham baru, atau kombinasi keduanya. Analisis rasio keuangan seperti rasio solvabilitas dan leverage dari laporan posisi keuangan membantu manajemen menilai risiko dan biaya pendanaan dari masing-masing alternatif.

Keputusan dividen menentukan proporsi laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham dan laba yang ditahan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas menyediakan informasi mengenai laba bersih yang tersedia dan perubahan ekuitas yang terjadi selama periode tertentu, sehingga manajemen dapat membuat keputusan yang seimbang antara kepentingan pemegang saham dan kebutuhan pendanaan internal.

2. Jenis Pengguna dan Kebutuhan Informasi

Laporan keuangan merupakan alat komunikasi utama antara perusahaan dan berbagai pihak yang berkepentingan, di mana setiap kelompok pengguna memiliki tujuan dan kebutuhan informasi yang berbeda. Investor, misalnya, menggunakan laporan keuangan untuk menilai profitabilitas dan risiko investasi, sehingga dapat membuat keputusan strategis apakah akan membeli, menahan, atau menjual saham perusahaan. Informasi mengenai laba bersih, arus kas, dan rasio keuangan menjadi pusat perhatiannya untuk menilai potensi pengembalian dan risiko investasi (Wild, Subramanyam, & Halsey, 2021).

Kreditur atau lembaga keuangan, seperti bank, memanfaatkan laporan keuangan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya. Informasi tentang likuiditas, solvabilitas, dan arus kas menjadi indikator utama bagi pemberian atau penolakan kredit. Rasio seperti current ratio, debt to equity, dan times interest earned membantu kreditur menilai risiko gagal bayar dan stabilitas keuangan perusahaan.

Manajemen internal perusahaan juga menjadi pengguna utama laporan keuangan untuk mengevaluasi efisiensi operasional dan efektivitas strategi bisnis. Laporan keuangan menyediakan dasar untuk pengaturan anggaran, pengendalian biaya, serta perencanaan ekspansi dan investasi. Melalui analisis laporan keuangan, manajemen dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan membuat keputusan yang meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Pemerintah menggunakan laporan keuangan untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan dan regulasi yang berlaku. Data keuangan menjadi dasar bagi kebijakan fiskal, pengawasan, dan penegakan hukum. Sementara itu, karyawan memanfaatkan informasi tersebut untuk menilai stabilitas dan keberlanjutan perusahaan, yang dapat mempengaruhi negosiasi gaji, keamanan kerja, dan perencanaan karier.

3. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Analisis Laporan Keuangan

Pengambilan keputusan berdasarkan analisis laporan keuangan merupakan proses penting bagi investor dan manajemen dalam merumuskan strategi keuangan yang optimal. Dalam konteks keputusan

investasi, investor menggunakan informasi dari laporan keuangan untuk menilai potensi laba dan risiko perusahaan sebelum menanamkan modal. Rasio seperti *Return on Equity* (ROE) dan *Earnings per Share* (EPS) menjadi indikator utama. Misalnya, PT XYZ yang mencatatkan ROE sebesar 18% dan stabil selama tiga tahun terakhir akan dipandang efisien dalam menghasilkan laba dari modal sendiri, sehingga menarik bagi investor. Selain itu, tren pendapatan, arus kas, dan beban operasional dianalisis untuk memperkirakan pertumbuhan jangka panjang perusahaan (Gitman & Zutter, 2022).

Pada pengambilan keputusan pendanaan, manajemen perlu menentukan struktur modal yang optimal, yakni keseimbangan antara utang dan ekuitas yang meminimalkan biaya modal (*cost of capital*). *Rasio Debt to Equity* (DER) digunakan untuk menilai tingkat ketergantungan perusahaan pada utang, sementara *Times Interest Earned* (TIE) mengukur kemampuan perusahaan membayar beban bunga. Struktur modal yang terlalu berisiko atau terlalu konservatif dapat memengaruhi stabilitas keuangan dan peluang pertumbuhan, sehingga manajemen harus mempertimbangkan likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas secara simultan (Higgins, 2022).

Keputusan operasional juga sangat bergantung pada laporan keuangan. Manajemen menilai efisiensi dan efektivitas operasi melalui pengendalian biaya produksi, manajemen kas dan piutang, serta penetapan kebijakan harga dan margin laba. Sebagai contoh, jika laporan menunjukkan peningkatan beban operasional 15% tanpa pertumbuhan pendapatan, perusahaan dapat mengambil langkah efisiensi atau mengotomatisasi proses produksi.

Laporan keuangan menjadi dasar dalam keputusan pembagian laba atau dividen. Dewan direksi menilai laba bersih, ketersediaan kas, serta kebutuhan investasi masa depan sebelum menentukan proporsi laba yang dibagikan. Rasio *Dividen Payout Ratio* (DPR) digunakan untuk menilai konsistensi kebijakan dividen. Kebijakan dividen yang stabil tidak hanya mencerminkan kesehatan keuangan perusahaan tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas harga saham (Kieso et al., 2022).

4. Pengambilan Keputusan dalam Konteks Manajemen Strategis

Pada konteks manajemen strategis, laporan keuangan berfungsi sebagai alat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang

selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Salah satu penerapannya adalah analisis profitabilitas setiap unit bisnis (*Business Unit Profitability Analysis*), di mana manajemen mengevaluasi kinerja masing-masing divisi atau unit operasional menggunakan indikator seperti *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Investment* (ROI). Informasi ini membantu menentukan divisi mana yang memberikan kontribusi optimal terhadap laba dan mana yang memerlukan perbaikan atau realokasi sumber daya (Higgins, 2022).

Laporan keuangan digunakan dalam penentuan prioritas investasi proyek melalui proses *capital budgeting*. Analisis arus kas, proyeksi pendapatan, dan indikator seperti *Net Present Value* (NPV) dan *Internal Rate of Return* (IRR) menjadi dasar dalam menilai kelayakan proyek dan memutuskan alokasi modal yang paling efektif. Keputusan ini bertujuan memaksimalkan nilai perusahaan sekaligus mengelola risiko investasi (Wild, Subramanyam, & Halsey, 2021).

Manajemen juga memanfaatkan laporan keuangan untuk benchmarking, yaitu membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing atau rata-rata industri. Rasio seperti *gross margin*, *operating margin*, *revenue growth*, dan EPS growth memberikan gambaran posisi pasar dan efisiensi operasional relatif perusahaan. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi kompetitif, termasuk pengendalian biaya, penetapan harga, dan inovasi produk (Higgins, 2022).

Struktur modal perusahaan dievaluasi melalui rasio leverage seperti *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Interest Coverage* untuk menentukan kebijakan pendanaan yang optimal, menjaga keseimbangan antara risiko dan pengembalian. Keputusan strategis yang berbasis laporan keuangan memungkinkan manajemen tidak hanya fokus pada kinerja jangka pendek tetapi juga pertumbuhan jangka panjang, efisiensi operasional, dan posisi kompetitif perusahaan.

F. Latihan Soal

1. Jelaskan hubungan antara laporan laba rugi, neraca, dan arus kas dalam pengambilan keputusan keuangan.
2. Mengapa analisis rasio keuangan harus dibandingkan dengan rata-rata industri?

3. Bagaimana analisis DuPont System membantu manajemen dalam mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi profitabilitas?
4. Jelaskan keterbatasan analisis laporan keuangan dan bagaimana cara mengatasinya.
5. Berikan contoh bagaimana laporan keuangan dapat digunakan dalam menentukan kebijakan dividen.



BAB XI

ISU DAN TANTANGAN DALAM

AKUNTANSI KEUANGAN

MODERN

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan konvergensi IFRS dan PSAK di Indonesia, memahami akuntansi keuangan di era digital (fintech dan *blockchain*), memahami akuntansi berkelanjutan (*sustainability reporting* dan ESG), serta memahami etika profesi akuntansi dan tanggung jawab sosial. Sehingga pembaca dapat menghadapi dinamika perubahan lingkungan bisnis global, menerapkan prinsip akuntansi yang beretika, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang transparan, adil, dan berkelanjutan.

Materi Pembelajaran

- Konvergensi IFRS dan PSAK di Indonesia
- Akuntansi Keuangan di Era Digital (Fintech dan *Blockchain*)
- Akuntansi Berkelanjutan (*Sustainability Reporting* dan ESG)
- Etika Profesi Akuntansi dan Tanggung Jawab Sosial
- Latihan Soal

A. Konvergensi IFRS dan PSAK di Indonesia

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam dunia akuntansi keuangan, terutama dengan munculnya *financial technology* (fintech) dan teknologi *blockchain*. Kedua inovasi ini tidak hanya mengubah cara entitas bisnis menjalankan transaksi dan pelaporan keuangan, tetapi juga menantang paradigma tradisional akuntansi dalam hal transparansi, efisiensi, keamanan, dan keandalan informasi keuangan. Dalam konteks modern, akuntansi tidak lagi terbatas pada pencatatan manual atau sistem berbasis komputer konvensional, melainkan telah berevolusi menuju otomatisasi, analitik

data besar (*big data analytics*), kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*), serta sistem terdesentralisasi yang mendukung efisiensi dan akurasi pelaporan (IAI, 2023; Warren et al., 2022).

1. Transformasi Akuntansi di Era Digital

Transformasi akuntansi di era digital telah mengubah secara fundamental seluruh siklus akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi hingga pelaporan dan pengambilan keputusan strategis. Menurut Susanto dan Meiryani (2021), perubahan ini mencakup tiga aspek utama yang mendasar. Pertama, otomatisasi proses akuntansi memungkinkan pencatatan transaksi keuangan dilakukan secara *real-time* melalui perangkat lunak berbasis cloud computing, seperti SAP, Xero, dan QuickBooks. Sistem ini tidak hanya meningkatkan akurasi data, tetapi juga mengurangi kesalahan manual serta mempercepat proses rekonsiliasi dan pelaporan keuangan.

Gambar 2. *Big Data*



Sumber: *Corporate Training*

Kedua, integrasi data dan analitik menjadi kunci dalam transformasi digital. Data keuangan dan non-keuangan kini dianalisis menggunakan teknologi big data dan analytics untuk memberikan wawasan strategis bagi manajemen. Analisis ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis bukti, termasuk dalam perencanaan keuangan, evaluasi kinerja, dan peramalan tren

bisnis. Dengan demikian, laporan keuangan tidak hanya menjadi catatan historis, tetapi juga alat prediktif untuk mendukung strategi perusahaan.

Ketiga, keamanan dan transparansi digital menjadi prioritas dalam era akuntansi modern. Penggunaan teknologi *blockchain* dan sistem enkripsi memastikan bahwa data keuangan terlindungi dari manipulasi dan dapat diverifikasi secara cepat dan akurat. Keamanan ini penting tidak hanya untuk kepatuhan regulasi, tetapi juga untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan terhadap integritas informasi keuangan.

2. Peran *Financial Technology* (Fintech) dalam Akuntansi Keuangan

Financial Technology atau Fintech merupakan inovasi di bidang jasa keuangan yang menggabungkan teknologi informasi dengan sistem keuangan untuk meningkatkan akses, efisiensi, dan keamanan layanan keuangan (OECD, 2023). Dalam konteks akuntansi, fintech berperan penting dalam mempercepat pengelolaan transaksi, pembayaran, dan analisis keuangan melalui platform digital yang terintegrasi. Dengan kemampuannya menghubungkan transaksi digital langsung ke sistem akuntansi melalui API, fintech mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat pencatatan transaksi secara otomatis. Hal ini memungkinkan perusahaan memiliki data keuangan yang lebih akurat dan terkini, mendukung pengambilan keputusan berbasis informasi *real-time*.

Fintech turut merevolusi proses audit dan pelaporan. *Real-time* auditing memungkinkan transaksi diverifikasi segera setelah terjadi, meningkatkan akurasi dan transparansi laporan keuangan. Integrasi ini juga mempermudah manajemen kas, pembayaran, dan pembiayaan perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengelola arus kas dan likuiditas dengan lebih efisien. Di sisi regulasi, fintech mempermudah kepatuhan perusahaan karena setiap transaksi terdokumentasi secara elektronik, memudahkan pelaporan kepada regulator serta audit internal maupun eksternal.

Di Indonesia, adopsi fintech dalam akuntansi semakin meluas. Sistem pembayaran digital seperti OVO, GoPay, dan DANA telah terintegrasi dengan perangkat lunak akuntansi, memungkinkan pencatatan otomatis transaksi bisnis. Selain itu, platform *crowdfunding* dan *peer-to-peer* (P2P) lending memengaruhi pencatatan pendanaan dan

investasi, sementara e-invoicing dan e-tax reporting mendukung efisiensi pelaporan pajak sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak. Menurut OJK (2023), adopsi fintech di sektor akuntansi Indonesia meningkat sebesar 45% dalam tiga tahun terakhir, menunjukkan percepatan transformasi digital yang signifikan. Dengan demikian, fintech tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan pengambilan keputusan strategis berbasis data dalam dunia akuntansi modern.

3. *Blockchain* dalam Akuntansi Keuangan

Blockchain merupakan sistem pencatatan digital terdistribusi yang menyimpan data transaksi dalam bentuk blok yang saling terhubung dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan seluruh jaringan (Nakamoto, 2008). Dalam akuntansi keuangan, *blockchain* berfungsi sebagai buku besar digital (*ledger*) yang mencatat setiap transaksi secara transparan, aman, dan andal. Sistem ini memungkinkan seluruh partisipan memiliki salinan yang sama dari buku besar, sehingga mengurangi risiko manipulasi data dan meningkatkan integritas informasi keuangan (IAI, 2023).

Prinsip dasar *blockchain* yang relevan bagi akuntansi mencakup desentralisasi, transparansi dan keamanan, serta *immutability*. Desentralisasi berarti tidak ada otoritas tunggal yang mengontrol data, sehingga setiap transaksi diverifikasi oleh jaringan *peer-to-peer*. Transparansi dan keamanan dicapai melalui kriptografi yang kuat, sehingga setiap partisipan dapat memverifikasi transaksi secara publik tanpa mengorbankan kerahasiaan informasi sensitif. *Immutability* atau ketidakmampuan untuk mengubah data yang sudah dicatat menjamin bahwa laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya, meminimalkan risiko kesalahan atau kecurangan.

Proses kerja *blockchain* dalam akuntansi dimulai dari pencatatan transaksi keuangan, seperti pembelian, pembayaran, atau penerimaan kas, yang kemudian diverifikasi dan dienkripsi oleh jaringan. Setelah itu, transaksi tersebut dibentuk menjadi blok baru yang ditambahkan ke rantai blok yang sudah ada, dan salinan buku besar yang diperbarui didistribusikan ke seluruh jaringan partisipan. Dengan mekanisme ini, setiap transaksi tercatat secara permanen dan dapat dilacak secara *real-time*. Menurut Susanto dan Meiryani (2021), implementasi *blockchain* dalam akuntansi memungkinkan otomatisasi audit, pengurangan biaya

administrasi, serta peningkatan efisiensi dan akurasi pelaporan keuangan. Dengan demikian, *blockchain* tidak hanya mengubah cara pencatatan transaksi, tetapi juga memperkuat kepercayaan, transparansi, dan keamanan dalam praktik akuntansi modern.

4. Manfaat *Blockchain* dalam Akuntansi Keuangan

Penerapan *blockchain* dalam akuntansi keuangan menawarkan berbagai manfaat yang signifikan bagi efisiensi, transparansi, dan keamanan sistem keuangan perusahaan. Menurut Coyne dan McMickle (2017) serta Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2023), salah satu keuntungan utama adalah transparansi dan kepercayaan tinggi. Dengan *blockchain*, semua pihak yang berpartisipasi dalam jaringan memiliki akses terhadap catatan transaksi yang sama, sehingga risiko manipulasi data atau kecurangan dapat diminimalkan. Setiap transaksi dicatat secara permanen dan dapat diverifikasi oleh seluruh jaringan, menciptakan kepercayaan yang lebih kuat antara manajemen, auditor, investor, dan pihak eksternal lainnya.

Blockchain meningkatkan efisiensi audit. Auditor dapat melakukan *real-time* auditing karena semua transaksi telah tercatat secara otomatis dalam ledger digital, mengurangi kebutuhan untuk memeriksa dokumen fisik dan mempercepat proses verifikasi (IAI, 2023). Hal ini juga berdampak pada reduksi biaya operasional, karena sistem *blockchain* mengurangi ketergantungan pada perantara dalam proses validasi transaksi, sehingga meminimalkan biaya administrasi dan meningkatkan produktivitas operasional.

Keamanan data juga menjadi keunggulan utama *blockchain*. Sistem kriptografi yang kuat, dikombinasikan dengan distribusi data di seluruh jaringan *peer-to-peer*, membuat informasi keuangan sulit diretas atau dimanipulasi, meningkatkan integritas laporan keuangan. Selain itu, *blockchain* mempercepat proses pencatatan dan pelaporan transaksi, sehingga perusahaan dapat memperoleh informasi keuangan yang lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan sistem akuntansi manual atau terpusat.

B. Akuntansi Keuangan di Era Digital (Fintech dan *Blockchain*)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam dunia akuntansi keuangan. Era digital

menuntut sistem akuntansi yang tidak hanya akurat dan transparan, tetapi juga cepat, aman, dan adaptif terhadap inovasi. Dua teknologi utama yang kini mendorong revolusi di bidang akuntansi adalah *Financial Technology* (Fintech) dan *Blockchain*. Keduanya berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pencatatan transaksi, transparansi laporan keuangan, serta keandalan audit. Akuntansi modern kini bergerak menuju sistem berbasis data *real-time*, *cloud computing*, dan teknologi terdesentralisasi yang memungkinkan otomatisasi penuh proses keuangan (IAI, 2023; Warren, Reeve, & Duchac, 2022).

1. Transformasi Akuntansi Menuju Era Digital

Transformasi akuntansi menuju era digital telah mengubah secara fundamental cara perusahaan mengelola, mencatat, dan melaporkan informasi keuangan. Menurut Susanto dan Meiryani (2021), transformasi digital ini mencakup tiga aspek utama. Pertama, otomatisasi proses keuangan memungkinkan pencatatan transaksi dilakukan secara otomatis menggunakan perangkat lunak akuntansi berbasis cloud seperti Xero, SAP, dan QuickBooks. Hal ini tidak hanya meningkatkan akurasi data, tetapi juga mempercepat siklus pencatatan dan pelaporan, sehingga manajemen dapat memperoleh informasi keuangan secara *real-time*.

Kedua, integrasi data keuangan dengan analitik canggih memungkinkan perusahaan menggabungkan informasi keuangan dan non-keuangan melalui big data analytics. Dengan demikian, laporan keuangan tidak hanya menjadi alat pelaporan historis, tetapi juga berfungsi sebagai sumber wawasan strategis untuk pengambilan keputusan bisnis. Analisis tren, prediksi arus kas, dan evaluasi kinerja unit bisnis dapat dilakukan lebih cepat dan akurat, mendukung strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan dan dinamika pasar yang kompleks.

Ketiga, transformasi digital meningkatkan transparansi dan keamanan data. Teknologi seperti *blockchain* memungkinkan pencatatan transaksi yang immutable, artinya setiap transaksi yang telah diverifikasi tidak dapat diubah atau dihapus. Sistem ini memperkuat kepercayaan stakeholder, baik internal maupun eksternal, terhadap integritas laporan keuangan dan proses audit (Susanto & Meiryani, 2021).

Seiring dengan perubahan ini, peran akuntan mengalami evolusi signifikan. Akuntan kini tidak hanya berfungsi sebagai pencatat

transaksi, tetapi juga sebagai analis data dan pengendali informasi keuangan digital, dituntut mampu menafsirkan data, menyediakan wawasan strategis, dan memastikan keamanan serta akurasi sistem informasi keuangan (Moll & Yigitbasioglu, 2019). Dengan demikian, transformasi akuntansi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat peran akuntansi sebagai bagian integral dari pengambilan keputusan strategis perusahaan.

2. Peran *Financial Technology* (Fintech) dalam Akuntansi

Financial Technology atau fintech merupakan inovasi berbasis teknologi yang mempermudah berbagai aktivitas keuangan, termasuk pembayaran, investasi, dan pencatatan transaksi, dengan lebih cepat dan efisien (OECD, 2023). Dalam konteks akuntansi, fintech berperan penting dalam mengotomatisasi proses pengelolaan kas, pencatatan transaksi, dan pelaporan keuangan digital. Melalui integrasi API antara sistem fintech dan perangkat lunak akuntansi, transaksi keuangan dapat dicatat secara otomatis, sehingga mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat siklus pembukuan.

Dampak fintech terhadap akuntansi keuangan sangat signifikan. Pertama, transaksi dapat dicatat secara *real-time*, sehingga laporan keuangan dapat disusun tanpa perlu entri manual yang memakan waktu. Kedua, fintech mempermudah audit dan kepatuhan karena setiap transaksi memiliki jejak digital yang terdokumentasi dengan baik, mendukung *real-time* auditing dan pelaporan yang transparan. Ketiga, sistem berbasis cloud memungkinkan akses laporan keuangan dari mana saja, mendukung fleksibilitas kerja jarak jauh. Contohnya, aplikasi e-payment seperti OVO, GoPay, dan DANA di Indonesia terhubung langsung dengan sistem pembukuan digital perusahaan, sehingga setiap transaksi pelanggan tercatat otomatis ke dalam ledger.

Penerapan fintech di Indonesia terus meningkat. Menurut OJK (2023), adopsi fintech di sektor akuntansi tumbuh hingga 45% dalam tiga tahun terakhir. Penerapannya meliputi e-tax reporting untuk pelaporan pajak digital melalui DJP Online, e-invoicing untuk pembuatan faktur otomatis, serta platform crowdfunding dan *peer-to-peer* (P2P) lending yang memengaruhi pencatatan pendanaan dan investasi perusahaan. Dengan demikian, fintech tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kecepatan pencatatan transaksi, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan akurasi pelaporan keuangan. Secara keseluruhan,

integrasi fintech menjadikan sistem akuntansi lebih adaptif, transparan, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara cepat dan andal.

3. ***Blockchain* dalam Akuntansi Keuangan**

Blockchain merupakan teknologi digital berbasis *distributed ledger* yang menyimpan catatan transaksi dalam bentuk blok-blok yang saling terhubung dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan konsensus dari seluruh jaringan (Nakamoto, 2008). Dalam konteks akuntansi keuangan, *blockchain* berfungsi sebagai buku besar digital permanen yang mencatat transaksi secara *real-time*, transparan, dan dapat diverifikasi oleh semua pihak yang berwenang (IAI, 2023). Dengan karakteristik ini, *blockchain* meningkatkan akurasi dan keandalan data keuangan serta meminimalkan risiko manipulasi atau kesalahan pencatatan.

Prinsip dasar *blockchain* yang membuatnya relevan dalam akuntansi meliputi desentralisasi, transparansi, keamanan kriptografis, dan immutability. Desentralisasi berarti catatan transaksi tidak disimpan di satu server pusat, tetapi tersebar ke seluruh jaringan komputer, sehingga mengurangi risiko kehilangan atau manipulasi data. Transparansi memungkinkan semua pihak yang memiliki hak akses untuk memverifikasi transaksi, sehingga memudahkan audit dan kontrol internal. Keamanan kriptografis menjamin bahwa setiap transaksi terlindungi dengan tanda digital unik, sehingga data tidak dapat diretas atau dipalsukan. Sedangkan *immutability* memastikan bahwa setiap transaksi yang telah dicatat tidak dapat dihapus atau diubah, meningkatkan integritas laporan keuangan (IAI, 2023).

Mekanisme kerja *blockchain* dalam akuntansi melibatkan beberapa tahap: transaksi dilakukan, kemudian diverifikasi oleh jaringan melalui algoritma konsensus, blok baru dibentuk, blok tersebut ditambahkan ke rantai yang sudah ada, dan akhirnya buku besar digital diperbarui di seluruh jaringan. Proses ini memastikan bahwa setiap transaksi tercatat secara otomatis dan permanen, memberikan visibilitas penuh kepada manajemen, auditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, penerapan *blockchain* dalam akuntansi tidak hanya meningkatkan efisiensi pencatatan dan audit, tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap laporan keuangan dan mendukung pengambilan

keputusan berbasis data yang lebih akurat dan andal (Nakamoto, 2008; IAI, 2023).

4. Manfaat *Blockchain* bagi Akuntansi Keuangan

Blockchain menghadirkan manfaat signifikan bagi sistem akuntansi keuangan, yang secara fundamental mengubah cara perusahaan mencatat, memverifikasi, dan melaporkan transaksi. Menurut Coyne & McMickle (2017) dan ACCA (2023), salah satu keuntungan utama *blockchain* adalah transparansi tinggi. Setiap transaksi yang tercatat dapat diverifikasi oleh seluruh pengguna jaringan, sehingga potensi manipulasi atau kecurangan data berkurang secara signifikan. Transparansi ini juga memudahkan audit internal maupun eksternal karena semua catatan dapat diakses secara *real-time*, mengurangi kebutuhan pemeriksaan dokumen fisik yang memakan waktu dan biaya.

Blockchain meningkatkan efisiensi audit melalui *real-time* auditing. Auditor dapat menilai transaksi secara langsung pada saat tercatat, tanpa harus menunggu laporan periodik atau mengumpulkan bukti dokumen manual. Keamanan data juga menjadi keunggulan penting, karena setiap transaksi dilindungi oleh enkripsi kriptografis dan tersimpan secara desentralisasi, sehingga mengurangi risiko peretasan atau kehilangan data. Dengan struktur jaringan yang tidak terpusat, ketergantungan pada pihak ketiga, seperti bank atau auditor eksternal, juga berkurang, sehingga terjadi penghematan biaya operasional yang signifikan.

Blockchain juga mempercepat proses pelaporan keuangan karena setiap transaksi tercatat otomatis dan langsung masuk ke sistem laporan keuangan. Hal ini memungkinkan manajemen memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat untuk pengambilan keputusan strategis. Selain itu, teknologi *blockchain* mendukung penerapan smart contracts, yaitu kontrak digital otomatis yang mengeksekusi transaksi keuangan ketika kondisi tertentu terpenuhi. Smart contracts ini tidak hanya meningkatkan kecepatan dan akurasi transaksi, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan manusia dalam proses pembayaran, pengelolaan utang, atau investasi (ACCA, 2023). Dengan demikian, penerapan *blockchain* tidak hanya meningkatkan integritas dan keandalan laporan keuangan, tetapi juga mendorong efisiensi, keamanan, dan transparansi yang lebih tinggi dalam praktik akuntansi modern.

C. Akuntansi Berkelanjutan (*Sustainability Reporting* dan ESG)

Akuntansi berkelanjutan merupakan perkembangan baru dalam bidang akuntansi keuangan yang berfokus pada pengungkapan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan (*triple bottom line*) perusahaan secara transparan dan terukur. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan organisasi tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan hidup (Elkington, 1997; IAI, 2023).

Pada konteks modern, konsep *Sustainability Reporting* dan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menjadi bagian integral dari sistem pelaporan akuntansi yang bertanggung jawab. Akuntansi berkelanjutan menekankan nilai jangka panjang daripada laba jangka pendek semata, sehingga berperan penting dalam menciptakan keberlanjutan bisnis, reputasi yang baik, dan kepercayaan investor (IFAC, 2022; IFRS Foundation, 2023).

1. Konsep Dasar Akuntansi Berkelanjutan

Akuntansi berkelanjutan adalah pendekatan akuntansi yang menekankan pelaporan dan pengelolaan kinerja perusahaan tidak hanya dari aspek finansial, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas organisasi. Menurut *Global Reporting Initiative* (GRI, 2021), *sustainability reporting* adalah proses sistematis yang menginformasikan pemangku kepentingan mengenai kebijakan, komitmen, dan hasil kinerja perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Tujuan utama akuntansi berkelanjutan mencakup peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan informasi non-keuangan yang relevan, penilaian keberlanjutan jangka panjang, identifikasi dan mitigasi risiko sosial serta lingkungan, serta penguatan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat.

Konsep ini berakar pada prinsip *triple bottom line* yang diperkenalkan oleh John Elkington (1997), yang menekankan perlunya keseimbangan antara tiga dimensi utama: ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*). Dimensi ekonomi fokus pada pertumbuhan pendapatan dan efisiensi biaya, diukur melalui indikator seperti laba bersih, *return on equity* (ROE), dan *return on assets* (ROA). Dimensi sosial menekankan kesejahteraan karyawan dan tanggung

jawab sosial perusahaan, misalnya melalui program keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pelatihan sumber daya manusia, serta kegiatan *corporate social responsibility* (CSR). Sementara itu, dimensi lingkungan menitikberatkan pada efisiensi energi, pengurangan limbah, dan perlindungan lingkungan, yang dapat diukur melalui emisi karbon, penggunaan air, atau pengelolaan limbah.

Dengan mengintegrasikan ketiga aspek ini, akuntansi berkelanjutan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja perusahaan, tidak hanya dari sisi finansial, tetapi juga dampak sosial dan ekologisnya. Pendekatan ini memungkinkan manajemen membuat keputusan yang lebih bertanggung jawab, mendukung strategi bisnis jangka panjang, dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, sehingga perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan etis. (GRI, 2021; Elkington, 1997).

2. *Sustainability Reporting* (Laporan Keberlanjutan)

Laporan keberlanjutan atau *sustainability report* adalah dokumen resmi yang mengungkapkan kinerja organisasi dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta menjelaskan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan (GRI, 2021). Laporan ini berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan, termasuk investor, konsumen, regulator, dan masyarakat luas, dengan tujuan menunjukkan tanggung jawab dan etika korporasi. Selain itu, laporan keberlanjutan dapat menarik investor dan konsumen yang semakin peduli terhadap isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), sekaligus meningkatkan efisiensi operasional melalui pengelolaan risiko yang terkait ESG. Laporan ini juga menjadi alat bagi perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional dan standar global yang relevan.

Pada praktiknya, penyusunan laporan keberlanjutan mengikuti kerangka standar yang diakui secara internasional. *Global Reporting Initiative* (GRI) menyediakan standar komprehensif untuk pelaporan ESG secara rinci, mencakup berbagai indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan. *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB) menekankan pelaporan berbasis industri yang relevan dengan kinerja keuangan perusahaan. *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD) fokus pada pengungkapan risiko dan peluang

terkait perubahan iklim, sedangkan *International Sustainability Standards Board* (ISSB) berupaya mengintegrasikan GRI, SASB, dan TCFD dalam satu kerangka global, memudahkan perusahaan untuk menyajikan informasi keberlanjutan secara konsisten dan transparan.

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 mewajibkan perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan, sehingga tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi bagian integral dari praktik bisnis yang baik. Dengan demikian, sustainability reporting tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih bijaksana, mendorong pertumbuhan berkelanjutan, dan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan (GRI, 2021; OJK, 2017).

3. ESG (*Environmental, Social, and Governance*)

ESG (*Environmental, Social, and Governance*) merupakan kerangka evaluasi kinerja perusahaan dari perspektif keberlanjutan yang mencakup tiga dimensi utama: lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dimensi lingkungan (*Environmental*) menilai dampak perusahaan terhadap lingkungan, termasuk emisi karbon, pengelolaan limbah, dan penggunaan energi terbarukan. Dimensi sosial (*Social*) mencakup hubungan perusahaan dengan karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas, dengan indikator seperti keadilan kerja, inklusivitas, dan keselamatan kerja. Sedangkan tata kelola (*Governance*) menilai sistem pengelolaan dan praktik etika perusahaan, termasuk struktur dewan direksi, kepatuhan hukum, dan integritas laporan keuangan (PwC, 2023). ESG kini menjadi indikator penting dalam pengambilan keputusan investasi karena memberikan gambaran risiko jangka panjang serta stabilitas keuangan perusahaan, yang tidak selalu terlihat dari laporan keuangan tradisional.

Integrasi ESG ke dalam akuntansi keuangan dilakukan melalui pencatatan dan pengukuran biaya yang terkait dengan dampak lingkungan dan sosial, serta pengungkapan informasi ESG dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan. Hal ini memungkinkan pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditur, dan regulator, untuk menilai kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan sekaligus memprediksi potensi risiko dan peluang yang terkait. Selain itu, pelaporan nilai non-keuangan, seperti program tanggung jawab

sosial perusahaan (CSR) dan kebijakan keberlanjutan, membantu menilai bagaimana keputusan bisnis memengaruhi reputasi, loyalitas pelanggan, dan kepercayaan investor.

Menurut IFRS Foundation (2023), pengungkapan ESG kini dianggap sama pentingnya dengan laporan keuangan tradisional dalam menilai kinerja perusahaan, karena faktor-faktor non-keuangan tersebut dapat memengaruhi nilai ekonomi jangka panjang dan keputusan investasi. Dengan demikian, penerapan ESG dalam akuntansi dan pelaporan keuangan tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih strategis, mendorong keberlanjutan operasional, serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja dan etika perusahaan. Integrasi ESG menjadi bagian krusial dalam transformasi akuntansi modern menuju praktik bisnis yang berkelanjutan.

4. Akuntansi Lingkungan dan Sosial

Akuntansi lingkungan dan sosial merupakan bagian penting dari akuntansi berkelanjutan yang bertujuan mengukur dan melaporkan dampak perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Akuntansi lingkungan (*environmental accounting*) mencatat biaya dan manfaat yang terkait dengan kegiatan lingkungan perusahaan. Hal ini meliputi biaya pengolahan limbah, investasi dalam teknologi ramah lingkungan, serta penghematan energi yang mendukung keberlanjutan operasional. Misalnya, perusahaan dapat mencatat biaya pemeliharaan sistem pengolahan limbah sebesar Rp750.000.000, pemasangan panel surya senilai Rp1.200.000.000, dan reklamasi lahan pasca tambang sebesar Rp2.500.000.000. Pencatatan ini tidak hanya membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya dengan efisien, tetapi juga memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai komitmen perusahaan terhadap praktik ramah lingkungan (Gray et al., 2020).

Akuntansi sosial (*social accounting*) berfokus pada kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia. Aktivitas yang dicatat dalam akuntansi sosial mencakup program donasi dan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR), pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM lokal, serta peningkatan kesejahteraan karyawan. Dengan mengukur nilai sosial dari aktivitas bisnis, akuntansi sosial membantu organisasi mengevaluasi

efektivitas program sosial dan memperkuat hubungan dengan komunitas serta pemangku kepentingan lainnya. Misalnya, pelaporan transparan mengenai dana CSR yang digunakan untuk pendidikan atau kesehatan masyarakat dapat meningkatkan reputasi perusahaan sekaligus menunjukkan tanggung jawab sosial yang nyata.

Menurut Gray et al. (2020), penerapan akuntansi lingkungan dan sosial mendukung pengambilan keputusan yang lebih berkelanjutan dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan. Dengan integrasi kedua akuntansi ini, perusahaan tidak hanya menilai kinerja finansial, tetapi juga keberlanjutan jangka panjang dan dampak positif terhadap masyarakat serta planet. Pendekatan ini menjadi semakin relevan seiring meningkatnya tuntutan pemangku kepentingan untuk transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam konteks bisnis modern.

D. Etika Profesi Akuntansi dan Tanggung Jawab Sosial

Etika profesi akuntansi merupakan fondasi moral yang memastikan bahwa akuntan menjalankan tugasnya dengan integritas, objektivitas, dan tanggung jawab kepada publik. Dalam konteks globalisasi dan transformasi digital yang cepat, peran etika dalam profesi akuntansi menjadi semakin penting untuk menjaga kepercayaan terhadap informasi keuangan yang disajikan. Profesi akuntan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada klien atau perusahaan, tetapi juga kepada masyarakat luas, investor, dan regulator yang bergantung pada keakuratan serta keandalan laporan keuangan (Duska et al., 2022). Selain itu, munculnya tuntutan terhadap tanggung jawab sosial korporasi (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dan praktik bisnis berkelanjutan memperluas cakupan etika akuntansi untuk mencakup dimensi sosial dan lingkungan.

1. Konsep Etika Profesi Akuntansi

Etika profesi akuntansi merupakan landasan moral dan pedoman perilaku yang harus dipegang teguh oleh setiap akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya. Prinsip-prinsip etika ini dirancang untuk memastikan bahwa akuntan bertindak dengan integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional yang sesuai standar (AICPA, 2021). Integritas menuntut

akuntan untuk jujur dan konsisten dengan nilai moral, meskipun menghadapi tekanan eksternal atau kepentingan pribadi. Objektivitas mengharuskan akuntan menghindari bias, konflik kepentingan, atau pengaruh pihak lain yang dapat mengganggu penilaian profesional. Kompetensi dan kehati-hatian profesional menekankan pentingnya keahlian, ketelitian, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi dalam melaksanakan setiap tugas, sementara kerahasiaan mengatur agar informasi yang diperoleh selama praktik profesional tidak diungkapkan tanpa izin, kecuali diwajibkan secara hukum. Selain itu, perilaku profesional menuntut akuntan untuk mematuhi hukum dan etika, serta menghindari tindakan yang dapat merusak reputasi profesi (IAI, 2022).

Penerapan prinsip-prinsip etika ini sangat penting, terutama dalam menghadapi dilema profesional. Sebagai contoh, akuntan sering dihadapkan pada tekanan manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan atau menyajikan informasi yang menyesatkan demi keuntungan jangka pendek perusahaan. Dalam situasi seperti ini, prinsip etika memandu akuntan untuk mengambil keputusan yang benar, menjaga kepercayaan publik, dan melindungi integritas profesi (Mintz & Morris, 2023). Lebih jauh, penerapan etika profesi tidak hanya berdampak pada akuntan individu, tetapi juga pada reputasi organisasi dan stabilitas pasar secara keseluruhan. Dengan mematuhi standar etika yang ditetapkan oleh AICPA maupun IAI, akuntan berkontribusi pada terciptanya praktik bisnis yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga memupuk kepercayaan stakeholder serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat. Etika profesi akuntansi, oleh karena itu, bukan sekadar aturan formal, tetapi menjadi fondasi bagi profesionalisme dan kredibilitas dalam praktik akuntansi modern.

2. Etika dalam Praktik Akuntansi dan Audit

Pada praktik akuntansi dan audit, dilema etika sering muncul akibat konflik antara kepentingan pribadi, profesional, dan publik. Auditor atau akuntan profesional terkadang menghadapi tekanan dari klien atau manajemen untuk mengabaikan temuan audit yang merugikan atau menyajikan informasi keuangan secara menyesatkan demi kepentingan bisnis jangka pendek. Dalam situasi seperti ini, prinsip etika profesi menuntut para profesional untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun perusahaan, menjaga integritas dan keandalan laporan keuangan (Arens et al., 2022).

Kasus nyata yang sering dijadikan pelajaran adalah skandal Enron pada tahun 2001, di mana praktik manipulasi laporan keuangan dilakukan dengan dukungan dari firma audit Arthur Andersen. Kegagalan etika, termasuk kurangnya independensi auditor dan pengawasan internal yang lemah, menyebabkan kehancuran reputasi perusahaan dan hilangnya kepercayaan publik terhadap integritas laporan keuangan perusahaan besar (Healy & Palepu, 2020). Kasus ini menekankan bahwa etika dalam praktik akuntansi bukan sekadar formalitas, melainkan elemen penting yang memengaruhi stabilitas pasar dan kepercayaan investor.

Untuk mencegah terulangnya kegagalan serupa, *International Federation of Accountants* (IFAC, 2022) memperkuat kode etik internasional melalui *International Ethics Standards Board for Accountants* (IESBA). Standar ini menekankan pentingnya independensi auditor, transparansi dalam pengungkapan informasi, dan tanggung jawab sosial dalam pelaporan keuangan. Implementasi prinsip-prinsip ini membantu auditor dan akuntan profesional mengambil keputusan yang benar ketika menghadapi tekanan etika, serta memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi nyata perusahaan secara objektif. Dengan demikian, penerapan etika dalam praktik akuntansi dan audit tidak hanya melindungi reputasi individu dan perusahaan, tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan, memperkuat kepercayaan stakeholder, dan mendorong praktik bisnis yang akuntabel dan berkelanjutan.

3. Tanggung Jawab Sosial Profesi Akuntan

Tanggung jawab sosial profesi akuntan melampaui sekadar penyusunan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Akuntan diharapkan berperan strategis dalam memastikan bahwa kegiatan bisnis perusahaan mencerminkan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan. Gray et al. (2022) menekankan bahwa akuntan memiliki peran penting dalam merancang dan mengembangkan sistem pelaporan yang transparan, akuntabel, dan mencakup aspek *environmental, social, and governance* (ESG), sehingga pemangku kepentingan dapat memahami dampak sosial dan lingkungan dari operasi perusahaan.

Pada praktiknya, akuntan modern diharapkan mampu mendorong transparansi melalui penyusunan laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*), menilai risiko sosial dan lingkungan yang mungkin timbul

dari keputusan keuangan, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang etis dan berkelanjutan kepada manajemen. Hal ini mencakup penilaian dampak investasi terhadap masyarakat, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, serta pertimbangan etika dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Peran ini menekankan bahwa tanggung jawab sosial profesi akuntan tidak hanya bersifat internal bagi perusahaan, tetapi juga eksternal terhadap masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan beroperasi.

Tanggung jawab sosial akuntan sejalan dengan konsep *triple bottom line* yang diperkenalkan oleh Elkington (2018), yang menekankan pengukuran kinerja organisasi berdasarkan tiga dimensi utama, yakni *Profit* (keuntungan ekonomi), *People* (kontribusi sosial terhadap masyarakat dan karyawan), dan *Planet* (kepedulian terhadap lingkungan). Dengan menerapkan prinsip ini, akuntan tidak hanya fokus pada hasil finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan bisnis. Dengan demikian, profesi akuntan berperan sebagai pengawal integritas, keberlanjutan, dan etika dalam bisnis, sekaligus mendorong perusahaan untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan. Penerapan tanggung jawab sosial ini menjadi semakin penting seiring meningkatnya tuntutan investor, regulator, dan masyarakat terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan etis.

4. Pendidikan Etika bagi Akuntan

Pendidikan etika bagi akuntan berperan penting dalam membentuk karakter profesional yang berintegritas dan bertanggung jawab. Etika tidak cukup hanya mengandalkan kode etik tertulis, melainkan perlu diinternalisasi melalui proses pendidikan formal dan pelatihan berkelanjutan. Dellaportas (2022) menekankan bahwa kurikulum akuntansi modern sebaiknya menekankan pembelajaran etika berbasis kasus nyata (*case-based ethics*), sehingga calon akuntan dapat memahami dan menganalisis dilema moral dalam konteks profesional yang kompleks. Pendekatan ini membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mempertimbangkan konsekuensi keputusan, dan menegakkan prinsip etika dalam praktik akuntansi sehari-hari.

Lembaga profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan *International Federation of Accountants* (IFAC) mendorong pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi profesional yang menekankan integritas,

objektivitas, dan tanggung jawab sosial. Program *Continuing Professional Education* (CPE) menjadi sarana penting bagi akuntan profesional untuk memperbarui pengetahuan dan memperkuat kesadaran etika, terutama dalam menghadapi perubahan regulasi, teknologi, dan tuntutan masyarakat terhadap transparansi serta akuntabilitas. Melalui program ini, akuntan dilatih untuk menghadapi dilema etis yang mungkin muncul akibat tekanan manajerial, konflik kepentingan, atau manipulasi laporan keuangan, sekaligus mampu mempertahankan standar profesional tertinggi.

Pendidikan etika juga berperan dalam membangun budaya organisasi yang sehat, di mana praktik akuntansi yang jujur, akurat, dan transparan menjadi norma. Dengan penekanan pada integritas, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap standar profesi, akuntan tidak hanya melindungi reputasi diri dan perusahaan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi secara keseluruhan. Dengan demikian, pendidikan etika menjadi fondasi penting dalam memastikan akuntan mampu berperan sebagai pengawal integritas dan keberlanjutan praktik bisnis di era modern (Dellaportas, 2022; IFAC, 2023).

E. Latihan Soal

1. Jelaskan tiga manfaat utama konvergensi IFRS terhadap PSAK bagi perusahaan di Indonesia!
2. Jelaskan bagaimana teknologi *blockchain* dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan!
3. Sebutkan dan jelaskan tiga aspek utama dalam pelaporan keberlanjutan berdasarkan standar GRI (2022)!
4. Mengapa etika profesi penting dalam menghadapi tantangan era digital di bidang akuntansi?
5. Jelaskan hubungan antara tanggung jawab sosial akuntan dan keberlanjutan bisnis perusahaan!



DAFTAR PUSTAKA

- ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). (2024). Future of Accounting: Technology, Transparency, and Trust. ACCA Global Publications.
- ACFE. (2023). Report to the Nations: Global Study on Occupational Fraud and Abuse. Association of Certified Fraud Examiners.
- Akter, M., et al. (2024). Challenges of Blockchain Adoption in Accounting. Journal article (MDPI / ScienceDirect).
- Alexander, D., & Nobes, C. (2023). Financial Accounting: An International Introduction (7th ed.). Pearson Education.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2022). Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach. Pearson.
- Bain & Company. (2022). Digital finance: Implications for accounting and performance measurement. Bain Report.
- Baridwan, Z. (2022). Intermediate Accounting. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Barone, E., & Mas, F. (2024). Digital Accounting: The Transformation of Financial Reporting in the AI Era. Springer.
- Barth, M. E., & Landsman, W. R. (2021). Financial Accounting Theory and Analysis. Wiley.
- Birt, J., Chalmers, K., & Maloney, S. (2023). Accounting: Business Reporting for Decision Making. Wiley.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2022). Fundamentals of Financial Management (16th ed.). Cengage Learning.
- Carroll, A. B. (2021). Corporate Social Responsibility: A Review of Concepts and Practices. *Business & Society*, 60(6), 1256–1285.
- Carroll, A. B. (2021). Corporate Social Responsibility: Concepts and Practice. *Business & Society*.
- Coyne, J. G., & McMickle, P. L. (2017). “Can Blockchain Revolutionize Accounting?” *Journal of Emerging Technologies in Accounting*, 14(2), 101–111.
- Dellaportas, S. (2022). The Role of Accounting Ethics Education in the Development of Ethical Decision-Making. *Journal of Business Ethics Education*, 19(3), 187–204.
- Deloitte. (2023). Credit Risk Management in the Digital Age. Deloitte Insights.

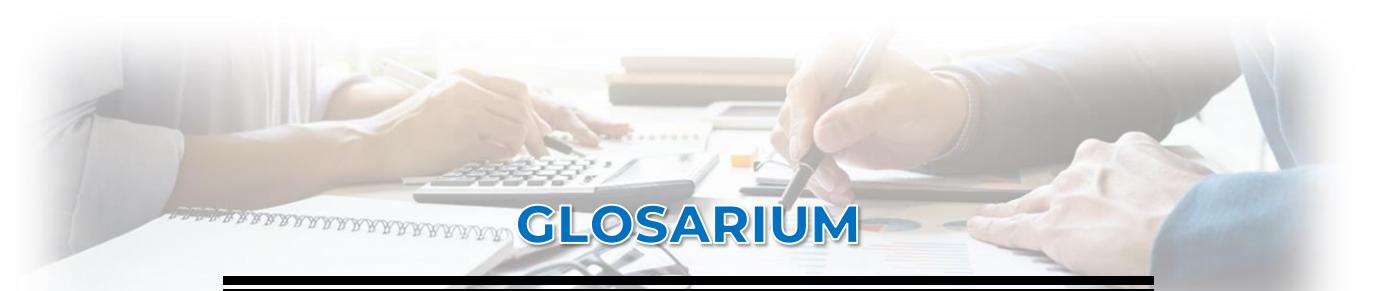
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK-IAI). (2021). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Directorate General of Taxes (DJP), Indonesia. (2022). E-Invoicing & E-Faktur Implementation Guidance. DJP.
- Duska, R. F., Duska, B. S., & Ragatz, J. (2022). Accounting Ethics (4th ed.). Wiley.
- Eccles, R. G., & Krzus, M. P. (2020). The Nordic Model: An example of integrated reporting and sustainability. *Journal of Applied Corporate Reporting*.
- Elkington, J. (1997). Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Capstone Publishing.
- EY. (2023). IFRS and sustainability reporting: Practical considerations for preparers. Ernst & Young.
- Garrison, R. H., Noreen, E. W., & Brewer, P. C. (2023). Managerial Accounting (18th ed.). McGraw-Hill.
- Gibson, C. H. (2021). Financial Reporting and Analysis. Cengage Learning.
- Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2022). Principles of Managerial Finance (16th ed.). Pearson.
- Glover, S. M., Prawitt, D., & Wood, D. A. (2021). Audit Quality and the Role of Technology. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*.
- Gray, R., Adams, C., & Owen, D. (2022). Accountability, Social Responsibility and Sustainability. Routledge.
- Gray, R., Owen, D., & Adams, C. (2020). Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting. London: Routledge.
- GRI (Global Reporting Initiative). (2021). GRI Standards: Consolidated set of reporting standards. GRI.
- GRI. (2022). Global Reporting Standards 2022 Update. Global Reporting Initiative.
- Handayani, S., & Arifin, Z. (2022). Peran Akuntan dalam Implementasi PSAK berbasis IFRS: studi lapangan. *Jurnal Akuntansi Modern*.
- He, Z., & Li, X. (2024). AI in Audit: Opportunities, risks and governance. *Journal of Accounting Technology*.
- Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2020). The Fall of Enron and Lessons for Accounting and Auditing. *Journal of Economic Perspectives*.
- Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2020). The Fall of Enron. *Journal of Economic Perspectives*, 17(2), 3–26.

- Higgins, R. C. (2022). Analysis for Financial Management (13th ed.). McGraw-Hill Education.
- Higgins, R. C. (2022). Analysis for Financial Management (13th ed.). McGraw-Hill.
- Horngren, C. T., Harrison, W. T., & Oliver, M. S. (2022). Financial Accounting. Pearson Education.
- Huang, R., & Zhou, H. (2023). Expected Credit Loss modelling under IFRS 9 for Fintech lenders. *Journal of Credit Risk*.
- IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). (2024). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Terbaru. Jakarta: DSAK IAI.
- IASB (International Accounting Standards Board). (2023). Conceptual Framework for Financial Reporting. IFRS Foundation.
- IFAC (International Federation of Accountants). (2023). Sustainability Reporting and Assurance: A Global Perspective. IFAC Publications.
- IFRS Foundation. (2023). Conceptual Framework for Financial Reporting. IFRS.org.
- Institut Akuntan Indonesia (IAI). (2023). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1: Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta: IAI.
- Janssen, M., & Kuk, G. (2021). Blockchain for Government: Use cases and reporting implications. *Government Information Quarterly*.
- Jones, R., & Rama, D. (2023). Financial Accounting Today: A Modern Perspective. McGraw-Hill Education.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2023). Intermediate Accounting (18th ed.). Wiley.
- Kimmel, P. D., Weygandt, J. J., & Kieso, D. E. (2023). Financial Accounting: Tools for Business Decision Making (11th ed.). Wiley.
- KPMG. (2022). The Time Has Come: The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2022.
- Lee, S., & Liao, S. (2022). Smart Contracts and Accounting: Recognition and verification issues. *Journal of Accounting & Public Policy*.
- Louwers, T. J., Ramsay, R. J., Sinason, D. H., & Strawser, J. R. (2020). Auditing & Assurance Services (6th ed.). McGraw-Hill.
- McKinsey & Company. (2021). The Future of Auditing: Digital transformation in audit and assurance. McKinsey Insights.
- Mintz, S. M., & Morris, R. E. (2023). Ethical Obligations and Decision Making in Accounting. McGraw-Hill.
- Moeller, R. R. (2021). Executive's Guide to IT Governance and Compliance. Wiley.

- Moll, J., & Yigitbasioglu, O. (2019). "The Role of Internet and Digital Technologies in Transforming Accounting." *Accounting, Organizations and Society*, 72, 1–13.
- Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.
- Needles, B. E., Powers, M., & Crosson, S. V. (2020). *Principles of Accounting* (13th ed.). Cengage.
- Nugraha, B. (2024). Blockchain adoption maturity model for accounting firms. *Jurnal Teknologi Finansial*.
- OJK. (2023). *Penerapan IFRS di Indonesia: Capaian dan Arah Kebijakan ke Depan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Penman, S. H. (2022). *Financial Statement Analysis and Security Valuation* (6th ed.). McGraw-Hill.
- Penman, S. H., & Zhang, X. J. (2021). Accounting Measurement and Capital Markets. *Journal of Accounting Research*.
- Prasetyo, H., & Nugroho, A. (2023). E-invoicing and tax compliance in Indonesia: Evidence and policy implications. *Jurnal Perpajakan*.
- Prokopenko, O. (2024). Development of Blockchain Technology in Financial Accounting. *Governance (MDPI) review*.
- Putri, N. (2022). Implementasi Fintech accounting pada UMKM: studi kasus Indonesia. *Jurnal Sistem Informasi*.
- PwC. (2023). *IFRS Manual of Accounting 2023*. London: PricewaterhouseCoopers LLP.
- Rees, W. (2020). Non-financial Reporting and Corporate Sustainability: Challenges for Accounting. *Sustainability Journal*.
- Reeve, J. M., Warren, C. S., & Duchac, J. (2022). *Principles of Accounting*. Cengage Learning.
- Rini, D., & Nugroho, A. (2022). "Tantangan Implementasi IFRS di Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19(2), 112–130.
- Roberts, R. W. (2022). Corporate Governance, Ethics, and Accounting: Developments and challenges. *Corporate Governance Journal*.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2022). *Accounting Information Systems* (15th ed.). Pearson.
- Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2022). *Fundamentals of Corporate Finance*. McGraw-Hill Education.
- SASB (Sustainability Accounting Standards Board). (2020). SASB Standards — Industry-based sustainability disclosure standards. SASB/Value Reporting Foundation.

- Schilit, H. M., & Perler, J. (2022). *Financial Shenanigans: How to Detect Accounting Gimmicks & Fraud in Financial Reports*. 5th Edition. McGraw-Hill.
- Schipper, K., & Vincent, L. (2020). *Earnings Management and Financial Reporting Quality*. Accounting Review.
- Schroeder, R. G., Clark, M. W., & Cathey, J. M. (2022). *Financial Accounting Theory and Analysis: Text and Cases*. Wiley.
- Scott, W. R. (2020). *Financial Accounting Theory* (8th ed.). Pearson Canada.
- Scott, W. R. (2023). *Financial Accounting Theory* (8th ed.). Pearson.
- Shahzad, A., & Qureshi, M. A. (2023). Fintech and its implications for accounting and audit. *Journal of Finance and Accounting*.
- Siregar, B. (2022). Konvergensi IFRS dan Tantangan Implementasi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 27(1), 45–59.
- Subramanyam, K. R. (2022). *Financial Statement Analysis* (13th ed.). McGraw-Hill Education.
- Suci, L., & Raharjo, K. (2023). Pengukuran emisi karbon untuk laporan keberlanjutan: metodologi dan tantangan. *Jurnal Lingkungan dan Bisnis*.
- Suryani, R. (2023). Penerapan Akuntansi Keuangan pada UMKM di Era Digitalisasi. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 12(3), 155–170.
- Susanto, A., & Meiryani. (2021). *Digital Accounting Transformation*. Bandung: Alfabeta.
- Sutton, S. G., Holt, M., & Arnold, V. (2021). *Accounting Information Systems and Ethical Challenges in the Digital Era*. International Journal of Accounting Information Systems, 40, 100510.
- Suwardjono. (2022). *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Tarigan, E., & Susilo, A. (2023). Penerapan Sustainability Reporting di Perusahaan Indonesia: Studi empiris. *Jurnal Akuntansi Indonesia*.
- Taylor & Francis. (2021–2024). Accounting and Finance journals: special issues on digital accounting and ESG. Taylor & Francis.
- Tendelilin, L. (2021). *Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Global*. Andi Publisher.
- Tendelilin, L. (2021). *Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Global*. Yogyakarta: Andi.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. (2022). *Principles of Accounting*. Cengage Learning.

- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. E. (2022). *Financial and Managerial Accounting* (16th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2022). *Accounting Principles* (14th ed.). Wiley.
- White, G. I., Sondhi, A. C., & Fried, D. (2023). *The Analysis and Use of Financial Statements*. Wiley.
- Wild, J. J., Subramanyam, K. R., & Halsey, R. F. (2023). *Financial Statement Analysis*. McGraw-Hill Education.
- Wilkinson, J. W., Cerullo, M. J., Raval, V., & Wong-On-Wing, B. (2021). *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications* (5th ed.). Wiley.
- World Economic Forum. (2022). *Global Risks and Technology Trends affecting Corporate Reporting*. WEF.
- Yuliana, R. (2023). Pengaruh ESG terhadap Cost of Capital perusahaan Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*.
- Zhang, Y., et al. (2024). *Audit of Blockchain Transactions: Methods and Challenges*. *International Journal of Auditing*.



GLOSARIUM

Akruan	Prinsip akuntansi yang mengakui pendapatan dan beban pada saat terjadinya transaksi meskipun kas belum diterima atau dibayarkan.
Akuntansi	Proses sistematis dalam mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi keuangan suatu entitas untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Amortisasi	Pengalokasian bertahap atas biaya aset tidak berwujud selama masa manfaatnya untuk mencerminkan penurunan nilai ekonomis.
Aset	Sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh entitas dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang.
Audit	Pemeriksaan independen dan sistematis terhadap laporan keuangan untuk menilai kewajaran penyajiannya sesuai standar yang berlaku.
Depresiasi	Proses pengalokasian secara sistematis nilai perolehan aset tetap selama masa manfaat ekonomisnya.
Dividen	Bagian laba yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham sebagai bentuk imbal hasil atas kepemilikan modal.
Ekuitas	Hak residual pemilik atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas yang dimilikinya.
Investasi	Penanaman dana pada aset atau instrumen keuangan dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan.
Jurnal	Catatan awal yang digunakan untuk mendokumentasikan semua transaksi keuangan secara kronologis berdasarkan bukti yang sah.

Kas	Aset paling likuid berupa uang tunai atau setara kas yang siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan transaksi harian.
Keuangan	Bidang yang berhubungan dengan pengelolaan, pengendalian, dan pelaporan sumber daya ekonomi agar entitas dapat menjalankan kegiatan operasionalnya secara berkelanjutan.
Laba	Selisih positif antara total pendapatan dan total beban yang mencerminkan keberhasilan entitas dalam satu periode akuntansi.
Laporan	Hasil penyajian formal atas informasi keuangan yang menggambarkan kondisi dan kinerja entitas dalam periode tertentu.
Liabilitas	Kewajiban hukum atau konstruktif yang mengharuskan entitas untuk menyerahkan sumber daya ekonomi pada periode mendatang.
Modal	Sejumlah dana atau nilai investasi yang diberikan oleh pemilik untuk digunakan dalam kegiatan operasional entitas.
Neraca	Laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan entitas berupa aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
Pendapatan	Peningkatan manfaat ekonomi yang diperoleh dari aktivitas normal entitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas selain dari kontribusi pemilik.
Persediaan	Barang yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal atau digunakan dalam proses produksi barang lain.
Piutang	Hak tagih entitas terhadap pihak lain yang timbul akibat penjualan barang atau jasa secara kredit.
Rugi	Selisih negatif antara pendapatan dan beban yang menunjukkan penurunan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode.
Transaksi	Setiap kegiatan ekonomi yang menyebabkan perubahan posisi keuangan entitas baik dalam bentuk aset, liabilitas, maupun ekuitas.



INDEKS

A

akademik · 163
akuntansi · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 78, 79, 81, 83, 84, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 131, 134, 135, 136, 139, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 158, 159, 160, 161, 162, 168, 169, 171, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 196, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 208, 209, 210, 214, 215, 217, 218, 219, 224, 227, 236, 238, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 269, 270, 276
audit · 10, 17, 18, 32, 33, 36, 41, 42, 43, 49, 53, 124, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 259, 260, 265, 267
auditor · 8, 17, 18, 33, 36, 41, 43, 50, 56, 249, 252, 253, 260

B

big data · 246, 250
blockchain · 245, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 262

C

cash flow · 210
cloud · 246, 250, 251

D

digitalisasi · 13
diskonto · 74, 118, 119, 121, 130, 136, 138, 142, 144, 151
distribusi · 78, 155, 156, 158, 159, 164, 166, 167, 168, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 184, 205, 206, 208, 209, 219, 221, 230, 249
dividen · 90, 100, 101, 103, 149, 150, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 178, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 219, 220, 221, 222, 238, 240, 242, 244
DJP · 251, 264
domestik · 195, 239

E

E-Business · vi
ekonomi · 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 39, 45, 47, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 91, 93, 96, 99, 103, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 156, 166, 171, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 194, 195, 197, 198, 201, 202, 203, 219, 222, 224, 226, 236, 239, 240, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 269, 270
ekspansi · 137, 138, 139, 150, 157, 164, 165, 166, 167, 170, 241
emisi · 10, 255, 256, 267
empiris · 267
entitas · 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 46, 55, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 91, 92, 96, 110, 113, 114, 117, 118, 120, 121, 126, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 139, 141, 145, 147, 148, 149, 155, 156, 160, 161, 169, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 182, 184, 185, 197, 198, 202, 203, 205, 206, 207, 210, 213, 214, 215, 216, 217, 220, 227, 231, 238, 245, 269, 270

F

finansial · 6, 9, 37, 63, 86, 87, 90, 91, 156, 164, 165, 166, 167, 178, 198, 199, 211, 219, 221, 225, 226, 233, 234, 235, 254, 255, 258, 261
fintech · 245, 247, 251
fiskal · 12, 14, 241
fleksibilitas · 26, 42, 86, 87, 100, 139, 164, 165, 170, 171, 251
fluktuasi · 19, 71, 87, 99, 112, 119, 123, 125, 126, 166, 192, 209, 228, 239
fundamental · 11, 19, 22, 23, 25, 35, 36, 61, 178, 186, 200, 218, 246, 250, 253

G

geografis · 192, 195
globalisasi · 5, 28, 258

I

implikasi · 16, 124
inflasi · 69, 71, 123, 130, 171, 239
inklusif · 15
inovatif · 114, 237
integrasi · 5, 10, 246, 250, 251, 252, 258
integritas · 8, 16, 18, 26, 28, 36, 37, 41, 45, 65, 195, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 256, 258, 259, 260, 261, 262
investasi · 8, 9, 11, 12, 13, 15, 21, 26, 27, 37, 64, 67, 72, 74, 85, 86, 87, 88, 89, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 110, 119, 124, 126, 135, 137, 138, 139, 142, 150, 156, 157, 164, 165, 167, 168,

170, 176, 178, 195, 198, 202, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 219, 222, 225, 238, 240, 241, 242, 243, 248, 251, 253, 256, 257, 261, 270

investor · 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 26, 27, 33, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 75, 78, 79, 90, 99, 104, 119, 123, 126, 129, 130, 135, 138, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 166, 168, 169, 170, 172, 179, 180, 185, 186, 192, 195, 196, 198, 200, 202, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 213, 215, 216, 221, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 249, 254, 255, 256, 258, 260, 261

K

komparatif · 228

komprehensif · 5, 19, 53, 118, 158, 173, 194, 198, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 218, 219, 220, 221, 229, 237, 255, 276

konkret · 178

Konseptual · 20, 61, 64, 84, 104, 177, 184

konsistensi · 2, 16, 39, 44, 55, 63, 111, 122, 125, 217, 221, 236, 242

kredit · 14, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 76, 77, 78, 79, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 104, 106, 107, 134, 135, 137, 162, 163, 199, 218, 222, 225, 241, 270

kreditor · 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 23, 25, 26, 33, 72, 119, 129, 130, 150, 151,

156, 172, 179, 180, 186, 195, 200, 202, 204, 205, 206, 208, 210, 212, 213, 215, 216, 221, 229, 237, 238, 239

L

likuiditas · 8, 12, 14, 18, 73, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 127, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 149, 151, 166, 168, 170, 195, 198, 199, 200, 210, 211, 212, 213, 219, 222, 224, 225, 226, 227, 231, 232, 233, 235, 237, 238, 239, 241, 242, 247

M

manajerial · 4, 5, 8, 13, 36, 79, 81, 89, 97, 125, 135, 156, 178, 187, 192, 199, 201, 220, 231, 262, 276

manipulasi · 56, 179, 247, 248, 249, 252, 253, 260, 262

manufaktur · 42, 95, 96, 216

metodologi · 215, 217, 267

moneter · 2, 14, 18, 19, 24, 66, 68, 70, 111, 113, 231

N

negosiasi · 13, 241

neraca · 3, 5, 7, 8, 20, 32, 33, 34, 35, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 68, 89, 103, 106, 110, 145, 151, 170, 197, 199, 200, 206, 211, 213, 218,

219, 220, 221, 222, 223, 226, 237, 240, 243

Net Present Value · 243

O

otoritas · 8, 9, 12, 248

P

Profitability · 243

proyeksi · 5, 22, 118, 130, 243

R

rasional · 8, 11, 16

real-time · 5, 10, 13, 98, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253

regulasi · 8, 9, 12, 15, 119, 166, 167, 169,

171, 172, 241, 247, 255, 261, 262

relevansi · 4, 12, 15, 21, 22, 55, 64, 66, 70, 72, 73, 76, 77, 95, 104, 118, 119, 125, 126, 129, 130, 136, 145, 150, 186, 193, 194, 202, 214, 216, 217, 239, 276

revolusi · 250

royalti · 178

S

solvabilitas · 9, 14, 108, 138, 149, 166, 198, 199, 200, 212, 224, 225, 231, 232,

233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242

stabilitas · 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 26, 71, 87, 99, 100, 112, 115, 158, 165, 166, 168, 170, 199, 201, 206, 207, 224, 225, 232, 233, 241, 242, 256, 259, 260

stakeholder · 250, 259, 260

suku bunga · 82, 119, 140, 144, 145, 171

sustainability · 6, 10, 14, 254, 255, 256, 260, 264, 266

syariah · 28

T

tarif · 113, 127

teoretis · 20

transformasi · 5, 9, 96, 245, 246, 248, 250, 251, 257, 258

transparansi · 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 53, 63, 64, 76, 77, 79, 92, 95, 103, 105, 118, 123, 126, 128, 129, 130, 135, 136, 141, 145, 148, 149, 150, 151, 153, 160, 162, 173, 192, 193, 194, 196, 202, 205, 206, 208, 209, 211, 214, 215, 216, 217, 221, 222, 225, 236, 245, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 260, 262

U

universal · 7

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Rizky Windar Amelia, S.E., M.Acc., Ak., CA.

Lahir di Klaten, 11 September 1988. Lulus S3 di Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2024. Saat ini sebagai Dosen di Universitas Widya Dharma Klaten pada Program Studi Manajemen Perpajakan.

AKUNTANSI KEUANGAN

PENGENALAN, PENGAKUAN, DAN
PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN

Buku ajar "Akuntansi Keuangan: Pengenalan, Pengakuan, dan Pelaporan Transaksi Keuangan" membahas secara komprehensif konsep dasar dan penerapan praktis akuntansi keuangan dalam dunia bisnis dan organisasi. Buku ajar ini disusun secara sistematis mulai dari pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar akuntansi, proses pengenalan serta pengakuan transaksi keuangan, hingga penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Buku ajar ini juga membahas pentingnya akurasi dan relevansi informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Dengan pendekatan teoritis yang dipadukan dengan contoh kasus dan ilustrasi pencatatan, pembaca diarahkan untuk memahami setiap tahapan dalam siklus akuntansi secara aplikatif. Buku ajar ini ditujukan bagi mahasiswa, dosen, maupun praktisi yang ingin memperdalam pemahaman tentang pelaporan keuangan yang transparan, andal, dan berintegritas tinggi, serta sebagai panduan untuk membangun kompetensi dalam bidang akuntansi keuangan modern yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha.



 mediapenerbitindonesia.com
 +6281362150605
 Penerbit Idn
 @pt.mediapenerbitidn

